PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PANGKALPINANG

BerAKHLAK



LAPORAN KINERJA (LKjIP)

2025

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru,
Kecamatan Pangkalan Baru
Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung

0717-9111513
www.ptun-pangkalpinang.go.id
info@ptun-pangkalpinang.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
TAHUN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai pedoman reviu atas Laporan Kinerja. Substansi Informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan atas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Pangkalpinang, 26 Februari 2026
Ketua Tim Pereviu LKjIP,

Lezi Fitri, S.H., M.H.
NIP. 197011201996032003

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmatnya, maka Laporan Kinerja (LKjIP) Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025 ini dapat tersusun tepat waktu sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi.

LKjIP Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025 merupakan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKJiP ini bertujuan untuk memberi informasi mengenai capaian target dan realisasi kinerja kepada pemberi mandat dalam menggambarkan tingkat keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan.





Mohamad Syauqie, S.H., M.H.

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

Diharapkan bahwa laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi untuk perbaikan kinerja organisasi secara berkesinambungan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pangkalpinang, 26 Februari 2026

K E T U A,

MOHAMAD SYAUQIE, S.H., M.H.

NIP. 19791129 200212 1 002







VISI *dan* MISI

VISI

"Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang Agung"

MISI

- Menjaga Kemandirian Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang
- Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan
- Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang
- Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

NILAI-NILAI UTAMA MAHKAMAH AGUNG

1. Kemandirian
2. Integritas
3. Kejujuran
4. Akuntabilitas
5. Responsibilitas
6. Keterbukaan
7. Ketidakberpihakan
8. Perlakuan yang Sama di Hadapan Hukum

PROFIL PIMPINAN



KETUA

Nama : Mohamad Syauqie, S.H., M.H.

NIP : 19791129 200212 1 002

Jabatan : Ketua PTUN Pangkalpinang

Pangkat : Pembina Utama Muda (IV/c)

WAKIL KETUA

Nama : Lucya Permata Sari, S.H., M.Hum.

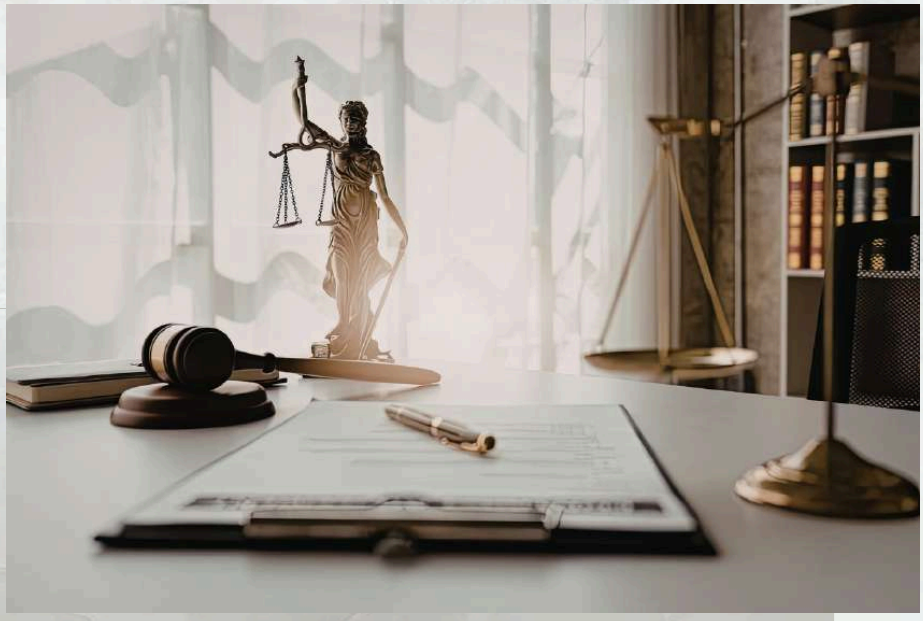
NIP : 19770217 200312 2 001

Jabatan : Wakil Ketua PTUN Pangkalpinang

Pangkat : Pembina Tk. I (IV/b)



RINGKASAN EKSEKUTIF



Dalam rangka mewujudkan visi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, maka dirumuskanlah tujuan strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025-2029 sebagai berikut.

1. Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara, dan Berkeadilan.
2. Mewujudkan Badan Peradilan yang Transparan, Akuntabel, Modern, dan Profesional

Tujuan strategis tersebut kemudian dipetakan dalam sasaran strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang lebih spesifik dan terukur untuk mencapai tujuan tersebut. Sasaran strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025-2029 ditetapkan sebagai berikut.

1. Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern
2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik
3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Ketiga sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan 11 indikator kinerja yang harus dicapai. Laporan Kinerja tahun 2025 mengukur dan mengevaluasi sejauh mana realisasi dan capaian masing-masing sasaran strategis berdasarkan 11 (sebelas) indikator kinerja sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini.

TABEL 1. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Peradilan Yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif Dan Modern	Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %
		Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak.	100 %	100 %	100 %
		Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak.	100 %	100 %	100 %
		Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan.	100 %	100 %	100 %
		Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara.	100 %	100 %	100 %
		Persentase Perkara Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court.	100 %	100 %	100 %
Rata-rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis I					100 %

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	3,78	3,88	102,65 %
Rata-rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis II					102,65 %
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	85	85	100 %
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	95	98,67	103,86 %
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	95	99,95	105,21 %
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3,175	105,83 %
Rata-rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis III					103,73 %
Rata-rata Capaian Kinerja PTUN Pangkalpinang Tahun 2025					102,13 %

Secara umum, target yang telah ditetapkan di Tahun 2025 berhasil dicapai dengan nilai kinerja secara rata-rata adalah sebesar **102,13%**. Nilai capaian rata-rata 102,13% ini menunjukkan capaian kinerja yang baik dengan capaian tiap indikator paling rendah 100%. Capaian tahun 2025 juga meningkat 1,16% jika dibandingkan dengan capaian rata-rata tahun 2024 yang sebesar 100,97%.

Keberhasilan kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang juga dibuktikan dengan berbagai prestasi dan penghargaan serta keberhasilan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Tahun 2025.

PRESTASI DAN PENGHARGAAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG TAHUN 2025



MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Piagam Penghargaan

Diberikan kepada :

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

sebagai unit kerja pelayanan berpredikat menuju

WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)

Jakarta, 09 Desember 2025

Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia

Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.



Penghargaan Satuan Kerja Berintegritas di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun 2025 sebagai satker Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang diserahkan langsung oleh YM. Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. kepada Ketua PTUN Pangkalpinang, Bapak Mohamad Syauqie, S.H., M.H. pada 9 Desember 2025 di Jakarta.

PRESTASI DAN PENGHARGAAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG TAHUN 2025





Penghargaan Satker Pelaksana Program Pengendalian Gratifikasi Terbaik, Kategori Satker Peserta e-Learning Gratifikasi dengan Persentase Terbanyak sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor 74/BP/SK.PW1.1.1/XII/2025 yang diserahkan pada 9 Desember 2025 di Jakarta.

PRESTASI DAN PENGHARGAAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG TAHUN 2025



BerAKHLAK bangga melayani bangsa

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Piagam Penghargaan

DIBERIKAN KEPADA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Pada Kegiatan Lomba Peningkatan Pelayanan Peradilan di Lingkungan
Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2025

JUARA 1

KATEGORI PENILAIAN KINERJA SATUAN KERJA BERDASARKAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN

Jakarta, 5 November 2025

DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

YUWONO AGUNG NUGROHO
MARSEKAL MUDA TNI

JUARA 1 Kategori "Kinerja Satuan Kerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan" dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang diserahkan dalam Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI Tahun 2025 tanggal 5 November 2025 di Jakarta.



PRESTASI DAN PENGHARGAAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG TAHUN 2025



Peringkat I Pengadilan Terbaik dalam Pelaksanaan Eksekusi Kategori Pengadilan Tata Usaha Negara (dengan Beban Perkara 1–50) yang diumumkan dalam kegiatan Apresiasi dan Refleksi Akhir Tahun Mahkamah Agung RI Tahun 2025 pada 30 Desember 2025.

PRESTASI DAN PENGHARGAAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG TAHUN 2025



Peringkat 3 Pengadilan Terbaik dalam Pelaksanaan E-Litigasi Kategori Pengadilan Tata Usaha Negara (dengan Beban Perkara 1–50) yang diumumkan dalam kegiatan Apresiasi dan Refleksi Akhir Tahun Mahkamah Agung RI Tahun 2025 pada 30 Desember 2025.

PRESTASI DAN PENGHARGAAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG TAHUN 2025



Peringkat Ke-2 dalam Kategori Penyelesaian Perkara Tepat Waktu Periode 1 Juli 2024 - 30 Juni 2025 sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang.



PIAGAM PENGHARGAAN

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Nomor: 708 /KPTTUN.W5-TUN/DL.01.2/VII/2025

Diberikan Kepada :

PTUN PANGKALPINANG

PERINGKAT KEDUA

"Penyelesaian Perkara Tepat Waktu
Pengadilan Tata Usaha Negara Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang"
Periode 1 Juli 2024 - 31 Juni 2025

Palembang, 31 Juli 2025
Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang

A. SYAIFULLAH, S.H.
NIP. 195901091986121001

PRESTASI DAN PENGHARGAAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG TAHUN 2025


KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor: PG-35/KPN.1001/2025

diberikan kepada:

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PANGKAL PINANG (401968)

Satuan Kerja Dengan Nilai IKPA 100 Periode Semester I Tahun 2025
Kategori Pagu DIPA di atas 2,5 Miliar s.d 10 Miliar Rupiah

Pangkalpinang, 6 Oktober 2025
Kepala KPPN Pangkalpinang

Abdul Lutfi

Penghargaan "Satuan Kerja Dengan Nilai IKPA 100 Periode Semester I Tahun 2025 Kategori Pagu DIPA di atas 2,5 Miliar s.d 10 Miliar Rupiah" dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui KPPN Pangkalpinang pada 10 Oktober 2025.

Peringkat Ketiga "Satuan Kerja Terbaik dalam Optimalisasi Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Periode Semester I Tahun 2025" dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui KPPN Pangkalpinang pada 10 Oktober 2025.


KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor: PG-49/KPN.1001/2025

diberikan kepada:

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PANGKAL PINANG (401968)

PERINGKAT KETIGA
Satuan Kerja Terbaik dalam Optimalisasi Penggunaan
Kartu Kredit Pemerintah Periode Semester I Tahun 2025

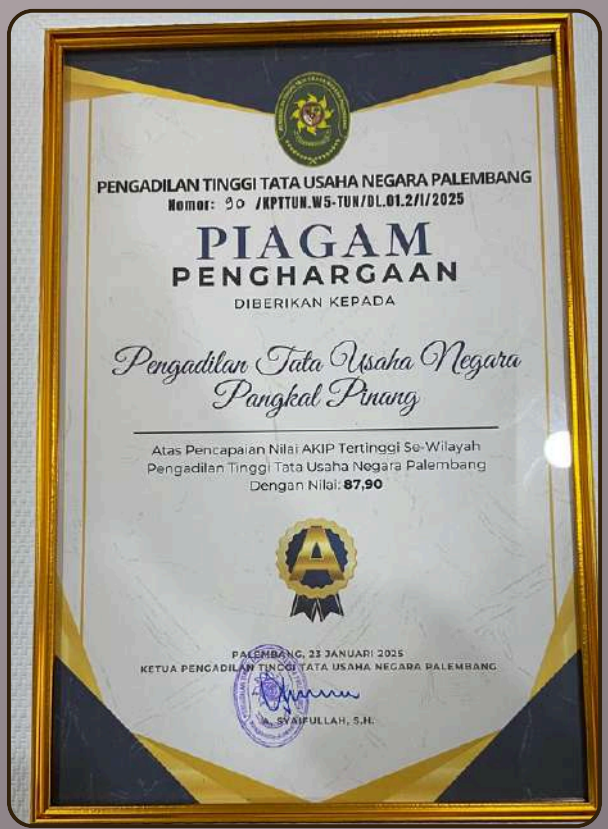
Pangkalpinang, 6 Oktober 2025
Kepala KPPN Pangkalpinang

Abdul Lutfi

PRESTASI DAN PENGHARGAAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG TAHUN 2025



Penghargaan Nilai AKIP Tertinggi Sewilayah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Dengan Nilai 87,90 (A) yang diserahkan langsung oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Bapak AK. Setiyono, S.H., M.H. kepada Tim Penyusun LKjIP Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada 23 Januari 2025.


PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
Nomor: 90 /KPTTUN.W5-TUN/DL.01.2/I/2025

PIAGAM
PENGHARGAAN
DIBERIKAN KEPADA

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang

Atas Pencapaian Nilai AKIP Tertinggi Se-Wilayah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang
Dengan Nilai: **87,90**

PALEMBANG, 23 JANUARI 2025
KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

H. SYAIFULLAH, S.H.

DAFTAR ISI

Pernyataan Telah Direviu
Kata Pengantar i
Visi dan Misi ii
Profil Pimpinan iii
Ringkasan Eksekutif iv
Prestasi dan Penghargaan Tahun 2025 vii
Daftar Isi xv
Daftar Tabel xvi
Daftar Grafik xxii
Daftar Gambar xxiii
Bab I Pendahuluan
A. Latar Belakang 1
B. Kedudukan dan Fungsi 3
C. Struktur Organisasi 5
D. Isu Strategis 13
E. Sistematika Penyajian 15
Bab II Perencanaan Kinerja
A. Perencanaan Strategis 2025-2029 16
1. Visi 17
2. Misi 17
3. Tujuan 18
4. Sasaran Strategis 18
5. Program Utama dan Kegiatan 19
B. Rencana Kinerja Tahun 2025 22
C. Perjanjian Kinerja dan Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 23
Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025
A. Capaian Kinerja Organisasi 29
B. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 134
C. Perubahan Budaya Kinerja 139
D. Realisasi Anggaran 141
Bab IV Penutup
A. Kesimpulan 146
B. Rekomendasi 148
Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian Kinerja Tahun 2025 ii
Tabel 2. Uraian Tugas Struktur Organisasi 6
Tabel 3. Profil ASN Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang 7
Tabel 4. Isu Strategis 14
Tabel 5. Rencana Kinerja Tahun 2025 22
Tabel 6. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 23
Tabel 7. Revisi PKT Ke I Tahun 2025 24
Tabel 8. Capaian Kinerja Akumulatif s/d Triwulan III Tahun 2025 25
Tabel 9. Revisi PKT Ke II Tahun 2025 27
Tabel 10. Capaian Kinerja Tahun 2025 30
Tabel 11. Capaian Kinerja Bulan Januari 2025 31
Tabel 12. Capaian Kinerja Bulan Februari 2025 32
Tabel 13. Capaian Kinerja Bulan Maret 2025 33
Tabel 14. Capaian Kinerja Bulan April 2025 34
Tabel 15. Capaian Kinerja Bulan Mei 2025 35
Tabel 16. Capaian Kinerja Bulan Juni 2025 36
Tabel 17. Capaian Kinerja Bulan Juli 2025 37
Tabel 18. Capaian Kinerja Bulan Agustus 2025 38
Tabel 19. Capaian Kinerja Bulan September 2025 39
Tabel 20. Capaian Kinerja Bulan Oktober 2025 40
Tabel 21. Capaian Kinerja Bulan November 2025 41
Tabel 22. Capaian Kinerja Bulan Desember 2025 42

DAFTAR TABEL

Tabel 23. Capaian Kinerja Utama Sasaran I 44
Tabel 24. Keadaan Perkara Tingkat Pertama 46
Tabel 25. Laporan Perkara Putus Tahun 2025 47
Tabel 26. Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu 47
Tabel 27. Data Penyelesaian Perkara Selama Tahun 2025 48
Tabel 28. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Indikator 1.1 49
Tabel 29. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir Indikator 1.1 50
Tabel 30. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Indikator 1.1 51
Tabel 31. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional Indikator 1.1 52
Tabel 32. Data Pengiriman Salinan Putusan Selama Tahun 2025 54
Tabel 33. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Indikator 1.2 55
Tabel 34. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir Indikator 1.2 56
Tabel 35. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Indikator 1.2 57
Tabel 36. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional Indikator 1.2 58
Tabel 37. Data Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Selama Tahun 2025 62

DAFTAR TABEL

Tabel 38. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Indikator 1.3 63
Tabel 39. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Indikator 1.3 65
Tabel 40. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional Indikator 1.3 66
Tabel 41. Data Pengunggahan Putusan ke Direktori Putusan Selama Tahun 2025 68
Tabel 42. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Indikator 1.4 69
Tabel 43. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Indikator 1.4 71
Tabel 44. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional Indikator 1.4 72
Tabel 45. Data Penyelesaian Permohonan Eksekusi Selama Tahun 2025 74
Tabel 46. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Indikator 1.5 75
Tabel 47. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir Indikator 1.5 76
Tabel 48. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Indikator 1.5 77
Tabel 49. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional Indikator 1.5 78
Tabel 50. Data Penggunaan e-Court Selama Tahun 2025 81

DAFTAR TABEL

Tabel 51. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Indikator 1.6 62
Tabel 52. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Indikator 1.6 84
Tabel 53. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional Indikator 1.6 85
Tabel 54. Capaian Kinerja Utama Sasaran II 88
Tabel 55. Realisasi Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Tahun 2025 89
Tabel 56. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Indikator 2.1 90
Tabel 57. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir Indikator 2.1 90
Tabel 58. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Indikator 2.1 91
Tabel 59. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional Indikator 2.1 92
Tabel 60. Capaian Kinerja Utama Sasaran III 94
Tabel 61. IP ASN Tahun 2025 94
Tabel 62. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Indikator 3.1 99
Tabel 63. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Indikator 3.1 100
Tabel 64. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional Indikator 3.1 101
Tabel 65. Nilai IKPA DIPA 01 105
Tabel 66. Nilai IKPA DIPA 05 106
Tabel 67. Nilai IKPA Tahun 2025 107

DAFTAR TABEL

Tabel 68. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Indikator 3.2 108
Tabel 69. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir Indikator 3.2 109
Tabel 70. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Indikator 3.2 110
Tabel 71. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional Indikator 3.2 111
Tabel 72. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Tahun 2025 114
Tabel 73. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Indikator 3.3 115
Tabel 74. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir Indikator 3.3 116
Tabel 75. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Indikator 3.3 117
Tabel 76. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional Indikator 3.3 118
Tabel 77. Hasil Penilaian Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Tahun 2025 122
Tabel 78. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Indikator 3.4 124
Tabel 79. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Indikator 3. 125
Tabel 80. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional Indikator 3.4 126

DAFTAR TABEL

Tabel 81. Analisis Efisiensi Sasaran Strategis I 129
Tabel 82. Analisis Efisiensi Sasaran Strategis II 130
Tabel 83. Analisis Efisiensi Sasaran Strategis III 131
Tabel 84. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan 132
Tabel 85. Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024 134
Tabel 86. Tindak Lanjut LHE AKIP Tahun 2024 136
Tabel 87. Realisasi Anggaran Tahun 2025 141
Tabel 88. Realisasi Anggaran DIPA 01 142
Tabel 89. Rincian Belanja DIPA 01 Tahun 2025 143
Tabel 90. Realisasi Anggaran DIPA 05 144
Tabel 91. Rincian Belanja DIPA 05 Tahun 2025 144
Tabel 92. Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2024 dan 2025 145

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Keadaan Perkara Tingkat pertama 46
Grafik 2. Penerimaan Amar Putusan Tahun 2025 61
Grafik 3. Pemberitahuan Amar Putusan Tahun 2025 61
Grafik 4. Realisasi Anggaran DIPA 01 142
Grafik 5. Realisasi Anggaran DIPA 05 144

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Wilayah Yurisdiksi PTUN Pangkalpinang 2
Gambar 2. Struktur Organisasi PTUN Pangkalpinang 5
Gambar 3. *Framework* RENSTRA 2025-209 21
Gambar 4. Rincian IP ASN PTUN Pangkalpinang Tahun 2025 95











BAB I

PENDAHULUAN





a. Latar Belakang
b. Kedudukan dan Fungsi
c. Struktur Organisasi
d. Isu Strategis
e. Sistematika Penyajian

A. LATAR BELAKANG

Sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, disebutkan bahwa:

1. Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik;
2. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar;
3. Negara Indonesia adalah negara hukum yang berbentuk Republik didasarkan bukan pada kekuasaan tapi didasarkan pada hukum;

Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara RI Ayat (2) menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Sesuai dengan Undang Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Sedangkan pada pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009, menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

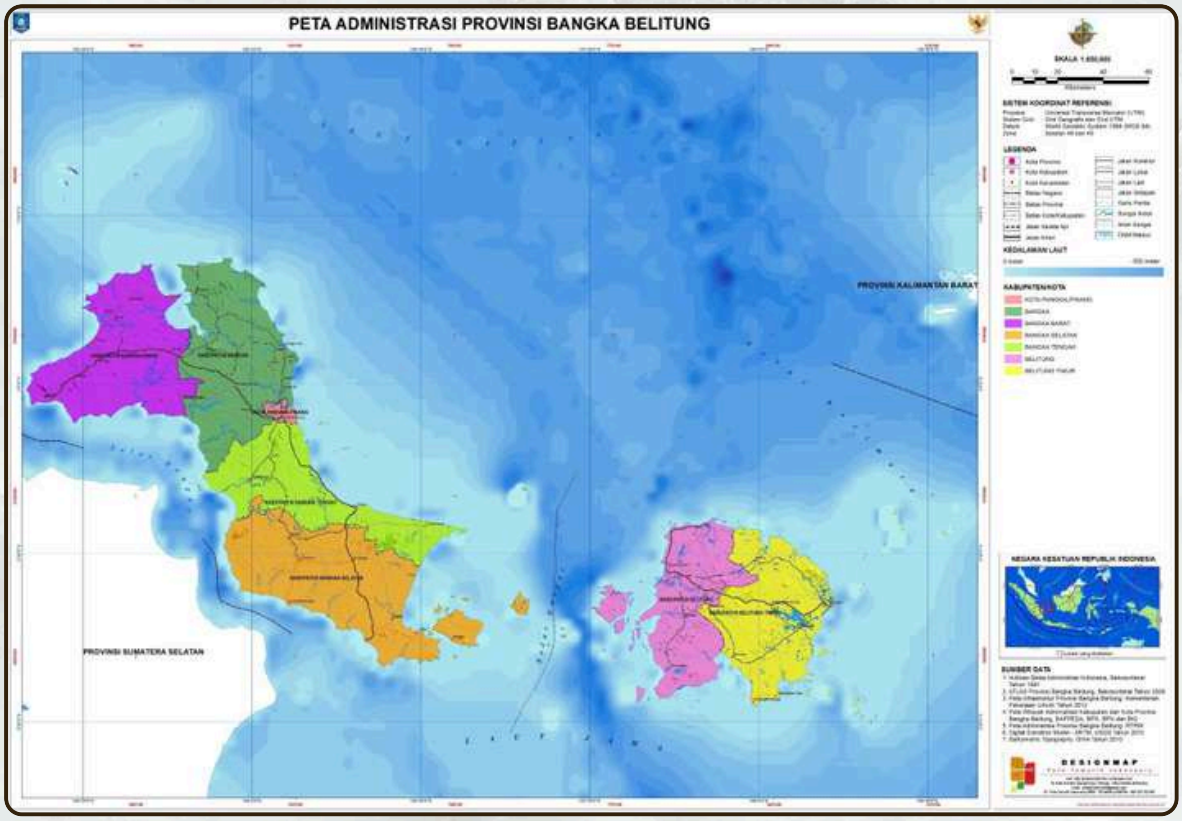


Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan mengenai sengketa tata usaha negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang selaku kawal depan Mahkamah Agung (*voorpost*) di daerah mempunyai tugas pokok dan fungsi menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan semua sengketa tata usaha negara di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang meliputi:

1. Kabupaten Bangka
2. Kabupaten Bangka Barat
3. Kabupaten Bangka Selatan
4. Kabupaten Bangka Tengah
5. Kabupaten Belitung
6. Kabupaten Belitung Timur
7. Kota Pangkalpinang

GAMBAR 1. WILAYAH YURISDIKSI
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG



Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang secara resmi beroperasi pada tanggal 22 Oktober 2018, tepatnya sejak diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam acara persemian 85 (delapan puluh lima) pengadilan baru di Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Provinsi Sulawesi Utara. Peresmian tersebut berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 183/KMA/SK/ IX/2018 tanggal 21 September 2018 tentang Penetapan Tanggal dan Tempat Peresmian Operasional Pengadilan Baru dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 210/KMA/SK/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018 tentang Pengoperasian Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka disusunlah Laporan Kinerja ini sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2025 sesuai dengan anggaran yang telah diberikan. Laporan Kinerja Tahun 2025 bertujuan memberikan informasi yang memadai kepada para *stakeholders* tentang capaian kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, keberhasilan, kendala serta upaya mengatasi kendala yang ada selama Tahun 2025.

B. KEDUDUKAN DAN FUNGSI



Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang secara organisatoris, administratif dan finansial serta teknis yustisial berada di bawah pembinaan dan pengawasan Mahkamah Agung, sesuai ketentuan pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. KEPPRES Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung serta PERMA Nomor 7 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tepatnya beralamat di Jalan Pulau Bangka, Komplek Perkantoran Pemprov. Kep. Bangka Belitung, Padang Baru, Kec. Pangkalan Baru, Prov. Kep. Bangka Belitung.

Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara di berbagai negara modern terutama Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) merupakan suatu tonggak yang menjadi tumpuan harapan masyarakat atau warga negara untuk mempertahankan hak-haknya yang dirugikan oleh perbuatan pejabat administrasi karena keputusan yang dikeluarkannya.

Maksud pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga masyarakat terhadap perbuatan pejabat administrasi yang melanggar hak asasi dalam lapangan hukum administrasi negara. Kecuali itu, kehadiran Peradilan Tata Usaha Negara akan memberikan perlindungan hukum yang sama kepada pejabat administrasi yang bertindak benar dan sesuai dengan hukum.

Jadi fungsi dari Peradilan Tata Usaha Negara adalah pertama, sebagai lembaga kontrol (pengawas) terhadap tindakan pejabat administrasi supaya tetap berada dalam rel hukum. Kedua, adalah sebagai wadah melindungi hak individu dan warga masyarakat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pejabat administrasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dipimpin oleh seorang Ketua yang merupakan pimpinan pengadilan dan didampingi seorang Wakil Ketua, guna pelaksanaan pengelolaan administrasi pengadilan secara tertib demi menunjang kelancaran penyelenggaraan peradilan, ditetapkan adanya kepaniteraan yang menangani administrasi perkara dipimpin seorang Panitera dan kesekretariatan yang menangani administrasi umum dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

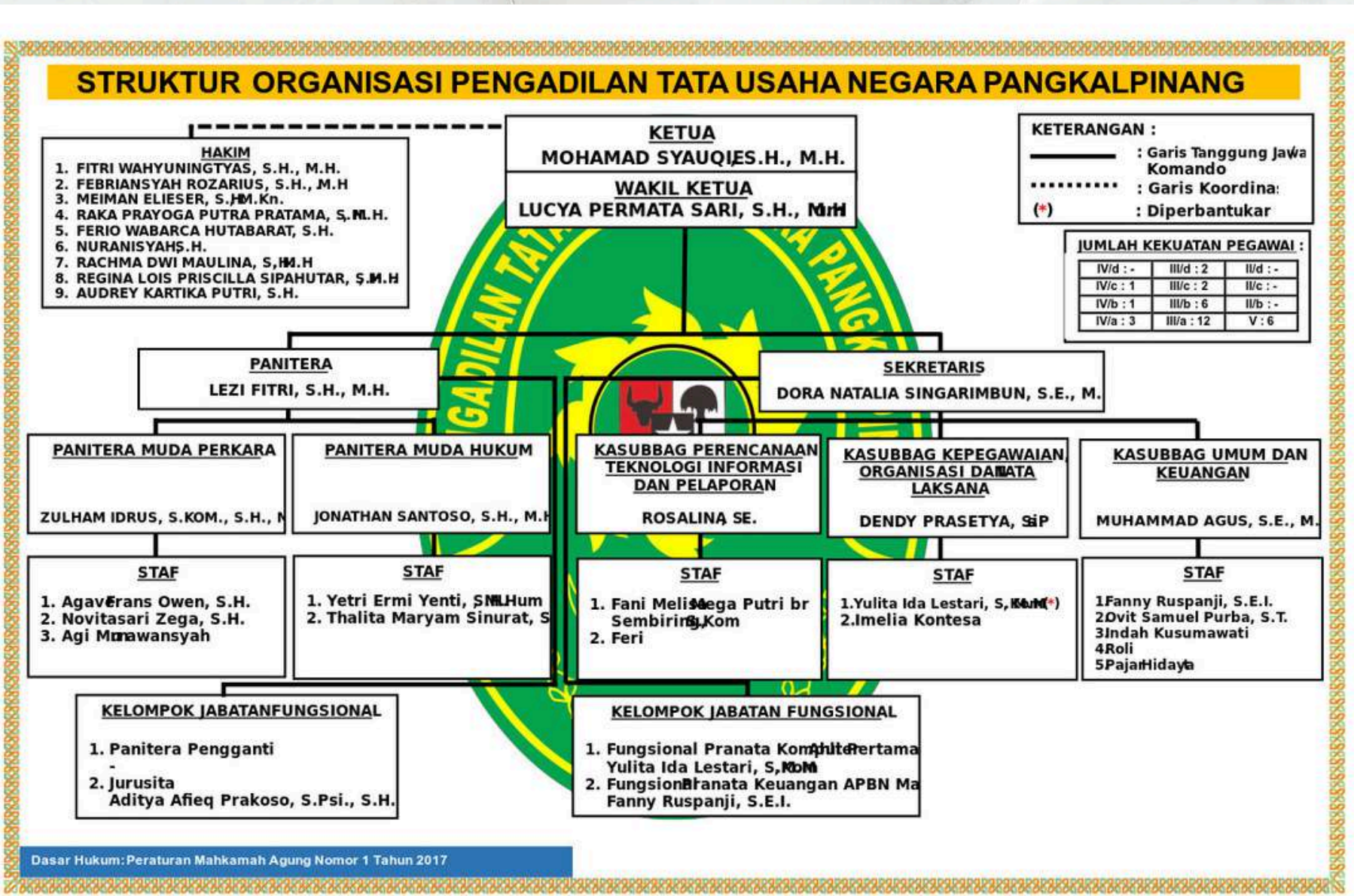
Kepaniteraan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis di bidang administrasi perkara dan administrasi peradilan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan tugas, seorang Panitera dibantu oleh Panitera Muda Perkara dan Panitera Muda Hukum. Untuk melaksanakan tugas tersebut kepaniteraan mempunyai fungsi: menyusun kegiatan pelayanan administrasi perkara, administrasi keuangan perkara, administrasi putusan perkara, statistik perkara dan dokumentasi perkara.



Kesekretariatan mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. Dalam menjalankan tugasnya, Sekretaris dibantu oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan, Kepala Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana serta Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan yang semua sub-sub berfungsi untuk melakukan urusan perencanaan, pelaporan, kepegawaian, urusan keuangan dan urusan surat-menyurat, perlengkapan, rumah tangga serta mengelola perpustakaan peradilan.



C. STRUKTUR ORGANISASI



GAMBAR 2. STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

TABEL 2. URAIAN TUGAS STRUKTUR ORGANISASI

<table>
<tr><th colspan="2">Uraian Tugas</th></tr>
<tr><td colspan="2">Ketua mempunyai tugas sebagai pimpinan pengadilan, bertanggungjawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada pengaadilan, melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan dibantu oleh Wakil, menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan, sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Wakil Ketua bertugas melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua
kepadanya.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Hakim bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum tata usaha negara, dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap bidang atau unit kerja internal yang ditugaskan kepadanya.</td></tr>
<tr><td>Panitera mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.</td><td>Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana.</td></tr>
<tr><td>Panmud Perkara bertugas melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara dan barang bukti.</td><td>Sub Bagian Umum dan Keuangan bertugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga dan sarana prasarana, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, pengelolaan keuangan.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Panmud Hukum bertugas mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara dan administrasi yang berkaitan dengan tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.</td><td>Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan bertugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.</td></tr>
<tr><td>Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala bertugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana.</td></tr>
</table>

Struktur Organisasi (susunan) Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, terdiri dari :

1. Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.
2. Hakim, adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.
3. Pada setiap Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh Panitera, dan Kesekretariatan dipimpin oleh Sekretaris.
4. Dalam melaksanakan tugas kepaniteraan, Panitera dibantu oleh 2 (dua) orang panitera muda, yaitu Panitera Muda Hukum dan Panitera Muda Perkara serta Panitera Pengganti.
5. Dalam melaksanakan tugas kesekretariatan, Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) orang kepala sub bagian, yaitu Kasubag Umum dan Keuangan, Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, serta Kasubag Perencanaan, Teknologi Infromasi dan Pelaporan.

Secara lengkap Profil Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang beserta jabatannya hingga 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

TABEL 3. PROFIL ASN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

NO.	PROFIL	BIODATA		
1		NAMA	:	Mohamad Syauqie, S.H., M.H.
		NIP	:	19791129 200212 1 002
		JABATAN	:	Ketua
2		NAMA	:	Lucya Permata Sari, S.H., M.Hum.
		NIP	:	19770217 200312 2 001
		JABATAN	:	Wakil Ketua
3		NAMA	:	Fitri Wahyuningtyas, S.H., M.H.
		NIP	:	19820722 200805 2 001
		JABATAN	:	Hakim

NO.	PROFIL	BIODATA		
4		NAMA	:	Febriansyah Rozarius, S.H.
		NIP	:	19920211 201712 1 003
		JABATAN	:	Hakim
5		NAMA	:	Raka Prayoga Putra Pratama, S.H., M.H.
		NIP	:	19961205 202203 1 007
		JABATAN	:	Hakim
6		NAMA	:	Meiman Elieser, S.H., M.Kn.
		NIP	:	19940505 202203 1 006
		JABATAN	:	Hakim
7		NAMA	:	Ferio Wabarca Hutabarat, S.H.
		NIP	:	19980119 202203 1 004
		JABATAN	:	Hakim
8		NAMA	:	Rachma Dwi Maulina, S.H., M.H.
		NIP	:	19980711 202203 2 017
		JABATAN	:	Hakim
9		NAMA	:	Regina Lois Priscilla Sipahutar, S.H., M.H.
		NIP	:	19980724 202203 2 013
		JABATAN	:	Hakim

NO.	PROFIL	BIODATA		
10		NAMA	:	Nuranisyah, S.H
		NIP	:	19940115 202203 2 007
		JABATAN	:	Hakim
11		NAMA	:	Audrey Kartika Putri, S.H
		NIP	:	19991222 202203 2 006
		JABATAN	:	Hakim
12		NAMA	:	Lezi Fitri, S.H., M.H.
		NIP	:	19701120 199603 2 003
		JABATAN	:	Panitera
13		NAMA	:	Dora Natalia Singarimbun, S.E., M.M.
		NIP	:	19811229 200604 2 015
		JABATAN	:	Sekretaris
14		NAMA	:	Zulham Idrus, S. Kom., S.H., M.H.
		NIP	:	19830912 201101 1 008
		JABATAN	:	Panitera Muda Perkara
15		NAMA	:	Jonathan Santoso, S.H.
		NIP	:	19900618 201903 1 004
		JABATAN	:	Panitera Muda Hukum

NO.	PROFIL	BIODATA		
16		NAMA	:	Muhammad Agus, S.E., M.Si.
		NIP	:	19850207 200604 1 001
		JABATAN	:	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
17		NAMA	:	Rosalina, S.E.
		NIP	:	19920808 201903 2 017
		JABATAN	:	Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan
18		NAMA	:	Dendy Prasetya, S. Psi.
		NIP	:	19920523 201903 1 005
		JABATAN	:	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana
19		NAMA	:	Aditya Afieq Prakoso, S.Psi., S.H.
		NIP	:	19930727 201903 1 010
		JABATAN	:	Juru Sita
20		NAMA	:	Yulita Ida Lestari, S.Kom
		NIP	:	19860701 202012 2 002
		JABATAN	:	Pranata Komputer Ahli Pertama
21		NAMA	:	Fanny Ruspanji, S.E.I
		NIP	:	19900412 202012 1 009
		JABATAN	:	Pranata Keuangan APBN Mahir

NO.	PROFIL	BIODATA		
22		NAMA	:	Yetri Ermi Yenti, S.H.
		NIP	:	19980703 202405 2 001
		JABATAN	:	Klerek - Analis Perkara Peradilan
23		NAMA	:	Fani Melisa Mega Putri Br. Sembiring, A.Md.
		NIP	:	19950530 202012 2 014
		JABATAN	:	Klerek - Pengolah Data dan Informasi
24		NAMA	:	Agave Frans Owen, S.H.
		NIP	:	20000521 202405 1 001
		JABATAN	:	Klerek - Analis Perkara Peradilan
25		NAMA	:	Novitasari Zega, S.H
		NIP	:	19991127 202506 2 015
		JABATAN	:	Klerek - Analis Perkara Peradilan
26		NAMA	:	Thalita Maryam Sinurat, S.H.
		NIP	:	20010618 202506 2 025
		JABATAN	:	Klerek - Analis Perkara Peradilan
27		NAMA	:	Ovit Samuel Purba, S.T.
		NIP	:	19911128 202506 1 004
		JABATAN	:	Teknisi Sarana dan Prasarana

NO.	PROFIL	BIODATA		
28		Nama	:	Imelia Kontesa
		NI PPPK	:	199909082025212011
		Jabatan	:	Operator Layanan Operasional
29		Nama	:	Indah Kusumawati
		NI PPPK	:	200201122025212001
		Jabatan	:	Operator Layanan Operasional
30		Nama	:	Roli
		NI PPPK	:	198206252025211043
		Jabatan	:	Operator Layanan Operasional
31		Nama	:	Agi Munarwansyah
		NI PPPK	:	200104162025211011
		Jabatan	:	Operator Layanan Operasional
32		Nama	:	Feri
		NI PPPK	:	200009292025211014
		Jabatan	:	Operator Layanan Operasional
33		Nama	:	Fajar Hidayat
		NI PPPK	:	199511072025211025
		Jabatan	:	Operator Layanan Operasional

D. ISU STRATEGIS

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan mendasar bagi peran Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya di bidang administrasi, organisasi perencanaan dan keuangan. Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang merupakan pengadilan di lingkungan Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sesuai dengan perannya, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dapat ikut serta mewujudkan upaya memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Lembaga peradilan termasuk Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang memiliki peran yang besar dalam memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan peradilan yang prima dan pengadilan yang terjangkau. Peran ini tentunya akan memberikan rasa percaya dan keyakinan publik terhadap peradilan sekaligus mendukung adanya kepastian hukum yang diharapkan semua pihak yang berkepentingan. Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang bertekad untuk meningkatkan kemampuannya untuk menjalankan peran tersebut demi kepercayaan dan keyakinan publik terhadap peradilan pada umumnya dan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang khususnya.

Sebagai pengadilan tingkat pertama yang memiliki cakupan wilayah yurisdiksi meliputi 6 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Bangka Belitung, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang memiliki peran yang sangat penting, yakni dalam hal mengadili perkara tingkat pertama di wilayah hukumnya, memberikan keterangan pertimbangan dan nasihat hukum pada instansi daerah apabila diminta, hingga peran lainnya sebagai narasumber pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian, serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, beberapa isu strategis yang dihadapi adalah sebagai berikut.

Tabel 4. Isu Strategis

No.	Isu Strategis	Kebijakan
1	Jaminan terhadap kepastian hukum yang bersumber dari putusan yang berkualitas dan konsisten.	• Pengembangan kapasitas sumber daya manusia peradilan, khususnya hakim. • Pemetaan kompetensi yang lebih sistematis dan dinamis. • Keterhubungan yang erat antara pelatihan, evaluasi kinerja, dan pola promosi.
2	Peningkatan pelayanan publik.	• Optimalisasi pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). • Optimalisasi Sistem Pelayanan Publik yang berbasis pada teknologi informasi. • Optimalisasi kualitas sumber daya manusia pelayanan publik melalui pembinaan, *briefing*, dan *training*. • Optimalisasi sarana prasana pelayanan publik termasuk sarana disabilitas. • Optimalisasi Standar Pelayanan Publik. • Pengawasan dan monev pelaksanaan pelayanan publik secara berkala.
3	Optimalisasi Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja.	• Peningkatan kualitas pengawasan. • Peningkatan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan. • Optimalisasi sistem akuntabilitas kinerja yang berbasis teknologi informasi melalui aplikasi Komdanas MA RI dan aplikasi berbasis google form “e-SAKIP” PTUN Pangkalpinang. • Melaksanakan monev akuntabilitas kinerja berkala.
4	Penguatan integritas	Melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
5	Kepercayaan Publik Terhadap Badan Peradilan	Penguatan integritas, peningkatan kualitas layanan, serta perluasan jangkauan informasi perlu terus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Upaya memperkuat akuntabilitas, transparansi, serta komunikasi publik yang efektif menjadi kunci untuk membangun citra positif dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan gambaran secara garis besar tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dan tentang SAKIP, yang berisikan antara lain:

A. Latar Belakang
B. Tugas dan Fungsi
C. Struktur Organisasi
D. Isu Strategis
E. Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan perencanaan dan penetapan kinerja serta program kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dalam Tahun anggaran 2025 yang berisikan antara lain:

A. Perencanaan Strategis 2025-2029; terdiri dari Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis, Program Utama dan Kegiatan
B. Rencana Kinerja Tahun 2025
C. Perjanjian Kinerja (dokumen penetapan kinerja) Tahun 2025 dan Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025, menguraikan tentang:

A. Capaian Kinerja Organisasi
B. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024
C. Perubahan Budaya Kinerja
D. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

Menguraikan kesimpulan dari seluruh sajian laporan tentang kinerja (LKjIP) serta rekomendasi.

LAMPIRAN

Berisi antara lain Struktur Organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, Perjanjian Kinerja dan Revisi Perjanjian Kinerja, Matriks Renstra 2025-2029, Surat Keputusan Tim Penyusunan LKjIP, dan lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II















PERENCANAAN KINERJA

a. Perencanaan Strategis 2025-2029
b. Rencana Kinerja Tahun 2025
c. Perjanjian Kinerja dan Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

A. PERENCANAAN STRATEGIS 2025-2029

Rencana Strategis Pengadian Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025–2029 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Pada awal tahun 2025, Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025–2029 telah disusun dengan menggunakan indikator kinerja yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya sembari menunggu penetapan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 dari Mahkamah Agung RI. Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025–2029 tersebut telah disahkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada 21 Februari 2025. Pada 16 September 2025, Mahkamah Agung RI menerbitkan Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029. Menindaklanjuti Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang menyusun Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025–2029 dengan berpedoman pada Renstra Mahkamah Agung RI. Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025–2029 diterbitkan pada 31 Oktober 2025.

Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025–2029 diterbitkan untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sesuai dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang selaras dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025–2029 memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi serta target kinerja dan kerangka pendanaan untuk mencapai visi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada 2025-2029.

1. VISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. Adapun visi dari Pengadilan Tata usaha Negara Pangkalpinang adalah:

"Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang Agung"

Visi dimaksud bermakna sebagai berikut:

Menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil.

Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan suatu perkara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi.

2. MISI

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yaitu:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan;
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

3. TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara, dan Berkeadilan.
2. Mewujudkan Badan Peradilan yang Transparan, Akuntabel, Modern, dan Profesional.

4. SASARAN STRATEGIS

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

1. **Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional**

   Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran strategis ini adalah:

   1. Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu.
   2. Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak.
   3. Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak.
   4. Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan.
   5. Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara.
   6. Persentase Perkara Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court.

2. **Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik**

   Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran strategis ini adalah:

   1. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan

3. **Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional**

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran strategis ini adalah:

1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan
2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan
3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran
4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

5. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang didukung oleh penyediaan program dan kegiatan sebagai berikut:

1. **Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu: Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum mendukung capaian indikator kinerja:

- Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu.
- Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak.
- Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak.
- Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan.
- Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara.
- Persentase Perkara Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court.
- Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan.

2. **Program Dukungan Manajemen**

Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu:

1. Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama.
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen mendukung capaian indikator kinerja:

- Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan
- Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan
- Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran
- Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

- Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu.
- Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak.
- Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak.
- Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan.
- Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara.
- Persentase Perkara Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court.
- Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan.

Program Dukungan Manajemen

- Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan
- Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan
- Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran
- Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Gambar 3. *Framework* Renstra 2025-2029



B. RENCANA KINERJA TAHUN 2025

Rencana Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025 memuat rencana target kinerja tahun 2025 yang disusun pada awal tahun 2024. Dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Di awal tahun 2024, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah menetapkan Rencana Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut:

TABEL 5.
RENCANA KINERJA TAHUN 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu	100 %
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	40 %
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	50 %
		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	80 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100 %

C. PERJANJIAN KINERJA DAN REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Berdasarkan Rancangan Rencana Strategis 2025-2029, Rencana Kinerja Tahun 2025 dan *trend* capaian kinerja tahun 2024, maka disusunlah Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada awal tahun 2025 sebagai berikut.

TABEL 6. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu	100 %
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	35 %
		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100 %
5.	Meningkatnya transparansi administrasi keuangan serta sarana dan prasarana yang efektif, efisien dan akuntabel	Persentase penyerapan anggaran	95 %
		Persentase Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95 %
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana sesuai standar	100 %
		Persentase penyelesaian tugas di bagian umum	100 %

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
6.	Meningkatnya sistem perencanaan dan pelaporan organisasi yang akuntabel dan berkinerja tinggi berbasis teknologi Informasi	Nilai akuntabilitas kinerja	87%
		Nilai kualitas perencanaan anggaran pada Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100%
		Persentase pelaksanaan tugas di bidang teknologi informasi	100%
7.	Meningkatnya ketatalaksanaan administrasi kepegawaian, organisasi dan SDM yang professional, akuntabel, efektif dan efisien	Jumlah ASN yang data kepegawaiannya terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP)	19
		Jumlah kebijakan yang dikeluarkan	120
		Persentase kedisiplinan ASN	100 %
		Jumlah Kegiatan Peningkatan Kompentesi ASN melalui Bimtek/Diklat	20
		Persentase produktivitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja)	100%
		Persentase pelaksanaan administrasi kenaikan pangkat/golongan dan gaji berkala	100%

Kegiatan		Anggaran
1.	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Rp 4.420.687.000,-
2.	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Rp 53.385.000,-

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 mengalami 2 (dua) kali revisi. Revisi pertama dilaksanakan sehubungan dengan adanya pergantian Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang dilantik pada 31 Juli 2025. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 disahkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada 4 Agustus 2025. Revisi Perjanjian Kinerja tersebut dijabarkan dalam Tabel 7 sebagai berikut.

TABEL 7. REVISI KE I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu	100 %
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	35 %
		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90 %

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100 %

Kegiatan		Anggaran
1.	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Rp 4.839.757.000,-
2.	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Rp 53.385.000,-

Catatan: Anggaran berdasarkan anggaran per tanggal 4 Agustus 2025

Sebagai upaya mewujudkan target kinerja yang telah diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang melakukan pengukuran kinerja bulanan dan monitoring/evaluasi capaian kinerja per triwulan. Capaian kinerja akumulatif hingga Triwulan III Tahun 2025 dijabarkan dalam tabel berikut.

TABEL 8. CAPAIAN KINERJA AKUMULATIF S/D TRIWULAN III TAHUN 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	100 %
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	35 %	40 %	114,29 %
		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90 %	97,27 %	108,07 %
Rata-rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis I					**107,45 %**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %
Rata-rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis II					**100 %**
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%	N/A	N/A
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %
Rata-rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis III					**100 %**
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100 %	100 %	100 %
Rata-rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis IV					**100 %**
Rata-rata Capaian Kinerja PTUN Pangkalpinang s/d Triwulan III Tahun 2025					**101,86 %**

Capaian kinerja hingga Triwulan III Tahun 2025 telah menunjukkan hasil yang sangat baik yang dibuktikan dengan nilai capaian kinerja akumulatif sebesar 101,86%. Seluruh target pada indikator kinerja berhasil dicapai dengan nilai capaian minimal 100%. Namun hingga Bulan September 2025, belum ada pendaftaran perkara prodeo, sehingga capaian kinerja indikator "Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan" tidak dapat didefinisikan (N/A). Oleh karenanya, indikator "Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan" tidak dimasukkan dalam perhitungan capaian kinerja hingga Bulan September 2025.

Pada 16 September 2025, Mahkamah Agung RI menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 167/KMA/SK.RA.1.3/IX/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029 yang disusul dengan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA.1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029.

Menindaklanjuti Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang menyusun Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025–2029 dengan berpedoman pada Renstra Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029. Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025–2029 diterbitkan pada 31 Oktober 2025. Selain menetapkan Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025–2029, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang juga menetapkan Revisi Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang melalui Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor 499a/KPTUN.W5-TUN5/RA1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025.

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Utama, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang juga melakukan revisi terhadap dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Rencana Kinerja Tahun 2026, dan Rencana Aksi Tahun 2025. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sesuai dengan Revisi Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dijabarkan sebagai berikut.

TABEL 9. REVISI KE II PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu	100 %
		Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak	100 %
		Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak	100 %
		Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan.	100 %
		Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara.	100 %
		Persentase Perkara Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court.	100 %
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	3,78

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	85
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	95
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	95
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3

Program		Anggaran
1.	Program Dukungan Manajemen	Rp 5.523.405.000,-
2.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 53.385.000,-

Catatan: Anggaran berdasarkan anggaran per tanggal 31 Oktober 2025

Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ini menjadi dasar pengukuran capaian kinerja Tahun 2025 yang dipertanggungjawabkan dalam Laporan Kinerja Tahun 2025 ini.

BAB III











AKUNTABILITAS KINERJA





a. Capaian Kinerja Organisasi
b. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP 2024
c. Perubahan Budaya Kinerja
d. Realisasi Anggaran

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Akuntabilitas kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian yang diperjanjikan pada tahun 2025. Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah diperjanjikan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

$$\text{CAPAIAN} = \frac{\text{REALISASI}}{\text{TARGET}} \times 100\%$$

Pengukuran capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Revisi Perjanjian Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025 dengan realisasinya dan melakukan analisis terhadap capaiannya. Analisis capaian kinerja tahun 2025 dilakukan dengan cara:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional;
5. Melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; serta
7. Melakukan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari evaluasi yang dilakukan Evaluator Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang pada tahun sebelumnya.

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja di Tahun 2025 tersebut diuraikan dalam tabel 10 berikut.

TABEL 10. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %
		Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak	100 %	100 %	100 %
		Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak	100 %	100 %	100 %
		Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan	100 %	100 %	100 %
		Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara	100 %	100 %	100 %
		Persentase Perkara Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court	100 %	100 %	100 %
Rata-rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis I					**100 %**
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	3,78	3,88	102,65 %
Rata-rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis II					**102,65 %**
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	85	85	100 %
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	95	98,67	103,86 %
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	95	99,95	105,21 %
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3,175	105,83 %
Rata-rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis III					**103,73 %**
Rata-rata Capaian Kinerja PTUN Pangkalpinang Tahun 2025					**102,13 %**

Capaian kinerja masing-masing indikator kinerja di Tahun 2025 secara bulanan diuraikan sebagai berikut

TABEL 11. CAPAIAN KINERJA BULAN JANUARI 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Bulan Januari				Realisasi s.d Bulan Januari			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu	100 %	0	0	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A
		Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak	100 %	0	0	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A
		Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak	100 %	3	3	100	100	3	3	100	100
		Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan	100 %	0	0	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A
		Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara	100 %	0	0	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A
		Persentase Perkara Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court	100 %	0	0	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A
Rata-rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis I							**100**				**100**
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	3,78	Dihitung Per Triwulan							
Rata-rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis II								**Dihitung Per Triwulan**			
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	85	Diisi Per Tahun							
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	95	-	-	100	105,26	-	-	100	105,26
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	95	Diisi Per Tahun							
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	Diisi Per Tahun							
Rata-rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis III							**105,26**				**105,26**
Rata-rata Capaian Kinerja PTUN Pangkalpinang							**102,63**				**102,63**

TABEL 12. CAPAIAN KINERJA BULAN FEBRUARI 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Bulan Februari				Realisasi s.d Bulan Februari			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu	100 %	1	1	100	100	1	1	100	100
		Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak	100 %	1	1	100	100	1	1	100	100
		Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak	100 %	1	1	100	100	4	4	100	100
		Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan	100 %	1	1	100	100	1	1	100	100
		Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara	100 %	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Persentase Perkara Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court	100 %	2	2	100	100	2	2	100	100
Rata-rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis I							**100**				**100**
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	3,78	Dihitung Per Triwulan							
Rata-rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis II							**Dihitung Per Triwulan**				
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	85	Diisi Per Tahun							
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	95	-	-	100	105,26	-	-	100	105,26
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	95	Diisi Per Tahun							
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	Diisi Per Tahun							
Rata-rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis III							**105,26**				**105,26**
Rata-rata Capaian Kinerja PTUN Pangkalpinang							**102,63**				**102,63**

TABEL 13. CAPAIAN KINERJA BULAN MARET 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Bulan Maret				Realisasi s.d Bulan Maret			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu	100 %	2	2	100	100	3	3	100	100
		Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak	100 %	2	2	100	100	3	3	100	100
		Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak	100 %	1	1	100	100	4	4	100	100
		Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan	100 %	2	2	100	100	3	3	100	100
		Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara	100 %	0	0	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A
		Persentase Perkara Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court	100 %	1	1	100	100	3	3	100	100
Rata-rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis I							**100**				**100**
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	3,78			3,84	101,59			3,84	101,59
Rata-rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis II							**101,59**				**101,59**
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	85	Diisi Per Tahun							
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	95	-	-	100	105,26	-	-	100	105,26
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	95	Diisi Per Tahun							
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	Diisi Per Tahun							
Rata-rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis III							**105,26**				**105,26**
Rata-rata Capaian Kinerja PTUN Pangkalpinang							**102,28**				**102,28**

TABEL 14. CAPAIAN KINERJA BULAN APRIL 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Bulan April				Realisasi s.d Bulan April			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu	100 %	0	0	N/A	N/A	3	3	100	100
		Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak	100 %	0	0	N/A	N/A	3	3	100	100
		Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak	100 %	0	0	N/A	N/A	4	4	100	100
		Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan	100 %	0	0	N/A	N/A	3	3	100	100
		Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara	100 %	0	0	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A
		Persentase Perkara Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court	100 %	1	1	100	100	4	4	100	100
Rata-rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis I							**100**	**100**			
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	3,78	Dihitung Per Triwulan							
Rata-rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis II							**Dihitung Per Triwulan**				
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	85	Diisi Per Tahun							
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	95	-	-	95,8	100,84	-	-	95,8	100,84
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	95	Diisi Per Tahun							
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	Diisi Per Tahun							
Rata-rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis III							**100,84**	**100,84**			
Rata-rata Capaian Kinerja PTUN Pangkalpinang							**100,42**	**100,42**			

TABEL 15. CAPAIAN KINERJA BULAN MEI 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Bulan Mei				Realisasi s.d Bulan Mei			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu	100 %	2	2	100	100	5	5	100	100
		Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak	100 %	2	2	100	100	5	5	100	100
		Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak	100 %	1	1	100	100	5	5	100	100
		Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan	100 %	2	2	100	100	5	5	100	100
		Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara	100 %	0	0	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A
		Persentase Perkara Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court	100 %	3	3	100	100	7	7	100	100
Rata-rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis I							**100**				**100**
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	3,78	Dihitung Per Triwulan							
Rata-rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis II								**Dihitung Per Triwulan**			
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	85	Diisi Per Tahun							
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	95	-	-	97,125	102,24	-	-	97,125	102,24
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	95	Diisi Per Tahun							
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	Diisi Per Tahun							
Rata-rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis III							**102,24**				**102,24**
Rata-rata Capaian Kinerja PTUN Pangkalpinang							**101,12**				**101,12**

TABEL 16. CAPAIAN KINERJA BULAN JUNI 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Bulan Juni				Realisasi s.d Bulan Juni			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu	100 %	1	1	100	100	6	6	100	100
		Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak	100 %	1	1	100	100	6	6	100	100
		Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak	100 %	2	2	100	100	7	7	100	100
		Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan	100 %	1	1	100	100	6	6	100	100
		Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara	100 %	0	0	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A
		Persentase Perkara Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court	100 %	1	1	100	100	8	8	100	100
Rata-rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis I							**100**				**100**
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	3,78			3,95	104,5			3,92	103,7
104,5							**104,5**				**103,7**
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	85	Diisi Per Tahun							
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	95	-	-	98,2	103,37	-	-	98,2	103,37
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	95	Diisi Per Tahun							
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	Diisi Per Tahun							
Rata-rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis III							**103,37**				**103,37**
Rata-rata Capaian Kinerja PTUN Pangkalpinang							**102,62**				**102,36**

TABEL 17. CAPAIAN KINERJA BULAN JULI 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Bulan Juli				Realisasi s.d Bulan Juli			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu	100 %	0	0	N/A	N/A	6	6	100	100
		Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak	100 %	0	0	N/A	N/A	6	6	100	100
		Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak	100 %	1	1	100	100	8	8	100	100
		Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan	100 %	0	0	N/A	N/A	6	6	100	100
		Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara	100 %	0	0	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A
		Persentase Perkara Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court	100 %	3	3	100	100	11	11	100	100
Rata-rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis I							**100**				**100**
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	3,78	Dihitung Per Triwulan							
Rata-rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis II								**Dihitung Per Triwulan**			
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	85	Diisi Per Tahun							
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	95	-	-	97,82	102,97	-	-	97,82	102,97
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	95	Diisi Per Tahun							
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	Diisi Per Tahun							
Rata-rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis III							**102,97**				**102,97**
Rata-rata Capaian Kinerja PTUN Pangkalpinang							**101,49**				**101,49**

TABEL 18. CAPAIAN KINERJA BULAN AGUSTUS 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Bulan Agustus				Realisasi s.d Bulan Agustus			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu	100 %	2	2	100	100	8	8	100	100
		Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak	100 %	2	2	100	100	8	8	100	100
		Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak	100 %	4	4	100	100	12	12	100	100
		Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan	100 %	2	2	100	100	8	8	100	100
		Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara	100 %	0	0	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A
		Persentase Perkara Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court	100 %	2	2	100	100	13	13	100	100
Rata-rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis I							**100**				**100**
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	3,78	Dihitung Per Triwulan							
Rata-rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis II								**Dihitung Per Triwulan**			
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	85	Diisi Per Tahun							
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	95	-	-	98,925	104,13	-	-	98,925	104,13
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	95	Diisi Per Tahun							
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	Diisi Per Tahun							
Rata-rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis III							**104,13**				**104,13**
Rata-rata Capaian Kinerja PTUN Pangkalpinang							**102,07**				**102,07**

TABEL 19. CAPAIAN KINERJA BULAN SEPTEMBER 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Bulan September				Realisasi s.d Bulan September			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu	100 %	2	2	100	100	10	10	100	100
		Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak	100 %	2	2	100	100	10	10	100	100
		Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak	100 %	2	2	100	100	14	14	100	100
		Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan	100 %	2	2	100	100	10	10	100	100
		Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara	100 %	1	1	100	100	1	1	100	100
		Persentase Perkara Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court	100 %	2	2	100	100	15	15	100	100
Rata-rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis I							**100**				**100**
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	3,78			3,84	101,59			3,89	102,91
104,5							**101,59**				**102,91**
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	85	Diisi Per Tahun							
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	95	-	-	98,31	103,48	-	-	98,31	103,48
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	95	Diisi Per Tahun							
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	Diisi Per Tahun							
Rata-rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis III							**103,48**				**103,48**
Rata-rata Capaian Kinerja PTUN Pangkalpinang							**101,69**				**102,13**

TABEL 20. CAPAIAN KINERJA BULAN OKTOBER 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Bulan Oktober				Realisasi s.d Bulan Oktober			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu	100 %	3	3	100	100	13	13	100	100
		Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak	100 %	3	3	100	100	13	13	100	100
		Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak	100 %	0	0	N/A	N/A	14	14	100	100
		Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan	100 %	3	3	100	100	13	13	100	100
		Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara	100 %	0	0	N/A	N/A	1	1	100	100
		Persentase Perkara Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court	100 %	5	5	100	100	20	20	100	100
Rata-rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis I							**100**				**100**
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	3,78	Dihitung Per Triwulan							
Rata-rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis II							**Dihitung Per Triwulan**				
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	85	Diisi Per Tahun							
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	95	-	-	98,53	103,72	-	-	98,53	103,72
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	95	Diisi Per Tahun							
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	Diisi Per Tahun							
Rata-rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis III							**103,72**				**103,72**
Rata-rata Capaian Kinerja PTUN Pangkalpinang							**101,86**				**101,86**

TABEL 21. CAPAIAN KINERJA BULAN NOVEMBER 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Bulan November				Realisasi s.d Bulan November			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu	100 %	2	2	100	100	15	15	100	100
		Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak	100 %	2	2	100	100	15	15	100	100
		Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak	100 %	0	0	N/A	N/A	14	14	100	100
		Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan	100 %	2	2	100	100	15	15	100	100
		Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara	100 %	0	0	N/A	N/A	1	1	100	100
		Persentase Perkara Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court	100 %	3	3	100	100	23	23	100	100
Rata-rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis I							**100**				**100**
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	3,78	Dihitung Per Triwulan							
Rata-rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis II								**Dihitung Per Triwulan**			
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	85	Diisi Per Tahun							
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	95	-	-	98,67	103,86	-	-	98,67	103,86
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	95	Diisi Per Tahun							
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	Diisi Per Tahun							
Rata-rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis III							**103,86**				**103,86**
Rata-rata Capaian Kinerja PTUN Pangkalpinang							**101,93**				**101,93**

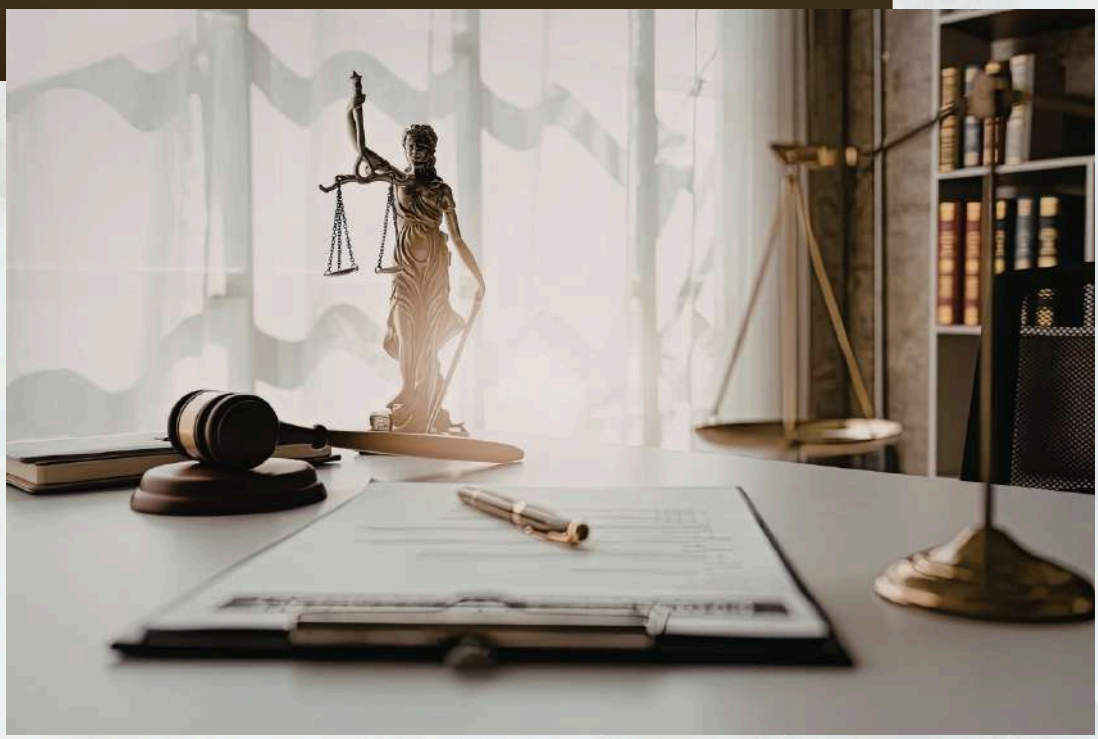
TABEL 22. CAPAIAN KINERJA BULAN DESEMBER 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Bulan Desember				Realisasi s.d Bulan Desember			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu	100 %	2	2	100	100	17	17	100	100
		Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak	100 %	2	2	100	100	17	17	100	100
		Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak	100 %	5	5	100	100	19	19	100	100
		Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan	100 %	2	2	100	100	17	17	100	100
		Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara	100 %	0	0	N/A	N/A	1	1	100	100
		Persentase Perkara Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court	100 %	1	1	100	100	24	24	100	100
Rata-rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis I							**100**				**100**
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	3,78			3,84	101,59			3,88	102,65
Rata-rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis II							**101,59**				**102,65**
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	85	-	-	85	100	-	-	85	100
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	95	-	-	98,67	103,86	-	-	98,67	103,86
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	95	-	-	99,95	105,21	-	-	99,95	105,21
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	-	-	3,175	105,83	-	-	3,175	105,83
Rata-rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis III							**103,73**				**103,73**
Rata-rata Capaian Kinerja PTUN Pangkalpinang							**101,77**				**102,13**

Secara umum, capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada tahun 2025 dinyatakan "**Berhasil**" dengan nilai **102,13%** dan target yang telah ditetapkan di Tahun 2025 berhasil dicapai dengan nilai kinerja yang baik. Berikut merupakan penjabaran capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025.

- Nilai kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025 secara rata-rata adalah sebesar 102,13%. Nilai kinerja di Tahun 2025 mengalami peningkatan 1,16% dibandingkan nilai kinerja Tahun 2024 yang sebesar 100,97%. Capaian Strategis 1 "Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern" sebesar 100%, Capaian Strategis 2 "Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik" sebesar 102,65%, Capaian Strategis 3 "Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional" sebesar 103,73%.
- Nilai kinerja untuk tiap-tiap indikator juga menunjukkan capaian minimal 100%.

Kondisi ini menunjukkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah berhasil mencapai target untuk mewujudkan seluruh sasaran strategis yang telah ditetapkan.



EVALUASI DAN ANALISA CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025 mengacu pada Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Tahun 2025-2029. Pada akhir Tahun 2025, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Dari hasil pengukuran kinerja selama tahun 2025, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang melakukan evaluasi dan analisis capaian kinerja untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan terhadap rencana kinerja tahun berikutnya. Evaluasi dan analisis hasil capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

I. Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern

Pencapaian Sasaran Strategis 1 “Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern” pada Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 23 berikut.

TABEL 23
CAPAIAN KINERJA UTAMA
TERWUJUDNYA PERADILAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN, AKUNTABEL, RESPONSIF, DAN MODERN

Sasaran I Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern				
No.	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**
1.	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100 %	100 %	100 %
	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100 %	100 %	100 %
	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100 %	100 %	100 %
	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100 %	100 %	100 %
	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara	100 %	100 %	100 %
	Persentase perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	100 %	100 %	100 %
Rata-rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis I				**100 %**

1.1. Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu



Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan.

Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, batas waktu penyelesaian perkara tingkat pertama adalah 5 (lima) bulan.

Penyelesaian tepat waktu adalah penyelesaian perkara yang diselesaikan pada tahun berjalan yang tidak lewat dari 5 (lima) bulan untuk pengadilan tingkat pertama yang dihitung sejak perkara mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasi.

Realisasi persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu pada Tahun 2025 adalah sebesar 100%. Nilai ini didapat dari perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu tahun 2025 dengan jumlah perkara tahun berjalan yang telah diselesaikan.



Selama Tahun 2025, perkara yang masuk adalah sebanyak 15 perkara dengan 5 perkara sisa dari Tahun 2024. Jumlah perkara yang diselesaikan pada Tahun 2025 adalah sebanyak 17 perkara yang terdiri dari 12 perkara yang diputus dan 5 perkara yang dicabut.

Perkara yang diselesaikan tepat waktu/kurang dari 5 bulan adalah sebanyak 17 perkara seperti yang ditunjukkan pada Tabel 25. Keadaan perkara secara lebih rinci dijelaskan dalam Tabel 24 pada halaman selanjutnya.

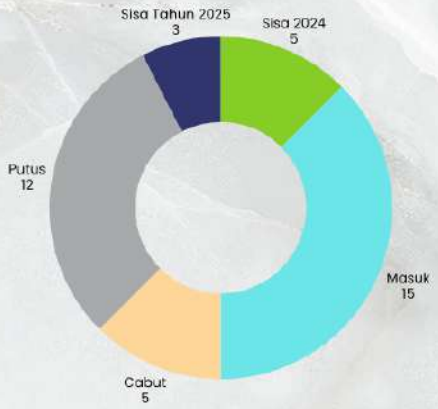
TABEL 24 KEADAAN PERKARA TINGKAT PERTAMA

No	Jenis Perkara	Sisa Tahun Lalu	Masuk	Dismissal	Perlawanan	Cabut	Putus	Sisa	Permohonan			
									B	K	PK	Eksekusi
A. GUGATAN												
1	Pertanahan	3	9	-	-	4	6	2	6	5	1	-
2	Kepegawaian	-	1	-	-	-	1	-	1	3	2	-
3	Pajak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Perijinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Lelang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Tender	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	HAKI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Badan Hukum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Tindakan Faktual/Administrasi Pemerintahan	1	2	-	-	1	2	-	2	-	-	-
10	Pemilukada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Partai Politik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	KIP	-	2	-	-	-	2	-	-	1	1	-
13	Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Kepala Desa/Perangkat Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Pergantian Antar Waktu (PAW)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Lain-lain	1	1	-	-	-	1	1	-	-	1	1
B. PERMOHONAN												
1	Fiktif Positif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Penyalahgunaan Wewenang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		**5**	**15**	**0**	**0**	**5**	**12**	**3**	**9**	**9**	**5**	**1**

Adapun dari keterangan dari tabel diatas adalah :

1. Sisa Perkara Tahun 2024 : 5 Perkara
2. Perkara Masuk Tahun 2025 : 15 Perkara
3. Jumlah Putus : 17 Perkara
   - Putus dalam sidang : 12 Perkara
   - Cabut : 5 Perkara
   - Dismissal : - Perkara
4. Sisa Tahun 2025 : 3 Perkara

GRAFIK 1. KEADAAN PERKARA TINGKAT PERTAMA



Data proses penyelesaian perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang lebih rinci disajikan sebagai berikut:

Tabel 25. Laporan Perkara yang Selesai Diproses Kurang Dari 3 Bulan, 3-5 Bulan, 5-12 Bulan dan Lebih dari 12 Bulan Tahun 2025

No	Perkara yang Diselesaikan Tahun 2025			
	Kurang dari 3 Bulan	3-5 Bulan	5-12 Bulan	Lebih dari 12 Bulan
1	7/G/2025/PTUN.PGP	14/G/TF-LH/2024/PTUN.PGP	-	-
2	9/G/KI/2025/PTUN.PGP	15/G/2024/PTUN.PGP	-	-
3	10/G/TF/2025/PTUN.PGP	16/G/2024/PTUN.PGP	-	-
4	11/G/2025/PTUN.PGP	17/G/2024/PTUN.PGP	-	-
5	12/G/2025/PTUN.PGP	18/G/2024/PTUN.PGP	-	-
6	13/G/2025/PTUN.PGP	1/G/2025/PTUN.PGP	-	-
7	-	2/G/2025/PTUN.PGP	-	-
8	-	3/G/TF/2025/PTUN.PGP	-	-
9		4/G/2025/PTUN.PGP		
10		5/G/KI/2025/PTUN.PGP		
11		6/G/2025/PTUN.PGP		
	6 Perkara	11 Perkara	-	-

Tabel 26. Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu

No	NAMA SATKER	Perkara Ditangani (Sisa Perkara Tahun Lalu + Perkara Masuk)	Perkara yang diselesaikan	Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu
1	PTUN PANGKALPINANG	20	17	17	0

Tabel 27. Data Penyelesaian Perkara Selama Tahun 2025

No	Bulan	Jumlah Perkara yang Diselesaikan	Jumlah Perkara yang Selesai Tepat Waktu	Realisasi Perkara yang Putus Tepat Waktu
1	Januari	0	0	N/A
2	Februari	1	1	100 %
3	Maret	2	2	100 %
4	April	0	0	N/A
5	Mei	2	2	100 %
6	Juni	1	1	100 %
7	Juli	0	0	N/A
8	Agustus	2	2	100 %
9	September	2	2	100 %
10	Oktober	3	3	100 %
11	November	2	2	100 %
12	Desember	2	2	100 %
Jumlah		**17**	**17**	**100 %**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Dari data-data di atas, maka capaian Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu dihitung sebagai berikut.

Perhitungan Realisasi:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan}} \times 100\%$$

$$= \frac{17}{17} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Perhitungan Capaian:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{100\%}{100\%} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah Perkara yang Diselesaikan	Jumlah Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu	2025	17	17	100%	100%	100%

Tabel 28. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Indikator 1.1

Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 100%. Di awal tahun 2025, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang memiliki sisa perkara dari tahun 2024 sebanyak 5 perkara. Perkara masuk selama tahun 2025 berjumlah 15 perkara sehingga total beban perkara selama tahun 2025 adalah sebanyak 20 perkara. Dari total 20 perkara tersebut, 17 perkara telah diselesaikan secara tepat waktu dengan rincian 12 perkara putus dalam persidangan dan 5 perkara dicabut. Dari data tersebut, maka realisasi penyelesaian perkara secara tepat waktu adalah sebesar 100% dengan capaian akhir sebesar 100%. Realisasi sebesar 100% ini telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Penyelesaian perkara pada Tahun 2025 yang sesuai dengan target menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah berjalan dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 dan Standar Operasional Prosedur Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah Perkara yang Diselesaikan	Jumlah Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu	2025	17	17	100%	100%	100%
	2024	14	14	100%	100%	100%
	2023	11	11	100%	100%	100%
	2022	16	16	100%	100%	100%

Tabel 29. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir Indikator 1.1

Jika dibandingkan dengan realisasi dan capaian tahun 2024 dan beberapa tahun terakhir, indikator Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu selalu mencapai target yang ditetapkan, sehingga capaiannya selalu 100%. Hal ini menunjukkan komitmen Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang untuk menyelesaikan perkara dengan cepat dan tidak melewati jangka waktu 5 (lima) bulan sesuai dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Renstra 2025-2029

Target jangka menengah untuk Periode 2025-2029 telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025-2029. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah pada Renstra 2025-2029 ditampilkan dalam tabel berikut.

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah Perkara yang Diselesaikan	Jumlah Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	Target Jangka Menengah pada Renstra	Realisasi	Capaian
Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu	2025	17	17	100%	100%	100%

Tabel 30. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Indikator 1.1

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah pada dokumen Renstra 2025-2029, indikator Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu telah mencapai target yang ditetapkan dengan realisasi dan capaian kinerja mencapai 100%.

Capaian "Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu" Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang mencapai 100% menunjukkan bahwa seluruh perkara pada periode pengukuran telah diselesaikan sesuai standar waktu yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan:

1. Efektivitas manajemen perkara, termasuk pengendalian jadwal persidangan dan musyawarah majelis hakim.
2. Kepatuhan hakim dan kepaniteraan terhadap standar waktu penyelesaian perkara.
3. Koordinasi yang baik antar unsur yudisial dan kepaniteraan, terutama dalam pengaturan minutasi dan administrasi perkara.
4. Optimalisasi pemanfaatan sistem informasi perkara (SIPP dan e-Court) dalam mendukung monitoring penyelesaian perkara.

Capaian 100% mencerminkan kinerja organisasi yang sangat baik dalam aspek ketepatan waktu penyelesaian perkara dan menunjukkan bahwa target jangka menengah dalam Renstra 2025–2029 telah tercapai sesuai *timeline*, sehingga diperlukan upaya menjaga konsistensi dan kualitas penyelesaian perkara agar capaian tersebut berkelanjutan.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Nasional

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional yang ada dalam dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029 ditampilkan dalam tabel berikut.

Indikator Kinerja	Tahun	Target pada Renstra MA	Target PTUN Pangkalpinang	Realisasi	Capaian
Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu	2025	96,46%	100%	100%	100%

Tabel 31. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional Indikator 1.1

Pada Tahun 2025, target "Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu" Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang ditetapkan sebesar 100%. Realisasi di akhir tahun 2025 adalah sebesar 100%, sehingga capaian kinerja indikator ini terpenuhi secara optimal, yakni sebesar 100%.

Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh perkara yang ditangani selama tahun 2025 telah diselesaikan sesuai standar waktu yang ditetapkan. Hal tersebut mencerminkan efektivitas pengendalian manajemen perkara, kedisiplinan majelis hakim dalam mematuhi jadwal persidangan dan musyawarah, serta dukungan administrasi kepaniteraan yang berjalan dengan baik.

Jika dibandingkan dengan target/standar nasional dalam dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025–2029 sebesar 96,46% untuk tahun 2025, capaian Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang berada di atas standar nasional. Penetapan target 100% menunjukkan komitmen Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dalam menjaga kinerja optimal dan tidak hanya mengikuti batas minimal nasional. Capaian yang sangat baik dan melampaui standar nasional ini menunjukkan tata kelola penyelesaian perkara yang efektif dan disiplin dengan komitmen untuk terus menjaga keberlanjutan kinerja secara konsisten dan berkualitas.

5. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

- **Analisis Penyebab Keberhasilan**
  - Kepatuhan hakim dan kepaniteraan terhadap standar waktu penyelesaian perkara sesuai dengan SOP Penyelesaian Perkara dengan mempedomani SEMA Nomor 2 Tahun 2014.
  - Efektivitas manajemen perkara, termasuk pengendalian jadwal persidangan dan musyawarah majelis hakim.
  - Koordinasi yang baik antar unsur hakim dan kepaniteraan, terutama dalam pengaturan minutasi dan administrasi perkara.
  - Optimalisasi pemanfaatan sistem informasi perkara (SIPP dan e-Court) dalam mendukung monitoring penyelesaian perkara.
  - Adanya monitoring dan evaluasi secara berjenjang mulai dari Panitera Muda, Panitera hingga Ketua dan Wakil Ketua yang dilakukan secara berkala untuk memastikan ketepatan waktu penyelesaian perkara.
  - Pengawasan bidang yang berjalan dengan baik oleh Hakim Pengawas Bidang.

- **Alternatif Solusi yang Akan Dilakukan**

Capaian indikator "Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu" pada tahun 2025 telah optimal dan berhasil mencapai target yang ditentukan, namun PTUN Pangkalpinang terus bertekad untuk meningkatkan kinerja di tahun mendatang dan mempertahankan capaian penyelesaian perkara secara tepat waktu sebesar 100%. Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang akan terus melakukan pengendalian jadwal persidangan secara ketat, monitoring dan evaluasi berkala berbasis sistem informasi perkara, serta penguatan koordinasi antara majelis hakim dan kepaniteraan guna memastikan konsistensi kinerja dan kualitas putusan.

Walaupun target telah tercapai 100%, strategi ke depan akan berfokus untuk:

- Menjaga konsistensi capaian
- Menyeimbangkan ketepatan waktu dan kualitas putusan
- Mengantisipasi peningkatan beban perkara
- Membangun sistem pengendalian yang berkelanjutan
- Meningkatkan kompetensi SDM

1.2. Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak

Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak adalah perbandingan jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dengan jumlah perkara yang diputus.

Salinan putusan didefinisikan tepat waktu apabila pengadilan telah menyiapkan salinan putusan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak perkara diputus. Perhitungan ketepatan waktu dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Dari data laporan perkara secara bulanan, dapat dihitung persentase salinan putusan yang disediakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang kepada para pihak tepat waktu.

Dari 17 (tujuh belas) perkara yang diselesaikan selama tahun 2025, 17 (tujuh belas) putusan disampaikan kepada para pihak tepat waktu. Rincian capaian secara bulanan dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 32. Data Pengiriman Salinan Putusan Selama Tahun 2025

No	Bulan	Jumlah Perkara yang Diselesaikan	Jumlah Salinan Putusan Tepat Waktu	Realisasi Penyediaan Salinan Putusan Tepat Waktu
1	Januari	0	0	N/A
2	Februari	1	1	100 %
3	Maret	2	2	100 %
4	April	0	0	N/A
5	Mei	2	2	100 %
6	Juni	1	1	100 %
7	Juli	0	0	N/A
8	Agustus	2	2	100 %
9	September	2	2	100 %
10	Oktober	3	3	100 %
11	November	2	2	100 %
12	Desember	2	2	100 %
Jumlah		17	17	100 %

1. **Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025**

Perhitungan realisasi dan capaian Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak dihitung sebagai berikut.

Perhitungan Realisasi:

$$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang Tersedia Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang Diputus}} \times 100\%$$

$$= \frac{17}{17} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Perhitungan Capaian: $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$

$$= \frac{100\%}{100\%} \times 100\%$$

$$= 100\ \%$$

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah Perkara yang Diselesaikan	Jumlah Salinan Putusan yang Tersedia Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak	2025	17	17	100%	100%	100%

Tabel 33. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Indikator 1.2

Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 100%. Selama tahun 2025, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah menyediakan 17 salinan putusan secara tepat waktu dari total 17 perkara yang diselesaikan. Dari data tersebut, maka realisasi Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu adalah sebesar 100% dengan capaian akhir sebesar 100%. Realisasi sebesar 100% ini telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah Perkara yang Disampaikan Tepat Waktu	Jumlah Putusan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Penyediaan/ Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak	2025	17	17	100%	100%	100%
	2024	14	14	100%	100%	100%
	2023	11	11	100%	100%	100%
	2022	16	16	100%	100%	100%

Tabel 34. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir Indikator 1.2

Jika dibandingkan dengan realisasi dan capaian tahun 2024 dan beberapa tahun terakhir, indikator “Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak” selalu berhasil merealisasikan target yang ditetapkan, sehingga capaiannya selalu 100%. Hal ini menunjukkan komitmen kuat Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang untuk menyediakan salinan putusan dengan cepat dan tidak melewati jangka waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Renstra 2025-2029

Target jangka menengah untuk Periode 2025-2029 telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025-2029. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah pada Renstra 2025-2029 ditampilkan dalam tabel berikut.

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah Perkara yang Diselesaikan	Jumlah Salinan Putusan yang Tersedia Tepat Waktu	Target Jangka Menengah pada Renstra	Realisasi	Capaian
Persentase Penyediaan/ Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak	2025	17	17	100%	100%	100%

Tabel 35. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Indikator 1.2

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah pada dokumen Renstra 2025-2029, indikator "Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak" telah berhasil merealisasikan target yang ditetapkan, yakni sebesar 100% sehingga capaian kinerja mencapai 100%.

Capaian "Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak" Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang mencapai 100% menunjukkan bahwa seluruh salinan putusan pada periode pengukuran telah diselesaikan sesuai standar waktu yang ditetapkan.

Capaian 100% mencerminkan kinerja organisasi yang sangat baik dalam aspek ketepatan waktu penyediaan salinan putusan dan menunjukkan bahwa target jangka menengah dalam Renstra 2025–2029 telah tercapai sesuai *timeline*, sehingga diperlukan upaya menjaga konsistensi agar capaian tersebut dapat berkelanjutan.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Nasional

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional yang ada dalam dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029 ditampilkan dalam tabel berikut.

Indikator Kinerja	Tahun	Target pada Renstra MA	Target PTUN Pangkalpinang	Realisasi	Capaian
Persentase Penyediaan/ Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak	2025	99,97%	100%	100%	100%

Tabel 36. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional Indikator 1.2

Pada Tahun 2025, target "Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak" Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang ditetapkan sebesar 100%. Realisasi di akhir tahun 2025 adalah sebesar 100%, sehingga capaian kinerja indikator ini terpenuhi secara optimal, yakni sebesar 100%.

Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh salinan putusan atas perkara yang ditangani selama tahun 2025 telah disediakan kepada para pihak sesuai standar waktu yang ditetapkan.

Jika dibandingkan dengan target/standar nasional dalam dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025–2029 sebesar 99,97% untuk tahun 2025, capaian Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang berada di atas standar nasional. Penetapan target 100% menunjukkan komitmen Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dalam menjaga kinerja optimal dan tidak hanya mengikuti batas minimal nasional. Capaian yang sangat baik dan melampaui standar nasional ini menunjukkan tata kelola penyelesaian perkara yang efektif dan disiplin dengan komitmen untuk terus menjaga keberlanjutan kinerja secara konsisten dan berkualitas.

5. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

- **Analisis Penyebab Keberhasilan**
  - Kepatuhan hakim dan kepaniteraan terhadap standar waktu penyampaian salinan dan petikan putusan sesuai dengan SOP Penyampaian Salinan Putusan dengan mempedomani SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.
  - Sinergi yang baik antara Majelis Hakim, Panitera Pengganti, dan staf kepaniteraan yang memastikan tidak terjadinya hambatan dalam proses pengetikan, penandatanganan, hingga pengiriman salinan.
  - Optimalisasi pemanfaatan sistem informasi perkara (SIPP dan e-Court) dalam mempercepat proses penyampaian salinan putusan kepada para pihak, baik secara elektronik maupun konvensional.
  - Adanya monitoring dan evaluasi secara berjenjang mulai dari Panitera Muda, Panitera hingga Ketua dan Wakil Ketua yang dilakukan secara berkala untuk memastikan ketepatan waktu penyampaian salinan putusan.
  - Adanya komitmen terhadap pelayanan publik yang prima dan budaya kerja yang berorientasi pada ketepatan waktu dan akuntabilitas yang mendorong seluruh aparatur untuk menjaga standar layanan sesuai target kinerja.
  - Pengawasan bidang yang berjalan dengan baik oleh Hakim Pengawas Bidang.

- **Alternatif Solusi yang Akan Dilakukan**

Capaian indikator “Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak” pada tahun 2025 telah optimal dan berhasil mencapai target yang ditentukan, namun PTUN Pangkalpinang terus bertekad untuk meningkatkan kinerja di tahun mendatang dan mempertahankan capaian penyediaan salinan putusan secara tepat waktu sebesar 100%. Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang akan terus melakukan monitoring dan evaluasi berkala berbasis sistem informasi perkara, serta penguatan koordinasi antara majelis hakim dan kepaniteraan guna memastikan konsistensi kinerja dalam upaya menyediakan salinan putusan tepat waktu.

Walaupun target telah tercapai 100%, untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja tersebut, perlu dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:

- Penguatan monitoring terhadap batas waktu minutasi dan pengiriman salinan putusan untuk mencegah potensi keterlambatan.
- Melakukan evaluasi berkala terhadap SOP agar lebih ringkas, jelas, dan adaptif terhadap perkembangan sistem peradilan elektronik.
- Mengadakan pembinaan teknis terkait percepatan minutasi, pemanfaatan aplikasi peradilan, dan manajemen waktu administrasi perkara sebagai upaya peningkatan kapasitas SDM kepaniteraan.
- Mendorong pemanfaatan e-Court secara maksimal untuk mempercepat penyampaian salinan putusan kepada para pihak.
- Evaluasi berkala dan identifikasi potensi hambatan (misalnya beban perkara meningkat atau keterbatasan SDM) serta menyiapkan langkah antisipatif sejak awal tahun.

Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat menjaga konsistensi capaian 100% serta memastikan pelayanan administrasi perkara tetap tepat waktu, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan para pencari keadilan.

1.3. Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak

Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak adalah perbandingan jumlah pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu dengan jumlah petikan/amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju. Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalu domisili elektronik para pihak, sedangkan kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirim kepada para pihak.

Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK dikatakan tepat waktu jika tidak melebihi batas waktu 14 (empat belas) hari sejak pengucapan putusan/penetapan.

Selama tahun 2025, jumlah pemberitahuan petikan/amar putusan banding, kasasi dan PK yang disampaikan tepat waktu adalah sebanyak 11 putusan banding, 6 putusan kasasi, dan 2 putusan PK dari total penerimaan 11 putusan banding, 6 putusan kasasi, dan 2 putusan PK.

GRAFIK 2. PENERIMAAN AMAR PUTUSAN TAHUN 2025



GRAFIK 3. PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN TAHUN 2025



Data realisasi pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan banding, kasasi, dan PK ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 37. Data Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Selama Tahun 2025

No	Bulan	Jumlah Petikan/Amar Putusan yang Diterima			Jumlah Petikan/Amar Putusan yang Disampaikan Tepat Waktu			Realisasi Pemberitahuan Amar/Putusan Tepat Waktu
		B	K	PK	B	K	PK	
1	Januari	2	1	-	2	1	-	100 %
2	Februari	1	-	-	1	-	-	100 %
3	Maret	-	-	-	-	-	-	N/A
4	April	-	-	-	-	-	-	N/A
5	Mei	1	-	-	1	-	-	100 %
6	Juni	1	-	1	1	-	1	100 %
7	Juli	1	-	-	1	-	-	100 %
8	Agustus	1	2	1	1	2	1	100 %
9	September	1	-	-	1	-	-	100 %
10	Oktober	1	-	-	1	-	-	100 %
11	November	-	-	-	-	-	-	N/A
12	Desember	2	3	-	2	3	-	100 %
Jumlah		**11**	**6**	**2**	**11**	**6**	**2**	**100 %**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perhitungan realisasi dan capaian Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak dihitung sebagai berikut.

Perhitungan Realisasi:

$$\frac{\text{Jumlah Pemberitahuan Petikan Atau Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi, PK yang Disampaikan Kepada Para Pihak Secara Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Petikan Atau Amar Putusan Banding, Kasasi, dan PK yang Diterima Pengadilan Pengaju}} \times 100\%$$

$$= \frac{19}{19} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Perhitungan Capaian: $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$

$$= \frac{100\%}{100\%} \times 100\%$$

$$= 100\ \%$$

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah Petikan Putusan yang Diterima	Jumlah Petikan Putusan yang Diberitahukan Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak	2025	19	19	100%	100%	100%

Tabel 38. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Indikator 1.3

Indikator kinerja "Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) Secara Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak" ditetapkan dengan target sebesar 100% pada Tahun 2025. Selama Tahun 2025, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang menerima sebanyak 11 putusan banding, 6 putusan kasasi, dan 2 putusan Peninjauan Kembali (PK). Seluruh pemberitahuan petikan/amar putusan tersebut telah disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, realisasi indikator ini mencapai 100%, sehingga tingkat capaian kinerja Tahun 2025 adalah 100%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan konsistensi dan efektivitas pengelolaan administrasi perkara serta optimalisasi pengawasan internal dalam memastikan tidak terjadi keterlambatan penyampaian putusan kepada para pihak.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator "Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) Secara Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak" merupakan indikator kinerja utama baru yang termuat dalam Renstra Mahkamah Agung Republik Indonesia dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang baru ditetapkan pada Oktober 2025.

Oleh karena indikator ini belum tercantum dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya, maka tidak tersedia data target, realisasi, maupun capaian tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya untuk dilakukan analisis perbandingan tren kinerja. Sehubungan dengan hal tersebut, data "Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) Secara Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak" tahun 2025 merupakan *baseline* awal pelaksanaan pengukuran indikator ini.

Dengan demikian, capaian tahun 2025 akan menjadi dasar evaluasi dan pembanding bagi pengukuran kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Renstra 2025-2029

Target jangka menengah untuk Periode 2025-2029 telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025-2029. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah pada Renstra 2025-2029 ditampilkan dalam tabel berikut.

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah Petikan Putusan yang Diterima	Jumlah Petikan Putusan yang Diberitahukan Tepat Waktu	Target Jangka Menengah pada Renstra	Realisasi	Capaian
Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak	2025	19	19	100%	100%	100%

Tabel 39. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Indikator 1.3

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah pada dokumen Renstra 2025-2029, indikator "Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak" telah berhasil merealisasikan target yang ditetapkan, yakni sebesar 100% sehingga capaian kinerja mencapai 100%.

Capaian "Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak" Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang mencapai 100% menunjukkan bahwa seluruh amar/petikan putusan banding, kasasi maupun PK pada periode pengukuran telah diberitahukan kepada para pihak sesuai standar waktu yang ditetapkan.

Capaian 100% mencerminkan kinerja organisasi yang sangat baik dalam aspek ketepatan waktu pemberitahuan petikan/amar putusan banding, kasasi dan PK serta menunjukkan bahwa target jangka menengah dalam Renstra 2025–2029 telah tercapai sesuai *timeline*.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Nasional

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional yang ada dalam dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029 ditampilkan dalam tabel berikut.

Indikator Kinerja	Tahun	Target pada Renstra MA	Target PTUN Pangkalpinang	Realisasi	Capaian
Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak	2025	91,01%	100%	100%	100%

Tabel 40. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional Indikator 1.3

Pada Tahun 2025, target "Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak" Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang ditetapkan sebesar 100%. Realisasi di akhir tahun 2025 adalah sebesar 100%, sehingga capaian kinerja indikator ini terpenuhi secara optimal, yakni sebesar 100%.

Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh amar/petikan putusan banding, kasasi maupun PK pada periode pengukuran telah diberitahukan kepada para pihak sesuai standar waktu yang ditetapkan.

Jika dibandingkan dengan target/standar nasional dalam dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025–2029 sebesar 91,01% untuk tahun 2025, capaian Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang berada di atas standar nasional. Penetapan target 100% menunjukkan komitmen Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dalam menjaga kinerja optimal dan tidak hanya mengikuti batas minimal nasional. Capaian yang sangat baik dan melampaui standar nasional ini menunjukkan tata kelola administrasi perkara yang efektif dan disiplin dengan komitmen untuk terus menjaga keberlanjutan kinerja secara konsisten dan berkualitas.

5. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

- **Analisis Penyebab Keberhasilan**

Keberhasilan pencapaian indikator "Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) Secara Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak" sebesar 100% pada Tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Penerapan monitoring administrasi perkara secara berkala, sehingga setiap putusan yang diterima segera diproses dan dijadwalkan pengirimannya tanpa penundaan.
2. Optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP dan sarana elektronik, yang mempercepat pencatatan dan pengendalian tenggat waktu pengiriman.
3. Koordinasi yang efektif antara kepaniteraan dan bagian terkait, sehingga tidak terjadi hambatan administratif dalam penyampaian pemberitahuan kepada para pihak.
4. Komitmen aparatur terhadap standar pelayanan dan kepatuhan terhadap SOP, yang memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan.

Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan administrasi perkara telah berjalan efektif, terkontrol, dan akuntabel, sehingga mampu menjamin ketepatan waktu penyampaian putusan kepada para pihak.

- **Alternatif Solusi yang Akan Dilakukan**

Capaian indikator "Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) Secara Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak" pada tahun 2025 telah optimal dan berhasil mencapai target yang ditentukan, namun Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang terus bertekad untuk meningkatkan kinerja di tahun mendatang dan mempertahankan capaian dengan terus melakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk menjaga ketepatan waktu pemberitahuan petikan/amar putusan banding, kasasi, dan PK kepada para pihak.

1.4. Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan

Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan adalah perbandingan jumlah putusan yang diunggah pada Direktori Putusan dengan jumlah putusan yang telah diminutasi. Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan unggah putusan pada Direktori Putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi dengan dasar hukum pelaksanaan berupa Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

Dari 17 (tujuh belas) putusan yang telah diminutasi, 17 (tujuh belas) putusan telah diunggah pada Direktori Putusan. Rincian capaian secara bulanan dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 41. Data Pengunggahan Putusan ke Direktori Putusan Selama Tahun 2025

No	Bulan	Jumlah Putusan yang Telah Diminutasi	Jumlah Putusan yang Diunggah pada Direktori Putusan	Realisasi Pengunggahan Putusan ke Direktori Putusan
1	Januari	0	0	N/A
2	Februari	1	1	100 %
3	Maret	2	2	100 %
4	April	0	0	N/A
5	Mei	2	2	100 %
6	Juni	1	1	100 %
7	Juli	0	0	N/A
8	Agustus	2	2	100 %
9	September	2	2	100 %
10	Oktober	3	3	100 %
11	November	2	2	100 %
12	Desember	2	2	100 %
Jumlah		17	17	100 %

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perhitungan realisasi dan capaian "Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan" dihitung sebagai berikut.

Perhitungan Realisasi:

$$\frac{\text{Jumlah Putusan yang Diunggah pada Direktori Putusan}}{\text{Jumlah Putusan yang Telah Diminutasi}} \times 100\%$$

$$= \frac{17}{17} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Perhitungan Capaian: $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$

$$= \frac{100\%}{100\%} \times 100\%$$

$$= 100\ \%$$

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah Putusan yang Telah Diminutasi	Jumlah Putusan yang Diunggah pada Direktori Putusan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan	2025	17	17	100%	100%	100%

Tabel 42. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Indikator 1.4

Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 100%. Selama tahun 2025, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah mengunggah 17 putusan ke Direktori Putusan dari seluruh 17 putusan yang telah diminutasi. Dari data tersebut, maka realisasi "Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan" adalah sebesar 100% dengan capaian akhir sebesar 100%. Realisasi sebesar 100% ini telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator “Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan” merupakan indikator kinerja utama baru yang termuat dalam Renstra Mahkamah Agung Republik Indonesia dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang baru ditetapkan pada Oktober 2025.

Oleh karena indikator ini belum tercantum dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya, maka tidak tersedia data target, realisasi, maupun capaian tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya untuk dilakukan analisis perbandingan tren kinerja. Sehubungan dengan hal tersebut, data Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan tahun 2025 merupakan *baseline* awal pelaksanaan pengukuran indikator ini.

Dengan demikian, capaian tahun 2025 akan menjadi dasar evaluasi dan pembanding bagi pengukuran indikator kinerja ini di tahun-tahun berikutnya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Renstra 2025-2029

Target jangka menengah untuk Periode 2025-2029 telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025-2029. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah pada Renstra 2025-2029 ditampilkan dalam tabel berikut.

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah Putusan yang Telah Diminutasi	Jumlah Putusan yang Diunggah pada Direktori Putusan	Target Jangka Menengah pada Renstra	Realisasi	Capaian
Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan	2025	17	17	100%	100%	100%

Tabel 43. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Indikator 1.4

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah pada dokumen Renstra 2025-2029, indikator "Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan" telah berhasil merealisasikan target yang ditetapkan, yakni sebesar 100% sehingga capaian kinerja mencapai 100%.

Capaian "Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan" Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang mencapai 100% menunjukkan bahwa seluruh putusan pada periode pengukuran telah diunggah pada Direktori Putusan sebagai bagian dari prinsip keterbukaan informasi perkara.

Capaian 100% mencerminkan kinerja organisasi yang sangat baik dalam aspek kedisiplinan pengunggahan putusan dan menunjukkan bahwa target jangka menengah dalam Renstra 2025–2029 telah tercapai sesuai *timeline*.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Nasional

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional yang ada dalam dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029 ditampilkan dalam tabel berikut.

Indikator Kinerja	Tahun	Target pada Renstra MA	Target PTUN Pangkalpinang	Realisasi	Capaian
Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan	2025	90,11%	100%	100%	100%

Tabel 44. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional Indikator 1.4

Pada Tahun 2025, target "Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan" Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang ditetapkan sebesar 100%. Realisasi di akhir tahun 2025 adalah sebesar 100%, sehingga capaian kinerja indikator ini terpenuhi secara optimal, yakni sebesar 100%.

Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh putusan atas perkara yang ditangani selama tahun 2025 telah diunggah ke Direktori Putusan.

Jika dibandingkan dengan target/standar nasional dalam dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025–2029 sebesar 90,11% untuk tahun 2025, capaian Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang berada di atas standar nasional. Penetapan target 100% menunjukkan komitmen Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dalam menjaga kinerja optimal dan tidak hanya mengikuti batas minimal nasional. Capaian yang sangat baik dan melampaui standar nasional ini menunjukkan tata kelola administrasi perkara yang efektif dan disiplin dengan komitmen untuk terus menjaga keberlanjutan kinerja secara konsisten dan berkualitas.

5. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

- **Analisis Penyebab Keberhasilan**

  Keberhasilan pencapaian indikator Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan sebesar 100% Tahun 2025 didukung oleh:

  1. Disiplin pelaksanaan minutasi dan unggah putusan.
  2. Pemantauan berkala oleh pimpinan dan kepaniteraan, sehingga tidak terdapat putusan yang terlewat dari kewajiban publikasi.
  3. Komitmen terhadap asas transparansi peradilan, yang mendorong aparatur untuk memastikan seluruh putusan dipublikasikan tepat waktu.

  Faktor-faktor tersebut menunjukkan pengelolaan administrasi publikasi putusan telah berjalan tertib, terkontrol, dan sesuai standar yang ditetapkan.

- **Alternatif Solusi yang Akan Dilakukan**

  Walaupun target telah tercapai 100%, untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja tersebut, perlu dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:

  - Membuat register monitoring khusus unggah Direktori Putusan, berisi tanggal minutasi dan tanggal unggah untuk memastikan tidak terjadi keterlambatan.
  - Menunjuk admin Direktori Putusan untuk memantau status putusan di Direktori Putusan. Jika terdapat putusan yang gagal tersinkronisasi dari SIPP, maka admin Direktori Putusan harus segera melakukan unggah putusan secara manual ke Direktori Putusan.
  - Menetapkan batas waktu internal di mana putusan harus diunggah ke Direktori Putusan bersamaan dengan tanggal minutasi.
  - Melakukan evaluasi bulanan oleh Panitera, untuk memastikan seluruh putusan yang telah diminutasi telah terunggah 100%.

1.5. Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara

Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara adalah perbandingan jumlah permohonan eksekusi putusan TUN yang telah diselesaikan dengan jumlah putusan perkara TUN yang dimohonkan eksekusi.

Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi:

1. Berhasil dilaksanakan eksekusi
   - Eksekusi yang dilaksanakan sebelum terbitnya Penetapan Ketua (eksekusi otomatis).
   - Eksekusi yang dilaksanakan setelah Penetapa Ketua (eksekusi upaya paksa).
   - Eksekusi sampai pada bersurat kepada Presiden dan Lembaga Perwakilan Rakyat.
2. Dicabut
3. Dicoret dari register, termasuk *non executable*.

Selama tahun 2025, hanya terdapat 1 (satu) permohonan eksekusi. Permohonan eksekusi tersebut telah selesai ditindaklanjuti pada Bulan September 2025. Rincian capaian secara bulanan dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 45. Data Penyelesaian Permohonan Eksekusi Selama Tahun 2025

No	Bulan	Jumlah Permohonan Eksekusi	Jumlah Permohonan Eksekusi yang Diselesaikan	Realisasi Penyelesaian Permohonan Eksekusi
1	Januari	0	0	N/A
2	Februari	0	0	N/A
3	Maret	0	0	N/A
4	April	0	0	N/A
5	Mei	0	0	N/A
6	Juni	0	0	N/A
7	Juli	0	0	N/A
8	Agustus	0	0	N/A
9	September	1	1	100 %
10	Oktober	0	0	N/A
11	November	0	0	N/A
12	Desember	0	0	N/A
Jumlah		**1**	**1**	**100 %**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perhitungan realisasi dan capaian "Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara" dihitung sebagai berikut.

Perhitungan Realisasi:

$$\frac{\text{Jumlah Permohonan Eksekusi Putusan TUN yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Putusan Perkara TUN yang Dimohonkan Eksekusi}} \times 100\%$$

$$= \frac{1}{1} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Perhitungan Capaian: $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$

$$= \frac{100\%}{100\%} \times 100\%$$

$$= 100\ \%$$

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah Permohonan Eksekusi	Jumlah Permohonan Eksekusi yang Diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara	2025	1	1	100%	100%	100%

Tabel 46. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Indikator 1.5

Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 100%. Selama tahun 2025, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah menyelesaikan 1 permohonan eksekusi TUN dari total 1 putusan perkara TUN yang dimohonkan eksekusi, yakni perkara Nomor 16/G/2024/PTUN.PGP. Dari data tersebut, maka realisasi "Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara" adalah sebesar 100% dengan capaian akhir sebesar 100%. Realisasi sebesar 100% ini telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah Permohonan Eksekusi	Jumlah Permohonan Eksekusi yang Diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara	2025	1	1	100%	100%	100%
	2024	1	1	100%	100%	100%
	2023	0	0	100%	N/A	N/A
	2022	1	1	10%	6,25%	62,5%

Tabel 47. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir Indikator 1.5

Realisasi dan capaian "Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara" pada tahun 2025 sebesar 100%. Capaian tersebut konsisten dengan tahun 2024 yang juga mencapai 100%, sehingga menunjukkan stabilitas kinerja dalam penyelesaian permohonan eksekusi secara tuntas. Pada tahun 2023 tidak terdapat permohonan eksekusi (realisasi N/A), sehingga persentase capaian pada tahun tersebut tidak dapat didefinisikan (N/A). Indikator Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) menjadi sulit untuk diukur ketika tidak ada putusan perkara Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) yang dimohonkan eksekusi. Namun, dikarenakan tidak adanya input (perkara yang dimohonkan eksekusi), maka capaian kinerja tidak dapat dinilai buruk karena bukan merupakan kesalahan organisasi.

Jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 62,5%, capaian tahun 2024 dan 2025 menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini mencerminkan perbaikan dalam pengelolaan proses eksekusi, peningkatan koordinasi, serta komitmen satuan kerja dalam memastikan setiap permohonan eksekusi dapat diselesaikan secara optimal.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Renstra 2025-2029

Target jangka menengah untuk Periode 2025-2029 telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025-2029. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah pada Renstra 2025-2029 ditampilkan dalam tabel berikut.

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah Permohonan Eksekusi	Jumlah Permohonan Eksekusi yang Diselesaikan	Target Jangka Menengah pada Renstra	Realisasi	Capaian
Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara	2025	1	1	100%	100%	100%

Tabel 48. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Indikator 1.5

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah pada dokumen Renstra 2025-2029, indikator "Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara" telah berhasil merealisasikan target jangka menengah yang ditetapkan, yakni sebesar 100% sehingga capaian kinerja mencapai 100%.

Realisasi "Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara" Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang mencapai 100% menunjukkan bahwa seluruh permohonan eksekusi telah diselesaikan secara tuntas.

Dengan demikian, kinerja pada tahun berjalan telah selaras dengan sasaran strategis yang direncanakan, sekaligus menunjukkan komitmen Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dalam menjaga konsistensi penyelesaian permohonan eksekusi secara optimal.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Nasional

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional yang ada dalam dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029 ditampilkan dalam tabel berikut.

Indikator Kinerja	Tahun	Target pada Renstra MA	Target PTUN Pangkalpinang	Realisasi	Capaian
Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara	2025	39,55%	100%	100%	100%

Tabel 49. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional Indikator 1.5

Pada Tahun 2025, target "Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara" Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang ditetapkan sebesar 100%. Realisasi di akhir tahun 2025 adalah sebesar 100%, sehingga capaian kinerja indikator ini terpenuhi secara optimal, yakni sebesar 100%.

Realisasi ini menunjukkan bahwa seluruh permohonan eksekusi telah ditindaklanjuti secara tuntas. Capaian ini jauh melampaui target/standar nasional yang ditetapkan dalam Renstra Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029 sebesar 39,55%. Dengan demikian, kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tidak hanya memenuhi standar nasional, tetapi juga menunjukkan tingkat efektivitas penyelesaian permohonan eksekusi yang sangat optimal dibandingkan rata-rata target nasional.

5. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

- **Analisis Penyebab Keberhasilan**

  Capaian Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara tahun 2025 sebesar 100% menunjukkan bahwa seluruh permohonan eksekusi yang diterima dapat diselesaikan secara tuntas. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain:

  1. Pengelolaan administrasi perkara yang tertib dan responsif

     Setiap permohonan eksekusi segera ditindaklanjuti sesuai tahapan dan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak terjadi penumpukan atau keterlambatan penyelesaian.

  2. Koordinasi yang efektif antara Majelis Hakim dan Kepaniteraan

     Sinergi yang baik mempercepat proses penanganan dan pemantauan perkembangan pelaksanaan eksekusi.

  3. Pengawasan dan monitoring pimpinan secara berkala

     Adanya kontrol internal memastikan setiap permohonan berada dalam jalur penyelesaian yang tepat waktu.

  4. Komitmen terhadap kepastian hukum dan pelayanan publik

     Orientasi pada penyelesaian perkara secara optimal mendorong aparatur untuk memastikan setiap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme eksekusi.

  Dengan dukungan tata kelola administrasi yang baik, koordinasi internal yang solid, serta komitmen pelayanan yang kuat, capaian 100% tersebut mencerminkan efektivitas kinerja dalam menjamin pelaksanaan putusan yang memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

- **Alternatif Solusi yang Akan Dilakukan**

Capaian indikator “Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara” pada tahun 2025 telah optimal dan berhasil mencapai target yang ditentukan, namun PTUN Pangkalpinang terus bertekad untuk meningkatkan kinerja di tahun mendatang dan mempertahankan capaian Penyelesaian Permohonan Eksekusi sebesar 100%. Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang akan melakukan beberapa upaya peningkatan kinerja berupa:

1. Penguatan sistem monitoring permohonan eksekusi
2. Melakukan evaluasi dan penyempurnaan SOP agar proses administrasi dan tahapan pelaksanaan eksekusi lebih efektif dan terdokumentasi dengan baik.
3. Peningkatan koordinasi internal
   Mengintensifkan komunikasi antara Majelis Hakim, Panitera, dan staf kepaniteraan untuk mempercepat penyelesaian serta mengantisipasi potensi hambatan.
4. Mitigasi risiko hambatan eksternal
   Mengidentifikasi faktor eksternal yang dapat menghambat pelaksanaan eksekusi serta menyiapkan langkah antisipatif sejak awal proses.
5. Evaluasi berkala terhadap kinerja eksekusi
   Melakukan review triwulanan guna menjaga konsistensi capaian dan memastikan standar pelayanan tetap terjaga.

Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat mempertahankan capaian 100% serta meningkatkan kualitas penyelesaian permohonan eksekusi secara berkelanjutan.

1.6. Persentase Perkara Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court

Persentase Perkara Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court adalah perbandingan jumlah perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan menggunakan e-Court dengan jumlah perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan.

Adapun jumlah perkara tata usaha negara yang mengajukan upaya hukum banding meliputi jumlah perkara tata usaha negara yang mengajukan upaya hukum banding secara elektronik melalui e-Court dan perkara tata usaha negara yg mengajukan upaya hukum banding secara konvensional.

Selama tahun 2025, terdapat 15 pengajuan perkara TUN tingkat pertama dan 9 perkara banding yang diajukan menggunakan e-Court dari total pengajuan 15 perkara tingkat pertama dan 9 perkara tingkat banding pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. Dengan kata lain, semua perkara tata usaha negara, baik tingkat pertama maupun tingkat banding telah diajukan menggunakan e-Court. Rincian capaian secara bulanan dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 50. Data Penggunaan e-Court Selama Tahun 2025

No	Bulan	Jumlah Pengajuan Perkara		Jumlah Pengajuan Perkara Menggunakan e-Court		Realisasi Penggunaan e-Court
		Tk. Pertama	Tk Banding	Tk. Pertama	Tk Banding	
1	Januari	0	0	0	0	N/A
2	Februari	1	1	1	1	100 %
3	Maret	0	1	0	1	100 %
4	April	1	0	1	0	100 %
5	Mei	1	2	1	2	100 %
6	Juni	1	0	1	0	100 %
7	Juli	2	1	2	1	100 %
8	Agustus	1	1	1	1	100 %
9	September	2	0	2	0	100 %
10	Oktober	4	1	4	1	100 %
11	November	2	1	2	1	100 %
12	Desember	0	1	0	1	100 %
Jumlah		**15**	**9**	**15**	**9**	**100 %**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perhitungan realisasi dan capaian "Persentase Perkara Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court" dihitung sebagai berikut.

Perhitungan Realisasi:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Diajukan Menggunakan e-Court}}{\text{Jumlah Perkara Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Diajukan}} \times 100\%$$

$$= \frac{24}{24} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Perhitungan Capaian: $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$

$$= \frac{100\%}{100\%} \times 100\%$$

$$= 100\ \%$$

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah Pengajuan Perkara		Jumlah Pengajuan Perkara Menggunakan e-Court		Target	Realisasi	Capaian
		Tk. Pertama	Tk. Banding	Tk. Pertama	Tk. Banding			
Persentase Perkara Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court	2025	15	9	15	9	100%	100%	100%

Tabel 51. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Indikator 1.6

Persentase Perkara Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 100%. Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah menerima pendaftaran 15 perkara tingkat pertama dan 9 perkara tingkat banding melalui e-Court dari total pengajuan 15 perkara tingkat pertama dan 9 perkara tingkat banding yang diterima Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang selama tahun 2025, maka realisasi Persentase Perkara Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court" adalah sebesar 100% dengan capaian akhir sebesar 100%. Realisasi sebesar 100% ini telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

2. **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir**

Indikator "Persentase Perkara Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court" merupakan indikator kinerja utama baru yang termuat dalam Renstra Mahkamah Agung Republik Indonesia dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang baru ditetapkan pada Oktober 2025.

Oleh karena indikator ini belum tercantum dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya, maka tidak tersedia data target, realisasi, maupun capaian tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya untuk dilakukan analisis perbandingan tren kinerja. Sehubungan dengan hal tersebut, data Persentase Perkara Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court tahun 2025 merupakan *baseline* awal pelaksanaan pengukuran indikator ini.

Dengan demikian, capaian tahun 2025 akan menjadi dasar evaluasi dan pembanding bagi pengukuran indikator kinerja ini di tahun-tahun berikutnya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Renstra 2025-2029

Target jangka menengah untuk Periode 2025-2029 telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025-2029. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah pada Renstra 2025-2029 ditampilkan dalam tabel berikut.

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah Pengajuan Perkara		Jumlah Pengajuan Perkara Menggunakan e-Court		Target Jangka Menengah pada Renstra	Realisasi	Capaian
		Tk. Pertama	Tk. Banding	Tk. Pertama	Tk. Banding			
Persentase Perkara Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court	2025	15	9	15	9	100%	100%	100%

Tabel 52. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Indikator 1.6

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah pada dokumen Renstra 2025-2029, indikator "Persentase Perkara Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court" telah berhasil merealisasikan target jangka menengah yang ditetapkan, yakni sebesar 100% sehingga capaian kinerja mencapai 100%.

Realisasi "Persentase Perkara Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court" Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang mencapai 100% menunjukkan bahwa seluruh pengajuan perkara, baik tingkat pertama maupun tingkat banding telah dilakukan melalui sistem elektronik dengan menggunakan e-Court.

Capaian ini selaras dengan target jangka menengah dalam Renstra yang ditetapkan sebesar 100%. Dengan demikian, kinerja yang dicapai tidak hanya memenuhi, tetapi juga menunjukkan konsistensi terhadap komitmen transformasi digital peradilan, khususnya dalam optimalisasi layanan berbasis e-Court secara menyeluruh dan berkelanjutan.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Nasional

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional yang ada dalam dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029 ditampilkan dalam tabel berikut.

Indikator Kinerja	Tahun	Target pada Renstra MA	Target PTUN Pangkalpinang	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court	2025	95,76%	100%	100%	100%

Tabel 53. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional Indikator 1.6

Pada Tahun 2025, target "Persentase Perkara Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court" Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang ditetapkan sebesar 100%. Realisasi di akhir tahun 2025 adalah sebesar 100%, sehingga capaian kinerja indikator ini terpenuhi secara optimal, yakni sebesar 100%.

Realisasi ini menunjukkan bahwa seluruh pengajuan perkara, baik tingkat pertama maupun tingkat banding telah dilakukan melalui sistem elektronik dengan menggunakan e-Court. Capaian ini berhasil melampaui target/standar nasional yang ditetapkan dalam Renstra Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029 sebesar 95,76%. Dengan demikian, kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tidak hanya memenuhi standar nasional, tetapi juga menunjukkan konsistensi terhadap komitmen transformasi digital peradilan, khususnya dalam optimalisasi layanan berbasis e-Court secara menyeluruh.

5. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

- **Analisis Penyebab Keberhasilan**

Capaian 100% pada indikator penggunaan e-Court untuk seluruh perkara Tata Usaha Negara tingkat pertama dan tingkat banding menunjukkan keberhasilan transformasi layanan peradilan berbasis digital secara optimal dan menyeluruh. Keberhasilan ini didukung oleh beberapa aspek berikut:

1. Komitmen Implementasi Kebijakan Digitalisasi Peradilan

   Seluruh pengajuan perkara telah dilakukan melalui sistem e-Court, yang merupakan bagian dari kebijakan modernisasi peradilan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya kepatuhan dan konsistensi satuan kerja dalam melaksanakan arah kebijakan strategis nasional.

2. Kesiapan Infrastruktur dan SDM

   Capaian penuh mencerminkan tersedianya infrastruktur teknologi informasi yang memadai, jaringan yang stabil, serta kesiapan sumber daya manusia dalam mengoperasikan dan mengawal proses administrasi perkara secara elektronik.

3. Efektivitas Sosialisasi dan Pendampingan Pengguna e-Court

   Tingkat penggunaan e-Court 100% menunjukkan bahwa para pencari keadilan, advokat, maupun pihak terkait telah memahami dan menerima mekanisme e-Court. Ini tidak terlepas dari upaya sosialisasi, bimbingan teknis, serta pelayanan bantuan yang berkelanjutan yang diberikan oleh petugas PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

Capaian 100% ini selaras dengan target jangka menengah dalam Renstra, yang menunjukkan bahwa perencanaan strategis telah diterjemahkan secara efektif ke dalam pelaksanaan operasional. Secara keseluruhan, keberhasilan ini mencerminkan tata kelola peradilan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

- **Alternatif Solusi yang Akan Dilakukan**

Capaian indikator “Persentase Perkara Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court” pada tahun 2025 telah optimal dan berhasil mencapai target yang ditentukan. Meskipun capaian penggunaan e-Court telah mencapai 100%, diperlukan langkah strategis untuk menjaga konsistensi dan meningkatkan kualitas implementasi. Adapun alternatif solusi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Infrastruktur Teknologi Informasi

   Meningkatkan kapasitas jaringan, keamanan sistem, serta melakukan pemeliharaan berkala guna mengantisipasi gangguan teknis yang dapat menghambat layanan.

2. Peningkatan Kompetensi SDM

   Menyelenggarakan pelatihan lanjutan dan pembaruan pengetahuan bagi aparatur agar mampu mengikuti perkembangan sistem serta regulasi terbaru terkait layanan peradilan elektronik.

3. Optimalisasi Layanan Bantuan dan Sosialisasi

   Memberikan pendampingan kepada pengguna baru, khususnya pencari keadilan yang belum familiar dengan sistem elektronik, sehingga akses terhadap e-Court tetap inklusif dan mudah dijangkau.

4. Penguatan Sistem Pengawasan Serta Monitoring dan Evaluasi Kinerja

   Mengintegrasikan indikator penggunaan e-Court ke dalam sistem pengawasan internal guna memastikan konsistensi pelaksanaan dan mencegah potensi penurunan capaian di masa mendatang.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan implementasi e-Court tidak hanya terjaga pada tingkat 100%, tetapi juga semakin efektif, efisien, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Pencapaian Sasaran Strategis 2 “Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik” pada Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 54 berikut.

TABEL 54
CAPAIAN KINERJA UTAMA
MENINGKATNYA TINGKAT KEYAKINAN DAN KEPERCAYAAN PUBLIK

Sasaran II Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik				
No.	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**
1.	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	3,78	3,88	102,65%
Rata-rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis II				**102,65%**

2.1. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan

Indeks kepuasan pengguna layanan adalah suatu indeks yang mengukur tingkat kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. Indeks kepuasan pengguna layanan diperoleh melalui survey kepuasan masyarakat yang dilaksanakan secara berkala per triwulan dengan penilaian terhaadap 9 (sembilan) ruang lingkup pelayanan, yaitu:

1. Persyaratan
2. Sistem Mekanisme/Prosedur
3. Waktu Penyelesaian
4. Tarif
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
6. Kompetensi Pelaksana
7. Perilaku Pelaksana
8. Sarana dan Prasarana
9. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

Dari hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025, diperoleh data realisasi sebagai berikut.

Tabel 55. Realisasi Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Tahun 2025

Indikator	Periode			
	Triwulan I (Januari s/d Maret)	Triwulan II (April s/d Juni)	Triwulan III (Juli s/d September)	Triwulan IV (Oktober s/d Desember)
Persyaratan	3,80	3,96	3,88	3,82
Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3,86	3,96	3,88	3,86
Waktu Penyelesaian	3,84	3,98	3,82	3,84
Biaya/Tarif	3,81	3,91	3,76	3,81
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,85	3,96	3,79	3,84
Kompetensi Pelaksana	3,91	3,93	3,82	3,82
Perilaku Pelaksana	3,99	4,00	3,94	3,86
Sarana dan Prasarana	3,92	3,96	3,85	3,84
Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	3,90	3,98	3,85	3,82
Nilai Indeks Per Triwulan	**3,88**	**3,95**	**3,84**	**3,84**
Realisasi Indeks Rata-Rata Tahunan				**3,88**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Dari data di atas, maka capaian Indeks Kepuasan Pengguna Layanan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan dihitung sebagai berikut.

Perhitungan Capaian: $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$

$= \frac{3,88}{3,78} \times 100\%$

$= 102,65\ \%$

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	2025	3,78	3,88	102,65%

Tabel 56. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Indikator 2.1

Persentase Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 3,78. Realisasi Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang rata-rata selama Tahun 2025 adalah 3,88, maka capaian "Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan" adalah sebesar 102,65%. Realisasi sebesar 3,88 ini telah berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Dari capaian ini, dapat disimpulkan bahwa masyarakat puas terhadap layanan peradilan yang diberikan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	2025	3,78	3,88	102,65%
	2024	90%	91,25%	101,38%
	2023	90%	91,55%	101,72%
	2022	80%	92%	115%

Tabel 57. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir Indikator 2.1

Berdasarkan data capaian selama empat tahun terakhir, kinerja Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan menunjukkan tren yang konsisten melampaui target setiap tahunnya. Pada tahun 2025, target indeks ditetapkan sebesar 3,78, dengan realisasi 3,88, sehingga capaian kinerja mencapai 102,65%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pengguna layanan berada di atas standar yang telah direncanakan.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya:

- Tahun 2024: Target 90%, realisasi 91,25%, capaian 101,38%.
- Tahun 2023: Target 90%, realisasi 91,55%, capaian 101,72%.
- Tahun 2022: Target 80%, realisasi 92%, capaian 115%.

Secara umum dapat dianalisis bahwa:

1. Setiap tahun, realisasi selalu berhasil melampaui target, yang menandakan kualitas layanan secara konsisten memenuhi bahkan melampaui standar yang ditetapkan.
2. Tahun 2022 mencatat capaian tertinggi secara persentase (115%), karena target yang relatif lebih rendah (80%).
3. Pada periode 2023–2024, meskipun target meningkat menjadi 90%, realisasi tetap stabil di atas 91%, menunjukkan keberlanjutan kualitas layanan.
4. Tahun 2025 menggunakan skala indeks (3,78–3,88), namun tetap menunjukkan kinerja yang melampaui target dengan capaian di atas 100%, yang mengindikasikan peningkatan mutu layanan dan persepsi positif masyarakat. Capaian tahun 2025 juga meningkat dari capaian tahun 2024 dan 2023.

Dengan demikian, secara komparatif, kinerja indikator ini menunjukkan stabilitas dan konsistensi peningkatan kualitas pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, serta keberhasilan dalam mempertahankan tingkat kepuasan pengguna di atas standar yang ditetapkan dari tahun ke tahun.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Renstra 2025-2029

Target jangka menengah untuk Periode 2025-2029 telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025-2029. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah pada Renstra 2025-2029 ditampilkan dalam tabel berikut.

Indikator Kinerja	Tahun	Target Jangka Menengah pada Renstra	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	2025	3,78	3,88	102,65%

Tabel 58. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Indikator 2.1

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah pada dokumen Renstra 2025-2029, indikator "Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan" telah berhasil melampaui target jangka menengah yang ditetapkan dengan realisasi sebesar 3,88 dari target 3,78, sehingga capaian kinerja mencapai 102,65%.

Realisasi "Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan" Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang mencapai 102,65% mencerminkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan telah memenuhi bahkan melebihi standar layanan yang direncanakan, serta menunjukkan komitmen berkelanjutan dalam meningkatkan profesionalisme, transparansi, dan responsivitas layanan kepada para pencari keadilan.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Nasional

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional yang ada dalam dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029 ditampilkan dalam tabel berikut.

Indikator Kinerja	Tahun	Target pada Renstra MA	Target PTUN Pangkalpinang	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	2025	3,78	3,78	3,88	102,65%

Tabel 59. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional Indikator 2.1

Pada Tahun 2025, target "Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan" Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang ditetapkan sebesar 3,78. Realisasi di akhir tahun 2025 adalah sebesar 3,88, sehingga capaian kinerja indikator ini terpenuhi secara optimal, yakni sebesar 102,65%.

Capaian Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan pada tahun 2025 sebesar 3,88 atau 102,65% tidak hanya menunjukkan keberhasilan melampaui target Renstra Mahkamah Agung Republik Indonesia sebesar 3,78, tetapi juga mencerminkan peningkatan kualitas layanan yang semakin dirasakan langsung oleh masyarakat.

Capaian tersebut menjadi bukti bahwa upaya perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) telah berjalan secara konsisten, sehingga kepercayaan publik terhadap layanan pengadilan semakin meningkat dari waktu ke waktu.

5. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

- **Analisis Penyebab Keberhasilan**

Keberhasilan capaian Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan sebesar 102,65% dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu:

1. **Peningkatan Kualitas Pelayanan** – Implementasi standar layanan yang konsisten, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan pencari keadilan.
2. **Optimalisasi Layanan Berbasis Teknologi** – Pemanfaatan sistem elektronik yang mempermudah akses layanan, meningkatkan transparansi, dan mempercepat proses administrasi.
3. **Kompetensi dan Profesionalisme SDM** – Aparatur yang semakin memahami prinsip pelayanan prima serta berorientasi pada kepuasan pengguna.
4. **Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan** – Adanya monitoring dan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat sehingga setiap kekurangan dapat segera diperbaiki.

Secara keseluruhan, keberhasilan ini merupakan hasil sinergi antara tata kelola yang baik, komitmen pimpinan, serta budaya kerja yang berorientasi pada kualitas layanan dan kepercayaan publik.

- **Alternatif Solusi yang Akan Dilakukan**

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan yang telah melampaui target, langkah-langkah strategis yang akan dilakukan antara lain:

1. Penguatan Tindak Lanjut Hasil Survei

   Melakukan analisis lebih mendalam terhadap komponen penilaian yang masih memiliki ruang perbaikan, serta menyusun rencana aksi perbaikan yang terukur dan berkelanjutan.
2. Peningkatan Kompetensi Pelayanan Prima melalui pelatihan dan pembinaan berkelanjutan guna memperkuat sikap profesional, empati, dan responsivitas aparatur dalam memberikan layanan.
3. Meningkatkan kualitas dan stabilitas sistem layanan berbasis elektronik agar semakin mudah diakses, cepat, dan transparan.
4. Melakukan monitoring berkala terhadap penerapan standar layanan guna memastikan konsistensi kualitas di setiap lini pelayanan.
5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung

3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Pencapaian sasaran Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional pada Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 60.

Tabel 60
Capaian Kinerja Utama
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Sasaran III Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional				
No.	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**
1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	85	85	100 %
2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	95	98,67	103,86%
3	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	95	99,95	105,21%
4	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3,175	105,83%
Rata-rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis III				**103,73%**

3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan

Indikator kinerja "Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan" adalah sebuah indeks yang mengukur profesionalitas ASN dari aspek kompetensi, kinerja, kualifikasi, dan disiplin. Data IP ASN diperoleh secara tahunan dari aplikasi SIKEP.

Pada tahun 2025, nilai IP ASN Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah sebesar 85 dan termasuk dalam kategori "Tinggi" dengan rincian nilai 25 untuk kualifikasi, 30 untuk kompetensi, 25 untuk kinerja, dan 5 untuk disiplin. Rincian data capaian IP ASN Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025 yang diperoleh dari aplikasi SIKEP ditampilkan sebagai berikut.

Tabel 61
Indeks Profesionalitas ASN Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025

Jumlah Pegawai	Jumlah Pegawai Masa Kerja > 1 TH	Indeks Profesionalitas ASN	Kategori	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin
33	8	85	Tinggi	25	30	25	5

Gambar 4. Rincian Indeks Profesionalitas ASN Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025

Monitoring IP ASN

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG — TOTAL 33 ITEMS.

NO	NIPBARU	NAMA	JABATAN	IP ASN	KATEGORI	GOLONGAN	PREDIKAT KINERJA PEGAWAI	JPL	TINGKAT PENDIDIKAN	KUALIFIKASI	KOMPETENSI	KINERJA	DISIPLIN	AKSI
1	198112292006042015	Dora Natalia Singarimbun, S.E., M.M.	Sekretaris	90.00	tinggi	IV/a	Baik	33	S-2	25	35	25	5	
2	198207222008052001	Fitri Wahyuningtyas, S.H., M.H.	Hakim Tingkat Pertama	90.00	tinggi	IV/a	Baik	32	S-2	25	35	25	5	
3	199208082019032017	Rosalina, S.E.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan	90.00	tinggi	III/c	Baik	921	S-1	25	35	25	5	
4	199202112017121003	Febriansyah Rozarius, S.H., M.H.	Hakim Tingkat Pertama	90.00	tinggi	III/b	Baik	40	S-2	25	35	25	5	
5	199006182019031004	Jonathan Santoso, S.H., M.H.	Panitera Muda	90.00	tinggi	III/b	Baik	20	S-2	25	35	25	5	
6	199505302020122014	Fani Melisa Mega Putri Br. Sembiring, S.Kom.	Klerek - Pengolah Data dan Informasi	90.00	tinggi	III/a	Baik	24	S-1	25	35	25	5	
7	199405052022031006	Meiman Elieser, S.H., M.Kn.	Hakim Tingkat Pertama	90.00	tinggi	III/a	Baik	484	S-2	25	35	25	5	
8	199807112022032017	Rachma Dwi Maulina, S.H., M.H.	Hakim Tingkat Pertama	90.00	tinggi	III/a	Baik	484	S-2	25	35	25	5	
9	199612052022031007	Raka Prayoga Putra Pratama, S.H., M.H.	Hakim Tingkat Pertama	90.00	tinggi	III/a	Baik	1028	S-2	25	35	25	5	
10	199807242022032013	Regina Lois Priscilla Sipahutar, S.H., M.H.	Hakim Tingkat Pertama	90.00	tinggi	III/a	Baik	518	S-2	25	35	25	5	

11	199807032024052001	Yetri Ermi Yenti, S.H., M.Hum.	Perkara Peradilan	85.00	tinggi	III/b	Sangat Baik	16	S-2	25	25	30	5
12	200106182025062025	THALITA MARYAM SINURAT, S.H.	Klerek - Analis Perkara Peradilan	85.00	tinggi	III/a	Sangat Baik	0	S-1	25	25	30	5
13	200104162025211011	AGI MURNAWANSYAH	Operator Layanan Operasional	85.00	tinggi	V	Baik	50	SLTA/SEDERAJAT	20	35	25	5
14	200009292025211014	FERI	Operator Layanan Operasional	85.00	tinggi	V	Baik	50	SLTA/SEDERAJAT	20	35	25	5
15	199909082025212011	IMELIA KONTESA	Operator Layanan Operasional	85.00	tinggi	V	Baik	55	SLTA/SEDERAJAT	20	35	25	5
16	199511072025211025	PAJAR HIDAYAT	Operator Layanan Operasional	85.00	tinggi	V	Baik	50	SLTA/SEDERAJAT	20	35	25	5
17	198206252025211043	ROLI	Operator Layanan Operasional	85.00	tinggi	V	Baik	50	SLTA/SEDERAJAT	20	35	25	5
18	199801192022031004	Ferio Wabarca Hutabarat, S.H.	Hakim Tingkat Pertama	85.00	tinggi	III/a	Baik	484	S-1	20	35	25	5
19	199401152022032007	Nuranisyah, S.H.	Hakim Tingkat Pertama	85.00	tinggi	III/a	Baik	518	S-1	20	35	25	5

20	197911292002121002	Mohamad Syauqie, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan	85.00	tinggi	IV/c	Baik	13	S-2	25	30	25	5
21	197702172003122001	Lucya Permata Sari, S.H., M.HUM.	Wakil Ketua Pengadilan	85.00	tinggi	IV/b	Baik	0	S-2	25	30	25	5
22	197011201996032003	Lezi Fitri, S.H., M.H.	Panitera Tingkat Pertama	85.00	tinggi	IV/a	Baik	0	S-2	25	30	25	5
23	198502072006041001	Muhammad Agus, S.E., M.Si.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	85.00	tinggi	III/d	Baik	16	S-2	25	30	25	5
24	198309122011011008	Zulham Idrus, S.KOM., S.H., M.H.	Panitera Muda	85.00	tinggi	III/d	Baik	0	S-2	25	30	25	5
25	199307272019031010	Aditya Afieq Prakoso, S.Psi., S.H.	Juru Sita	85.00	tinggi	III/b	Baik	3	S-1	25	30	25	5
26	200005212024051001	Agave Frans Owen, S.H.	Klerek - Analis Perkara Peradilan	85.00	tinggi	III/a	Baik	16	S-1	25	30	25	5
27	199912222022032006	Audrey Kartika Putri, S.H.	Hakim Tingkat Pertama	83.00	tinggi	III/a	Baik	360	S-1	20	35	25	3
28	199205232019031005	Dendy Prasetya, S.Psi.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	80.00	sedang	III/c	Baik	21	S-1	25	25	25	5
29	198607012020122002	Yulita Ida Lestari, S.Kom. M.M.	Pranata Komputer Ahli Pertama	80.00	sedang	III/b	Baik	28	S-2	25	25	25	5

30	199111282025061004	OVIT SAMUEL PURBA, S.T.	Teknisi Sarana dan Prasarana	80.00	sedang	III/a	Baik	48	S-1	25	25	25	5
31	200201122025212001	INDAH KUSUMAWATI	Operator Layanan Operasional	75.00	sedang	V	Baik	50	SLTA/SEDERAJAT	20	25	25	5
32	199004122020121009	Fanny Ruspanji, S.E.I.	Pranata Keuangan APBN Mahir	75.00	sedang	III/b	Baik	10	S-1	25	20	25	5
33	199911272025062015	NOVITASARI ZEGA, S.H.	Klerek - Analis Perkara Peradilan	75.00	sedang	III/a	Baik	0	S-1	25	20	25	5

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perhitungan capaian "Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan" dihitung sebagai berikut.

Perhitungan Capaian: $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$

$= \frac{85}{85} \times 100\%$

$= 100\ \%$

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	2025	85	85	100%

Tabel 62. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Indikator 3.1

Realisasi Indeks Profesionalitas ASN pada tahun 2025 mencapai 85, sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebesar 85, sehingga capaian kinerja mencapai 100%.

Keselarasan antara target dan realisasi tersebut menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin aparatur telah berjalan efektif sesuai dengan perencanaan. Capaian ini mencerminkan konsistensi dalam menjaga standar profesionalitas ASN, sekaligus menunjukkan bahwa strategi pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia telah dilaksanakan secara optimal dan terukur.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) merupakan indikator kinerja utama baru yang termuat dalam Renstra Mahkamah Agung Republik Indonesia dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra PTUN Pangkalpinang yang baru ditetapkan pada Oktober 2025.

Sehubungan dengan hal tersebut, data IP ASN tahun 2025 merupakan *baseline* awal pelaksanaan pengukuran indikator ini. Oleh karena indikator ini belum tercantum dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya, maka tidak tersedia data target, realisasi, maupun capaian tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya untuk dilakukan analisis perbandingan tren kinerja.

Dengan demikian, capaian tahun 2025 akan menjadi dasar evaluasi dan pembanding bagi pengukuran kinerja pada tahun-tahun berikutnya dalam rangka memastikan peningkatan profesionalitas ASN secara berkelanjutan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Renstra 2025-2029

Target jangka menengah untuk Periode 2025-2029 telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025-2029. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah pada Renstra 2025-2029 ditampilkan dalam tabel berikut.

Indikator Kinerja	Tahun	Target Jangka Menengah pada Renstra	Realisasi	Capaian
Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	2025	85	85	100%

Tabel 63. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Indikator 3.1

Target jangka menengah Indeks Profesionalitas ASN dalam Renstra Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025–2029 yang mengacu pada Renstra Mahkamah Agung Republik Indonesia ditetapkan sebesar 85. Pada tahun 2025, realisasi kinerja berhasil mencapai 85, sehingga capaian kinerja tercatat 100% terhadap target yang telah ditetapkan.

Realisasi tersebut menunjukkan bahwa kinerja pada tahun pertama periode Renstra telah memenuhi target jangka menengah yang direncanakan. Hal ini mencerminkan bahwa strategi pembinaan dan pengembangan profesionalitas ASN telah berjalan efektif serta memberikan hasil yang optimal sejak awal periode perencanaan.

Dengan capaian tersebut, kinerja tahun 2025 tidak hanya selaras dengan target jangka menengah, tetapi juga memberikan fondasi yang kuat untuk mempertahankan dan meningkatkan profesionalitas ASN pada tahun-tahun berikutnya dalam periode Renstra 2025–2029.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Nasional

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional yang ada dalam dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029 ditampilkan dalam tabel berikut.

Indikator Kinerja	Tahun	Target pada Renstra MA	Target PTUN Pangkalpinang	Realisasi	Capaian
Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	2025	71	85	85	100%

Tabel 64. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional Indikator 3.1

Standar nasional Indeks Profesionalitas ASN yang tercantum dalam Renstra Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029 ditetapkan sebesar 71. Pada tahun 2025, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang menetapkan target sebesar 85 dan berhasil merealisasikan nilai 85, sehingga capaian kinerja mencapai 100% terhadap target yang telah ditetapkan.

Jika dibandingkan dengan standar nasional sebesar 71, realisasi tahun 2025 berada di atas standar nasional, yang menunjukkan bahwa tingkat profesionalitas ASN pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah melampaui *benchmark* yang ditetapkan secara nasional. Hal ini mencerminkan komitmen Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dalam menjaga kualitas sumber daya manusia serta konsistensi dalam pembinaan dan pengembangan kompetensi aparatur secara berkelanjutan.

5. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

- **Analisis Penyebab Keberhasilan**

  Keberhasilan pencapaian Indeks Profesionalitas ASN sebesar 85 (100% dari target) menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya manusia telah berjalan secara efektif dan terarah. Adapun faktor-faktor yang mendukung keberhasilan tersebut antara lain:

  1. Perencanaan dan Penetapan Target yang Progresif

     Penetapan target sebesar 85, yang melampaui standar nasional, menunjukkan komitmen untuk tidak sekadar memenuhi batas minimum, tetapi mendorong kualitas profesionalitas ASN yang lebih tinggi.

  2. Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi ASN

     Pelaksanaan diklat, peningkatan kualifikasi pendidikan, serta penguatan kompetensi teknis dan manajerial berkontribusi pada peningkatan nilai profesionalitas.

  3. Pengelolaan Kinerja dan Disiplin yang Konsisten

     Penerapan sistem penilaian kinerja yang terukur serta pengawasan kedisiplinan ASN mendukung terciptanya budaya kerja yang profesional dan akuntabel.

  4. Komitmen Pimpinan dan Budaya Kerja Organisasi

     Dukungan pimpinan dalam mendorong peningkatan kapasitas ASN serta budaya kerja yang berorientasi pada kinerja dan integritas menjadi faktor kunci keberhasilan.

  Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan bahwa strategi pengelolaan ASN telah dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan, sehingga mampu menghasilkan tingkat profesionalitas yang sesuai dengan target yang ditetapkan.

- **Alternatif Solusi yang Akan Dilakukan**

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian Indeks Profesionalitas ASN yang telah mencapai target dan melampaui standar nasional, langkah-langkah strategis yang akan dilakukan antara lain:

1. Penyusunan Rencana Pengembangan Individu

   Menyusun peta kebutuhan kompetensi ASN secara lebih terarah agar pengembangan kapasitas sesuai dengan jabatan dan kebutuhan organisasi.

2. Mendorong ASN mengikuti diklat teknis, manajerial, dan fungsional serta sertifikasi kompetensi guna meningkatkan kualitas profesionalitas secara berkelanjutan.

3. Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja

   Melakukan evaluasi berkala terhadap capaian kinerja dan disiplin ASN agar standar profesionalitas tetap terjaga dan terus meningkat.

4. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi dalam Manajemen SDM

   Memanfaatkan sistem informasi kepegawaian untuk pemantauan data kinerja, kompetensi, dan pengembangan ASN secara lebih akurat dan terintegrasi.

5. Penguatan Budaya Kerja Berbasis Integritas dan Akuntabilitas

   Menanamkan nilai-nilai profesionalisme, tanggung jawab, dan pelayanan publik melalui pembinaan rutin serta keteladanan pimpinan.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan tingkat profesionalitas ASN tidak hanya stabil pada angka target, tetapi terus meningkat secara berkelanjutan di tahun-tahun berikutnya.

3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas pelaksanaan anggaran oleh satuan kerja pemerintah dalam satu tahun anggaran. Penetapan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dilakukan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja satuan kerja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tidak hanya melihat seberapa besar anggaran terserap, tetapi juga menilai ketepatan, kepatuhan, dan kualitas pengelolaan anggaran sesuai dengan ketentuan perbendaharaan negara.

Dasar hukum penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) mengacu pada Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) terdiri dari:

- Revisi DIPA (10%)
- Penyerapan Anggaran (20%)
- Penyelesaian Tagihan (10%)
- Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA)
- Deviasi Hal. 3 DIPA (15%)
- Belanja Kontraktual (10%)
- Pengelolaan UP dan TUP (10%)
- Capaian Output (25%)

Pengukuran Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang mencakup 2 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), yakni DIPA 401968 atau DIPA 01 yang merupakan sumber pembiayaan/pendanaan untuk Program Dukungan Manajemen dan DIPA 403429 atau DIPA 05 yang merupakan sumber pembiayaan/pendanaan untuk Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.

Per 31 Desember 2025, nilai IKPA DIPA 401968/DIPA 01 adalah senilai 98,95, sedangkan nilai IKPA DIPA 403429/DIPA 05 adalah senilai 98,38. Rincian nilai IKPA Per 31 Desember 2025 ditampilkan dalam tabel berikut.

TABEL 65. NILAI INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN DIPA 401968 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG TAHUN 2025

Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
	Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP/TUP	Capaian Output				
Nilai	100	93,01	100	100	100	100	100	98,95	100%	0	**98,95**
Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
Nilai Akhir	10	13,95	20	10	10	10	25				
Nilai Aspek	96,51		100				100				

TABEL 66. NILAI INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN DIPA 403429 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG TAHUN 2025

Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
	Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP/TUP	Capaian Output				
Nilai	100	100	92,8	0	100	99,84	100	88,54	90%	0	**98,38**
Bobot	10	15	20	0	10	10	25				
Nilai Akhir	10	15	18,56	0	10	9,98	25				
Nilai Aspek	100		97,55				100				

Rincian nilai IKPA secara akumulatif per bulan ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 67. Nilai IKPA Tahun 2025

No	Bulan	Nilai IKPA	
		DIPA 01	DIPA 05
1	Januari	100	100
2	Februari	100	100
3	Maret	100	100
4	April	99,42	92,18
5	Mei	99,96	94,29
6	Juni	100	96,4
7	Juli	99,8	95,84
8	Agustus	99,99	97,86
9	September	98,76	97,85
10	Oktober	98,68	98,38
11	November	98,95	98,38
12	Desember	98,95	98,38

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perhitungan realisasi dan capaian "Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)" dihitung sebagai berikut.

Perhitungan Realisasi: $\frac{\text{Nilai IKPA DIPA 01 + IKPA DIPA 05}}{2}$

$= \frac{98{,}95 + 98{,}38}{2}$

$= 98{,}67$

Perhitungan Capaian: $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$

$= \frac{98{,}67}{95} \times 100\%$

$= 103{,}86\ \%$

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	2025	95	98,67	103,86%

Tabel 68. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Indikator 3.2

Pada tahun 2025, target nilai IKPA ditetapkan sebesar 95, sedangkan realisasi yang dicapai adalah 98,67, sehingga capaian kinerja mencapai 103,86%. Realisasi tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelaksanaan anggaran telah melampaui target yang direncanakan. Capaian ini mencerminkan pengelolaan anggaran yang efektif, tertib, dan sesuai dengan Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi			Capaian
			DIPA 01	DIPA 05	Rata-Rata	
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	2025	95	98,95	98,38	98,67	103,86%
	2024	-	99,73	95,88	97,81	-
	2023	-	96,28	96,47	96,38	-
	2022	-	94,19	96,11	95,15	-

Tabel 69. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir Indikator 3.2

Meskipun indikator "Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan" merupakan indikator baru dalam Renstra 2025–2029 dan belum tercantum sebagai IKU pada Renstra Periode 2020–2024, secara substansi kegiatan pelaksanaan anggaran dan pengukuran Nilai IKPA telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga dapat dilakukan perbandingan data realisasi meskipun data capaian kinerja tahun 2024-2022 tidak dapat dihitung karena target kinerja belum ditetapkan pada periode tahun tersebut.

Nilai rata-rata Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tahun 2025 mencapai 98,67, menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yaitu 97,81 pada 2024, 96,38 pada 2023, dan 95,15 pada 2022. Secara tren, nilai IKPA menunjukkan peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun dalam empat tahun terakhir. Kenaikan bertahap tersebut mencerminkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian anggaran.

Dibandingkan tahun 2024, nilai tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 0,86 poin, yang menegaskan bahwa tata kelola pelaksanaan anggaran semakin efektif dan akuntabel. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, peningkatan mencapai 3,52 poin, yang menunjukkan kemajuan signifikan dalam disiplin dan kualitas pengelolaan keuangan.

Dengan demikian, capaian tahun 2025 tidak hanya mempertahankan kinerja yang baik, tetapi juga memperlihatkan tren peningkatan yang stabil dan berkelanjutan dalam pelaksanaan anggaran selama beberapa tahun terakhir.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Renstra 2025-2029

Target jangka menengah untuk Periode 2025-2029 telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025-2029. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah pada Renstra 2025-2029 ditampilkan dalam tabel berikut.

Indikator Kinerja	Tahun	Target Jangka Menengah pada Renstra	Realisasi	Capaian
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	2025	95	98,67	103,86%

Tabel 70. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Indikator 3.2

Target jangka menengah nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dalam Renstra 2025–2029 ditetapkan sebesar 95. Pada tahun 2025, realisasi nilai IKPA mencapai 98,67, sehingga capaian kinerja tercatat sebesar 103,86%.

Realisasi tersebut menunjukkan bahwa pada tahun pertama periode Renstra, kualitas pelaksanaan anggaran telah melampaui target jangka menengah yang direncanakan. Hal ini mencerminkan efektivitas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian anggaran serta konsistensi dalam menjaga kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan keuangan negara.

Dengan capaian yang berada di atas target jangka menengah, kinerja tahun 2025 memberikan fondasi yang kuat untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran pada tahun-tahun berikutnya dalam periode Renstra 2025–2029.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Nasional

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional yang ada dalam dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029 ditampilkan dalam tabel berikut.

Indikator Kinerja	Tahun	Target pada Renstra MA	Target PTUN Pangkalpinang	Realisasi	Capaian
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	2025	93	95	98,67	103,86%

Tabel 71. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional Indikator 3.2

Standar nasional nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dalam Renstra Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025–2029 ditetapkan sebesar 93. Pada tahun 2025, realisasi nilai IKPA mencapai 98,67 dengan capaian kinerja sebesar 103,86% terhadap target internal yang telah ditetapkan.

Jika dibandingkan dengan standar nasional sebesar 93, realisasi tahun 2025 berada secara signifikan di atas standar tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelaksanaan anggaran telah melampaui tolok ukur nasional, baik dari aspek ketepatan perencanaan, kepatuhan terhadap regulasi, maupun efektivitas penyerapan anggaran.

Dengan demikian, kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2025 tidak hanya memenuhi target internal, tetapi juga mencerminkan tata kelola keuangan yang lebih baik dibandingkan standar nasional yang ditetapkan dalam dokumen Renstra.

5. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

- **Analisis Penyebab Keberhasilan**

Keberhasilan pencapaian nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar 98,67 dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain:

1. Perencanaan Anggaran yang Akurat dan Realistis

   Penyusunan rencana penarikan dana dan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara terukur sehingga meminimalkan revisi dan deviasi.

2. Pengendalian dan Monitoring Berkala

   Dilakukannya evaluasi rutin terhadap realisasi anggaran, capaian output, serta kepatuhan administrasi sehingga potensi kendala dapat segera diantisipasi. Rapat Monitoring dan Evaluasi Penyerapan Anggaran dilakukan secara triwulan untuk memastikan penyerapan anggaran telah optimal sesuai dengan target penyerapan anggaran yang ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Nomor PER-5/PB/2024.

3. Kepatuhan terhadap Regulasi Perbendaharaan

   Pelaksanaan anggaran mengikuti ketentuan dan batas waktu yang berlaku, sehingga tidak terjadi keterlambatan maupun kesalahan administrasi yang signifikan.

4. Koordinasi yang Efektif Antar Unit Kerja

   Sinergi antara kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, bendahara, perencana, dan operator keuangan mendukung kelancaran proses pelaksanaan anggaran.

5. Komitmen Pimpinan dalam Pengawasan

   Pengawasan dan arahan pimpinan secara konsisten menjaga disiplin pelaksanaan anggaran sesuai prinsip akuntabilitas. Wakil Ketua selaku Ketua Tim Komite Anggaran melakukan pengawasan secara rutin melalui monitoring dan evaluasi anggaran per triwulan.

Secara keseluruhan, keberhasilan tersebut mencerminkan tata kelola anggaran yang terencana, terkontrol, dan dilaksanakan secara profesional.

- **Alternatif Solusi yang Akan Dilakukan**

  Meskipun capaian kinerja telah memenuhi dan/atau melampaui target yang ditetapkan, upaya penguatan tetap dilakukan guna menjaga konsistensi dan meningkatkan kualitas kinerja pada periode berikutnya. Langkah-langkah yang akan dilakukan antara lain:

  1. Mempertahankan Monitoring Berkala – Melakukan evaluasi rutin atas realisasi dan rencana penarikan dana agar kualitas pelaksanaan anggaran tetap terjaga.
  2. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Keuangan – Mengikuti pembaruan regulasi dan pelatihan teknis guna meminimalkan kesalahan administrasi.
  3. Penguatan Perencanaan yang Lebih Presisi – Menyusun rencana kegiatan dan penarikan dana secara lebih detail untuk menghindari revisi berulang.
  4. Optimalisasi Koordinasi Internal – Memperkuat komunikasi antar pejabat pengelola anggaran agar setiap kendala dapat segera diselesaikan.

  Dengan langkah tersebut, diharapkan nilai IKPA dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan pada periode berikutnya.

3.3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Perencanaan anggaran memegang peran penting dalam memastikan bahwa setiap rupiah APBN benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Perencanaan yang baik tidak hanya mengarahkan pelaksanaan kegiatan, tetapi juga menjadi kunci keberhasilan pencapaian output dan *outcome* pembangunan. Oleh karena itu, kualitas perencanaan anggaran perlu dipahami dan dikelola secara serius oleh setiap satuan kerja.

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) merupakan bagian dari Nilai Kinerja Anggaran (NKA) sebagaimana diatur dalam KMK Nomor 466 Tahun 2023 dan PMK Nomor 107 Tahun 2024 yang menjadi indikator penting dalam menilai kualitas perencanaan anggaran pada satuan kerja, unit eselon I, hingga kementerian/lembaga. Nilai tersebut bukan dimaksudkan sebagai penilaian administratif semata. Lebih dari itu, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran berfungsi sebagai cermin untuk melihat apakah perencanaan telah disusun secara realistis, terukur, dan selaras dengan target kinerja yang ditetapkan.

Bobot penilaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran terdiri dari:

a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari:
   - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%)
   - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%)
   - Agregasi Capaian RO Satker (30%)

b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker

Pengukuran Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dilakukan secara tahunan dan mencakup 2 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), yakni DIPA 401968 atau DIPA 01 yang merupakan sumber pembiayaan/pendanaan untuk Program Dukungan Manajemen dan DIPA 403429 atau DIPA 05 yang merupakan sumber pembiayaan/pendanaan untuk Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.

Data Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) diambil dari aplikasi Monev Kemenkeu. Per 31 Desember 2025, nilai NKPA DIPA 401968/DIPA 01 adalah senilai 100, sedangkan nilai NKPA DIPA 403429/DIPA 05 adalah senilai 99,89. Rincian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) ditampilkan dalam tabel berikut.

Keterangan	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA)	Efektivitas	Efisiensi	
		Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
DIPA 01 (401968)	100	100	100	100
DIPA 05 (403429)	99,89	100	100	99,25

Tabel 72. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Tahun 2025

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perhitungan realisasi dan capaian "Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA)" dihitung sebagai berikut.

Perhitungan Realisasi: $\frac{\text{Nilai NKPA DIPA 01 + NKPA DIPA 05}}{2}$

$$= \frac{100 + 99{,}89}{2}$$

$$= 99{,}95$$

Perhitungan Capaian: $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$

$$= \frac{99{,}95}{95} \times 100\%$$

$$= 105{,}21\ \%$$

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA)	2025	95	99,95	105,21%

Tabel 73. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Indikator 3.3

Pada tahun 2025, target Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) ditetapkan sebesar 95, sedangkan realisasi yang dicapai adalah 99,95, sehingga capaian kinerja mencapai 105,21%.

Realisasi tersebut menunjukkan bahwa kualitas perencanaan anggaran telah melampaui target yang telah ditetapkan. Nilai yang mendekati angka maksimal (100) mencerminkan penyusunan anggaran yang akurat, selaras dengan perencanaan kinerja, serta minim revisi dan deviasi dalam proses pelaksanaannya.

Dengan capaian yang melebihi target, kinerja perencanaan anggaran tahun 2025 dapat dinilai sangat optimal dan menunjukkan komitmen kuat dalam memastikan anggaran direncanakan secara efektif, efisien, dan berbasis kinerja.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi			Capaian
			DIPA 01	DIPA 05	Rata-Rata	
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA)	2025	95	100	99,89	99,95	105,21%
	2024	-	75	75	75	-
	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-

Tabel 74. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir Indikator 3.3

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) merupakan bagian dari Nilai Kinerja Anggaran (NKA) yang diatur dalam KMK Nomor 466 Tahun 2023 dan PMK Nomor 107 Tahun 2024. Ketersediaan data NKPA pada aplikasi Monev Kemenkeu dimulai sejak tahun 2024, sehingga data NKPA tahun-tahun sebelumnya tidak dapat ditampilkan.

Meskipun indikator "Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA)" merupakan indikator baru dalam Renstra 2025–2029 dan belum tercantum sebagai IKU pada Renstra Periode 2020–2024, secara substansi kegiatan perencanaan anggaran dan pengukuran Nilai NKPA telah tersedia sejak tahun 2024, sehingga dapat dilakukan perbandingan data realisasi antara tahun 2025 dengan tahun 2024, meskipun data capaian kinerja tahun 2024 tidak dapat dihitung karena target kinerja belum ditetapkan pada periode tahun tersebut.

Nilai rata-rata NKPA tahun 2025 mencapai 99,95, mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 75. Kenaikan sebesar 24,95 poin tersebut menunjukkan adanya perbaikan yang substansial dalam kualitas perencanaan anggaran.

Peningkatan ini mencerminkan semakin baiknya efektivitas dan efisiensi perencanaan anggaran, meningkatnya akurasi dalam penganggaran, serta semakin selarasnya perencanaan anggaran dengan target kinerja yang ditetapkan. Selain itu, perbaikan koordinasi dan pengendalian dalam proses penyusunan anggaran turut berkontribusi terhadap lonjakan nilai pada tahun 2025. Adapun data realisasi tahun 2023 dan sebelumnya tidak tersedia, sehingga analisis tren jangka panjang belum dapat dilakukan. Dengan demikian, capaian tahun 2025 menjadi indikator penting yang menunjukkan peningkatan kualitas perencanaan anggaran secara signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Renstra 2025-2029

Target jangka menengah untuk Periode 2025-2029 telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025-2029. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah pada Renstra 2025-2029 ditampilkan dalam tabel berikut.

Indikator Kinerja	Tahun	Target Jangka Menengah pada Renstra	Realisasi	Capaian
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA)	2025	95	99,95	105,21%

Tabel 75. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Indikator 3.3

Target jangka menengah Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) dalam Renstra 2025–2029 ditetapkan sebesar 95. Pada tahun 2025, realisasi nilai NKPA mencapai 99,95, sehingga capaian kinerja tercatat sebesar 105,21%.

Realisasi tersebut menunjukkan bahwa pada tahun pertama periode Renstra, kualitas perencanaan anggaran telah melampaui target jangka menengah yang telah ditetapkan. Nilai yang hampir mencapai angka maksimal mencerminkan perencanaan anggaran yang semakin akurat, efektif, efisien, dan terintegrasi dengan target kinerja, serta minim revisi dan deviasi.

Dengan capaian yang berada di atas target jangka menengah, kinerja tahun 2025 memberikan dasar yang kuat untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas perencanaan anggaran pada tahun-tahun berikutnya dalam periode Renstra 2025–2029.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Nasional

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional yang ada dalam dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029 ditampilkan dalam tabel berikut.

Indikator Kinerja	Tahun	Target pada Renstra MA	Target PTUN Pangkalpinang	Realisasi	Capaian
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA)	2025	75	95	99,95	105,21%

Tabel 76. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional Indikator 3.3

Standar nasional Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) dalam Renstra Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025–2029 ditetapkan sebesar 75. Pada tahun 2025, realisasi nilai NKPA mencapai 99,95 dengan capaian kinerja sebesar 105,21% terhadap target senilai 95 yang telah ditetapkan sebelumnya.

Jika dibandingkan dengan standar nasional sebesar 75, realisasi tahun 2025 berada jauh di atas tolok ukur tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas perencanaan anggaran tidak hanya memenuhi ekspektasi internal, tetapi juga melampaui standar nasional yang ditetapkan.

Capaian ini mencerminkan perencanaan anggaran yang semakin akurat, selaras dengan target kinerja, serta didukung oleh pengendalian dan koordinasi yang efektif dalam proses penyusunan anggaran. Dengan demikian, kinerja tahun 2025 menegaskan komitmen kuat terhadap tata kelola perencanaan anggaran yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

5. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

- **Analisis Penyebab Keberhasilan**

  Keberhasilan pencapaian nilai NKPA sebesar 99,95 yang melampaui target dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain:

  1. Perencanaan Anggaran yang Lebih Presisi dan Berbasis Kinerja

     Penyusunan anggaran dilakukan secara selaras dengan target output dan indikator kinerja, sehingga meminimalkan ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan.

  2. Peningkatan Kualitas Penyusunan Dokumen Perencanaan

     Kelengkapan dan ketepatan dokumen RKA serta dukungan data yang akurat meningkatkan kualitas penilaian perencanaan anggaran.

  3. Koordinasi dan Review Internal yang Efektif

     Adanya proses verifikasi dan evaluasi internal sebelum pengajuan anggaran membantu mengurangi potensi revisi dan kesalahan administratif. Selain itu, terdapat sinergi dan koordinasi yang kuat antara Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan dengan Sub Bagian Umum dan Keuangan dalam melakukan perencanaan anggaran yang berbasis *output* real yang dapat dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum dan Keuangan.

  4. Komitmen Pimpinan dan Tim Perencanaan

     Pengawasan serta pembinaan yang konsisten mendorong disiplin dan ketelitian dalam setiap tahapan penyusunan anggaran.

  Secara keseluruhan, keberhasilan ini mencerminkan perencanaan anggaran yang semakin matang, terstruktur, dan berorientasi pada akuntabilitas kinerja.

- **Alternatif Solusi yang Akan Dilakukan**

  Meskipun nilai NKPA telah melampaui target, langkah penguatan tetap diperlukan untuk menjaga konsistensi dan meningkatkan kualitas perencanaan anggaran ke depan. Adapun alternatif solusi yang akan dilakukan antara lain:

  1. Penyempurnaan Perencanaan Berbasis Data dan Kinerja

     Memperkuat penggunaan data dukung dan analisis kebutuhan agar perencanaan semakin presisi dan realistis.

2. Peningkatan Kapasitas Tim Perencanaan

   Mengikuti pelatihan dan pembaruan regulasi terkait perencanaan dan penganggaran guna menjaga kualitas penyusunan dokumen.

3. Memastikan keterpaduan antara dokumen perencanaan, rencana penarikan dana, dan target kinerja.

4. Penguatan *Review* dan *Quality Control Internal*

   Melakukan evaluasi berlapis sebelum pengajuan anggaran untuk meminimalkan potensi revisi dan ketidaksesuaian.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kualitas perencanaan anggaran tetap terjaga pada kategori sangat baik dan dapat dipertahankan secara berkelanjutan.

3.4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara pada tahun berjalan. Dasar hukum pengelolaan aset mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024.

Ruang lingkup Indeks Pengelolaan Aset meliputi siklus pengelolaan BMN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 yaitu kegiatan perencanaan kebutuhan, penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Penilaian Indeks Pengelolaan Aset (IPA) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dengan memperhatikan beberapa parameter berikut:

1. Pengelolaan BMN yang akuntabel dan produktif
    - Penatausahaan Barang Milik Negara (bobot sebesar 20%)
    - Realisasi PNBP dari pengelolaan aset (bobot sebesar 15%)
2. Kepatuhan pengelolaan BMN terhadap Peraturan Perundang-undangan
    - Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN (bobot sebesar 25%)
3. Pengawasan dan pengendalian BMN yang efektif
    - Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN (bobot sebesar 10%)
    - Tindak lanjut BMN yang Dihentikan Penggunaannya (bobot sebesar 10%)
4. Administrasi BMN yang andal
    - BMN memiliki dokumen kepemilikan (bobot sebesar 10%)
    - Penggunaan BMN yang sesuai ketentuan (bobot sebesar 10%)

Berdasarkan surat Sekretaris Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Nomor 21/SEK.PTTUN.W5-TUN/PL1.2/I/2026 tentang Hasil Penilaian Indeks Pengelolaan Aset (IPA) pada Satuan Kerja Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tanggal 19 Januari 2026, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang memperoleh nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA) sebesar 3,175.

Tabel 77. Hasil Penilaian Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025

No.	Parameter	Data		Nilai Parameter	Penyesuaian Kelompok	Bobot	Nilai Parameter/Indeks Akhir Setelah Penyesuaian	Indeks
1	2	3	4	5=3x4	6	7	8=5x6	9=7x8
1	**Pengelolaan BMN yang Akuntabel dan Produktif**							
	1.1	**Penatausahaan BMN**				Bobot	Indeks Sebelum Bobot	**0,8**
						20%		
	1.1.1	Kesesuaian dan Kelengkapan Dokumen BMN	Jumlah Transaksi yang Telah Diverifikasi	Jumlah Transaksi			Bobot	Indeks Sebelum Bobot	2,4
			11	11	100%	-	60%	4	
	1.1.2	Penjelasan Data Telaah BMN	Data yang Sudah Dilakukan Telaah Atau Penjelasan	Jumlah Data Telaah			Bobot	Indeks Sebelum Bobot	1,6
			0	0	0%	-	40%	4	
	1.2	**Realisasi PNBP dari Pengelolaan Aset**				Bobot		**0,45**
						15%		
	1.2.1	Realisasi Pendapatan dari Pemanfaatan BMN	Realisasi Pendapatan dari Pemanfaatan BMN	Total Estimasi Pendapatan dari Pemanfaatan BMN			Bobot	Indeks Sebelum Bobot	1,5
			-	-	0%		50%	3	
	1.2.2	Realisasi PNBP dari Pemanfaatan BMN Berdasarkan Penetapan Pengguna Barang	Total Nilai Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Berdasarkan Penetapan Pengguna Barang	Total Nilai Pendapatan dari Seluruh Pemanfaatan BMN			Bobot	Indeks Sebelum Bobot	1,5
			-	-	0%	-	50%	3	
2	**Kepatuhan Pengelolaan BMN Terhadap Peraturan Perundang-Undangan**							
	2.1	**Ketepatan Waktu dan Kelengkapan Dokumen Dalam Penyampaian Laporan dan Usulan RKBMN**				Bobot		**0,825**
						25%		
	2.1.1	Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan RKBMN	Tanggal Terima	Batas Penyampaian		Lengkap/Tidak Lengkap	Bobot	Indeks Sebelum Bobot	1,2
			23 Juli 2025	8 Agustus 2025	< H-16	4	30%	4	

No.	Parameter		Data		Nilai Parameter	Penyesuaian Kelompok	Bobot	Nilai Parameter/Indeks Akhir Setelah Penyesuaian	Indeks
1	2		3	4	5=3x4	6	7	8=5x6	9=7x8
	2.1.2	Ketepatan Waktu dan Kelengkapan Dokumen Penyampaian LBKP	Tanggal Terima	Batas Penyampaian		Lengkap/Tidak Lengkap	Bobot	Indeks Sebelum Bobot	0,9
							30%	3	
	2.1.3	Ketepatan Waktu dan Kelengkapan Dokumen Penyampaian Wasdal	Tanggal Terima	Batas Penyampaian		Lengkap/Tidak Lengkap	Bobot	Indeks Sebelum Bobot	1,2
			10 Januari 2025	16 Januari 2025	3	3	40%	3	
			8 Juli 2025	7 Juli 2025	3	3			
3	**Pengawasan dan Pengendalian BMN yang Efektif**								
	3.1	Tindak Lanjut Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan BMN	Jumlah Persetujuan Pengelolaan BMN yang Ditindaklanjuti	Jumlah Keseluruhan Persetujuan Pengelolaan BMN yang Diterbitkan Pengguna Barang			Bobot	Indeks Sebelum Bobot	0,1
			0	1	0%		10%	1	
	3.2	Tindak Lanjut BMN yang Dihentikan Penggunaannya	Saldo BMN yang Dihentikan Penggunaannya Periode Akhir	Saldo BMN yang Dihentikan Penggunaannya Periode Awal	(57)		Bobot	Indeks Sebelum Bobot	0,2
			-	-	akhir t-0 > awal t-0	-	10%	2	
4	**Administrasi BMN yang Andal**								
	4.1	BMN Bersertifikat Sesuai Ketentuan	Luas Tanah Bersertifikat (m2)	Total Luas Tanah (m2)			Bobot	Indeks Sebelum Bobot	0,4
			4.000	4.000	100%		10%	4	
	4.2	Penggunaan BMN Sesuai Ketentuan	Total Nilai Perolehan BMN yang Sudah PSP	Total Nilai Perolehan BMN			Bobot	Indeks Sebelum Bobot	0,4
			33.587.417.806	34.205.503.142	98%		10%	4	
Nillai IPA									**3,175**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perhitungan capaian "Indikator Pengelolaan Aset (IPA)" dihitung sebagai berikut.

Perhitungan Capaian: $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$

$= \frac{3{,}175}{3} \times 100\%$

$= 105{,}83\ \%$

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	2025	3	3,175	105,83%

Tabel 78. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Indikator 3.4

Pada tahun 2025, target nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA) ditetapkan sebesar 3. Berdasarkan hasil penilaian tingkat banding, realisasi yang dicapai adalah 3,175, sehingga capaian kinerja mencapai 105,83%.

Realisasi tersebut menunjukkan bahwa kualitas pengelolaan aset telah melampaui target yang ditetapkan. Nilai yang lebih tinggi dari standar indeks mencerminkan pengelolaan aset yang semakin tertib, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik dari aspek pengelolaan, administrasi, kepatuhan, maupun pengendalian barang milik negara.

Dengan capaian di atas target, kinerja pengelolaan aset tahun 2025 dapat dinilai sangat baik serta menunjukkan komitmen yang kuat dalam mewujudkan tata kelola aset yang akuntabel, transparan, dan profesional.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Indeks Pengelolaan Aset (IPA) merupakan indikator kinerja utama baru yang termuat dalam Renstra PTUN Pangkalpinang yang baru ditetapkan pada Oktober 2025.

Sehubungan dengan hal tersebut, data Indeks Pengelolaan Aset (IPA) tahun 2025 merupakan *baseline* awal pelaksanaan pengukuran indikator ini. Oleh karena indikator ini belum tercantum dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya, maka tidak tersedia data target, realisasi, maupun capaian tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya untuk dilakukan analisis perbandingan tren kinerja. Dengan demikian, capaian tahun 2025 akan menjadi dasar evaluasi dan pembanding bagi pengukuran kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Renstra 2025-2029

Target jangka menengah untuk Periode 2025-2029 telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025-2029. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah pada Renstra 2025-2029 ditampilkan dalam tabel berikut.

Indikator Kinerja	Tahun	Target Jangka Menengah pada Renstra	Realisasi	Capaian
Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	2025	3	3,175	105,83%

Tabel 79. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Indikator 3.4

Target jangka menengah nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA) dalam Renstra Tahun 2025–2029 ditetapkan sebesar 3. Pada tahun 2025, realisasi nilai IPA mencapai 3,175 berdasarkan hasil penilaian tingkat banding, sehingga capaian kinerja tercatat sebesar 105,83%.

Realisasi tersebut menunjukkan bahwa pada tahun pertama periode Renstra, pengelolaan aset telah melampaui target jangka menengah yang direncanakan. Nilai yang lebih tinggi dari standar indeks mencerminkan tertibnya administrasi barang milik negara, meningkatnya kualitas pencatatan dan pelaporan aset, serta penguatan pengawasan dalam pengelolaan aset.

Dengan capaian yang berada di atas target jangka menengah, kinerja tahun 2025 memberikan dasar yang kuat untuk mempertahankan serta meningkatkan kualitas tata kelola aset secara berkelanjutan selama periode Renstra 2025–2029.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Nasional

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional yang ada dalam dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029 ditampilkan dalam tabel berikut.

Indikator Kinerja	Tahun	Target pada Renstra MA	Target PTUN Pangkalpinang	Realisasi	Capaian
Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	2025	3	3	3,175	105,83%

Tabel 80. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional Indikator 3.4

Standar nasional nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA) dalam Renstra Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025–2029 ditetapkan sebesar 3. Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang menetapkan target tahun 2025 sebesar 3, dan berdasarkan hasil penilaian tingkat banding, realisasi yang dicapai adalah 3,175, sehingga capaian kinerja mencapai 105,83%.

Jika dibandingkan dengan standar nasional sebesar 3, realisasi tahun 2025 berada di atas tolok ukur tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pengelolaan aset tidak hanya memenuhi standar nasional, tetapi juga melampauinya, yang tercermin dari tertibnya administrasi, akurasi pencatatan, serta efektivitas pengawasan terhadap barang milik negara.

Dengan demikian, kinerja pengelolaan aset tahun 2025 menunjukkan tata kelola yang semakin baik, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip pengelolaan aset negara yang profesional.

5. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

- **Analisis Penyebab Keberhasilan**

  Keberhasilan pencapaian nilai IPA sebesar 3,175 yang melampaui target dan standar nasional dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain:

  1. Tertib Administrasi dan Penatausahaan Aset

     Pencatatan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik negara dilakukan secara akurat dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

  2. Penguatan Pengawasan dan Pengendalian Internal

     Dilakukannya monitoring berkala terhadap kondisi fisik dan administratif aset sehingga potensi permasalahan dapat segera ditindaklanjuti.

  3. Peningkatan Kompetensi Pengelola Barang

     Pengelola BMN memahami regulasi dan prosedur pengelolaan BMN, termasuk dalam aspek pengamanan, pemanfaatan, dan pemeliharaan.

  4. Komitmen terhadap Akuntabilitas dan Kepatuhan Regulasi

     Kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan aset negara menjadi faktor penting dalam memperoleh nilai penilaian yang optimal.

  Secara keseluruhan, capaian tersebut mencerminkan tata kelola aset yang semakin profesional, tertib, dan akuntabel.

- **Alternatif Solusi yang Akan Dilakukan**

  Meskipun nilai IPA telah melampaui target, langkah penguatan tetap diperlukan untuk menjaga konsistensi dan meningkatkan kualitas pengelolaan aset ke depan. Adapun alternatif solusi yang akan dilakukan antara lain:

  1. Pemutakhiran Data Aset Secara Berkala – Melakukan inventarisasi dan rekonsiliasi rutin untuk memastikan akurasi dan kesesuaian data fisik dan administrasi.
  2. Peningkatan Kompetensi Pengelola BMN – Mengikuti pelatihan dan pembaruan regulasi agar pengelolaan aset tetap sesuai ketentuan terbaru.

3. Penguatan Monitoring dan Pengawasan Internal – Melaksanakan pengecekan berkala terhadap kondisi dan pemanfaatan aset guna mencegah potensi penyimpangan.
4. Optimalisasi Pemeliharaan dan Pengamanan Aset – Menyusun jadwal pemeliharaan yang terencana agar nilai dan fungsi aset tetap terjaga.

Dengan langkah tersebut, kualitas pengelolaan aset diharapkan tetap terjaga pada kategori sangat baik dan berkelanjutan.

ANALISIS EFISIENSI
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

SASARAN STRATEGIS 1:
TERWUJUDNYA PERADILAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN, AKUNTABEL, RESPONSIF, DAN MODERN
DATA REALISASI TAHUN 2025

Tabel 81. Analisis Efisiensi Sasaran Strategis I

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	Target	Realisasi	Hasil
1. Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu	100%	100%	100%	17	17	100%
2. Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak	100%	100%	100%	17	17	100%
3. Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak	100%	100%	100%	19	19	100%
4. Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan	100%	100%	100%	17	17	100%
5. Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara	100%	100%	100%	1	1	100%
6. Persentase Perkara Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court	100%	100%	100%	24	24	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja Fisik	**100%**	**100%**	**100%**	**15,83**	**15,83**	**100%**
Rata-Rata Capaian Kinerja Keuangan	**53.385.000**	**53.380.000**	**99,99%**	**53.385.000**	**53.380.000**	**99,99%**

KESIMPULAN:
- CAPAIAN KINERJA FISIK SASARAN STRATEGIS 1 EFEKTIF YAITU SEBESAR 100%
- REALISASI ANGGARAN MENDEKATI PAGU YAITU SEBESAR 99,99%.
- KARENA CAPAIAN KINERJA FISIK (100%) > REALISASI ANGGARAN (99,99%), MAKA SASARAN STRATEGIS 1 SUDAH DICAPAI SECARA EFISIEN.

Pangkalpinang, 26 Februari 2026
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

Mohamad Syauqie, S.H., M.H.
NIP. 19791129 200212 1 002

ANALISIS EFISIENSI
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

SASARAN STRATEGIS 2:
MENINGKATNYA TINGKAT KEYAKINAN DAN KEPERCAYAAN PUBLIK
DATA REALISASI TAHUN 2025

Tabel 82. Analisis Efisiensi Sasaran Strategis II

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	Target	Realisasi	Hasil
1. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	3,78	3,88	102,65%	3,78	3,88	102,65%
Rata-Rata Capaian Kinerja Fisik	**3,78**	**3,88**	**102,65%**	**3,78**	**3,88**	**102,65%**
Rata-Rata Capaian Kinerja Keuangan	**53.385.000**	**53.380.000**	**99,99%**	**53.385.000**	**53.380.000**	**99,99%**

KESIMPULAN:
- CAPAIAN KINERJA FISIK SASARAN STRATEGIS 2 EFEKTIF YAITU SEBESAR 102,65%
- REALISASI ANGGARAN MENDEKATI PAGU YAITU SEBESAR 99,99%.
- KARENA CAPAIAN KINERJA FISIK (102,65%) > REALISASI ANGGARAN (99,99%), MAKA SASARAN STRATEGIS 2 SUDAH DICAPAI SECARA EFISIEN.

Pangkalpinang, 26 Februari 2026
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

Mohamad Syauqie, S.H., M.H.
NIP. 19791129 200212 1 002

ANALISIS EFISIENSI
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

SASARAN STRATEGIS 3:
TERWUJUDNYA MANAJEMEN PERADILAN YANG TRANSPARAN DAN PROFESIONAL
DATA REALISASI TAHUN 2025

Tabel 83. Analisis Efisiensi Sasaran Strategis III

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	Target	Realisasi	Hasil
1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	85	85	100%	85	85	100%
2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	95	98,67	103,86%	95	98,67	103,86%
3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	95	99,95	105,21%	95	99,95	105,21%
4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3,175	105,83%	3	3,175	105,83%
Rata-Rata Capaian Kinerja Fisik	**69,5**	**71,69**	**103,73%**	**69,5**	**71,69**	**103,73%**
Rata-Rata Capaian Kinerja Keuangan	**6.192.255.000**	**6.141.709.995**	**99,18%**	**6.192.255.000**	**6.141.709.995**	**99,18%**

KESIMPULAN:
- CAPAIAN KINERJA FISIK SASARAN STRATEGIS 3 EFEKTIF YAITU SEBESAR 103,73%
- REALISASI ANGGARAN MENDEKATI PAGU YAITU SEBESAR 99,18%.
- KARENA CAPAIAN KINERJA FISIK (103,73%) > REALISASI ANGGARAN (99,18%), MAKA SASARAN STRATEGIS 3 SUDAH DICAPAI SECARA EFISIEN.

Pangkalpinang, 26 Februari 2026
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

Mohamad Syauqie, S.H., M.H.
NIP. 19791129 200212 1 002

ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN/KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Tabel 84. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan

Program	Kegiatan	Realisasi Anggaran	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Analisa Dukungan
Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan TUN	PAGU : Rp 53.385.000,- Realisasi : Rp 53.380.000,- (99,99%)	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern	Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu	100%	Program dan kegiatan ini berperan mendukung kelancaran proses persidangan dan menjaga ketepatan waktu penyelesaian perkara melalui: • Anggaran konsumsi pengamanan sidang sebesar Rp 2.885.000,- yang memastikan persidangan berjalan tertib dan lancar tanpa penundaan akibat gangguan keamanan. • Anggaran sidang keliling sebesar Rp 17.500.000,- yang mempercepat penyelesaian perkara bagi pihak yang terkendala akses, sehingga mencegah keterlambatan proses.
				Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak	100%	Dukungan program dan kegiatan bersifat tidak langsung berupa: • Kelancaran persidangan (didukung pengamanan sidang) yang berdampak pada percepatan minutasi dan penyampaian salinan putusan. • Sidang keliling yang membantu mempercepat tahapan penyelesaian perkara sehingga tahapan administrasi putusan tidak tertunda.
				Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak	100%	Proses perkara tingkat pertama yang tertib dan tepat waktu mempengaruhi kelancaran administrasi lanjutan, termasuk pengiriman pemberitahuan amar putusan. Dalam hal ini, program dan kegiatan mendukung sistem manajemen perkara yang tertib dan berkelanjutan.
				Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan	100%	Kelancaran proses persidangan dan minutasi (yang didukung kegiatan dalam DIPA) memastikan tidak terjadi penumpukan perkara sehingga unggah putusan dapat dilakukan tepat waktu. Hal ini mendukung tertib administrasi publikasi putusan.
				Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara	100%	Pengamanan sidang dan dukungan operasional persidangan turut menunjang proses eksekusi agar berjalan lancar dan aman.
				Persentase Perkara Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court	100%	Program dan kegiatan mendukung peningkatan aksesibilitas dan modernisasi layanan melalui: • Posbakum yang membantu masyarakat memahami dan memanfaatkan e-Court. • Sidang keliling memperluas akses layanan peradilan, termasuk layanan berbasis elektronik.

Program	Kegiatan	Realisasi Anggaran	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Analisa Dukungan
Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan TUN	PAGU : Rp 53.385.000,- Realisasi : Rp 53.380.000,- (99,99%)	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	102,65%	Program dan kegiatan berimplikasi secara langsung meningkatkan persepsi kualitas layanan melalui: • Anggaran pelaksanaan Posbakum yang meningkatkan akses bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu. • Anggaran sidang keliling yang meningkatkan kemudahan akses layanan. • Pengamanan sidang yang menciptakan suasana persidangan yang aman dan tertib. Dukungan ini memliki efek nyata dalam meningkatkan kepuasan masyarakat pencari keadilan.
Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	PAGU : Rp 5.699.777.000,- Realisasi : Rp 5.650.166.499,- (99,12%)	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	100 %	Program dan kegiatan secara langsung mendukung peningkatan profesionalitas ASN melalui pemenuhan hak pegawai melalui Belanja Pegawai, sarana kerja, dan dukungan operasional.
				Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	103,86 %	Seluruh struktur DIPA menjadi instrumen utama pencapaian IKPA karena indikator ini mengukur kualitas pelaksanaan anggaran tersebut.
				Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	105,21 %	Struktur DIPA yang direncanakan berbasis kebutuhan riil menjadi faktor utama dalam menjaga nilai NKPA.
	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	PAGU : Rp 492.478.000,- Realisasi : Rp 491.543.496,- (99,81%)		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	105,83 %	Program dan kegiatan berperan dalam pencapaian nilai IPA melalui: • Pengadaan kendaraan dinas dan perangkat pengolah data yang menambah nilai aset yang harus dikelola secara tertib. • Anggaran pemeliharaan kantor yang mendukung kondisi aset tetap optimal. • Dukungan manajemen administrasi yang memastikan pencatatan dan pelaporan BMN berjalan sesuai ketentuan.

B. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKIP TAHUN 2024

Dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas kinerja, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang melakukan evaluasi untuk melihat faktor utama yang mendukung atau menghambat pencapaian kinerja. Selain itu, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang berusaha untuk konsisten meningkatkan akuntabilitas kinerja kepada *stakeholder* dan para pencari keadilan melalui tindaklanjut terhadap evaluasi pelaksanaan AKIP.

Mengacu pada Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya, Pengadilan Tingkat Banding melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP pada seluruh Pengadilan Tingkat Pertama di 4 (empat) Lingkungan Peradilan. Oleh karenanya, pelaksanaan AKIP Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dievaluasi secara berkala setiap tahunnya oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang.

Hasil evaluasi SAKIP Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2024 berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Nomor 413/KPTTUN.W5-TUN/OT1.6/IV/2025 tanggal 28 April 2025 ditampilkan sebagai berikut.

Tabel 85. Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

No.	Komponen/Sub Komponen Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Tahun 2023	Tahun 2024
1	Perencanaan Kinerja	30	23,70	27,60
2	Pengukuran Kinerja	30	27,90	26,40
3	Pelaporan Kinerja	15	13,80	13,05
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	22,50	21,25
Nilai Akuntabilitas Kinerja			**87,90**	**88,30**
Predikat			**A (Memuaskan)**	**A (Memuaskan)**

Hasil evaluasi tersebut menunjukan bahwa implementasi AKIP Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2024 sudah sangat baik dan mengalami peningkatan sebesar 0,4% jika dibandingkan nilai Evaluasi AKIP Tahun 2023. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang direkomendasikan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagai berikut:

A. Perencanaan Kinerja

1. Ke depannya, dokumen RKT, PK, Renstra dan Rencana Aksi dapat mempedomani IKU (untuk indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan upaya hukum kasasi agar digabungkan indikatornya sesuai dengan indikator yang terdapat di IKU).

B. Pengukuran Kinerja

1. Agar dilengkapi dengan SK Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pengumpulan Kinerja.

C. Pelaporan Kinerja

1. Agar dilengkapi dengan SOP yang berkaitan dengan pencapaian kinerja.
2. Ke depannya, satker dapat menyertakan narasi perubahan budaya kinerjanya ke arah yang lebih baik pada salah satu bagian dalam Laporan Kinerja tahunannya. Namun sebelumnya, Satker harus menentukan dahulu variabel budaya kinerja yang diinginkan, dapat berasal dari internal (misal: 5S, 3S, dan budaya lainnya yang telah ditentukan) atau budaya kinerja yang berlaku umum (contoh: BERAKHLAK). Satker mengangkat adanya kondisi budaya kinerja yang masih silo (terpisah-pisah) dan penyebab kendala kinerja kemudian diidentifikasi dan ditetapkan rencana aksi (*action plan*). Pada akhirnya, satker juga menyertakan narasi tentang hasil tindak lanjut atas rencana aksi perubahan budaya silo tersebut.

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

1. Agar dilengkapi dengan SOP yang berkaitan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi.

Semua rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan bukti dukung telah dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang pada 15 Agustus 2025. Rincian tindak lanjut tersebut ditampilkan dalam matriks tindak lanjut berikut.

MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

Tabel 86. Tindak Lanjut LHE AKIP Tahun 2024

No.	Rekomendasi LHE Tahun 2024	Permasalahan	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/Progress Penyelesaian	Link Bukti Dukung
1	**Perencanaan Kinerja** 1. Ke depannya, dokumen RKT, PK, Renstra dan Rencana Aksi dapat mempedomani IKU (untuk indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan upaya hukum kasasi agar digabungkan indikatornya sesuai dengan indikator yang terdapat di IKU).	Pada dokumen RKT, PK, Renstra dan Rencana Aksi terdapat indikator kinerja yang tidak sesuai dengan IKU (Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi, di mana untuk indikator tersebut dibuat terpisah)	1. Pemisahan indikator upaya hukum banding dan upaya hukum kasasi pada dokumen perencanaan PTUN Pangkalpinang disebabkan karena perubahan/penggabungan IKU Mahkamah Agung RI tersebut ditetapkan pada 31 Januari 2022 yang masih dalam Periode Renstra 2020 - 2024. Dikarenakan penggabungan ini akan menyebabkan kesulitan perbandingan capaian kinerja per indikator pada Laporan Kinerja dalam kurun waktu Periode Renstra 2020-2024, maka diambil keputusan untuk tetap memisahkan indikator Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dengan Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi untuk memudahkan pengukuran dan perbandingan kinerja pada Laporan Kinerja Tahun 2020-2024. Kesepakatan ini diambil pada Rapat Reviu PK, RKT dan Rencana Aksi Tahun 2024 tanggal 26 November 2024. Pada tahun 2025 yang merupakan tahun awal periode Renstra 2025-2029, indikator Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi telah digabung mempedomani Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022.	Tindak Lanjut selesai sebelum 19 Agustus 2025	28 April -15 Agustus 2025	Sekretaris	Selesai (Dokumen Keterangan Terkait IKU Banding dan Kasasi yang memuat kesepakatan rapat tanggal 26 November 2024, IKU 2025, PKT 2025 dan Rencana Aksi 2025 telah dilampirkan dalam link bukti dukung.)	https://drive.google.com/drive/folders/1TbvgREpWIimQ4k4KzGBqMJgWderz8s2v?usp=sharing

No.	Rekomendasi LHE Tahun 2024	Permasalahan	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/Progress Penyelesaian	Link Bukti Dukung
2	**Pengukuran Kinerja** 1. Agar dilengkapi dengan SK Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pengumpulan Kinerja.	Untuk SOP Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja telah tersedia, hanya saja belum dilengkapi dengan SK Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pengumpulan Kinerja	1. Melengkapi SK Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pengumpulan Kinerja.	Tindak Lanjut selesai sebelum 19 Agustus 2025	28 April -15 Agustus 2025	Sekretaris	Selesai (Dokumen SK Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pengumpulan Kinerja telah dilampirkan dalam link *evidence*.)	https://drive.google.com/drive/folders/1R35ArS8h13MfdV6ZyeF4IS8ug11k_qey?usp=sharing
3	**Pelaporan Kinerja** 1. Agar dilengkapi dengan SOP yang berkaitan dengan pencapaian kinerja. 2. Ke depannya, satker dapat menyertakan narasi perubahan budaya kinerjanya ke arah yang lebih baik pada salah satu bagian dalam Laporan Kinerja tahunannya. Namun sebelumnya, Satker harus menentukan dahulu variabel budaya kinerja yang diinginkan, dapat berasal dari internal (misal: 5S, 3S, dan budaya lainnya yang telah ditentukan) atau budaya kinerja yang berlaku umum (contoh: BERAKHLAK). Satker mengangkat adanya kondisi budaya kinerja yang masih silo (terpisah-pisah) dan penyebab kendala kinerja kemudian diidentifikasi dan ditetapkan rencana aksi (action plan). Pada akhirnya, satker juga menyertakan narasi tentang hasil tindak lanjut atas rencana aksi perubahan budaya silo tersebut.	1. Belum dilengkapi dengan SOP yang berkaitan dengan pencapaian kinerja. 2. Belum ditemukan titik perubahan budaya kinerja pada satker yang dimaksud dalam Laporan Kinerja.	1. Melengkapi SOP yang berkaitan dengan pencapaian kinerja. 2. Ke depannya, satker akan menyertakan narasi perubahan budaya kinerja dalam Laporan Kinerja tahunan.				Selesai (SOP yang berkaitan dengan pencapaian kinerja telah dilampirkan dalam link *evidence*.)	https://drive.google.com/drive/folders/1EPaNZ57_-eraahaanKznRx1AZFl6A-AA?usp=sharing

No.	Rekomendasi LHE Tahun 2024	Permasalahan	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/Progress Penyelesaian	Link Bukti Dukung
4	**Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal** 1. Agar dilengkapi dengan SOP yang berkaitan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi.	Belum dilengkapi dengan SOP yang berkaitan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi	1. Melengkapi SOP yang berkaitan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi.	Tindak Lanjut selesai sebelum 19 Agustus 2025	28 April -15 Agustus 2025	Sekretaris	Selesai (SOP yang berkaitan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi telah dilampirkan dalam link *evidence*.)	https://drive.google.com/drive/folders/1Feaz00AoaMn9NJLMyjeNKFvNldMjtHT6?usp=sharing

C. PERUBAHAN BUDAYA KINERJA

1. Kondisi Awal

Budaya kinerja di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah berjalan dengan baik, di antaranya budaya kinerja transparansi, integritas serta profesionalisme. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2025. Namun, ada kondisi di mana budaya kinerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang masih cenderung bersifat silo (terpisah antar bagian), di mana:

- Koordinasi antar kepaniteraan dan kesekretariatan belum optimal.
- Fokus kinerja masih bersifat sektoral sesuai tupoksi masing-masing bagian.
- Pemahaman keterkaitan antara program, anggaran, dan indikator kinerja belum sepenuhnya terintegrasi.

Kondisi tersebut menjadi dasar perlunya penguatan budaya kinerja yang terstruktur dan terinternalisasi.

2. Penguatan Budaya Kinerja 5 S

Pada Tahun 2025, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang melakukan penguatan budaya kinerja 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, dan Sopan) sebagai nilai dasar dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan.

Budaya 5S dimaknai sebagai berikut:

- Senyum → menciptakan suasana pelayanan yang ramah dan terbuka.
- Salam → membangun komunikasi yang menghargai.
- Sapa → menunjukkan kepedulian dan responsivitas.
- Santun → menjaga etika dalam interaksi kerja dan pelayanan.
- Sopan → mencerminkan profesionalitas dan integritas aparatur.

Budaya 5S tidak hanya diterapkan dalam pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga dalam interaksi internal antar bagian untuk menghilangkan budaya silo.

3. Rencana Aksi (*Action Plan*)

Untuk mengimplementasikan budaya 5S dan mengurangi pola kerja silo, dilakukan langkah-langkah:

1. Internalisasi budaya 5S melalui apel pagi dan rapat bulanan.
2. Pemasangan media pengingat (*banner*/poster) 5S di area pelayanan dan ruang kerja.

3. Penerapan standar pelayanan berbasis 5S pada PTSP dan dalam persidangan.
4. Monitoring pimpinan terhadap penerapan 5S dalam pelayanan publik.
5. Peningkatan koordinasi lintas bagian dalam rapat monitoring kinerja secara berkala.

4. **Hasil Tindak Lanjut (Perubahan Budaya Kinerja) Setelah Penguatan 5 S**

Sebagai hasil implementasi rencana aksi tersebut:

- Koordinasi internal menunjukkan komunikasi yang lebih terbuka dan harmonis.
- Tidak terdapat lagi keterlambatan akibat miskomunikasi lintas unit.
- Keterkaitan antara program, anggaran, dan indikator kinerja semakin dipahami oleh aparatur.
- Capaian indikator strategis dapat dipertahankan secara optimal.
- Penyusunan laporan kinerja menjadi lebih terintegrasi karena adanya sinergi dan komunikasi yang baik antar bagian untuk menyediakan data-data yang diperlukan.
- Pelayanan kepada para pihak menjadi lebih ramah dan responsif.
- Tidak terdapat keluhan signifikan terkait sikap pelayanan.
- Indeks Kepuasan Pengguna Layanan menunjukkan tren positif.

Perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran dari pola kerja sektoral menuju budaya kerja yang lebih komunikatif, kolaboratif, dan berorientasi pada pelayanan prima.

Penetapan dan implementasi budaya kinerja 5S pada Tahun 2025 menjadi langkah konkret dalam membangun tata kelola yang lebih harmonis, profesional, dan terintegrasi, serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan peradilan dan pencapaian sasaran strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

D. REALISASI ANGGARAN



Untuk melaksanakan seluruh sasaran kinerja yang telah diperjanjikan, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang didukung oleh anggaran yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Anggaran pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang terdiri dari 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yaitu DIPA Badan Urusan Administrasi dan DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

Anggaran semula Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025 adalah sebesar Rp 4.420.687.000,- untuk DIPA 01 dan Rp 53.385.000,- untuk DIPA 05. Selama tahun 2025, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang melakukan 22x revisi DIPA 01 yang menyebabkan perubahan pada PAGU DIPA 01 menjadi Rp 6.192.255.000,- dan 6x revisi DIPA 05 tanpa perubahan PAGU. Realisasi anggaran total sebesar Rp.6.195.089.995,- atau sekitar 99,19% dari total keseluruhan PAGU. Rincian data realisasi anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025 ditampilkan dalam tabel berikut.

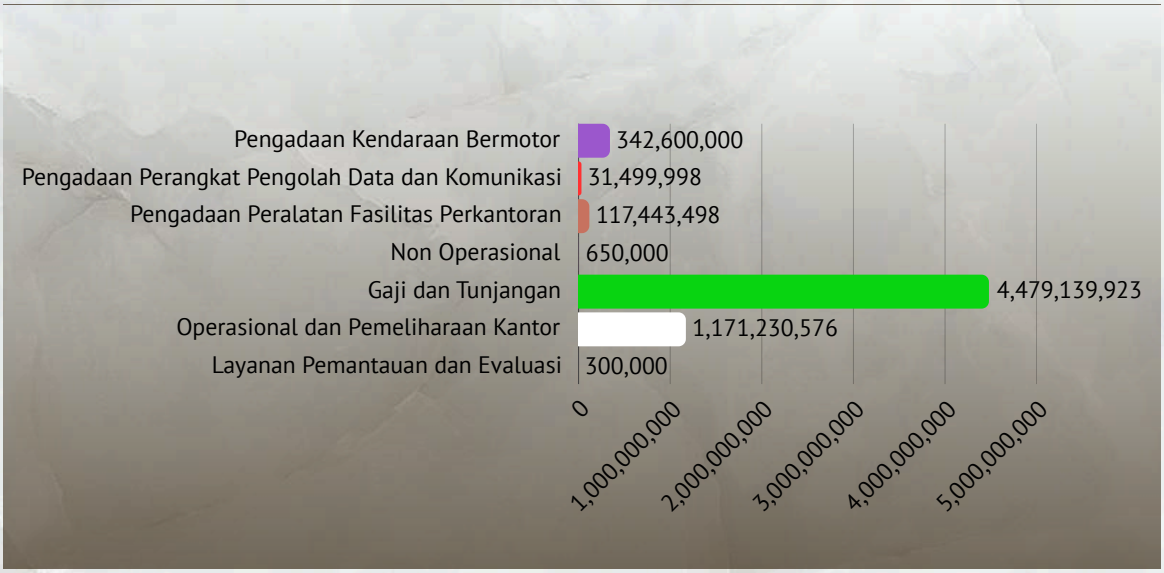
Tabel 87. Realisasi Anggaran Tahun 2025

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
DIPA 01 (401968)			
Belanja Pegawai (51)	4.528.600.000	4.479.139.923	98,91
Belanja Barang (52)	1.171.177.000	1.171.026.576	99,99
Belanja Modal (53)	492.478.000	491.543.496	99,81
JUMLAH I	**6.192.255.000**	**6.141.709.995**	**99,18**
DIPA 05 (403429)			
Belanja Barang (52)	53.385.000	53.380.000	99,99
JUMLAH II	**53.385.000**	**53.380.000**	**99,99**
JUMLAH TOTAL I+II	**6.245.640.000**	**6.195.089.995**	**99,19**

1. DIPA BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Pada awal tahun 2025, anggaran DIPA Badan Urusan Administrasi (DIPA 01) yang diperoleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah sebesar Rp 4.420.687.000,-, namun setelah dilakukan beberapa kali revisi anggaran, DIPA terakhir Badan Urusan Administrasi (DIPA 01) yang diperoleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah sebesar Rp 6.192.255.000,- yang digunakan untuk keperluan Belanja Pegawai (51), Belanja Barang (52), dan Belanja Modal. Realisasi anggaran dijelaskan secara rinci pada grafik dan tabel berikut.

Grafik 4. Realisasi Anggaran DIPA 01



TABEL 88. REALISASI ANGGARAN DIPA 01

No.	Program/ Kegiatan	Pagu Semula	Pagu Setelah Revisi	Realisasi	Sisa Anggaran	Keterangan
Program Dukungan Manajemen						
1.	Belanja Pegawai	2.782.746.000	4.528.600.000	4.479.139.923	49.460.077	98,91%
2.	Belanja Barang	1.237.963.000	1.171.177.000	1.171.026.576	150.424	99,99%
3.	Belanja Modal	399.978.000	492.278.000	491.543.496	934.504	99,81%
Jumlah		4.420.687.000	6.192.255.000	6.141.709.995	50.545.005	99,18%

TABEL 89. RINCIAN BELANJA DIPA 01 TAHUN 2025

No.	Jenis Belanja	Pagu Setelah Revisi	Realisasi	Keterangan
Belanja Pegawai				
1	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	4.528.600.000	4.479.139.923	98,91%
Belanja Barang				
1	Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran	308.584.000	308.578.940	99,99%
2	Langganan Daya dan Jasa	204.024.000	204.023.600	99,99%
3	Pemeliharaan Kantor	431.557.000	431.543.026	99,99%
4	Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor	74.702.000	74.702.000	100%
5	Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim dan Hakim Ad Hoc	113.400.000	113.400.000	100%
6	Koordinasi/Konsultasi ke Pusat/Tingkat Banding/Tingkat Pertama	37.910.000	37.829.010	99,79%
7	Dokumen Pemantauan dan Evaluasi	300.000	300.000	100%
8	Pengadaan Peralatan dan Mesin Ekstrakomptabel	700.000	650.000	92,86%
Belanja Modal				
1	Pengadaan Kendaraan Dinas	342.600.000	342.600.000	100%
2	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	31.500.000	31.499.998	99,99%
3	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	118.378.000	117.443.498	99,21%
Jumlah		6.192.255.000	6.141.709.995	99,18%

2. DIPA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN TUN

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang juga memperoleh anggaran DIPA Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara untuk melaksanakan kegiatan yang anggarannya ada di Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara seperti Pelayanan Pos Bantuan Hukum, Pengamanan Sidang, dan Sidang Keliling. Adapun realisasi anggaran untuk DIPA Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Grafik 5. Realisasi Anggaran DIPA 05



TABEL 90. REALISASI ANGGARAN DIPA 05

No.	Program/ Kegiatan	Pagu Semula	Pagu Setelah Revisi	Realisasi	Sisa Anggaran	Keterangan
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)						
1	Belanja Barang	53.385.000	53.385.000	53.380.000	5.000	99,99%
Jumlah		53.385.000	53.385.000	53.380.000	5.000	99,99%

TABEL 91. RINCIAN BELANJA DIPA 05 TAHUN 2025

No.	Jenis Belanja	Pagu Setelah Revisi	Realisasi	Keterangan
Belanja Barang				
1	Pelaksanaan Pengamanan Sidang	2.885.000	2.880.000	99,83%
2	Pos Bantuan Hukum	33.000.000	33.000.000	100%
3	Sidang di Luar Gedung Pengadilan	17.500.000	17.500.000	100%
Jumlah		53.385.000	53.380.000	99,99%

Realisasi anggaran tahun 2025 secara keseluruhan mencapai 99,19%, menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2024 yang terealisasi sebesar 98,11% dengan nilai Rp 3.901.297.397,-. Dengan demikian, terjadi kenaikan tingkat realisasi sebesar 1,08% pada tahun 2025.

Peningkatan tersebut mencerminkan semakin optimalnya pelaksanaan anggaran, baik dari sisi perencanaan, pengendalian, maupun percepatan penyerapan anggaran. Selain itu, capaian mendekati 100% menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran semakin efektif dan efisien, serta mampu meminimalkan sisa anggaran pada akhir tahun.

Secara keseluruhan, realisasi tahun 2025 menunjukkan kinerja pengelolaan anggaran yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya dan menggambarkan konsistensi dalam menjaga kualitas pelaksanaan anggaran. Lebih rinci perbandingan realisasi anggaran antara tahun 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 92
PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024 DAN 2025

No.	Program	Pagu Anggaran		Realisasi Anggaran			
		2024	2025	2024		2025	
		Rp.	Rp.	Rp.	%	Rp.	%
1.	Program Dukungan Manajemen	3.899.182.000	6.192.255.000	3.826.310.747	98,13	6.141.709.995	99,18%
2.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	77.250.000	53.385.000	74.986.650	97,07	53.380.000	99,99%
Jumlah		**3.976.432.000**	**6.245.640.000**	**3.901.297.397**	**98,11**	**6.195.089.995**	**99,19%**

B

A

B









IV



PENUTUP



a. Kesimpulan
b. Rekomendasi



A. KESIMPULAN

Laporan kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan selama Tahun 2025. Laporan kinerja tahun 2025 juga berfungsi sebagai tolak ukur awal/*baseline* atas pengukuran kinerja di Periode Renstra 2025-2029.

Secara umum, kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang di tahun 2025 sudah optimal dan berhasil mencapai semua target yang telah ditetapkan dengan nilai kinerja 102,13% dengan rincian sebagai berikut.

1. Capaian Sasaran I Terwujudnya Proses Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern sebesar 100%.
2. Capaian Sasaran II Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik sebesar 102,65%.
3. Capaian Sasaran III Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional sebesar 103,73%.

Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik dan melampaui sebagian besar target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja. Seluruh indikator strategis berhasil mencapai bahkan melampaui target, baik pada aspek layanan peradilan, kepuasan masyarakat, profesionalitas ASN, maupun tata kelola keuangan dan aset.

Pada aspek pelayanan peradilan, penggunaan e-Court telah mencapai 100%, penyelesaian permohonan eksekusi terealisasi secara optimal, serta penyediaan salinan putusan tepat waktu terlaksana sesuai target. Hal ini menunjukkan komitmen terhadap modernisasi peradilan dan peningkatan kualitas layanan kepada para pencari keadilan.

Pada aspek kualitas layanan publik, Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan melampaui target yang ditetapkan dalam Renstra, mencerminkan meningkatnya kepercayaan dan persepsi positif masyarakat terhadap layanan pengadilan.

Dalam bidang tata kelola organisasi, Indeks Profesionalitas ASN menunjukkan capaian sesuai target dan berada di atas standar nasional, yang menandakan pengelolaan sumber daya manusia berjalan secara efektif dan berorientasi pada peningkatan kompetensi serta integritas aparatur.

Sementara itu, pada aspek pengelolaan keuangan dan perencanaan anggaran, nilai IKPA dan NKPA menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dan melampaui target jangka menengah maupun standar nasional.

Realisasi anggaran tahun 2025 juga mencapai 99,19%, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, yang mencerminkan pelaksanaan anggaran yang efektif, tertib, dan akuntabel. Demikian pula, Indeks Pengelolaan Aset berada di atas target dan standar nasional, menunjukkan tata kelola aset yang semakin profesional.

Secara keseluruhan, capaian kinerja tahun 2025 menggambarkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Keberhasilan ini menjadi fondasi yang kuat untuk mempertahankan serta meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pada periode perencanaan berikutnya, sejalan dengan arah kebijakan dan Renstra Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025–2029.

Keberhasilan capaian di tahun 2025 ini didukung oleh berbagai faktor, di antaranya komitmen pimpinan dan segenap aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dalam mencapai target yang ditetapkan dan upaya monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala untuk memantau kualitas kinerja yang dihasilkan serta dukungan anggaran, sarana prasarana dan teknologi informasi yang baik.

Sangat disadari bahwa perlu terus dilakukannya peningkatan kinerja kualitas pelayanan peradilan untuk memenuhi tuntutan berbagai pihak masyarakat pencari keadilan terhadap pelayanan peradilan yang profesional, efektif, efisen, dan bersih. Pengukuran kinerja yang menjadi dasar penyusunan laporan kinerja ini merupakan wujud nyata tindakan perbaikan kinerja yang terus dilakukan oleh seluruh jajaran Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

Laporan kinerja tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi salah satu alat ukur kinerja yang andal dan akuntabel, serta dapat memberikan informasi terkait pencapaian kinerja di tahun 2025 sebagai bahan evaluasi di tahun-tahun mendatang.

B. REKOMENDASI

Melihat evaluasi akuntabilitas kinerja sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa nilai capaian kinerja telah sangat baik dan melebihi nilai 100%. Kiranya capaian ini perlu dipertahankan dan dapat menjadi suatu pertimbangan untuk meningkatkan target capaian kinerja di tahun yang akan datang.

Kendati nilai capaian kinerja tahun 2025 telah optimal, namun perlu terus dilakukan upaya-upaya perbaikan untuk hasil yang lebih baik di masa mendatang. Beberapa rekomendasi yang kiranya dapat dilaksanakan untuk kinerja yang lebih baik adalah:

1. Peningkatan Target Secara Progresif dan Berbasis Risiko

   Menetapkan target yang lebih menantang namun realistis dengan mempertimbangkan tren capaian dan analisis risiko.

2. Optimalisasi Pemanfaatan e-Court dan Layanan Digital

   Meningkatkan kualitas pemanfaatan e-Court tidak hanya pada aspek penggunaan 100%, tetapi juga pada kecepatan, ketepatan, dan kemudahan akses layanan bagi para pihak.

3. Peningkatan Ketepatan Waktu Penyelesaian Perkara dan Layanan Administratif

   Melakukan monitoring berkala terhadap penyelesaian perkara, pengiriman salinan putusan, dan pelaksanaan eksekusi agar tetap sesuai standar waktu yang ditetapkan.

4. Penguatan Kapasitas SDM dan Budaya Kinerja

   Mendorong peningkatan kompetensi aparatur serta memperkuat budaya kerja profesional, responsif, dan berorientasi pada pelayanan prima.

5. Penguatan Tata Kelola Perencanaan, Anggaran, dan Aset

   Mempertahankan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran serta pengelolaan aset yang akuntabel dan tertib administrasi.

Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan proses peradilan semakin modern dan berkualitas, serta capaian kinerja tidak hanya dapat dipertahankan tetapi terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

LAMPIRAN









a. Struktur Organisasi
b. Matriks Renstra 2025-2029
c. Revisi Pohon Kinerja 2025
d. Indikator Kinerja Utama
e. Revisi Indikator Kinerja Utama
f. Rencana Kinerja Tahun 2025
g. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
h. Revisi Rencana Kinerja I Tahun 2025
i. Revisi Perjanjian Kinerja II Tahun 2025
j. Checklist Reviu
k. Capaian Kinerja Akumulatif Sebelum Revisi PKT 2025
l. Capaian Kinerja Setelah Revisi PKT 2025
m. SK Tim Penyusun LKjIP 2025
n. Analisis Efisiensi
o. Pengukuran Kinerja Berkala Sebelum Perubahan RENSTRA
p. Pengukuran Kinerja Berkala Setelah Perubahan RENSTRA
q. Monev Rencana Aksi Berkala
r. Revisi Monev Rencana Aksi Berkala
s. Tindak Lanjut LHE Tahun 2024
t. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target MA
u. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah
v. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Kinerja
w. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan



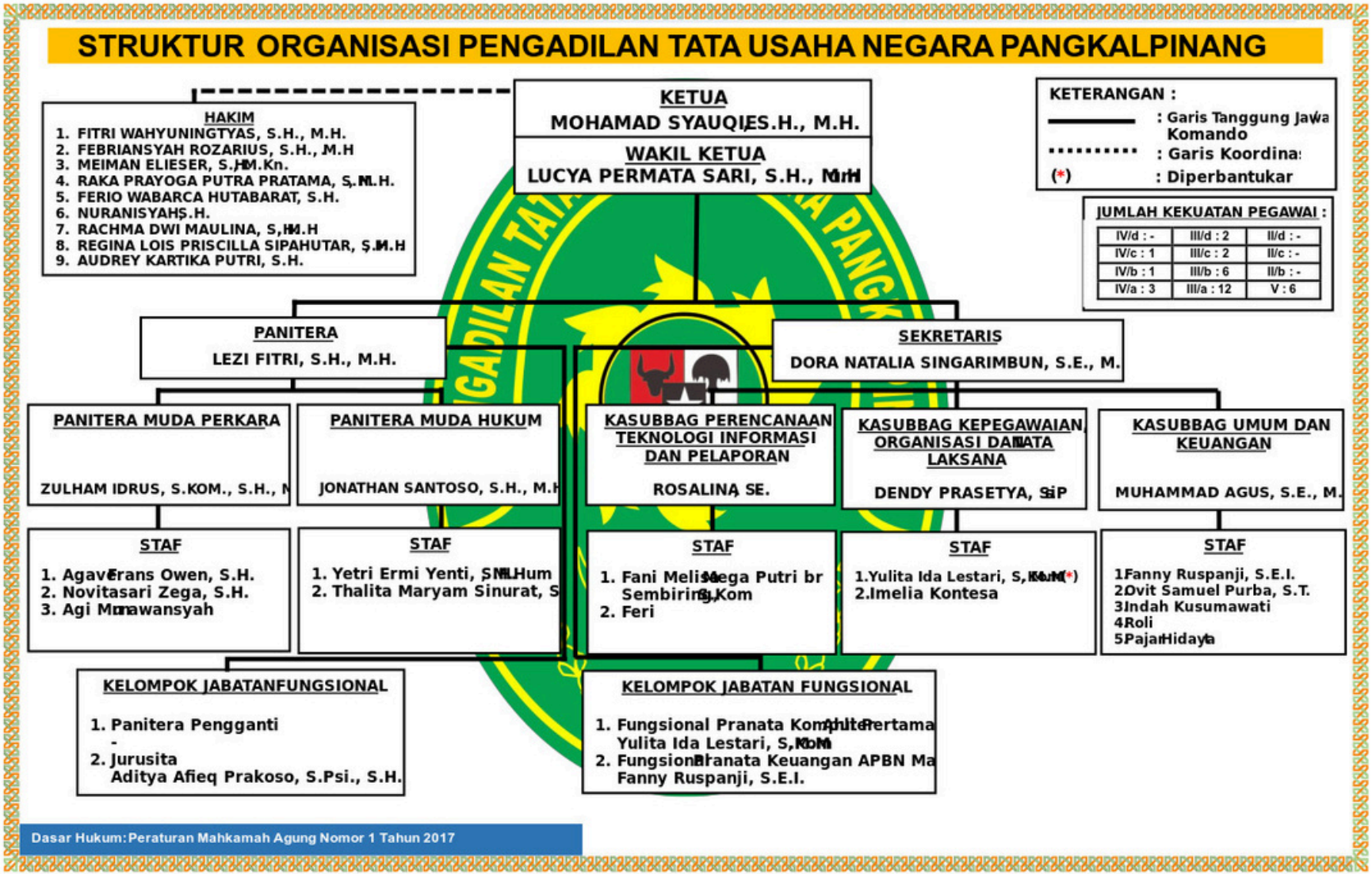




LAMPIRAN I

STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PANGKALPINANG



LAMPIRAN II

MATRIKS RENSTRA
2025-2029

MATRIKS RENCANA STRATEGIS 2025-2029
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

Visi : Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang Agung

Misi : Menjaga Kemandirian Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;

Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan;

Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;

Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;

No.	Tujuan	Sasaran Strategis		Target					Pendanaan			
		Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029	Program	Kegiatan	Pelaksana	Alokasi Anggaran
1	Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara, dan Berkeadilan.	Terwujudnya Peradilan Yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif Dan Modern.	a. Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Kepaniteraan	268.387.000
			b. Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak.	100%	100%	100%	100%	100%				
			c. Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak.	100%	100%	100%	100%	100%				

			d. Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan.	100%	100%	100%	100%	100%				
			e. Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara.	100%	100%	100%	100%	100%				
			f. Persentase Perkara Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court.	100%	100%	100%	100%	100%				
		Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	3,78	3,8	3,82	3,84	3,85	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Kepaniteraan	268.387.000
2	Mewujudkan Badan Peradilan yang Transparan, Akuntabel, Modern, dan Profesional.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	85	85	85	85	85	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Kesekretariatan	42.554.756.000
			Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	95	95	95	95	95				
			Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	95	95	95	95	95				
			Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3,05	3,10	3,15	3,2				

LAMPIRAN III

REVISI POHON KINERJA TAHUN 2025

REVISI POHON KINERJA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG 2025

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

PIMPINAN
KETUA DAN WAKIL KETUA

VISI & MISI

Visi :

Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Yang Agung

Misi:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan;
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;

TUJUAN

1. Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara, dan Berkeadilan.
2. Mewujudkan Badan Peradilan yang Transparan, Akuntabel, Modern, dan Profesional

PROGRAM

Penegakan dan Pelayanan Hukum

Dukungan Manajemen

SASARAN

1. Terwujudnya Peradilan Yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern
2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

1. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

INDIKATOR

1. Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu
2. Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak
3. Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak
4. Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan
5. Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara
6. Persentase Perkara Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court
7. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan

1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan
2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan
3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran
4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Eselon III (Panitera)

Eselon III (Sekretaris)

HAKIM

KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR
Mengadili perkara TUN	1. Meningkatnya Efektivitas dan Ketepatan Waktu Penyelesaian Perkara 2. Meningkatnya Profesionalisme dan Integritas Hakim	1. Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu 2. Putusan yang Diselesaikan Tepat Waktu 3. Kepatuhan Terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim 4. Kedisiplinan Hakim 5. Kehadiran Hakim Dalam Persidangan Sesuai Jadwal
Melaksanakan tugas pengawasan	Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	Laporan Hasil Pengawasan yang selesai ditindaklanjuti

ESELON III PANITERA DAN SEKRETARIS

Pimpinan (Sasaran 1)

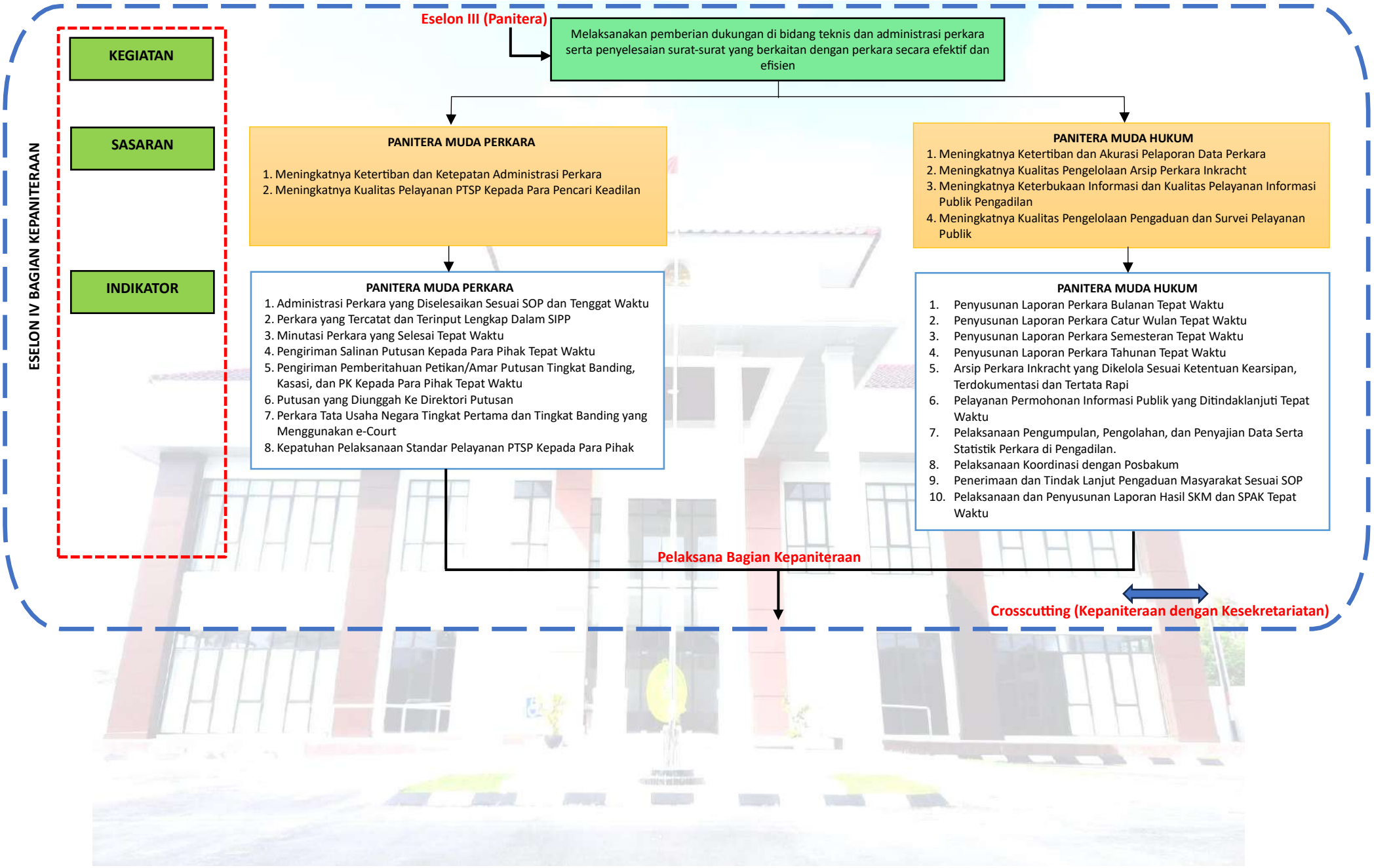
Pimpinan (Sasaran 2)

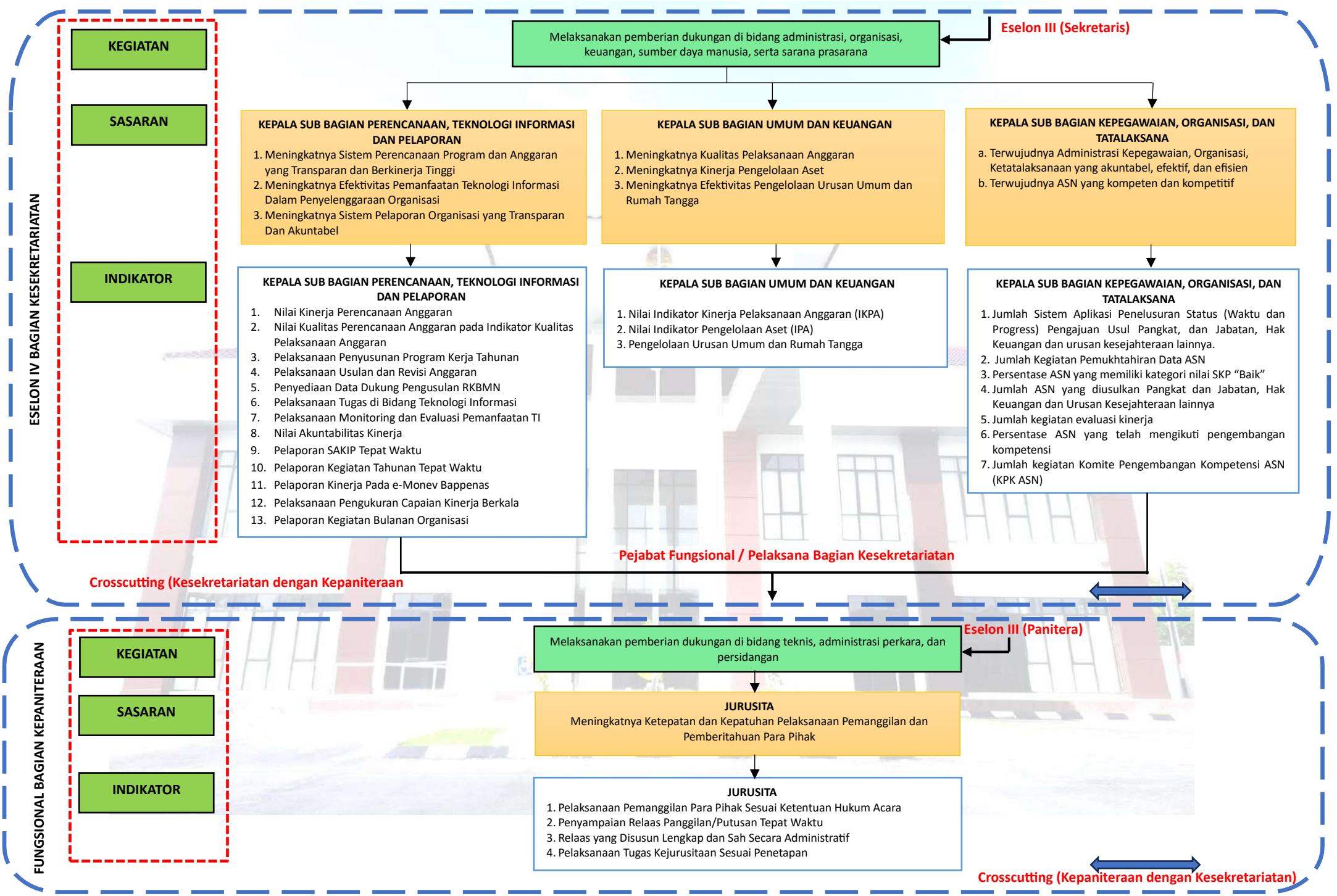
KEGIATAN	PANITERA	SEKRETARIS
	Melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta penyelesaian surat-surat yang berkaitan dengan perkara secara efektif dan efisien	Melaksanakan dukungan manajemen dalam peningkatan Indeks Kepuasan Pelayanan Publik serta tata kelola administrasi, keuangan, SDM, dan sarana prasarana secara efektif dan efisien
SASARAN	1. Meningkatnya Efektivitas dan Ketertiban Administrasi Perkara 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepaniteraan Kepada Para Pencari Keadilan	1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Para Pencari Keadilan 2. Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Anggaran dan Pengelolaan Aset 3. Meningkatnya Sistem Perencanaan dan Pelaporan Organisasi yang Akuntabel dan Berkinerja Tinggi Berbasis Teknologi Informasi 4. Meningkatnya Ketatalaksanaan Administrasi Kepegawaian, Organisasi dan SDM yang Profesional, Akuntabel, Efektif dan Efisien
INDIKATOR	1. Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu 2. Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak 3. Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak 4. Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan 5. Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara 6. Perkara Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court 7. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	1. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan 2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 3. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) 4. Pengelolaan Urusan Umum dan Rumah Tangga 5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran 6. Pelaksanaan Pelaporan Organisasi Tepat Waktu 7. Pelaksanaan Tugas di Bidang Teknologi Informasi 8. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) 9. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian 10. Pengelolaan Ketertiban Organisasi dan Tata Laksana Pengadilan

Eselon IV Bagian Kepaniteraan

Crosscutting (Panitera dengan Sekretaris)

Eselon IV Bagian Kesekretariatan


ESELON IV BAGIAN KEPANITERAAN
KEGIATAN
SASARAN
INDIKATOR
Eselon III (Panitera)
Melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta penyelesaian surat-surat yang berkaitan dengan perkara secara efektif dan efisien
PANITERA MUDA PERKARA
1. Meningkatnya Ketertiban dan Ketepatan Administrasi Perkara
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan PTSP Kepada Para Pencari Keadilan
PANITERA MUDA HUKUM
1. Meningkatnya Ketertiban dan Akurasi Pelaporan Data Perkara
2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Perkara Inkracht
3. Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Kualitas Pelayanan Informasi Publik Pengadilan
4. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pengaduan dan Survei Pelayanan Publik
PANITERA MUDA PERKARA
1. Administrasi Perkara yang Diselesaikan Sesuai SOP dan Tenggat Waktu
2. Perkara yang Tercatat dan Terinput Lengkap Dalam SIPP
3. Minutasi Perkara yang Selesai Tepat Waktu
4. Pengiriman Salinan Putusan Kepada Para Pihak Tepat Waktu
5. Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi, dan PK Kepada Para Pihak Tepat Waktu
6. Putusan yang Diunggah Ke Direktori Putusan
7. Perkara Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court
8. Kepatuhan Pelaksanaan Standar Pelayanan PTSP Kepada Para Pihak
PANITERA MUDA HUKUM
1. Penyusunan Laporan Perkara Bulanan Tepat Waktu
2. Penyusunan Laporan Perkara Catur Wulan Tepat Waktu
3. Penyusunan Laporan Perkara Semesteran Tepat Waktu
4. Penyusunan Laporan Perkara Tahunan Tepat Waktu
5. Arsip Perkara Inkracht yang Dikelola Sesuai Ketentuan Kearsipan, Terdokumentasi dan Tertata Rapi
6. Pelayanan Permohonan Informasi Publik yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu
7. Pelaksanaan Pengumpulan, Pengolahan, dan Penyajian Data Serta Statistik Perkara di Pengadilan.
8. Pelaksanaan Koordinasi dengan Posbakum
9. Penerimaan dan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Sesuai SOP
10. Pelaksanaan dan Penyusunan Laporan Hasil SKM dan SPAK Tepat Waktu
Pelaksana Bagian Kepaniteraan
Crosscutting (Kepaniteraan dengan Kesekretariatan)


ESELON IV BAGIAN KESEKRETARIATAN
KEGIATAN
SASARAN
INDIKATOR
Melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana prasarana
Eselon III (Sekretaris)
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN
1. Meningkatnya Sistem Perencanaan Program dan Anggaran yang Transparan dan Berkinerja Tinggi
2. Meningkatnya Efektivitas Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Penyelenggaraan Organisasi
3. Meningkatnya Sistem Pelaporan Organisasi yang Transparan Dan Akuntabel
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
1. Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Anggaran
2. Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Aset
3. Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Urusan Umum dan Rumah Tangga
KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI, DAN TATALAKSANA
a. Terwujudnya Administrasi Kepegawaian, Organisasi, Ketatalaksanaan yang akuntabel, efektif, dan efisien
b. Terwujudnya ASN yang kompeten dan kompetitif
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN
1. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran
2. Nilai Kualitas Perencanaan Anggaran pada Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran
3. Pelaksanaan Penyusunan Program Kerja Tahunan
4. Pelaksanaan Usulan dan Revisi Anggaran
5. Penyediaan Data Dukung Pengusulan RKBMN
6. Pelaksanaan Tugas di Bidang Teknologi Informasi
7. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan TI
8. Nilai Akuntabilitas Kinerja
9. Pelaporan SAKIP Tepat Waktu
10. Pelaporan Kegiatan Tahunan Tepat Waktu
11. Pelaporan Kinerja Pada e-Monev Bappenas
12. Pelaksanaan Pengukuran Capaian Kinerja Berkala
13. Pelaporan Kegiatan Bulanan Organisasi
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA)
3. Pengelolaan Urusan Umum dan Rumah Tangga
KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI, DAN TATALAKSANA
1. Jumlah Sistem Aplikasi Penelusuran Status (Waktu dan Progress) Pengajuan Usul Pangkat, dan Jabatan, Hak Keuangan dan urusan kesejahteraan lainnya.
2. Jumlah Kegiatan Pemukhtahiran Data ASN
3. Persentase ASN yang memiliki kategori nilai SKP "Baik"
4. Jumlah ASN yang diusulkan Pangkat dan Jabatan, Hak Keuangan dan Urusan Kesejahteraan lainnya
5. Jumlah kegiatan evaluasi kinerja
6. Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi
7. Jumlah kegiatan Komite Pengembangan Kompetensi ASN (KPK ASN)
Pejabat Fungsional / Pelaksana Bagian Kesekretariatan
Crosscutting (Kesekretariatan dengan Kepaniteraan
FUNGSIONAL BAGIAN KEPANITERAAN
KEGIATAN
SASARAN
INDIKATOR
Melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis, administrasi perkara, dan persidangan
Eselon III (Panitera)
JURUSITA
Meningkatnya Ketepatan dan Kepatuhan Pelaksanaan Pemanggilan dan Pemberitahuan Para Pihak
JURUSITA
1. Pelaksanaan Pemanggilan Para Pihak Sesuai Ketentuan Hukum Acara
2. Penyampaian Relaas Panggilan/Putusan Tepat Waktu
3. Relaas yang Disusun Lengkap dan Sah Secara Administratif
4. Pelaksanaan Tugas Kejurusitaan Sesuai Penetapan
Crosscutting (Kepaniteraan dengan Kesekretariatan)

FUNGSIONAL BAGIAN KESEKRETARIATAN

KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

Eselon IV Bagian Kesekretariatan

Melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi , organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana prasarana

FUNGSIONAL SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

Pengelolaan Anggaran Berdasarkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

FUNGSIONAL SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

1. Nilai Deviasi Halaman III DIPA DIPA 01 dan DIPA 05
2. Nilai Penyerapan Anggaran DIPA 01 dan DIPA 05
3. Nilai Belanja Kontraktual DIPA 01 dan DIPA 05
4. Nilai Penyelesaian Tagihan DIPA 01 dan DIPA 05
5. Nilai Pengelolaan UP dan TUP DIPA 01 dan DIPA 05
6. Nilai Capaian Output DIPA 01 dan DIPA 05
7. Nilai Dispensasi SPM (Pengurang) DIPA 01 dan DIPA 05
8. Pelaksanaan Tugas Perbendaharaan Sesuai SOP
9. Penyusunan Laporan Keuangan Tepat Waktu

FUNGSIONAL SUB KEPEGAWAIAN, ORGANISASI, DAN TATALAKSANA

Dukungan Peningkatan Ketertiban Organisasi dan Tata Laksana Pengadilan

FUNGSIONAL SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI, DAN TATALAKSANA

1. Pemutakhiran Dokumen Organisasi dan Tata Laksana (SOP, dll)
2. Pelaksanaan Evaluasi Jabatan, ANJAB dan ABK
3. Dukungan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas

Crosscutting (Kesekretariatan dengan Kepaniteraan)

PELAKSANA BAGIAN KEPANITERAAN

KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

Melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis, administrasi perkara, dan pelayanan

Eselon IV Bagian Kepaniteraan

PELAKSANA SUB BAGIAN PANITERA MUDA PERKARA

1. Dukungan Administrasi Perkara yang Tertib dan Akurat
2. Dukungan Kualitas Layanan PTSP Kepada Para Pencari Keadilan

PELAKSANA SUB BAGIAN PANITERA MUDA PERKARA

1. Terselenggaranya Penyelesaian Administrasi Perkara Sesuai Penugasan
2. Terselenggaranya Kelengkapan Berkas Perkara
3. Terselenggaranya Ketepatan Penginputan Data Perkara Dalam SIPP
4. Terselenggaranya Dukungan Administrasi Persidangan Tepat Waktu
5. Terselenggaranya Putusan yang Diunggah ke Direktori Putusan
6. Terselenggaranya Pelaksanaan Standar Layanan PTSP Kepada Para Pihak

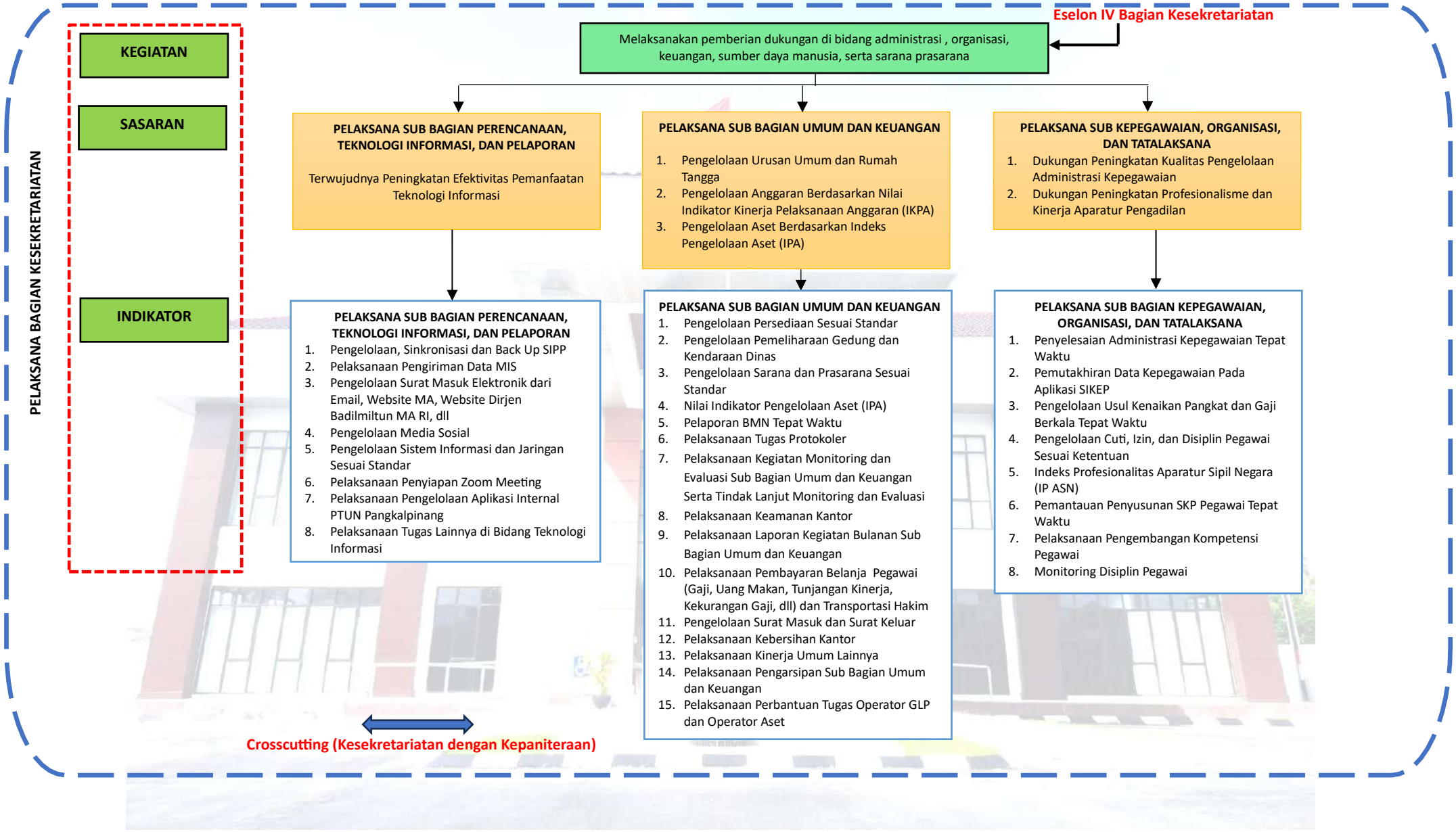
PELAKSANA SUB BAGIAN PANITERA MUDA HUKUM

1. Dukungan Administrasi dan Pelaporan Data Perkara
2. Dukungan Pengelolaan Arsip Perkara Inkracht
3. Dukungan Pelayanan Informasi Publik
4. Dukungan Pengelolaan Pengaduan dan Survei Pelayanan Publik

PELAKSANA SUB BAGIAN PANITERA MUDA HUKUM

1. Terselenggaranya Dukungan Penyusunan Laporan Perkara Bulanan
2. Terselenggaranya Dukungan Penyusunan Laporan Perkara Catur Wulan
3. Terselenggaranya Dukungan Penyusunan Laporan Perkara Semesteran
4. Terselenggaranya Dukungan Penyusunan Laporan Perkara Tahunan
5. Terselenggaranya Penataan Arsip Perkara Inkracht
6. Terselenggaranya Pelayanan Permohonan Informasi Publik Sesuai Penugasan
7. Terselenggaranya Pengumpulan dan Pengolahan Data Serta Statistik Perkara
8. Terselenggaranya Dukungan Pelaksanaan Posbakum
9. Terselenggaranya Penerimaan dan Pencatatan Pengaduan Masyarakat Sesuai SOP
10. Terselenggaranya Dukungan Pelaksanaan dan Penyusunan Laporan Hasil SKM dan SPAK

Crosscutting (Kepaniteraan dengan Kesekretariatan)


PELAKSANA BAGIAN KESEKRETARIATAN
KEGIATAN
SASARAN
INDIKATOR
Eselon IV Bagian Kesekretariatan
Melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi , organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana prasarana
PELAKSANA SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PELAPORAN
Terwujudnya Peningkatan Efektivitas Pemanfaatan Teknologi Informasi
PELAKSANA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
1. Pengelolaan Urusan Umum dan Rumah Tangga
2. Pengelolaan Anggaran Berdasarkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
3. Pengelolaan Aset Berdasarkan Indeks Pengelolaan Aset (IPA)
PELAKSANA SUB KEPEGAWAIAN, ORGANISASI, DAN TATALAKSANA
1. Dukungan Peningkatan Kualitas Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
2. Dukungan Peningkatan Profesionalisme dan Kinerja Aparatur Pengadilan
PELAKSANA SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PELAPORAN
1. Pengelolaan, Sinkronisasi dan Back Up SIPP
2. Pelaksanaan Pengiriman Data MIS
3. Pengelolaan Surat Masuk Elektronik dari Email, Website MA, Website Dirjen Badilmiltun MA RI, dll
4. Pengelolaan Media Sosial
5. Pengelolaan Sistem Informasi dan Jaringan Sesuai Standar
6. Pelaksanaan Penyiapan Zoom Meeting
7. Pelaksanaan Pengelolaan Aplikasi Internal PTUN Pangkalpinang
8. Pelaksanaan Tugas Lainnya di Bidang Teknologi Informasi
PELAKSANA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
1. Pengelolaan Persediaan Sesuai Standar
2. Pengelolaan Pemeliharaan Gedung dan Kendaraan Dinas
3. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sesuai Standar
4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA)
5. Pelaporan BMN Tepat Waktu
6. Pelaksanaan Tugas Protokoler
7. Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Sub Bagian Umum dan Keuangan Serta Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi
8. Pelaksanaan Keamanan Kantor
9. Pelaksanaan Laporan Kegiatan Bulanan Sub Bagian Umum dan Keuangan
10. Pelaksanaan Pembayaran Belanja Pegawai (Gaji, Uang Makan, Tunjangan Kinerja, Kekurangan Gaji, dll) dan Transportasi Hakim
11. Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar
12. Pelaksanaan Kebersihan Kantor
13. Pelaksanaan Kinerja Umum Lainnya
14. Pelaksanaan Pengarsipan Sub Bagian Umum dan Keuangan
15. Pelaksanaan Perbantuan Tugas Operator GLP dan Operator Aset
PELAKSANA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI, DAN TATALAKSANA
1. Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu
2. Pemutakhiran Data Kepegawaian Pada Aplikasi SIKEP
3. Pengelolaan Usul Kenaikan Pangkat dan Gaji Berkala Tepat Waktu
4. Pengelolaan Cuti, Izin, dan Disiplin Pegawai Sesuai Ketentuan
5. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)
6. Pemantauan Penyusunan SKP Pegawai Tepat Waktu
7. Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai
8. Monitoring Disiplin Pegawai
Crosscutting (Kesekretariatan dengan Kepaniteraan)

LAMPIRAN IV

INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2025

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

PANGKALPINANG

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru
Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung

0717-91[illegible]513

www.ptun-pangkalpinang.go.id

info@ptun-pangkalpinang.go.id

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PANGKALPINANG

NOMOR : 69/KPTUN.W5-TUN5/RA1.5/I/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;
b. Bahwa untuk menyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang berlandaskan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah beberapa kalo diubah, terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;;
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Kekuasaan Kehakiman;

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

Memperhatikan:

1. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045;
2. Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) tanggal 18 Desember 2024 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG;

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor : 137/KPTUN.W5-TUN5/RA1.5/I/2024 tertanggal 15 Januari 2024 tentang

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dalam menyusun Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja;

KETIGA : Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk menyelaraskan isu-isu strategis pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang agar tetap memiliki indikator kinerja yang valid untuk dipergunakan mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada 2 Januari 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh:
KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

EDI SEPTA SURHAZA

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	**Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu x 100%** **Jumlah perkara yang diselesaikan** **Catatan :** • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi termasuk perkara yang dicabut, tidak lolos dismissal dan perlawanan pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi termasuk perkara yang dicabut, tidak lolos dismissal dan perlawanan pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

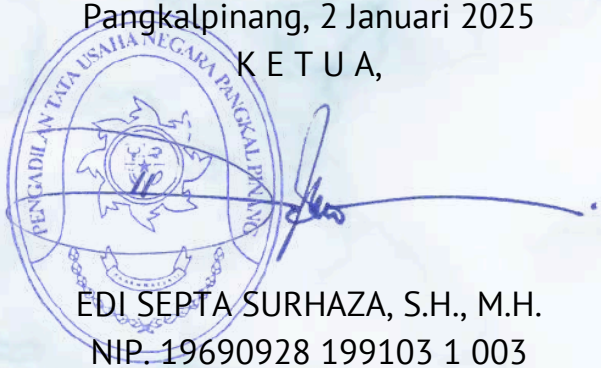
NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi.	**Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi / Jumlah Perkara yang diselesaikan X 100%** **Catatan :** • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum banding dan kasasi. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi termasuk perkara yang dicabut pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Index persepsi Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	**INDEX KEPUASAN PENCARI KEADILAN** **Catatan :** • PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelengara Pelayanan Publik. • Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi internal IKM Index harus ⩾ 80.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang disampaikan kepada Para Pihak tepat waktu	**Jumlah Salinan Putusan yang disampaikan tepat waktu x 100%** **Jumlah Putusan** **Catatan :** • SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. • Jumlah Salinan putusan yang disampaikan tepat waktu adalah jumlah salinan yang disampaikan kepada para pihak sesuai dengan ketentuan. • Jumlah putusan adalah jumlah putusan yang sudah diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	**Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan x 100%** **Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo** **Catatan :** • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan. • Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara . • Perkara Prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo termasuk prodeo murni. • Bagi satker yang tidak tersedia anggaran perkara prodeo pengadilan tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	**Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum x 100%** **Jumlah permohonan layanan hukum** **Catatan :** • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan. • Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum. • Bagi satker yang tidak tersedia anggaran posbakum tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti.	**Jumlah Putusan Perkara TUN yang Ditindak lanjuti x 100%** **Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT** **Catatan :** • BHT : Berkekuatan Hukum Tetap. • Jumlah putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti adalah jumlah putusan perkara TUN yang telah disampaikan ke para pihak/dilaksanakan oleh tergugat. • Jumlah putusan yang sudah BHT adalah putusan yang berkekuatan hukum tetap yang dimohonkan eksekusi.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Pangkalpinang, 2 Januari 2025

K E T U A,



EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H.

NIP. 19690928 199103 1 003

KAMUS INDIKATOR KINERJA UTAMA

PTUN PANGKALPINANG

INDIKATOR KINERJA I

Kamus IKU	
Nama IKU	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu
Definisi	Mengukur penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu. Perkara yang tepat waktu pada bulan berjalan memperhatikan SEMA nomor 2 tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan, dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lambat dalam jangka waktu 5 bulan. Tenggat waktu tersebut sudah termasuk penyelesaian minutasi berkas perkara.
Formula Perhitungan	(A/B) * 100%
	A= jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu
	B= jumlah perkara yang diputus dan diminutasi
Satuan Digunakan	Persentase (%)
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
Sumber Data	Laporan bulanan, laporan tahunan dan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP
Periode Pengambilan Data	Setiap akhir bulan dan setiap tahun
Metode Pengambilan Data	Pengumpulan data perkara
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	< 100 % Buruk 100 % Baik >100 % Sangat Baik
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	1. Salinan putusan perkara yang dikirim ke para pihak tepat waktu. 2. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan

INDIKATOR KINERJA II

Kamus IKU	
Nama IKU	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi
Definisi	Mengukur jumiah perkara yang tidak mengajukan banding dan kasasi. Banding adalah salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak terhadap suatu putusan pengadilan ke pengadilan tingkat banding melalui pengadilan tingkat pertama. Banding dapat diajukan bila pihak merasa belum puas dengan isi putusan pengadilan. Kasasi adalah salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak terhadap suatu putusan pengadilan tinggi. Kasasi dapat diajukan ke Mahkamah Agung RI bila pihak merasa belum puas dengan isi putusan pengadilan tinggi.
Formula Perhitungan	(A/B) * 100%
	A= jumlah perkara yang tidak diajukan upaya hukum banding dan kasasi
	B= jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan
Satuan Digunakan	Persentase (%)
Trend/Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
Sumber Data	Laporan bulanan, laporan tahunan
Periode Pengambilan Data	Setiap akhir bulan dan tahunan
Metode Pengambilan Data	Pengumpulan data perkara
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	< 35% Buruk 35% Baik >35% Sangat Baik
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan

INDIKATOR KINERJA III

Kamus IKU	
Nama IKU	Index kepuasan pencari keadilan
Definisi	Mengukur mutu kinerja pelayanan pengadilan tingkat pertama dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Indeks ini didapat dari hasil survey yang dilakukan oleh pengadilan berdasarkan PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Variabel pengukurannya adalah: persyaratan pelayanan, prosedur peiayanan, waktu pelayanan, biaya/tarif pelayanan, produk spesifikasi jenis layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, dan sarana dan prasarana.
Formula Perhitungan	NILAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
Satuan Digunakan	Persentase (%)
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, trans paran dan akuntabel
Sumber Data	Hasil survey yang dilakukan secara triwulan
Periode Pengambilan Data	Setiap triwulan
Metode Pengambilan Data	Survey
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	< 80% Buruk 80% Baik ≥80% Sangat Baik
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu

INDIKATOR KINERJA IV

Kamus IKU	
Nama IKU	Persentase salinan putusan perkara yang dikirim ke para pihak tepat waktu.
Definisi	Mengukur jumlah salinan putusan perkara yang dikirim ke para pihak tepat waktu dengan berpedoman pada SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.
Formula Perhitungan	(A/B) * 100%
	A= Salinan putusan perkara yang dikirim kepada para pihak tepat waktu
	B= jumlah putusan
Satuan Digunakan	Persentase (%)
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Sumber Data	Laporan bulanan, laporan tahunan
Periode Pengambilan Data	Setiap akhir bulan
Metode Pengambilan Data	Pengumpulan data perkara
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	< 100 % Buruk 100 % Baik >100% Sangat Baik
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	1. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu 2. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan

INDIKATOR KINERJA V

Kamus IKU	
Nama IKU	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
Definisi	Mengukur jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dibandingkan dengan jumlah perkara prodeo yang diajukan berpedoman dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo, termasuk prodeo murni.
Formula Perhitungan	(A/B) * 100%
	A= jumlah perkara prodeo yang diselesaikan
	B= jumlah perkara yang diajukan secara prodeo
Satuan Digunakan	Persentase (%)
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
Sumber Data	Laporan bulanan, laporan tahunan
Periode Pengambilan Data	Setiap akhir bulan
Metode Pengambilan Data	Pengumpulan data perkara
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	< 100 % Buruk 100 % Baik >100% Sangat Baik
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat bantuan hukum

INDIKATOR KINERJA VI

Kamus IKU	
Nama IKU	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum
Definisi	Mengukur jumlah pencari keadilan yang mendapat layanan bantuan hukum sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Golongan tertentu didefinisikan sebagai setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum.
Formula Perhitungan	(A/B) * 100%
	A= jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum
	B= jumlah permohonan layanan hukum
Satuan Digunakan	Persentase (%)
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
Sumber Data	Laporan bulanan, laporan tahunan
Periode Pengambilan Data	Setiap akhir bulan
Metode Pengambilan Data	Pengumpulan data perkara
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	< 100 % Buruk 100 % Baik >100% Sangat Baik
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

INDIKATOR KINERJA VII

Kamus IKU	
Nama IKU	Persentase putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti
Definisi	Mengukur jumlah putusan perkara BHT yang ditindaklanjuti. Jumlah putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti adalah jumlah putusan perkara TUN yang telah disampaikan ke para pihak/dilaksanakan ole tergugat. Jumlah putusan yang sudah BHT adalah putusan yang berkekuatan hukum tetap yang dimohonkan eksekusi.
Formula Perhitungan	(A/B) * 100%
	A= jumlah putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti
	B= jumlah putusan BHT yang dimohonkan eksekusi
Satuan Digunakan	Persentase (%)
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
Sumber Data	Laporan bulanan, laporan tahunan
Periode Pengambilan Data	Setiap akhir bulan
Metode Pengambilan Data	Pengumpulan data perkara
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	< 100 % Buruk 100 % Baik >100% Sangat Baik
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	1. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu 2. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan 3. Persentase salinan putusan yang disampaikan tepat waktu

SUMBER DATA (DASAR HUKUM)

1. SK SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI Nomor 173/SEK/SK/III/2022 Tanggal 31 Januari 2022 Perihal Penetapan Indikator Kinerja (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
2. SK SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 Tanggal 27 Desember 2022 Perihal Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya.

Pangkalpinang, 2 Januari 2025

K E T U A,



EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H.

NIP. 19690928 199103 1 003

LAMPIRAN V

REVISI
INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PANGKALPINANG

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
bangga melayani bangsa

REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG



Jalan Pulau Bangka, Padang Baru,
Kecamatan Pangkalan Baru
Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung

0717-9111513
www.ptun-pangkalpinang.go.id
info@ptun-pangkalpinang.go.id

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PANGKALPINANG

NOMOR : 499a/KPTUN.W5-TUN5/RA1.3/X/2025

TENTANG

PENETAPAN REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
TAHUN 2025-2029

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG,

Menimbang :

a. Bahwa untuk memberikan informasi kinerja dan ukuran keberhasilan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis, perlu disusun Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;
b. Bahwa dengan terbitnya Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029, sehingga Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor 69/KPTUN.W5-TUN5/RA1.5/I/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang perlu dilakukan penyesuaian;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tentang Penetapan Revisi Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah beberapa kalo diubah, terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045;
3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
12. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029

Memperhatikan:

1. Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor 498a/KPTUN.W5-TUN5/RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025-2029;
2. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG TENTANG PENETAPAN REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG TAHUN 2025-2029;

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang 69/KPTUN.W5-TUN5/RA1.5/I/2025 tertanggal 2 Januari 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dalam menyusun Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan penyusunan

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja;

KETIGA : Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk menyelaraskan isu-isu strategis pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang agar tetap memiliki indikator kinerja yang valid untuk dipergunakan mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada 31 Oktober 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh:
KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

MOHAMAD SYAUQIE

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Tujuan 1: Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan					
1	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	1.1. Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu	**<u>Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu</u> x 100%** **Jumlah perkara yang diselesaikan** **Catatan:** 1. Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasi. 2. Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk). 3. Jumlah Perkara yang Ada = Jumlah Perkara yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya. **Dasar Hukum**: • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. • Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		1.2. Persentase Penyediaan/ Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak	**Jumlah Salinan Putusan yang Tersedia/Dikirimkan Kepada Para Pihak Secara Tepat Waktu** / **Jumlah Perkara yang Diputus** **X 100%** **Catatan :** Kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.3. Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak	**Jumlah Pemberitahuan Petikan Atau Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi, PK yang Disampaikan Kepada Para Pihak Secara Tepat Waktu** / **Jumlah Petikan Atau Amar Putusan Banding, Kasasi, dan PK yang Diterima Pengadilan Pengaju** **X 100%** **Catatan :** Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara TUN secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: • Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; • Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirim kepada para pihak.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		1.4. Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan	**Jumlah Putusan yang Diunggah pada Direktori Putusan x 100%** **Jumlah Putusan yang Telah Diminutasi** **Catatan:** Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi. **Dasar Hukum:** Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.5. Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara	**Jumlah Permohonan Eksekusi Putusan TUN yang Diselesaikan x 100%** **Jumlah Putusan Perkara TUN yang Dimohonkan Eksekusi** **Catatan:** Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi: a. Berhasil dilaksanakan eksekusi; ◦ Eksekusi yang dilaksanakan sebelum terbitnya penetapan Ketua (eksekusi otomatis). ◦ Eksekusi yang dilaksanakan setelah penetapan Ketua (eksekusi upaya paksa). ◦ Eksekusi sampai pada bersurat kepada Presiden dan Lembaga Perwakilan Rakyat b. Dicabut; dan c. Dicoret dari register termasuk *non executable*.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		1.6. Persentase Perkara Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court	**Jumlah Perkara Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Diajukan Menggunakan e-Court** **x 100%** **Jumlah Perkara Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Diajukan** **Catatan:** Jumlah perkara tata usaha negara yang mengajukan upaya hukum banding meliputi jumlah perkara tata usaha negara yang mengajukan upaya hukum banding secara elektronik melalui e-Court dan perkara tata usaha negara yg mengajukan upaya hukum banding secara konvensional.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	**INDEKS KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN** Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut: 1. Persyaratan; 2. Sistem, mekanisme dan prosedur; 3. Waktu penyelesaian; 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan; 6. Kompetensi pelaksana; 7. Perilaku pelaksana; 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan; 9. Sarana dan prasarana.	Panitera dan Sekretaris	Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			Pengukuran indeks meliputi layanan sebagai berikut: 1. Kepuasan pengguna layanan pos bantuan hukum (posbakum); 2. Kepuasan pengguna layanan sidang di luar gedung pengadilan; 3. Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya perkara (prodeo); 4. Kepuasan para pihak dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum; 5. Kepuasan para pihak dalam perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 di antaranya: 1. Pelayanan administrasi persidangan; 2. Pelayanan bantuan hukum; 3. Pelayanan pengaduan; 4. Pelayanan permohonan informasi		
Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional					
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	**Catatan:** Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari: 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%) **Dasar Hukum:** Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019	Sekretaris	Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	**Catatan:** Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan. **Dasar Hukum:** Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan dan Tahunan
		3.3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	**Catatan:** Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: ◦ Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) ◦ Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) ◦ Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan dan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		3.4. Nilai Indikator Kinerja Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	**Catatan:** Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara. Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan. **Dasar Hukum:** • Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024. • Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.	Sekretaris	Laporan Tahunan Aplikasi e-Sadewa, SIMAN, MonSAKTI, dan Laporan Realisasi Anggaran

Pangkalpinang, 31 Oktober 2025

K E T U A,

MOHAMAD SYAUQIE, S.H., M.H.

NIP. 19791129 200212 1 002

KAMUS INDIKATOR KINERJA UTAMA

PTUN PANGKALPINANG

INDIKATOR KINERJA I

Kamus IKU	
Nama IKU	Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu
Definisi	Mengukur penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu. Perkara yang tepat waktu memperhatikan SEMA nomor 2 tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan, dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lambat dalam jangka waktu 5 bulan. Penyelesaian perkara dihitung sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasi.
Formula Perhitungan	(A/B) * 100%
	A= jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu
	B= jumlah perkara yang diselesaikan
Satuan Digunakan	Persentase (%)
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern.
Sumber Data	Laporan bulanan, laporan tahunan dan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP
Periode Pengambilan Data	Setiap akhir bulan dan setiap tahun
Metode Pengambilan Data	Pengumpulan data perkara
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	< 100 % Buruk 100 % Baik >100 % Sangat Baik
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	1. Salinan Putusan Perkara yang Dikirim ke Para Pihak Tepat Waktu. 2. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan.

INDIKATOR KINERJA II

Kamus IKU	
Nama IKU	Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan
Definisi	Mengukur jumlah salinan putusan perkara yang dikirim ke para pihak tepat waktu dengan berpedoman pada SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.
Formula Perhitungan	(A/B) * 100%
	A= Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu
	B= Jumlah Perkara yang Diputus
Satuan Digunakan	Persentase (%)
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern.
Sumber Data	Laporan bulanan, laporan tahunan
Periode Pengambilan Data	Setiap akhir bulan dan setiap tahun
Metode Pengambilan Data	Pengumpulan data perkara
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	< 100 % Buruk 100 % Baik >100% Sangat Baik
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	1. Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu 2. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan

INDIKATOR KINERJA III

Kamus IKU	
Nama IKU	Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak
Definisi	Mengukur jumlah petikan/amar putusan banding, kasasi dan PK yang dikirim oleh pengadilan pengaju ke para pihak tepat waktu secara tepat waktu.
Formula Perhitungan	(A/B) * 100%
	A= Jumlah Pemberitahuan Petikan Atau Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi, PK yang Disampaikan Kepada Para Pihak Secara Tepat Waktu
	B= Jumlah Petikan Atau Amar Putusan Banding, Kasasi, dan PK yang Diterima Pengadilan Pengaju
Satuan Digunakan	Persentase (%)
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern.
Sumber Data	Laporan bulanan, laporan tahunan
Periode Pengambilan Data	Setiap akhir bulan dan setiap tahun
Metode Pengambilan Data	Pengumpulan data perkara
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	< 100 % Buruk 100 % Baik >100% Sangat Baik
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	1. Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu 2. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan

INDIKATOR KINERJA IV

Kamus IKU	
Nama IKU	Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan
Definisi	Mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi.
Formula Perhitungan	(A/B) * 100%
	A= Jumlah Jumlah Putusan yang Diunggah pada Direktori Putusan
	B= Jumlah Putusan yang Telah Diminutasi
Satuan Digunakan	Persentase (%)
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern.
Sumber Data	Laporan bulanan, laporan tahunan
Periode Pengambilan Data	Setiap akhir bulan dan setiap tahun
Metode Pengambilan Data	Pengumpulan data perkara
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	< 100 % Buruk 100 % Baik >100% Sangat Baik
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	1. Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu 2. Penyediaan/ Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak 3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan

INDIKATOR KINERJA V

Kamus IKU	
Nama IKU	Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara
Definisi	Mengukur jumlah permohonan eksekusi yang diselesaikan. Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi eksekusi yang berhasil dilaksanakan, dicabut, dan dicoret dari register termasuk *non executable*.
Formula Perhitungan	(A/B) * 100%
	A= Jumlah Permohonan Eksekusi Putusan TUN yang Diselesaikan
	B= Jumlah Putusan Perkara TUN yang Dimohonkan Eksekusi
Satuan Digunakan	Persentase (%)
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern.
Sumber Data	Laporan bulanan, laporan tahunan
Periode Pengambilan Data	Setiap akhir bulan dan akhir tahun
Metode Pengambilan Data	Pengumpulan data perkara
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	< 100 % Buruk 100 % Baik >100% Sangat Baik
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	1. Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu 2. Penyediaan/ Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak 3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan

INDIKATOR KINERJA VI

Kamus IKU	
Nama IKU	Persentase Perkara Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court
Definisi	Mengukur jumlah perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court. Jumlah perkara tata usaha negara yang mengajukan upaya hukum banding meliputi jumlah perkara tata usaha negara yang mengajukan upaya hukum banding secara elektronik melalui e-Court dan perkara tata usaha negara yg mengajukan upaya hukum banding secara konvensional.
Formula Perhitungan	(A/B) * 100%
	A= Jumlah Perkara Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Diajukan Menggunakan e-Court
	B= Jumlah Perkara Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Diajukan
Satuan Digunakan	Persentase (%)
Trend/Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern.
Sumber Data	Laporan bulanan, laporan tahunan
Periode Pengambilan Data	Setiap akhir bulan dan akhir tahun
Metode Pengambilan Data	Pengumpulan data perkara
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	< 100 % Buruk 100 % Baik >100% Sangat Baik
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	1. Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu 2. Penyediaan/ Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak 3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan

INDIKATOR KINERJA VII

Kamus IKU	
Nama IKU	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan
Definisi	Mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan. Indeks ini didapat dari hasil survey yang dilakukan oleh pengadilan berdasarkan PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Variabel pengukurannya adalah: persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan, dan sarana dan prasarana.
Formula Perhitungan	NILAI INDEKS KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN
Satuan Digunakan	Indeks (1-4)
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik
Sumber Data	Hasil survey yang dilakukan secara triwulan
Periode Pengambilan Data	Setiap triwulan
Metode Pengambilan Data	Survey
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	< 3,78 Buruk 3,78 Baik ⩾3,78 Sangat Baik
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu

INDIKATOR KINERJA VIII

Kamus IKU	
Nama IKU	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan
Definisi	Mengukur indeks profesionalitas ASN dilihat dari sisi kompetensi, kinerja, kualifikasi, dan kedisiplinan.
Formula Perhitungan	NILAI INDEKS PROFESIONALITAS ASN
Satuan Digunakan	Nilai (0-100)
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional
Sumber Data	Laporan tahunan
Periode Pengambilan Data	Setiap akhir tahun
Metode Pengambilan Data	Pengumpulan data dari SIKEP
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	< 85 Buruk 85 Baik >85 Sangat Baik
Penanggung Jawab	Sekretaris
KPI Terkait	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan

INDIKATOR KINERJA IX

Kamus IKU	
Nama IKU	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan
Definisi	Mengukur nilai kinerja pelaksanaan anggaran pada tahun berjalan yang terdiri dari 8 komponen, yakni: revisi DIPA, penyerapan anggaran, penyelesaian tagihan, dispensasi SPM, deviasi Hal. III DIPA, belanja kontraktural, pengelolaan UP dan TUP serta capaian output.
Formula Perhitungan	Nilai diukur dari komponen berikut: a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%)
Satuan Digunakan	Nilai (0-100)
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional
Sumber Data	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan dan Tahunan
Periode Pengambilan Data	Setiap bulan, triwulan, semester atau tahunan
Metode Pengambilan Data	Pengumpulan data dari aplikasi OMSPAN atau Monev Kemenkeu
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	< 95 Buruk 95 Baik >95 Sangat Baik
Penanggung Jawab	Sekretaris
KPI Terkait	1. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran 2. Indeks Pengelolaan Aset

INDIKATOR KINERJA X

Kamus IKU	
Nama IKU	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran
Definisi	Mengukur nilai kinerja perencanaan anggaran pada tahun berjalan yang terdiri dari 2 komponen, yakni: efektivitas dan efisiensi.
Formula Perhitungan	Nilai diukur dari komponen berikut: a. Efektivitas • Capaian Rincian Output (75%) b. Efisiensi • Penggunaan SBK (10%) • Efisiensi SBK (15%)
Satuan Digunakan	Nilai (0-100)
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional
Sumber Data	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan dan Tahunan
Periode Pengambilan Data	Setiap bulan, triwulan, semester atau tahunan
Metode Pengambilan Data	Pengumpulan data dari aplikasi Monev Kemenkeu
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	< 95 Buruk 95 Baik >95 Sangat Baik
Penanggung Jawab	Sekretaris
KPI Terkait	1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 2. Indeks Pengelolaan Aset

INDIKATOR KINERJA XI

Kamus IKU	
Nama IKU	Nilai Indikator Kinerja Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan
Definisi	Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara pada tahun berjalan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
Formula Perhitungan	Nilai diukur dari komponen berikut: 1. Penatausahaan BMN 2. Realisasi PNBP dari Pengelolaan Aset 3. Ketepatan Waktu dan Kelengkapan Dokumen Dalam Penyampaian Laporan dan Usulan RKBMN 4. Tindak Lanjut Peman
Satuan Digunakan	Indeks (1-4)
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional
Sumber Data	Laporan Tahunan Aplikasi e-Sadewa, SIMAN, MonSAKTI, dan Laporan Realisasi Anggaran
Periode Pengambilan Data	Setiap tahun
Metode Pengambilan Data	Pengumpulan data dari aplikasi e-Sadewa, SIMAN, MonSAKTI, dan Laporan Realisasi Anggaran
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	< 3 Buruk 3 Baik >3 Sangat Baik
Penanggung Jawab	Sekretaris
KPI Terkait	1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 2. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA)

SUMBER DATA (DASAR HUKUM)

1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 Tanggal 16 September 2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029.
2. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK/SK.RA1.3/X/2025 Tanggal 31 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029.
3. SK SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 Tanggal 27 Desember 2022 Perihal Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya.

Pangkalpinang, 31 Oktober 2025

K E T U A,

MOHAMAD SYAUQIE, S.H., M.H.

NIP. 19791129 200212 1 002

LAMPIRAN VI

RENCANA KINERJA
TAHUN 2025

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

RENCANA KINERJA TAHUN 2025





PREPARED FOR
SAKIP 2024

ADDRESS
Jl. Pulau Bangka, Padang Baru
Telp. (0717) 9111513
www.ptun-pangkalpinang.go.id

RENCANA KINERJA TAHUNAN

TAHUN 2025

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang



Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang
JL. Pulau Bangka, Padang Baru, Kec. Pangkalan Baru,
Provinsi Kepulauan Bangkabelitung
Telp. 0717-9111513
Pangkalpinang - Bangka Belitung 33684
e-mail : info@ptun-pangkalpinang.go.id

RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2025
NO. 44b /KPTUN.W5-TUN5/OT.01.1/I/2024
Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu	100
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	40
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	50
		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	80
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	100
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100

Pangkalpinang, 18 Januari 2024

Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

RONI ERRY SAPUTRO, S.H., M.H.

NIP. 19770628 200112 1003



LAMPIRAN VII

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

PANGKALPINANG

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

2025



PERJANJIAN KINERJA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru
Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung

0717-91[illegible]513

www.ptun-pangkalpinang.go.id

info@ptun-pangkalpinang.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

Selanjutnya disebut **pihak pertama.**

Nama : A. SYAIFULLAH, S.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua.**

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalpinang, 6 Januari 2025

Pihak Kedua	**Pihak Pertama**
Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang	Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang
A. SYAIFULLAH, S.H.	EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H.
NIP. 19590109 198612 1 001	NIP. 19690928 199103 1 003

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu	100 %
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	35 %
		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100 %
5.	Meningkatnya transparansi administrasi keuangan serta sarana dan prasarana yang efektif, efisien dan akuntabel	Persentase penyerapan anggaran	95 %
		Persentase Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95 %
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana sesuai standar	100 %
		Persentase penyelesaian tugas di bagian umum	100 %
6.	Meningkatnya sistem perencanaan dan pelaporan organisasi yang akuntabel dan berkinerja tinggi berbasis teknologi Informasi	Nilai akuntabilitas kinerja	87%
		Nilai kualitas perencanaan anggaran pada Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100%
		Persentase pelaksanaan tugas di bidang teknologi informasi	100%
7	Meningkatnya ketatalaksanaan administrasi kepegawaian, organisasi dan SDM yang professional, akuntabel, efektif dan efisien	Jumlah ASN yang data kepegawaiannya terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP)	19
		Jumlah kebijakan yang dikeluarkan	120
		Persentase kedisiplinan ASN	100 %
		Jumlah Kegiatan Peningkatan Kompentesi ASN melalui Bimtek/Diklat	20
		Persentase produktivitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja)	100%
		Persentase pelaksanaan administrasi kenaikan pangkat/golongan dan gaji berkala	100%

	Kegiatan		Anggaran
1.	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Rp.	4.420.687.000,-
2.	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Rp.	53.385.000,-

Pangkalpinang, 6 Januari 2025

Ketua,

EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H.

NIP. 19690928 199103 1 003

LAMPIRAN VIII

REVISI PERJANJIAN KINERJA I
TAHUN 2025

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

PANGKALPINANG

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

2025



REVISI PERJANJIAN KINERJA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru
Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung

0717-91[illegible]513

www.ptun-pangkalpinang.go.id

info@ptun-pangkalpinang.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOHAMAD SYAUQIE, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

Selanjutnya disebut **pihak pertama.**

Nama : A. SYAIFULLAH, S.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua.**

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalpinang, 4 Agustus 2025

Pihak Kedua	**Pihak Pertama**
Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang	Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang
A. SYAIFULLAH, S.H.	MOHAMAD SYAUQIE, S.H., M.H.
NIP. 19590109 198612 1 001	NIP. 19791129 200212 1 002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	100 %
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	35 %
		Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang Disampaikan Kepada Para Pihak Tepat Waktu	100 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100 %

	Kegiatan		Anggaran
1.	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Rp.	4.839.757.000,-
2.	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Rp.	53.385.000,-

Pangkalpinang, 4 Agustus 2025

Ketua,

MOHAMAD SYAUQIE, S.H., M.H.

NIP. 19791129 200212 1 002

LAMPIRAN IX

REVISI PERJANJIAN KINERJA II
TAHUN 2025

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

PANGKALPINANG

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

2025



REVISI PERJANJIAN KINERJA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru
Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung

0717-91[illegible]513

www.ptun-pangkalpinang.go.id

info@ptun-pangkalpinang.go.id

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOHAMAD SYAUQIE, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : A. SYAIFULLAH, S.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalpinang, 31 Oktober 2025

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang	Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang
A. SYAIFULLAH, S.H.	MOHAMAD SYAUQIE, S.H., M.H.
NIP. 19590109 198612 1 001	NIP. 19791129 200212 1 002

LAMPIRAN REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Peradilan Yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif Dan Modern.	Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu	100 %
		Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak.	100 %
		Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak.	100 %
		Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan.	100 %
		Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara.	100 %
		Persentase Perkara Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court.	100 %
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	3,78
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	85
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	95
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	95
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3

	Program	Anggaran	
1.	Program Dukungan Manajemen	Rp.	5.523.405.000,-
2.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.	53.385.000,-

Pangkalpinang, 31 Oktober 2025

Ketua,

MOHAMAD SYAUQIE, S.H., M.H.

NIP. 19791129 200212 1 002

LAMPIRAN X

CHECKLIST REVIU

FORMULIR CHECKLIST REVIU

No.	Pernyataan		Checklist
I	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP 2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja 3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai 4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan 5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan. 6. Telah menyajikan akuntablitas keuangan	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
II	Mekanisme penyusunan	1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu. 2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai. 3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj. 4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja. 5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya. 6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait. 7. LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari di bawahnya.	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

No.	Pernyataan		Checklist
III	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja.	✓
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis.	✓
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai.	✓
		4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja.	✓
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama.	✓
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai.	✓
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat.	✓
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran.	✓
		9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai.	✓
		10. IKU dan IK telah SMART	✓

Pangkalpinang, 26 Februari 2026
Ketua Tim Pereviu LKjIP,

Lezi Fitri, S.H., M.H.
NIP. 197011201996032003

LAMPIRAN XI

CAPAIAN KINERJA AKUMULATIF
JAN S/D SEPT 2025
SEBELUM REVISI PKT 2025

CAPAIAN KINERJA AKUMULATIF S/D TRIWULAN III TAHUN 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	100 %
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	35 %	40 %	114,29 %
		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90 %	97,27 %	108,07 %
Rata-rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis I					**107,45 %**
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %
Rata-rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis II					**100 %**
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%	N/A	N/A
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %
Rata-rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis III					**100 %**
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100 %	100 %	100 %
Rata-rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis IV					**100 %**
Rata-rata Capaian Kinerja PTUN Pangkalpinang s/d Triwulan III Tahun 2025					**101,86 %**

Pangkalpinang, 26 Februari 2026

K E T U A,

MOHAMAD SYAUQIE, S.H., M.H.

NIP. 197911292002121002

LAMPIRAN XII

CAPAIAN KINERJA
SETELAH REVISI PKT
TAHUN 2025

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %
		Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak	100 %	100 %	100 %
		Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak	100 %	100 %	100 %
		Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan	100 %	100 %	100 %
		Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara	100 %	100 %	100 %
		Persentase Perkara Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court	100 %	100 %	100 %
Rata-rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis I					**100 %**
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	3,78	3,88	102,65 %
Rata-rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis II					**102,65 %**
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	85	85	100 %
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	95	98,67	103,86 %
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	95	99,95	105,21 %
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3,175	105,83 %
Rata-rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis III					**103,73 %**
Rata-rata Capaian Kinerja PTUN Pangkalpinang Tahun 2025					**102,13 %**

Pangkalpinang, 26 Februari 2026

K E T U A,

MOHAMAD SYAUQIE, S.H., M.H.

NIP. 197911292002121002

LAMPIRAN XIII

SK TIM PENYUSUN LKjIP
TAHUN 2025

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

NOMOR : 436a/KPTUN.W5-TUN5/RA1.5/XI/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025 PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas;
b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2024 Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomo3 Tahun

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PTUN PANGKALPINANG TAHUN 2025.

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor : 351p /KPTUN.W5-

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

TUN5/RA1.5/IX/2025 tertanggal 1 September 2025 tentang TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG TAHUN 2025 dan membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

KETIGA : Memerintahkan kepada masing-masing tim untuk mengimplementasikan keputusan ini dan melaksanakan tugas sampai dengan Bulan Maret Tahun 2025.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada 14 Oktober 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh:
KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

MOHAMAD SYAUQIE

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
NOMOR : 436a/KPTUN.W5-TUN5/RA1.5/XI/2025
TANGGAL : 14 Oktober 2025

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

NO	JABATAN	NAMA / NIP	KETERANGAN
1	Penanggung Jawab	MOHAMAD SYAUQIE, S.H., M.H. NIP.19791129 200212 1 002	Penanggung Jawab Tim
2.	Koordinator Validasi Data	LUCYA PERMATA SARI, S.H.M.Hum NIP.19770217 200312 2 001	Koordinator Validasi Data
3.	Ketua	LUCYA PERMATA SARI, S.H.M.Hum NIP.19770217 200312 2 001	Ketua Tim
4.	Sekretariat	DORA NATALIA SINGARIMBUN, S.E.., M.M NIP. 19811229 200604 2 015	Sekretaris Tim
5.	Anggota	JONATHAN SANTOSO, S.H., M.H. NIP.19900618 201903 1 004 ROSALINA , S.E. NIP. 19920808 201903 2 017 YULITA IDA LESTARI, S.Kom., M.M. NIP. 19860701 202012 2 002	Tim Penyusun & Penanggung Jawab Data/Informasi
6.	Tim Pereviu Laporan Kinerja	LEZI FITRI, S.H., M.H. NIP. 19701120 199603 2 0003 ZULHAM IDRUS, S.Kom., S.H., M.H. NIP. 19730415 200604 1 002 M. AGUS, S.E., M. Si. NIP. 19850207 200604 1 001 DENDY PRASETYA, S.Psi NIP. 19920523 201903 1 005	- Ketua Tim - Anggota - Anggota - Anggota

Ditandatangani secara elektronik oleh:
KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

MOHAMAD SYAUQIE

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
NOMOR : 436a/KPTUN.W5-TUN5/RA1.5/IX/2025
TANGGAL :1 September 2025

TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

NO	JABATAN	TUGAS
1	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang
2.	Koordinator Validasi Data	Memvalidasi keabsahan data kinerja
3.	Ketua	a) Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan laporan kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan; b) Mengkoordinasikan pelaksanaan reviu atas laporan kinerja;
4.	Sekretaris	Mengkoordinasikan teknis penyusunan laporan kinerja;
5.	Anggota	Mengukur kinerja, menyusun laporan kinerja serta menganalisis indikator kinerja.
6.	Tim Pereviu Laporan Kinerja	Menelaah atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.

Ditandatangani secara elektronik oleh:
KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

MOHAMAD SYAUQIE

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

LAMPIRAN XIV

ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

ANALISIS EFISIENSI
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

SASARAN STRATEGIS 1:
TERWUJUDNYA PERADILAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN, AKUNTABEL, RESPONSIF, DAN MODERN
DATA REALISASI TAHUN 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	Target	Realisasi	Hasil
1. Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu	100%	100%	100%	17	17	100%
2. Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak	100%	100%	100%	17	17	100%
3. Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak	100%	100%	100%	19	19	100%
4. Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan	100%	100%	100%	17	17	100%
5. Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara	100%	100%	100%	1	1	100%
6. Persentase Perkara Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court	100%	100%	100%	24	24	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja Fisik	**100%**	**100%**	**100%**	**15,83**	**15,83**	**100%**
Rata-Rata Capaian Kinerja Keuangan	**53.385.000**	**53.380.000**	**99,99%**	**53.385.000**	**53.380.000**	**99,99%**

KESIMPULAN:
- CAPAIAN KINERJA FISIK SASARAN STRATEGIS 1 EFEKTIF YAITU SEBESAR 100%
- REALISASI ANGGARAN MENDEKATI PAGU YAITU SEBESAR 99,99%.
- KARENA CAPAIAN KINERJA FISIK (100%) > REALISASI ANGGARAN (99,99%), MAKA SASARAN STRATEGIS 1 SUDAH DICAPAI SECARA EFISIEN.

Pangkalpinang, 26 Februari 2026
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang



Mohamad Syauqie, S.H., M.H.
NIP. 19791129 200212 1 002

ANALISIS EFISIENSI
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

SASARAN STRATEGIS 2:
MENINGKATNYA TINGKAT KEYAKINAN DAN KEPERCAYAAN PUBLIK
DATA REALISASI TAHUN 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	Target	Realisasi	Hasil
1. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	3,78	3,88	102,65%	3,78	3,88	102,65%
Rata-Rata Capaian Kinerja Fisik	**3,78**	**3,88**	**102,65%**	**3,78**	**3,88**	**102,65%**
Rata-Rata Capaian Kinerja Keuangan	**53.385.000**	**53.380.000**	**99,99%**	**53.385.000**	**53.380.000**	**99,99%**

KESIMPULAN:
- CAPAIAN KINERJA FISIK SASARAN STRATEGIS 2 EFEKTIF YAITU SEBESAR 102,65%
- REALISASI ANGGARAN MENDEKATI PAGU YAITU SEBESAR 99,99%.
- KARENA CAPAIAN KINERJA FISIK (102,65%) > REALISASI ANGGARAN (99,99%), MAKA SASARAN STRATEGIS 2 SUDAH DICAPAI SECARA EFISIEN.

Pangkalpinang, 26 Februari 2026
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

Mohamad Syauqie, S.H., M.H.
NIP. 19791129 200212 1 002

ANALISIS EFISIENSI
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

SASARAN STRATEGIS 3:
TERWUJUDNYA MANAJEMEN PERADILAN YANG TRANSPARAN DAN PROFESIONAL
DATA REALISASI TAHUN 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	Target	Realisasi	Hasil
1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	85	85	100%	85	85	100%
2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	95	98,67	103,86%	95	98,67	103,86%
3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	95	99,95	105,21%	95	99,95	105,21%
4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3,175	105,83%	3	3,175	105,83%
Rata-Rata Capaian Kinerja Fisik	**69,5**	**71,69**	**103,73%**	**69,5**	**71,69**	**103,73%**
Rata-Rata Capaian Kinerja Keuangan	**6.192.255.000**	**6.141.709.995**	**99,18%**	**6.192.255.000**	**6.141.709.995**	**99,18%**

KESIMPULAN:
- CAPAIAN KINERJA FISIK SASARAN STRATEGIS 3 EFEKTIF YAITU SEBESAR 103,73%
- REALISASI ANGGARAN MENDEKATI PAGU YAITU SEBESAR 99,18%.
- KARENA CAPAIAN KINERJA FISIK (103,73%) > REALISASI ANGGARAN (99,18%), MAKA SASARAN STRATEGIS 3 SUDAH DICAPAI SECARA EFISIEN.

Pangkalpinang, 26 Februari 2026
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

Mohamad Syauqie, S.H., M.H.
NIP. 19791129 200212 1 002

LAMPIRAN XV

PENGUKURAN KINERJA BERKALA
SEBELUM PERUBAHAN RENSTRA

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

BULAN JANUARI

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan JANUARI			Kegiatan/Upaya/Strategi/Kendala/Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
				Realisasi		Capaian (%)	
					%		
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu	100	0/0	N/A	N/A	Belum ada perkara yang diselesaikan di Bulan Januari 2025 karena masih dalam proses persidangan. Ketua dan Panitera selalu melakukan evaluasi agar tidak ada perkara yang melewati batas waktu penyelesaian perkara, yakni 5 bulan untuk pengadilan tingkat pertama.
2.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	35	0/0	N/A	N/A	Belum ada perkara yang diselesaikan di Bulan Januari 2025 karena masih dalam proses persidangan, sehingga belum ada perkara tahun berjalan yang mengajukan banding dan kasasi. Ketua dan Panitera selalu melakukan evaluasi untuk mencapai target yang telah direncanakan.
3.		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas	90	Diisi secara Triwulan			Laporan survey persepsi kepuasan masyarakat dilaporkan secara triwulan, sehingga indikator ini belum dapat diukur di

		Terhadap Layanan Peradilan					Bulan Januari 2025. Ketua dan segenap aparatur pengadilan berusaha memberikan layanan terbaik, baik dari segi kepaniteraan maupun dari sisi kesekretariatan untuk dukungan sarana dan prasarana.
4.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	100	0/0	N/A	N/A	Belum ada perkara yang diselesaikan di Bulan Januari 2025 karena masih dalam proses persidangan, sehingga belum ada salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Ketua dan Panitera selalu melakukan evaluasi agar semua salinan putusan perkara yang disampaikan selalu tepat waktu, yakni 14 hari sejak perkara diputus.
5.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	0/0	N/A	N/A	Belum ada pendaftaran perkara prodeo sampai dengan Bulan Januari 2025, namun Ketua selalu melakukan monitoring dan mendorong Kepaniteraan untuk menggalakkan sosialisasi pembebasan biaya perkara, terutama melalui Posbankum.
6.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	8/8	100	100	Panitera dan Panitera Muda Hukum selalu melakukan monitoring terhadap layanan Posbankum sehingga semua permohonan layanan hukum selalu ditindaklanjuti dengan baik.

7.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100	0/0	N/A	N/A	Sampai dengan Bulan Januari, tidak ada perkara BHT yang dimohonkan eksekusi. Ketua dan Panitera selalu melakukan monitoring agar permohonan eksekusi segera ditindaklanjuti.
Rata-rata Total			**93,75**			**100**	

Perhitungan Capaian Kinerja s/d Bulan JANUARI Tahun 2025:

- Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel : N/A
- Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara : N/A
- Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan : 100%
- Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan : N/A

Rata-Rata : **100%**

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

PENJELASAN

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

1.Indikator : Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu

Indikator ini mengukur perkara yang diselesaikan tepat waktu dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi		Capaian
Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu	100	0/0	N/A	N/A(%)

- Perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu pada bulan JANUARI 2025 sebanyak 0 perkara dari total 0 perkara yang diselesaikan di Bulan JANUARI 2025, sehingga realisasi atas indikator ini tidak dapat dihitung (N/A) karena pada Bulan JANUARI 2025, tidak ada perkara yang diselesaikan karena proses persidangan masih berjalan.
- Perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu **sampai dengan** bulan JANUARI 2025 sebanyak 0 perkara dari total 0 perkara yang telah diselesaikan/diputus. Realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Bulan JANUARI 2025 tidak dapat dihitung (N/A).

2.Indikator : Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi

Indikator ini mengukur Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi		Capaian
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	35	0/0	N/A	N/A(%)

- Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding dan Kasasi pada bulan JANUARI 2025 sebanyak 0 perkara dari total 0 perkara yang putus di Bulan JANUARI 2025, sehingga realisasi dan capaian kinerja atas indikator ini tidak dapat dihitung dikarenakan tidak ada perkara yang diselesaikan di Bulan JANUARI 2025 karena proses persidangan masih berjalan, sehingga tidak ada pula perkara yang dimohonkan banding dan kasasi di Bulan Januari 2025.
- Realisasi dan capaian kinerja **sampai dengan** bulan JANUARI 2025 tidak dapat dihitung (N/A).

3.Indikator : Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Indikator ini mengukur Nilai Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi	Capaian
Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90	Dihitung secara Triwulanan	

- Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat dihitung secara triwulanan, sehingga belum ada data capaian atas indikator ini.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

4. Indikator : Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu

Indikator ini mengukur Salinan Putusan Perkara TUN yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi		Capaian
Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	100	0/0	N/A	N/A(%)

- Jumlah Putusan yang disampaikan tepat waktu pada bulan JANUARI 2025 sebanyak 0 putusan perkara dari total 0 perkara yang putus di Bulan JANUARI 2025. Pada Bulan JANUARI 2025, tidak ada perkara yang diselesaikan karena masih dalam proses persidangan, sehingga realisasi dan capaian atas indikator ini tidak dapat dihitung (N/A).
- Realisasi **sampai dengan** JANUARI 2025 sebanyak 0 putusan yang disampaikan tepat waktu dari total 0 putusan yang dihasilkan karena belum ada perkara yang putus di Bulan Januari 2025. Realisasi dan capaian atas indikator ini tidak dapat dihitung (N/A).

5. Indikator : Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan

Indikator ini mengukur jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi		Capaian
Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	0/0	N/A	N/A(%)

- Pada Bulan JANUARI 2025, tidak ada pendaftaran perkara prodeo. Realisasi dan capaian kinerja Bulan JANUARI tidak dapat dihitung (N/A).
- **Sampai dengan** Bulan JANUARI 2025, belum ada perkara prodeo yang didaftarkan, sehingga realisasi dan capaian atas target

perkara prodeo yang diselesaikan tidak dapat dihitung (N/A).

6.Indikator : Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Indikator ini mengukur Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi		Capaian
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	8/8	100%	100 (%)

- Pada bulan JANUARI 2025 pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum) adalah sebanyak 8 layanan dari 8 permohonan bantuan hukum.(Realisasi 100%)
- Realisasi sebesar 100% ini telah sesuai target (100%) sehingga capaian atas indikator ini sebesar 100%.
- Sampai dengan bulan JANUARI 2025, pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum) adalah sebanyak 8 layanan dari 8 permohonan bantuan hukum. (Realisasi 100%)
- Realisasi sampai dengan bulan JANUARI 2025 sebesar 100% ini mencapai target (100%) sehingga capaian atas indikator ini sampai dengan JANUAR I2025 sebesar 100%.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

7.Indikator : Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)

Indikator ini mengukur Jumlah Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi		Capaian
Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100	0/0	N/A	N/A(%)

- Pada bulan JANUARI 2025 tidak ada permohonan Eksekusi maupun Penetapan Eksekusi, sehingga realisasi dan capaian di Bulan Januari 2025 tidak dapat dihitung (N/A). Tidak adanya permohonan eksekusi di bulan berjalan bukan merupakan kesalahan satker, dan bisa disebabkan karena telah adanya eksekusi secara sukarela dari para pihak dan tidak dilaporkan ke pengadilan.
- **Sampai dengan** bulan JANUARI 2025, belum ada permohonan Eksekusi dan Penetapan Eksekusi.
- Realisasi dan capaian **sampai dengan** Bulan JANUARI tidak dapat dihitung (N/A).

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

Penjelasan Target, Realisasi dan Capaian Rata-Rata :

- Target rata-rata 7 Indikator Kinerja yaitu sebesar **93,75%.**
- Dikarenakan beberapa indikator tidak dapat didefinisikan (N/A), maka atas indikator N/A tersebut tidak dimasukkan dalam perhitungan capaian kinerja. Capaian rata-rata Indikator Kinerja yang dapat dihitung **sampai dengan** bulan JANUARI 2025 yaitu sebesar **100%**.

Pangkalpinang, 3 Februari 2025
KETUA,

EDI SEPTA SURHAZA

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

BULAN FEBRUARI

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi s/d Bulan FEBRUARI			Kegiatan/Upaya/Strategi/Kendala/Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
				Realisasi		Capaian (%)	
					%		
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu	100	1/1	100	100	Pada Bulan Februari, terdapat 1 perkara yang diselesaikan tepat waktu, yakni perkara No 14/G/TF/2024/PTUN.PGP. Ketua dan Panitera selalu melakukan evaluasi agar tidak ada perkara yang melewati batas waktu penyelesaian perkara, yakni 5 bulan untuk pengadilan tingkat pertama.
2.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	35	0/1	0	0	Perkara yang diselesaikan sampai dengan Bulan Februari 2025 adalah 1 perkara yang langsung diajukan banding di tanggal 11 Februari 2025. Ketua dan Panitera selalu melakukan evaluasi untuk mencapai target yang telah direncanakan.
3.		Index Persepsi	90	Diisi secara Triwulan			Laporan survey persepsi kepuasan

		Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan					masyarakat dilaporkan secara triwulan, sehingga indikator ini belum dapat diukur di Bulan FEBRUARI 2025. Ketua dan segenap aparatur pengadilan berusaha memberikan layanan terbaik, baik dari segi kepaniteraan maupun dari sisi kesekretariatan untuk dukungan sarana dan prasarana.
4.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	100	1/1	100	100	Salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu adalah 1 putusan dari total 1 perkara yang telah diselesaikan. Ketua dan Panitera selalu melakukan evaluasi agar semua salinan putusan perkara yang disampaikan selalu tepat waktu, yakni 14 hari sejak perkara diputus.
5.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	0/0	N/A	N/A	Belum ada pendaftaran perkara prodeo sampai dengan Bulan FEBRUARI 2025, namun Ketua selalu melakukan monitoring dan mendorong Kepaniteraan untuk menggalakkan sosialisasi pembebasan biaya perkara, terutama melalui Posbankum.
6.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	100	17/17	100	100	Panitera dan Panitera Muda Hukum selalu melakukan monitoring terhadap layanan Posbankum sehingga semua permohonan layanan hukum selalu ditindaklanjuti dengan baik.

		(Posbakum)					
7.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100	0/0	N/A	N/A	Sampai dengan Bulan FEBRUARI, tidak ada perkara BHT yang dimohonkan eksekusi. Ketua dan Panitera selalu melakukan monitoring agar permohonan eksekusi segera ditindaklanjuti.
Rata-rata Total			**93,75**			**83,33**	

Perhitungan Capaian Kinerja s/d Bulan FEBRUARI Tahun 2025:

- Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel : 50
- Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara : 100
- Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan : 100
- Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan : N/A

Rata-Rata : **83,33**

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

PENJELASAN

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

1.Indikator : Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu

Indikator ini mengukur perkara yang diselesaikan tepat waktu dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi		Capaian
Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu	100	1/1	100	100(%)

- Perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu pada bulan FEBRUARI 2025 sebanyak 1 perkara dari total 1 perkara yang diselesaikan di Bulan FEBRUARI 2025. Realisasi atas indikator ini sebesar 100%, sehingga capaian atas indikator ini sebesar 100%.
- Perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu **sampai dengan** bulan FEBRUARI 2025 sebanyak 1 perkara dari total 1 perkara yang telah diselesaikan. Realisasi atas indikator ini **sampai dengan** bulan FEBRUARI 2025 sebesar 100%, sehingga capaian atas indikator ini sebesar 100%.

2.Indikator : Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi

Indikator ini mengukur Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi		Capaian
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	35	0/1	0	0(%)

- Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding dan Kasasi pada bulan FEBRUARI 2025 sebanyak 0 perkara dari total 1 perkara yang diselesaikan di Bulan FEBRUARI 2025, sehingga realisasi atas indikator ini adalah 0%. Capaian kinerja 0%.
- Realisasi dan capaian kinerja **sampai dengan** bulan FEBRUARI 2025 adalah sebesar 0%.

3.Indikator : Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Indikator ini mengukur Nilai Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi	Capaian
Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90	Dihitung secara Triwulanan	

- Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat dihitung secara triwulanan, sehingga belum ada data capaian atas indikator ini.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

4. Indikator : Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu

Indikator ini mengukur Salinan Putusan Perkara TUN yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi		Capaian
Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	100	1/1	100	100 %)

- Jumlah Putusan yang disampaikan tepat waktu pada bulan FEBRUARI 2025 sebanyak 1 putusan perkara dari total 1 perkara yang diselesaikan di Bulan FEBRUARI 2025. Realisasi dan capaian atas indikator ini sebesar 100%.
- Realisasi **sampai dengan** FEBRUARI 2025 sebanyak 1 putusan yang disampaikan tepat waktu dari total 1 putusan yang dihasilkan. Realisasi dan capaian atas indikator ini sebesar 100%.

5. Indikator : Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan

Indikator ini mengukur jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi		Capaian
Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	0/0	N/A	N/A(%)

- Pada Bulan FEBRUARI 2025, tidak ada pendaftaran perkara prodeo. Realisasi dan capaian kinerja Bulan FEBRUARI tidak dapat dihitung (N/A).
- **Sampai dengan** Bulan FEBRUARI 2025, belum ada perkara prodeo yang didaftarkan, sehingga realisasi dan capaian atas target perkara prodeo yang diselesaikan tidak dapat dihitung (N/A).

6.Indikator : Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Indikator ini mengukur Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi		Capaian
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	17/17	100%	100 (%)

- Pada bulan FEBRUARI 2025 pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum) adalah sebanyak 8 layanan dari 8 permohonan bantuan hukum.(Realisasi 100%)
- Realisasi sebesar 100% ini telah sesuai target (100%) sehingga capaian atas indikator ini sebesar 100%.
- Sampai dengan bulan FEBRUARI 2025, pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum) adalah sebanyak 17 layanan dari 17 permohonan bantuan hukum. (Realisasi 100%)
- Realisasi sampai dengan bulan FEBRUARI 2025 sebesar 100% ini mencapai target (100%) sehingga capaian atas indikator ini sampai dengan Februari 2025 sebesar 100%.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

7.Indikator : Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)

Indikator ini mengukur Jumlah Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi		Capaian
Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100	0/0	N/A	N/A(%)

- Pada bulan FEBRUARI 2025 tidak ada permohonan Eksekusi maupun Penetapan Eksekusi, sehingga realisasi dan capaian di Bulan FEBRUARI 2025 tidak dapat dihitung (N/A). Tidak adanya permohonan eksekusi di bulan berjalan bukan merupakan kesalahan satker, dan bisa disebabkan karena telah adanya eksekusi secara sukarela dari para pihak dan tidak dilaporkan ke pengadilan.
- **Sampai dengan** bulan FEBRUARI 2025, belum ada permohonan Eksekusi dan Penetapan Eksekusi.
- Realisasi dan capaian **sampai dengan** Bulan FEBRUARI tidak dapat dihitung (N/A).

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

Penjelasan Target, Realisasi dan Capaian Rata-Rata :

- Target rata-rata 7 Indikator Kinerja yaitu sebesar **93,75%.**
- Dikarenakan beberapa indikator tidak dapat didefinisikan (N/A), maka atas indikator N/A tersebut tidak dimasukkan dalam perhitungan capaian kinerja. Capaian rata-rata Indikator Kinerja yang dapat dihitung **sampai dengan** bulan FEBRUARI 2025 yaitu sebesar **83,33%**.

Pangkalpinang, 28 FEBRUARI 2025
KETUA,

EDI SEPTA SURHAZA

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

BULAN MARET

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi s.d. Bulan MARET			Kegiatan/Upaya/Strategi/Kendala/Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
				Realisasi		Capaian (%)	
					%		
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu	100	3/3	100	100	3 perkara diselesaikan tepat waktu dari 3 perkara yang diselesaikan. Ketua dan Panitera selalu melakukan evaluasi agar tidak ada perkara yang melewati batas waktu penyelesaian perkara, yakni 5 bulan untuk pengadilan tingkat pertama.
2.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	35	1/3	33,33	95,22	Dari total 3 perkara yang diselesaikan, 2 perkara mengajukan banding, sedangkan untuk kasasi belum ada, sehingga nilai realisasi perkara yang tidak mengajukan banding dan kasasi adalah 33,33% dan capaian 95,22%. Ketua dan Panitera selalu melakukan evaluasi untuk mencapai target yang telah direncanakan.
3.		Index Persepsi Pencari Keadilan	90		97,01	107,78	Nilai capaian indeks kepuasan TW I sangat baik. Ketua dan segenap aparatur pengadilan berusaha memberikan layanan

		Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan					terbaik, baik dari segi kepaniteraan maupun dari sisi kesekretariatan untuk dukungan sarana dan prasarana.
4.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	100	3/3	100	100	Ketua dan Panitera selalu melakukan evaluasi agar semua salinan putusan perkara yang disampaikan selalu tepat waktu, yakni 14 hari sejak perkara diputus.
5.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	0/0	N/A	N/A	Belum ada pendaftaran perkara prodeo sampai dengan Bulan MARET 2025, namun Ketua selalu melakukan monitoring dan mendorong Kepaniteraan untuk menggalakkan sosialisasi pembebasan biaya perkara, terutama melalui Posbankum.
6.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	24/24	100	100	Panitera dan Panitera Muda Hukum selalu melakukan monitoring terhadap layanan Posbankum sehingga semua permohonan layanan hukum selalu ditindaklanjuti dengan baik.
7.	Meningkatnya Kepatuhan	Persentase Putusan Perkara	100	0	N/A	N/A	Sampai dengan Bulan MARET, tidak ada perkara BHT yang dimohonkan eksekusi.

	terhadap Putusan Pengadilan	TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)		0			Ketua dan Panitera selalu melakukan monitoring agar permohonan eksekusi segera ditindaklanjuti.
Rata-rata Total			**93,75**			**100,33**	

Perhitungan Capaian Kinerja s/d Bulan MARET Tahun 2025:

- Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel : 101 %
- Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara : 100 %
- Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan : 100 %
- Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan : N/A

Rata-Rata : **100,33%**

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

PENJELASAN

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

1.Indikator : Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu

Indikator ini mengukur perkara yang diselesaikan tepat waktu dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi		Capaian
Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu	100	3/3	100	100(%)

- Perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu pada bulan MARET 2025 sebanyak 2 perkara dari total 2 perkara yang diselesaikan di Bulan MARET 2025.
- Perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu **sampai dengan** bulan MARET 2025 sebanyak 3 perkara dari total 3 perkara yang telah diselesaikan/diputus. Realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Bulan MARET 2025 sebesar 100%.

2.Indikator : Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi

Indikator ini mengukur Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi		Capaian
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	35	1/3	33,33	95,22(%)

- Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding dan Kasasi pada bulan MARET 2025 sebanyak 1 perkara dari total 2

perkara yang putus di Bulan MARET 2025.

- Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding dan Kasasi sampai dengan bulan MARET 2025 sebanyak 1 perkara dari total 3 perkara yang putus sampai dengan Bulan MARET 2025.
- Realisasi sampai dengan Bulan Maret 2025 sebesar 33,33% sehingga capaian kinerja sampai dengan Bulan Maret 2025 sebesar 95,22%.

3.Indikator : Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Indikator ini mengukur Nilai Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi	Capaian
Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90	97,01	107,78

- Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan I sebesar 97,01% sehingga capaiannya sebesar 107,78%.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

4. Indikator : Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu

Indikator ini mengukur Salinan Putusan Perkara TUN yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi		Capaian
Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	100	3/3	100	100 %)

- Jumlah Putusan yang disampaikan tepat waktu pada bulan MARET 2025 sebanyak 2 putusan perkara dari total 2 perkara yang putus di Bulan MARET 2025.
- Jumlah Putusan yang disampaikan tepat waktu sampai dengan bulan MARET 2025 sebanyak 3 putusan perkara dari total 3 perkara yang diselesaikan sampai dengan Bulan MARET 2025.
- Realisasi **sampai dengan** MARET 2025 100%, capaian 100%.

5. Indikator : Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan

Indikator ini mengukur jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi		Capaian
Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	0/0	N/A	N/A(%)

- Pada Bulan MARET 2025, tidak ada pendaftaran perkara prodeo. Realisasi dan capaian kinerja Bulan MARET tidak dapat dihitung (N/A).
- **Sampai dengan** Bulan MARET 2025, belum ada perkara prodeo yang didaftarkan, sehingga realisasi dan capaian atas target perkara prodeo yang diselesaikan tidak dapat dihitung (N/A).

6.Indikator : Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Indikator ini mengukur Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi		Capaian
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	24/24	100%	100 (%)

- Pada bulan MARET 2025 pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum) adalah sebanyak 7 layanan dari 7 permohonan bantuan hukum.(Realisasi 100%)
- Realisasi sebesar 100% ini telah sesuai target (100%) sehingga capaian atas indikator ini sebesar 100%.
- Sampai dengan bulan MARET 2025, pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum) adalah sebanyak 24 layanan dari 24 permohonan bantuan hukum. (Realisasi 100%)
- Realisasi sampai dengan bulan MARET 2025 sebesar 100% ini mencapai target (100%) sehingga capaian atas indikator ini sampai dengan MARET 2025 sebesar 100%.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

7.Indikator : Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)

Indikator ini mengukur Jumlah Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi		Capaian
Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100	0/0	N/A	N/A(%)

- Pada bulan MARET 2025 tidak ada permohonan Eksekusi maupun Penetapan Eksekusi, sehingga realisasi dan capaian di Bulan MARET 2025 tidak dapat dihitung (N/A). Tidak adanya permohonan eksekusi di bulan berjalan bukan merupakan kesalahan satker, dan bisa disebabkan karena telah adanya eksekusi secara sukarela dari para pihak dan tidak dilaporkan ke pengadilan.
- **Sampai dengan** bulan MARET 2025, belum ada permohonan Eksekusi dan Penetapan Eksekusi.
- Realisasi dan capaian **sampai dengan** Bulan MARET tidak dapat dihitung (N/A).

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

Penjelasan Target, Realisasi dan Capaian Rata-Rata :

- Target rata-rata 7 Indikator Kinerja yaitu sebesar **93,75%.**
- Dikarenakan beberapa indikator tidak dapat didefinisikan (N/A), maka atas indikator N/A tersebut tidak dimasukkan dalam perhitungan capaian kinerja. Capaian rata-rata Indikator Kinerja yang dapat dihitung **sampai dengan** bulan MARET 2025 yaitu sebesar **100,33%**.

Pangkalpinang, 8 April 2025
KETUA,

EDI SEPTA SURHAZA

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

BULAN APRIL

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi s.d. Bulan APRIL			Kegiatan/Upaya/Strategi/Kendala/Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
				Realisasi		Capaian (%)	
					%		
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu	100	3/3	100	100	3 perkara diselesaikan tepat waktu dari 3 perkara yang diselesaikan. Ketua dan Panitera selalu melakukan evaluasi agar tidak ada perkara yang melewati batas waktu penyelesaian perkara, yakni 5 bulan untuk pengadilan tingkat pertama.
2.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	35	1/3	33,33	95,22	Dari total 3 perkara yang diselesaikan, 2 perkara mengajukan banding, sedangkan untuk kasasi belum ada, sehingga nilai realisasi perkara yang tidak mengajukan banding dan kasasi adalah 33,33% dan capaian 95,22%. Ketua dan Panitera selalu melakukan evaluasi untuk mencapai target yang telah direncanakan.
3.		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas	90	Diisi Secara Triwulan			Laporan survey persepsi kepuasan masyarakat dilaporkan secara triwulan, sehingga indikator ini belum dapat diukur di

		Terhadap Layanan Peradilan					Bulan April 2025. Ketua dan segenap aparatur pengadilan berusaha memberikan layanan terbaik, baik dari segi kepaniteraan maupun dari sisi kesekretariatan untuk dukungan sarana dan prasarana.
4.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	100	3/3	100	100	Ketua dan Panitera selalu melakukan evaluasi agar semua salinan putusan perkara yang disampaikan selalu tepat waktu, yakni 14 hari sejak perkara diputus.
5.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	0/0	N/A	N/A	Belum ada pendaftaran perkara prodeo sampai dengan Bulan APRIL 2025, namun Ketua selalu melakukan monitoring dan mendorong Kepaniteraan untuk menggalakkan sosialisasi pembebasan biaya perkara, terutama melalui Posbankum.
6.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	33/33	100	100	Panitera dan Panitera Muda Hukum selalu melakukan monitoring terhadap layanan Posbankum sehingga semua permohonan layanan hukum selalu ditindaklanjuti dengan baik.

7.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100	0/0	N/A	N/A	Sampai dengan Bulan APRIL, tidak ada perkara BHT yang dimohonkan eksekusi. Ketua dan Panitera selalu melakukan monitoring agar permohonan eksekusi segera ditindaklanjuti.
Rata-rata Total			**93,75**			**99,2**	

Perhitungan Capaian Kinerja s/d Bulan APRIL Tahun 2025:

- Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel : 97,61 %
- Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara : 100 %
- Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan : 100 %
- Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan : N/A

Rata-Rata : **99,2%**

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

PENJELASAN

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

1.Indikator : Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu

Indikator ini mengukur perkara yang diselesaikan tepat waktu dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi		Capaian
Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu	100	3/3	100	100(%)

- Perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu pada bulan APRIL 2025 sebanyak 0 perkara dari total 0 perkara yang diselesaikan di Bulan APRIL 2025.
- Perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu **sampai dengan** bulan APRIL 2025 sebanyak 3 perkara dari total 3 perkara yang telah diselesaikan/diputus. Realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Bulan APRIL 2025 sebesar 100%.

2.Indikator : Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi

Indikator ini mengukur Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi		Capaian
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	35	1/3	33,33	95,22(%)

- Pada Bulan April 2025, tidak ada permohonan perkara banding maupun kasasi.

- Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding dan Kasasi sampai dengan bulan APRIL 2025 sebanyak 1 perkara dari total 3 perkara yang putus sampai dengan Bulan APRIL 2025.
- Realisasi sampai dengan Bulan APRIL 2025 sebesar 33,33% sehingga capaian kinerja sampai dengan Bulan APRIL 2025 sebesar 95,22%.

3.Indikator : Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Indikator ini mengukur Nilai Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi	Capaian
Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90	Dihitung Secara Triwulan	

- Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat dihitung secara triwulanan, sehingga belum ada data capaian atas indikator ini.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

4. Indikator : Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu

Indikator ini mengukur Salinan Putusan Perkara TUN yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi		Capaian
Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	100	3/3	100	100 %)

- Jumlah Putusan yang disampaikan tepat waktu pada bulan APRIL 2025 sebanyak 0 putusan perkara dari total 0 perkara yang putus di Bulan APRIL 2025.
- Jumlah Putusan yang disampaikan tepat waktu sampai dengan bulan APRIL 2025 sebanyak 3 putusan perkara dari total 3 perkara yang diselesaikan sampai dengan Bulan APRIL 2025.
- Realisasi **sampai dengan** APRIL 2025 100%, capaian 100%.

5. Indikator : Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan

Indikator ini mengukur jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi		Capaian
Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	0/0	N/A	N/A(%)

- Pada Bulan APRIL 2025, tidak ada pendaftaran perkara prodeo. Realisasi dan capaian kinerja Bulan APRIL tidak dapat dihitung (N/A).
- **Sampai dengan** Bulan APRIL 2025, belum ada perkara prodeo yang didaftarkan, sehingga realisasi dan capaian atas target perkara prodeo yang diselesaikan tidak dapat dihitung (N/A).

6.Indikator : Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Indikator ini mengukur Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi		Capaian
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	33/33	100%	100 (%)

- Pada bulan APRIL 2025 pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum) adalah sebanyak 9 layanan dari 9 permohonan bantuan hukum.(Realisasi 100%)
- Realisasi sebesar 100% ini telah sesuai target (100%) sehingga capaian atas indikator ini sebesar 100%.
- Sampai dengan bulan APRIL 2025, pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum) adalah sebanyak 33 layanan dari 33 permohonan bantuan hukum. (Realisasi 100%)
- Realisasi sampai dengan bulan APRIL 2025 sebesar 100% ini mencapai target (100%) sehingga capaian atas indikator ini sampai dengan APRIL 2025 sebesar 100%.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

7.Indikator : Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)

Indikator ini mengukur Jumlah Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi		Capaian
Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100	0/0	N/A	N/A(%)

- Pada bulan APRIL 2025 tidak ada permohonan Eksekusi maupun Penetapan Eksekusi, sehingga realisasi dan capaian di Bulan APRIL 2025 tidak dapat dihitung (N/A). Tidak adanya permohonan eksekusi di bulan berjalan bukan merupakan kesalahan satker, dan bisa disebabkan karena telah adanya eksekusi secara sukarela dari para pihak dan tidak dilaporkan ke pengadilan.
- **Sampai dengan** bulan APRIL 2025, belum ada permohonan Eksekusi dan Penetapan Eksekusi.
- Realisasi dan capaian **sampai dengan** Bulan APRIL tidak dapat dihitung (N/A).

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

Penjelasan Target, Realisasi dan Capaian Rata-Rata :

- Target rata-rata 7 Indikator Kinerja yaitu sebesar **93,75%.**
- Dikarenakan beberapa indikator tidak dapat didefinisikan (N/A), maka atas indikator N/A tersebut tidak dimasukkan dalam perhitungan capaian kinerja. Capaian rata-rata Indikator Kinerja yang dapat dihitung **sampai dengan** bulan APRIL 2025 yaitu sebesar **99,2%**.

Pangkalpinang, 2 Mei 2025
KETUA,

EDI SEPTA SURHAZA

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

BULAN MEI

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi s.d. Bulan MEI			Kegiatan/Upaya/Strategi/Kendala/Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
				Realisasi		Capaian (%)	
					%		
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu	100	5/5	100	100	5 perkara diselesaikan tepat waktu dari total 5 perkara yang diselesaikan. Ketua dan Panitera selalu melakukan evaluasi agar tidak ada perkara yang melewati batas waktu penyelesaian perkara, yakni 5 bulan untuk pengadilan tingkat pertama.
2.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	35	1/5	20	57,14	Dari total 5 perkara yang diselesaikan, 1 perkara yang tidak mengajukan banding, sedangkan untuk kasasi belum ada pengajuan, sehingga nilai realisasi perkara yang tidak mengajukan banding dan kasasi adalah 20% dan capaian 57,14%. Ketua dan Panitera selalu melakukan evaluasi untuk mencapai target yang telah direncanakan.
3.		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas	90	Diisi Secara Triwulan			Laporan survey persepsi kepuasan masyarakat dilaporkan secara triwulan, sehingga indikator ini belum dapat diukur di

		Terhadap Layanan Peradilan					Bulan MEI 2025. Ketua dan segenap aparatur pengadilan berusaha memberikan layanan terbaik, baik dari segi kepaniteraan maupun dari sisi kesekretariatan untuk dukungan sarana dan prasarana.
4.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	100	5/5	100	100	Ketua dan Panitera selalu melakukan evaluasi agar semua salinan putusan perkara yang disampaikan selalu tepat waktu, yakni 14 hari sejak perkara diputus.
5.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	0/0	N/A	N/A	Belum ada pendaftaran perkara prodeo sampai dengan Bulan MEI 2025, namun Ketua selalu melakukan monitoring dan mendorong Kepaniteraan untuk menggalakkan sosialisasi pembebasan biaya perkara, terutama melalui Posbankum.
6.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	42/42	100	100	Panitera dan Panitera Muda Hukum selalu melakukan monitoring terhadap layanan Posbankum sehingga semua permohonan layanan hukum selalu ditindaklanjuti dengan baik.

7.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100	0/0	N/A	N/A	Sampai dengan Bulan MEI, tidak ada perkara BHT yang dimohonkan eksekusi. Ketua dan Panitera selalu melakukan monitoring agar permohonan eksekusi segera ditindaklanjuti.
Rata-rata Total			**93,75**			**92,85**	

Perhitungan Capaian Kinerja s/d Bulan MEI Tahun 2025:

- Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel : 78,57 %
- Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara : 100 %
- Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan : 100 %
- Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan : N/A

Rata-Rata : **92,85%**

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

PENJELASAN

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

1.Indikator : Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu

Indikator ini mengukur perkara yang diselesaikan tepat waktu dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi		Capaian
Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu	100	$\frac{5}{5}$	100	100(%)

- Perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu pada bulan MEI 2025 sebanyak 2 perkara dari total 2 perkara yang diselesaikan di Bulan MEI 2025.
- Perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu **sampai dengan** bulan MEI 2025 sebanyak 5 perkara dari total 5 perkara yang telah diselesaikan/diputus. Realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Bulan MEI 2025 sebesar 100%.

2.Indikator : Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi

Indikator ini mengukur Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi		Capaian
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	35	$\frac{1}{5}$	20	57,14(%)

- Pada Bulan MEI 2025, terdapat 2 permohonan banding dari 2 perkara yang diselesaikan di Bulan Mei 2025.

- Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding dan Kasasi sampai dengan bulan MEI 2025 sebanyak 1 perkara dari total 5 perkara yang putus sampai dengan Bulan MEI 2025.
- Realisasi sampai dengan Bulan MEI 2025 sebesar 20% sehingga capaian kinerja sampai dengan Bulan MEI 2025 sebesar 57,14%.

3.Indikator : Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Indikator ini mengukur Nilai Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi	Capaian
Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90	Dihitung Secara Triwulan	

- Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat dihitung secara triwulanan, sehingga belum ada data capaian atas indikator ini.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

4. Indikator : Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu

Indikator ini mengukur Salinan Putusan Perkara TUN yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi		Capaian
Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	100	5/5	100	100 %)

- Jumlah Putusan yang disampaikan tepat waktu pada bulan MEI 2025 sebanyak 2 putusan perkara dari total 2 perkara yang putus di Bulan MEI 2025.
- Jumlah Putusan yang disampaikan tepat waktu sampai dengan bulan MEI 2025 sebanyak 5 putusan perkara dari total 5 perkara yang diselesaikan sampai dengan Bulan MEI 2025.
- Realisasi **sampai dengan** MEI 2025 100%, capaian 100%.

5. Indikator : Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan

Indikator ini mengukur jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi		Capaian
Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	0/0	N/A	N/A(%)

- Pada Bulan MEI 2025, tidak ada pendaftaran perkara prodeo. Realisasi dan capaian kinerja Bulan MEI tidak dapat dihitung (N/A).
- **Sampai dengan** Bulan MEI 2025, belum ada perkara prodeo yang didaftarkan, sehingga realisasi dan capaian atas target perkara prodeo yang diselesaikan tidak dapat dihitung (N/A).

6.Indikator : Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Indikator ini mengukur Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi		Capaian
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	42/42	100%	100 (%)

- Pada bulan MEI 2025 pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum) adalah sebanyak 9 layanan dari 9 permohonan bantuan hukum.(Realisasi 100%)
- Realisasi sebesar 100% ini telah sesuai target (100%) sehingga capaian atas indikator ini sebesar 100%.
- Sampai dengan bulan MEI 2025, pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum) adalah sebanyak 42 layanan dari 42 permohonan bantuan hukum. (Realisasi 100%)
- Realisasi sampai dengan bulan MEI 2025 sebesar 100% ini mencapai target (100%) sehingga capaian atas indikator ini sampai dengan MEI 2025 sebesar 100%.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

7.Indikator : Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)

Indikator ini mengukur Jumlah Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi		Capaian
Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100	0/0	N/A	N/A(%)

- Pada bulan MEI 2025 tidak ada permohonan Eksekusi maupun Penetapan Eksekusi, sehingga realisasi dan capaian di Bulan MEI 2025 tidak dapat dihitung (N/A). Tidak adanya permohonan eksekusi di bulan berjalan bukan merupakan kesalahan satker, dan bisa disebabkan karena telah adanya eksekusi secara sukarela dari para pihak dan tidak dilaporkan ke pengadilan.
- **Sampai dengan** bulan MEI 2025, belum ada permohonan Eksekusi dan Penetapan Eksekusi.
- Realisasi dan capaian **sampai dengan** Bulan MEI tidak dapat dihitung (N/A).

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

Penjelasan Target, Realisasi dan Capaian Rata-Rata :

- Target rata-rata 7 Indikator Kinerja yaitu sebesar **93,75%.**
- Dikarenakan beberapa indikator tidak dapat didefinisikan (N/A), maka atas indikator N/A tersebut tidak dimasukkan dalam perhitungan capaian kinerja. Capaian rata-rata Indikator Kinerja yang dapat dihitung **sampai dengan** bulan MEI 2025 yaitu sebesar **92,85%**.

Pangkalpinang, 2 Juni 2025
KETUA,

EDI SEPTA SURHAZA

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

BULAN JUNI

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi s.d. Bulan JUNI			Kegiatan/Upaya/Strategi/Kendala/Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
				Realisasi		Capaian (%)	
					%		
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu	100	6/6	100	100	6 perkara diselesaikan tepat waktu dari total 6 perkara yang diselesaikan. Ketua dan Panitera selalu melakukan evaluasi agar tidak ada perkara yang melewati batas waktu penyelesaian perkara, yakni 5 bulan untuk pengadilan tingkat pertama.
2.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	35	2/6	33	94,28	Dari total 6 perkara yang diselesaikan, 2 perkara yang tidak mengajukan banding yakni perkara Nomor 16/G/2024/PTUN.PGP dan perkara Nomor 1/G/2025/PTUN.PGP, sedangkan untuk kasasi ada1 pengajuan kasasi, sehingga nilai realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (banding dan kasasi) adalah 33% dan capaian 94,28%. Ketua dan Panitera selalu melakukan evaluasi untuk mencapai target yang telah direncanakan.

3.		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90		98,85	109,83	Laporan survey persepsi kepuasan masyarakat dilaporkan secara triwulan. Ketua dan segenap aparatur pengadilan berusaha memberikan layanan terbaik, baik dari segi kepaniteraan maupun dari sisi kesekretariatan untuk dukungan sarana dan prasarana.
4.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	100	6/6	100	100	Ketua dan Panitera selalu melakukan evaluasi agar semua salinan putusan perkara yang disampaikan selalu tepat waktu, yakni 14 hari sejak perkara diputus.
5.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	0/0	N/A	N/A	Belum ada pendaftaran perkara prodeo sampai dengan Bulan JUNI 2025, namun Ketua selalu melakukan monitoring dan mendorong Kepaniteraan untuk menggalakkan sosialisasi pembebasan biaya perkara, terutama melalui Posbankum.
6.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	100	49/49	100	100	Panitera dan Panitera Muda Hukum selalu melakukan monitoring terhadap layanan Posbankum sehingga semua permohonan layanan hukum selalu ditindaklanjuti dengan baik.

		(Posbakum)					
7.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100	0 1	0	0	Pada Bulan Juni, terdapat 1 permohonan eksekusi. Saat ini permohonan eksekusi sedang dalam proses dan belum selesai atau belum ada Penetapan Ketua, namun Ketua dan Panitera selalu melakukan monitoring agar permohonan eksekusi segera ditindaklanjuti dan kemungkinan penetapan eksekusi akan terbit di Bulan Juli 2025.
Rata-rata Total			**93,75**			**75,34**	

Perhitungan Capaian Kinerja s/d Bulan JUNI Tahun 2025:

- Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel : 101,37 %
- Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara : 100 %
- Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan : 100 %
- Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan : 0 %

Rata-Rata : **75,34%**

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

PENJELASAN

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

1.Indikator : Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu

Indikator ini mengukur perkara yang diselesaikan tepat waktu dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi		Capaian
Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu	100	$\frac{6}{6}$	100	100(%)

- Perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu pada bulan JUNI 2025 sebanyak 1 perkara dari total 1 perkara yang diselesaikan di Bulan JUNI 2025.
- Perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu **sampai dengan** bulan JUNI 2025 sebanyak 6 perkara dari total 6 perkara yang telah diselesaikan/diputus. Realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Bulan JUNI 2025 sebesar 100%.

2.Indikator : Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi

Indikator ini mengukur Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi		Capaian
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	35	$\frac{2}{6}$	33	94,28(%)

- Pada Bulan JUNI 2025, tidak terdapat permohonan banding dari 1 perkara yang diselesaikan di Bulan JUNI 2025.

- Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding dan Kasasi sampai dengan bulan JUNI 2025 sebanyak 2 perkara dari total 6 perkara yang putus sampai dengan Bulan JUNI 2025.
- Realisasi sampai dengan Bulan JUNI 2025 sebesar 33% sehingga capaian kinerja sampai dengan Bulan JUNI 2025 sebesar 94,28%.

3.Indikator : Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Indikator ini mengukur Nilai Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi	Capaian
Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90	98,85	109,83

- Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat dihitung secara triwulanan.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

4. Indikator : Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu

Indikator ini mengukur Salinan Putusan Perkara TUN yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi		Capaian
Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	100	6/6	100	100 %)

- Jumlah Putusan yang disampaikan tepat waktu pada bulan JUNI 2025 sebanyak 1 putusan perkara dari total 1 perkara yang putus di Bulan JUNI 2025.
- Jumlah Putusan yang disampaikan tepat waktu sampai dengan bulan JUNI 2025 sebanyak 6 putusan perkara dari total 6 perkara yang diselesaikan sampai dengan Bulan JUNI 2025.
- Realisasi **sampai dengan** JUNI 2025 100%, capaian 100%.

5. Indikator : Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan

Indikator ini mengukur jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi		Capaian
Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	0/0	N/A	N/A(%)

- Pada Bulan JUNI 2025, tidak ada pendaftaran perkara prodeo. Realisasi dan capaian kinerja Bulan JUNI tidak dapat dihitung (N/A).
- **Sampai dengan** Bulan JUNI 2025, belum ada perkara prodeo yang didaftarkan, sehingga realisasi dan capaian atas target perkara prodeo yang diselesaikan tidak dapat dihitung (N/A).

6.Indikator : Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Indikator ini mengukur Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi		Capaian
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	49/49	100%	100 (%)

- Pada bulan JUNI 2025 pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum) adalah sebanyak 7 layanan dari 7 permohonan bantuan hukum.(Realisasi 100%)
- Realisasi sebesar 100% ini telah sesuai target (100%) sehingga capaian atas indikator ini sebesar 100%.
- Sampai dengan bulan JUNI 2025, pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum) adalah sebanyak 49 layanan dari 49 permohonan bantuan hukum. (Realisasi 100%)
- Realisasi sampai dengan bulan JUNI 2025 sebesar 100% ini mencapai target (100%) sehingga capaian atas indikator ini sampai dengan JUNI 2025 sebesar 100%.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

7.Indikator : Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)

Indikator ini mengukur Jumlah Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi		Capaian
Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100	0/1	0	0(%)

- Pada bulan JUNI 2025 terdapat 1 permohonan Eksekusi yang belum terbit Penetapan Eksekusinya namun telah diproses sesuai prosedur, sehingga realisasi dan capaian di Bulan JUNI 2025 sebesar 0% karena belum ada penetapan ketua.
- **Sampai dengan** bulan JUNI 2025, terdapat 1 permohonan Eksekusi.
- Realisasi dan capaian **sampai dengan** Bulan JUNI sebesar 0%.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

Penjelasan Target, Realisasi dan Capaian Rata-Rata :

- Target rata-rata 7 Indikator Kinerja yaitu sebesar **93,75%.**
- Dikarenakan terdapat 1 indikator yang tidak dapat didefinisikan (N/A), maka atas indikator N/A tersebut tidak dimasukkan dalam perhitungan capaian kinerja. Capaian rata-rata Indikator Kinerja yang dapat dihitung **sampai dengan** bulan JUNI 2025 yaitu sebesar **75,34%**.

Pangkalpinang, 3 Juli 2025
KETUA,

EDI SEPTA SURHAZA

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

BULAN JULI

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi s.d. Bulan JULI			Kegiatan/Upaya/Strategi/Kendala/Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
				Realisasi		Capaian (%)	
					%		
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu	100	6/6	100	100	6 perkara diselesaikan tepat waktu dari total 6 perkara yang diselesaikan. Ketua dan Panitera selalu melakukan evaluasi agar tidak ada perkara yang melewati batas waktu penyelesaian perkara, yakni 5 bulan untuk pengadilan tingkat pertama.
2.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	35	1/6	16,67	47,63	Dari total 6 perkara yang diselesaikan, 1 perkara yang tidak mengajukan banding yakni perkara Nomor 16/G/2024/PTUN.PGP, sedangkan untuk kasasi ada 1 pengajuan kasasi, sehingga nilai realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (banding dan kasasi) adalah 16,67% dan capaian 47,63%. Ketua dan Panitera selalu melakukan evaluasi untuk mencapai target yang telah direncanakan, namun capaian kinerja bulanan tidak dapat diprediksi karena upaya

							hukum adalah hak para pihak.
3.		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90	Diisi Secara Triwulan			Laporan survey persepsi kepuasan masyarakat dilaporkan secara triwulan. Ketua dan segenap aparatur pengadilan berusaha memberikan layanan terbaik, baik dari segi kepaniteraan maupun dari sisi kesekretariatan untuk dukungan sarana dan prasarana.
4.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	100	6/6	100	100	Ketua dan Panitera selalu melakukan evaluasi agar semua salinan putusan perkara yang disampaikan selalu tepat waktu, yakni 14 hari sejak perkara diputus.
5.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	0/0	N/A	N/A	Belum ada pendaftaran perkara prodeo sampai dengan Bulan JULI 2025, namun Ketua selalu melakukan monitoring dan mendorong Kepaniteraan untuk menggalakkan sosialisasi pembebasan biaya perkara, terutama melalui Posbankum.
6.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan	100	57/57	100	100	Panitera dan Panitera Muda Hukum selalu melakukan monitoring terhadap layanan Posbankum sehingga semua permohonan layanan hukum selalu ditindaklanjuti dengan baik.

		Hukum (Posbakum)					
7.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100	1/1	100	100	Pada Bulan Juni, terdapat 1 permohonan eksekusi yang telah ditindaklanjuti dan telah diterbitkan Penetapan Ketua pada tanggal 23 Juli 2025. Ketua dan Panitera selalu melakukan monitoring agar permohonan eksekusi segera ditindaklanjuti.
Rata-rata Total			**93,75**			**93,45**	

Perhitungan Capaian Kinerja s/d Bulan JULI Tahun 2025:

- Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel : 73,82 %
- Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara : 100 %
- Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan : 100 %
- Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan : 100 %

Rata-Rata : **93,45%**

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

PENJELASAN

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

1.Indikator : Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu

Indikator ini mengukur perkara yang diselesaikan tepat waktu dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi		Capaian
Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu	100	$\frac{6}{6}$	100	100(%)

- Perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu pada bulan JULI 2025 sebanyak 0 perkara dari total 0 perkara yang diselesaikan di Bulan JULI 2025 (Tidak ada perkara yang diselesaikan di Bulan Juli 2025).
- Perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu **sampai dengan** bulan JULI 2025 sebanyak 6 perkara dari total 6 perkara yang telah diselesaikan/diputus. Realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Bulan JULI 2025 sebesar 100%.

2.Indikator : Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi

Indikator ini mengukur Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi		Capaian
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	35	$\frac{1}{6}$	16,67	47,63(%)

- Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding dan Kasasi sampai dengan bulan JULI 2025 sebanyak 1 perkara dari

total 6 perkara yang putus sampai dengan Bulan JULI 2025.

- Realisasi sampai dengan Bulan JULI 2025 sebesar16,67% sehingga capaian kinerja sampai dengan Bulan JULI 2025 sebesar 47,63%.

3.Indikator : Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Indikator ini mengukur Nilai Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi	Capaian
Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90	Diisi per triwulan	

- Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat dihitung secara triwulanan.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

4. Indikator : Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu

Indikator ini mengukur Salinan Putusan Perkara TUN yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi		Capaian
Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	100	6/6	100	100 %)

- Jumlah Putusan yang disampaikan tepat waktu pada bulan JULI 2025 sebanyak 0 putusan perkara dari total 0 perkara yang putus di Bulan JULI 2025. (Tidak ada perkara yang diselesaikan di Bulan Juli 2025).
- Jumlah Putusan yang disampaikan tepat waktu sampai dengan bulan JULI 2025 sebanyak 6 putusan perkara dari total 6 perkara yang diselesaikan sampai dengan Bulan JULI 2025.
- Realisasi **sampai dengan** JULI 2025 100%, capaian 100%.

5. Indikator : Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan

Indikator ini mengukur jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi		Capaian
Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	0/0	N/A	N/A(%)

- Pada Bulan JULI 2025, tidak ada pendaftaran perkara prodeo. Realisasi dan capaian kinerja Bulan JULI tidak dapat dihitung (N/A).
- **Sampai dengan** Bulan JULI 2025, belum ada perkara prodeo yang didaftarkan, sehingga realisasi dan capaian atas target perkara prodeo yang diselesaikan tidak dapat dihitung (N/A).

6.Indikator : Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Indikator ini mengukur Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi		Capaian
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	57/57	100%	100 (%)

- Pada bulan JULI 2025 pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum) adalah sebanyak 8 layanan dari 8 permohonan bantuan hukum.(Realisasi 100%)
- Realisasi sebesar 100% ini telah sesuai target (100%) sehingga capaian atas indikator ini sebesar 100%.
- Sampai dengan bulan JULI 2025, pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum) adalah sebanyak 57 layanan dari 57 permohonan bantuan hukum. (Realisasi 100%)
- Realisasi sampai dengan bulan JULI 2025 sebesar 100% ini mencapai target (100%) sehingga capaian atas indikator ini sampai dengan JULI 2025 sebesar 100%.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

7.Indikator : Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)

Indikator ini mengukur Jumlah Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi		Capaian
Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100	1/1	100%	100(%)

- Pada bulan JULI 2025 terdapat 1 Penetapan Eksekusi oleh Ketua atas permohonan eksekusi yang diajukan di Bulan Juni 2025. Sehingga realisasi di Bulan Juli 2025 sebesar 100% dan capaian di Bulan JULI 2025 sebesar 100%.
- **Sampai dengan** bulan JULI 2025, terdapat 1 permohonan Eksekusi.
- Realisasi dan capaian **sampai dengan** Bulan JULI sebesar 100%.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

Penjelasan Target, Realisasi dan Capaian Rata-Rata :

- Target rata-rata 7 Indikator Kinerja yaitu sebesar **93,75%.**
- Dikarenakan terdapat 1 indikator yang tidak dapat didefinisikan (N/A), maka atas indikator N/A tersebut tidak dimasukkan dalam perhitungan capaian kinerja. Capaian rata-rata Indikator Kinerja yang dapat dihitung **sampai dengan** bulan JULI 2025 yaitu sebesar **93,45%**.

Pangkalpinang, 31 Juli 2025
KETUA,

EDI SEPTA SURHAZA

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

BULAN AGUSTUS

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi s.d. Bulan AGUSTUS			Kegiatan/Upaya/Strategi/Kendala/Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
				Realisasi		Capaian (%)	
					%		
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu	100	8/8	100	100	8 perkara diselesaikan tepat waktu dari total 8 perkara yang diselesaikan. Ketua dan Panitera selalu melakukan evaluasi agar tidak ada perkara yang melewati batas waktu penyelesaian perkara, yakni 5 bulan untuk pengadilan tingkat pertama.
2.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	35	2/8	25	71,43	Dari total 8 perkara yang diselesaikan, 2 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi yakni perkara Nomor 16/G/2024/PTUN.PGP dan perkara Nomor 7/G/2025/PTUN.PGP, sehingga nilai realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (banding dan kasasi) adalah 25% dan capaian 71,43%. Ketua dan Panitera selalu melakukan evaluasi untuk mencapai target yang telah direncanakan, namun capaian kinerja bulanan tidak dapat

							diprediksi karena upaya hukum adalah hak para pihak.
3.		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90	Diisi Secara Triwulan			Laporan survey persepsi kepuasan masyarakat dilaporkan secara triwulan. Ketua dan segenap aparatur pengadilan berusaha memberikan layanan terbaik, baik dari segi kepaniteraan maupun dari sisi kesekretariatan untuk dukungan sarana dan prasarana.
4.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	100	8/8	100	100	Ketua dan Panitera selalu melakukan evaluasi agar semua salinan putusan perkara yang disampaikan selalu tepat waktu, yakni 14 hari sejak perkara diputus.
5.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	0/0	N/A	N/A	Belum ada pendaftaran perkara prodeo sampai dengan Bulan AGUSTUS 2025. Ketua selalu melakukan monitoring dan mendorong Kepaniteraan untuk menggalakkan sosialisasi pembebasan biaya perkara, terutama melalui Posbankum, namun sampai dengan Bulan Agustus 2025, masih belum ada permohonan perkara prodeo. Menindaklanjuti hal ini, pada tanggal 21 Agustus telah diadakan rapat koordinasi dengan Dirjen Badilmiltun dan

							diikuti dengan rapat Komite Anggaran PTUN Pangkalpinang untuk mengevaluasi pelaksanaan perkara prodeo. Pada tanggal 25 Agustus 2025, PTUN Pangkalpinang telah mengajukan permohonan revisi anggaran prodeo ke Dirjen Badilmiltun MA RI.
6.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	65/65	100	100	Panitera dan Panitera Muda Hukum selalu melakukan monitoring terhadap layanan Posbankum sehingga semua permohonan layanan hukum selalu ditindaklanjuti dengan baik.
7.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100	1/1	100	100	Pada Bulan Juni, terdapat 1 permohonan eksekusi yang telah ditindaklanjuti dan telah diterbitkan Penetapan Ketua pada tanggal 23 Juli 2025. Ketua dan Panitera selalu melakukan monitoring agar permohonan eksekusi segera ditindaklanjuti.
Rata-rata Total			**93,75**			**96,43**	

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

Perhitungan Capaian Kinerja s/d Bulan AGUSTUS Tahun 2025:

- Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel : 85,72 %
- Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara : 100 %
- Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan : 100 %
- Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan : 100 %

Rata-Rata : **96,43%**

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

PENJELASAN

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

1.Indikator : Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu

Indikator ini mengukur perkara yang diselesaikan tepat waktu dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi		Capaian
Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu	100	8/8	100	100(%)

- Perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu pada bulan AGUSTUS 2025 sebanyak 2 perkara dari total 2 perkara yang diselesaikan di Bulan AGUSTUS 2025.
- Perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu **sampai dengan** bulan AGUSTUS 2025 sebanyak 8 perkara dari total 8 perkara yang telah diselesaikan/diputus. Realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Bulan AGUSTUS 2025 sebesar 100%.

2.Indikator : Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi

Indikator ini mengukur Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi		Capaian
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	35	2/8	25	71,43(%)

- Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding dan Kasasi sampai dengan bulan AGUSTUS 2025 sebanyak 2 perkara dari total 8 perkara yang diselesaikan sampai dengan Bulan AGUSTUS 2025.
- Realisasi sampai dengan Bulan AGUSTUS 2025 sebesar 25% sehingga capaian kinerja sampai dengan Bulan AGUSTUS 2025 sebesar 71,43%.

3.Indikator : Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Indikator ini mengukur Nilai Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi	Capaian
Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90	Diisi per triwulan	

- Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat dihitung secara triwulanan.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

4. Indikator : Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu

Indikator ini mengukur Salinan Putusan Perkara TUN yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi		Capaian
Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	100	8/8	100	100 %)

- Jumlah Putusan yang disampaikan tepat waktu pada bulan AGUSTUS 2025 sebanyak 2 putusan perkara dari total 2 perkara yang diselesaikan di Bulan AGUSTUS 2025.
- Jumlah Putusan yang disampaikan tepat waktu sampai dengan bulan AGUSTUS 2025 sebanyak 8 putusan perkara dari total 8 perkara yang diselesaikan sampai dengan Bulan AGUSTUS 2025.
- Realisasi **sampai dengan** AGUSTUS 2025 100%, capaian 100%.

5. Indikator : Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan

Indikator ini mengukur jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi		Capaian
Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	0/0	N/A	N/A(%)

- Pada Bulan AGUSTUS 2025, tidak ada pendaftaran perkara prodeo. Realisasi dan capaian kinerja Bulan AGUSTUS tidak dapat dihitung (N/A).
- **Sampai dengan** Bulan AGUSTUS 2025, belum ada perkara prodeo yang didaftarkan, sehingga realisasi dan capaian atas target perkara prodeo yang diselesaikan tidak dapat dihitung (N/A).

6.Indikator : Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Indikator ini mengukur Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi		Capaian
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	65/65	100%	100 (%)

- Pada bulan AGUSTUS 2025 pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum) adalah sebanyak 8 layanan dari 8 permohonan bantuan hukum.(Realisasi 100%)
- Realisasi sebesar 100% ini telah sesuai target (100%) sehingga capaian atas indikator ini sebesar 100%.
- Sampai dengan bulan AGUSTUS 2025, pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum) adalah sebanyak 65 layanan dari 65 permohonan bantuan hukum. (Realisasi 100%)
- Realisasi sampai dengan bulan AGUSTUS 2025 sebesar 100% ini mencapai target (100%) sehingga capaian atas indikator ini sampai dengan AGUSTUS 2025 sebesar 100%.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

7.Indikator : Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)

Indikator ini mengukur Jumlah Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi		Capaian
Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100	$\frac{1}{1}$	100%	100(%)

- **Sampai dengan** bulan AGUSTUS 2025, terdapat 1 permohonan Eksekusi, yakni perkara Nomor 16/G/2024/PTUN.PGP. Permohonan eksekusi didaftarkan di Bulan Juni 2025, penetapan Ketua diterbitkan tanggal 23 Juli 2025.
- Realisasi dan capaian **sampai dengan** Bulan AGUSTUS sebesar 100%.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

Penjelasan Target, Realisasi dan Capaian Rata-Rata :

- Target rata-rata 7 Indikator Kinerja yaitu sebesar **93,75%.**
- Dikarenakan terdapat 1 indikator yang tidak dapat didefinisikan (N/A), maka atas indikator N/A tersebut tidak dimasukkan dalam perhitungan capaian kinerja. Capaian rata-rata Indikator Kinerja yang dapat dihitung **sampai dengan** bulan AGUSTUS 2025 yaitu sebesar **96,43%**.

Pangkalpinang, 3 September 2025
KETUA,

MOHAMAD SYAUQIE

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

BULAN SEPTEMBER

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi s.d. Bulan SEPTEMBER			Kegiatan/Upaya/Strategi/Kendala/Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
				Realisasi		Capaian (%)	
					%		
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu	100	10/10	100	100	10 perkara diselesaikan tepat waktu dari total 10 perkara yang diselesaikan. Ketua dan Panitera selalu melakukan evaluasi agar tidak ada perkara yang melewati batas waktu penyelesaian perkara, yakni 5 bulan untuk pengadilan tingkat pertama.
2.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	35	4/10	40	114,29	Dari total 10 perkara yang diselesaikan, 4 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi yakni perkara Nomor 16/G/2024/PTUN.PGP, perkara Nomor 7/G/2025/PTUN.PGP, perkara Nomor 3/G/TF/2025/PTUN.PGP dan perkara Nomor 5/G/KI/2025/PTUN.PGP sehingga nilai realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi adalah 40% dan capaian 114,29%. Ketua dan Panitera selalu melakukan

							evaluasi untuk mencapai target yang telah direncanakan dan hasil yang diperoleh sudah sesuai dengan target.
3.		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90		97,27	108,07	Laporan survey persepsi kepuasan masyarakat dilaporkan secara triwulan. Hasil survey Triwulan III menunjukkan nilai yang sangat baik, yakni sebesar 95,95%, sedangkan hasil survey Triwulan I sebesar 97,01, Triwulan II sebesar 98,85. Nilai rata-rata hasil survey sampai dengan Triwulan III adalah 97,27%, sehingga capaian adalah sebesar 108,07%. Ketua dan segenap aparatur pengadilan berusaha memberikan layanan terbaik, baik dari segi kepaniteraan maupun dari sisi kesekretariatan untuk dukungan sarana dan prasarana.
4.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	100	10/10	100	100	Ketua dan Panitera selalu melakukan evaluasi agar semua salinan putusan perkara yang disampaikan selalu tepat waktu, yakni 14 hari sejak perkara diputus.
5.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	0/0	N/A	N/A	Belum ada pendaftaran perkara prodeo sampai dengan Bulan SEPTEMBER 2025. Ketua selalu melakukan monitoring dan mendorong Kepaniteraan untuk

	Miskin dan Terpinggirkan						menggalakkan sosialisasi pembebasan biaya perkara, terutama melalui Posbankum, namun sampai dengan Bulan SEPTEMBER 2025, masih belum ada permohonan perkara prodeo. Menindaklanjuti hal ini, pada tanggal 21 Agustus telah diadakan rapat koordinasi dengan Dirjen Badilmiltun dan diikuti dengan rapat Komite Anggaran PTUN Pangkalpinang untuk mengevaluasi pelaksanaan perkara prodeo. Pada tanggal 25 Agustus 2025, PTUN Pangkalpinang telah mengajukan permohonan revisi anggaran prodeo ke Dirjen Badilmiltun MA RI dan saat ini sedang menunggu penetapan DIPA Revisi dari DJA Kemenkeu.
6.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	75/75	100	100	Panitera dan Panitera Muda Hukum selalu melakukan monitoring terhadap layanan Posbankum sehingga semua permohonan layanan hukum selalu ditindaklanjuti dengan baik.
7.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti	100	1/1	100	100	Pada Bulan Juni, terdapat 1 permohonan eksekusi yang telah ditindaklanjuti dan telah diterbitkan Penetapan Ketua pada tanggal 24 September 2025. Ketua dan Panitera selalu

	Pengadilan	(Dieksekusi)					melakukan monitoring agar permohonan eksekusi segera ditindaklanjuti.
Rata-rata Total			**93,75**			**101,86**	

Perhitungan Capaian Kinerja s/d Bulan SEPTEMBER Tahun 2025:

- Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel : 107,45 %
- Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara : 100 %
- Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan : 100 %
- Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan : 100 %

Rata-Rata : **101,86%**

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

PENJELASAN

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

1.Indikator : Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu

Indikator ini mengukur perkara yang diselesaikan tepat waktu dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi		Capaian
Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu	100	$\frac{10}{10}$	100	100(%)

- Perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu pada bulan SEPTEMBER 2025 sebanyak 2 perkara dari total 2 perkara yang diselesaikan di Bulan SEPTEMBER 2025.
- Perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu **sampai dengan** bulan SEPTEMBER 2025 sebanyak 10 perkara dari total 10 perkara yang telah diselesaikan/diputus. Realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Bulan SEPTEMBER 2025 sebesar 100%.

2.Indikator : Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi

Indikator ini mengukur Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi		Capaian
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	35	$\frac{4}{10}$	40	114,29 (%)

- Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding dan Kasasi sampai dengan bulan SEPTEMBER 2025 sebanyak 4 perkara dari total 10 perkara yang diselesaikan sampai dengan Bulan SEPTEMBER 2025.
- Realisasi sampai dengan Bulan SEPTEMBER 2025 sebesar 40% sehingga capaian kinerja sampai dengan Bulan SEPTEMBER 2025 sebesar 114,29%.

3.Indikator : Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Indikator ini mengukur Nilai Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi sd Bulan September	Capaian
Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90	97,27	108,07

- Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat dihitung secara triwulanan.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

4. Indikator : Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu

Indikator ini mengukur Salinan Putusan Perkara TUN yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi		Capaian
Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	100	10/10	100	100 %)

- Jumlah Putusan yang disampaikan tepat waktu pada bulan SEPTEMBER 2025 sebanyak 2 putusan perkara dari total 2 perkara yang diselesaikan di Bulan SEPTEMBER 2025.
- Jumlah Putusan yang disampaikan tepat waktu sampai dengan bulan SEPTEMBER 2025 sebanyak 10 putusan perkara dari total 10 perkara yang diselesaikan sampai dengan Bulan SEPTEMBER 2025.
- Realisasi **sampai dengan** SEPTEMBER 2025 100%, capaian 100%.

5. Indikator : Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan

Indikator ini mengukur jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi		Capaian
Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	0/0	N/A	N/A(%)

- Pada Bulan SEPTEMBER 2025, tidak ada pendaftaran perkara prodeo. Realisasi dan capaian kinerja Bulan SEPTEMBER tidak dapat dihitung (N/A).
- **Sampai dengan** Bulan SEPTEMBER 2025, belum ada perkara prodeo yang didaftarkan, sehingga realisasi dan capaian atas target perkara prodeo yang diselesaikan tidak dapat dihitung (N/A).

6.Indikator : Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Indikator ini mengukur Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi		Capaian
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	75/75	100%	100 (%)

- Pada bulan SEPTEMBER 2025 pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum) adalah sebanyak 10 layanan dari 10 permohonan bantuan hukum.(Realisasi 100%)
- Realisasi sebesar 100% ini telah sesuai target (100%) sehingga capaian atas indikator ini sebesar 100%.
- Sampai dengan bulan SEPTEMBER 2025, pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum) adalah sebanyak 75 layanan dari 75 permohonan bantuan hukum. (Realisasi 100%)
- Realisasi sampai dengan bulan SEPTEMBER 2025 sebesar 100% ini mencapai target (100%) sehingga capaian atas indikator ini sampai dengan SEPTEMBER 2025 sebesar 100%.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

7.Indikator : Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)

Indikator ini mengukur Jumlah Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi		Capaian
Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100	$\frac{1}{1}$	100%	100(%)

- **Sampai dengan** bulan SEPTEMBER 2025, terdapat 1 permohonan Eksekusi, yakni perkara Nomor 16/G/2024/PTUN.PGP. Permohonan eksekusi didaftarkan di Bulan Juni 2025, penetapan Ketua diterbitkan tanggal 24 September 2025.
- Realisasi dan capaian **sampai dengan** Bulan SEPTEMBER sebesar 100%.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

Penjelasan Target, Realisasi dan Capaian Rata-Rata :

- Target rata-rata 7 Indikator Kinerja yaitu sebesar **93,75%.**
- Dikarenakan terdapat 1 indikator yang tidak dapat didefinisikan (N/A), maka atas indikator N/A tersebut tidak dimasukkan dalam perhitungan capaian kinerja. Capaian rata-rata Indikator Kinerja yang dapat dihitung **sampai dengan** bulan SEPTEMBER 2025 yaitu sebesar **101,86%**.

Pangkalpinang, 6 Oktober 2025
KETUA,

MOHAMAD SYAUQIE

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

LAPORAN KINERJA
TRIWULAN I TAHUN 2025

- Memperhatikan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah , Bagian keenam Pasal 18 dan 19;
- Permenpan No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Rekomendasi Kementerian PAN dan RB No. B/3826/M.PAN-RB/11/2014 Hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah “Pemanfaatan Penetapan Kinerja (PK) yang telah ditandatangani, sebagai sarana untuk menilai dan menyimpulkan kinerja pihak yang berjanji. Selain itu , perlu ada penjabaran lebih lanjut dokumen Penetapan Kinerja (PK) ke dalam satu rencana aksi yang lebih detil dan dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan (progress) kinerja secara periodik (triwulan atau semesteran), sekaligus sebagai sarana untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
TRIWULAN I

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi s.d. Triwulan I			Kegiatan/Upaya/Strategi/Kendala/Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
				Realisasi		Capaian (%)	
					%		
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu	100	3/3	100	100	3 perkara diselesaikan tepat waktu dari 3 perkara yang diselesaikan. Ketua dan Panitera selalu melakukan evaluasi agar tidak ada perkara yang melewati batas waktu penyelesaian perkara, yakni 5 bulan untuk pengadilan tingkat pertama.
2.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	35	1/3	33,33	95,22	Dari total 3 perkara yang diselesaikan, 2 perkara mengajukan banding, sedangkan untuk kasasi belum ada, sehingga nilai realisasi perkara yang tidak mengajukan banding dan kasasi adalah 33,33% dan capaian 95,22%. Ketua dan Panitera selalu melakukan evaluasi untuk mencapai target yang telah direncanakan.
3.		Index Persepsi Pencari Keadilan	90		97,01	107,78	Nilai capaian indeks kepuasan Triwulan I sangat baik. Ketua dan segenap aparatur

		Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan					pengadilan berusaha memberikan layanan terbaik, baik dari segi kepaniteraan maupun dari sisi kesekretariatan untuk dukungan sarana dan prasarana.
4.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	100	3/3	100	100	Ketua dan Panitera selalu melakukan evaluasi agar semua salinan putusan perkara yang disampaikan selalu tepat waktu, yakni 14 hari sejak perkara diputus.
5.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	0/0	N/A	N/A	Belum ada pendaftaran perkara prodeo sampai dengan Bulan MARET 2025, namun Ketua selalu melakukan monitoring dan mendorong Kepaniteraan untuk menggalakkan sosialisasi pembebasan biaya perkara, terutama melalui Posbankum.
6.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	24/24	100	100	Panitera dan Panitera Muda Hukum selalu melakukan monitoring terhadap layanan Posbankum sehingga semua permohonan layanan hukum selalu ditindaklanjuti dengan baik.
7.	Meningkatnya	Persentase	100	0	N/A	N/A	Sampai dengan Bulan MARET, tidak ada perkara BHT yang dimohonkan eksekusi.

	Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)		0			Ketua dan Panitera selalu melakukan monitoring agar permohonan eksekusi segera ditindaklanjuti.
Rata-rata Total			**93,75**			**100,33**	

Perhitungan Capaian Kinerja s/d Triwulan I Tahun 2025:

- Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel : 101 %
- Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara : 100 %
- Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan : 100 %
- Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan : N/A

Rata-Rata : **100,33%**

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

PENJELASAN

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

1.Indikator : Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu

Indikator ini mengukur perkara yang diselesaikan tepat waktu dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi		Capaian
Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu	100	3/3	100	100(%)

- Perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu pada bulan MARET 2025 sebanyak 2 perkara dari total 2 perkara yang diselesaikan di Bulan MARET 2025.
- Perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu **sampai dengan** Triwulan I 2025 sebanyak 3 perkara dari total 3 perkara yang telah diselesaikan/diputus. Realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan I 2025 sebesar 100%.

2.Indikator : Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi

Indikator ini mengukur Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi		Capaian
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	35	1/3	33,33	95,22(%)

- Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding dan Kasasi pada bulan MARET 2025 sebanyak 1 perkara dari total 2

perkara yang putus di Bulan MARET 2025.

- Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding dan Kasasi sampai dengan Triwulan I 2025 sebanyak 1 perkara dari total 3 perkara yang putus sampai dengan Triwulan I 2025.
- Realisasi sampai dengan Triwulan I 2025 sebesar 33,33% sehingga capaian kinerja sampai dengan Triwulan I 2025 sebesar 95,22%.

3.Indikator : Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Indikator ini mengukur Nilai Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi	Capaian
Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90	97,01	107,78

- Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan I sebesar 97,01% sehingga capaiannya sebesar 107,78%.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

4. Indikator : Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu

Indikator ini mengukur Salinan Putusan Perkara TUN yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi		Capaian
Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	100	3/3	100	100 %)

- Jumlah Putusan yang disampaikan tepat waktu pada bulan MARET 2025 sebanyak 2 putusan perkara dari total 2 perkara yang putus di Bulan MARET 2025.
- Jumlah Putusan yang disampaikan tepat waktu sampai dengan Triwulan I 2025 sebanyak 3 putusan perkara dari total 3 perkara yang diselesaikan sampai dengan Triwulan I 2025.
- Realisasi **sampai dengan** Triwulan I 2025 100%, capaian 100%.

5. Indikator : Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan

Indikator ini mengukur jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi		Capaian
Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	0/0	N/A	N/A(%)

- Pada Bulan MARET 2025, tidak ada pendaftaran perkara prodeo. Realisasi dan capaian kinerja Bulan MARET tidak dapat dihitung (N/A).
- **Sampai dengan** Triwulan I 2025, belum ada perkara prodeo yang didaftarkan, sehingga realisasi dan capaian atas target perkara prodeo yang diselesaikan tidak dapat dihitung (N/A).

6.Indikator : Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Indikator ini mengukur Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi		Capaian
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	24/24	100%	100 (%)

- Pada bulan MARET 2025 pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum) adalah sebanyak 7 layanan dari 7 permohonan bantuan hukum.(Realisasi 100%)
- Realisasi sebesar 100% ini telah sesuai target (100%) sehingga capaian atas indikator ini sebesar 100%.
- Sampai dengan Triwulan I 2025, pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum) adalah sebanyak 24 layanan dari 24 permohonan bantuan hukum. (Realisasi 100%)
- Realisasi sampai dengan bulan Triwulan I 2025 sebesar 100% ini mencapai target (100%) sehingga capaian atas indikator ini sampai dengan Triwulan I 2025 sebesar 100%.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

7.Indikator : Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)

Indikator ini mengukur Jumlah Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi		Capaian
Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100	0/0	N/A	N/A(%)

- Pada bulan MARET 2025 tidak ada permohonan Eksekusi maupun Penetapan Eksekusi, sehingga realisasi dan capaian di Bulan MARET 2025 tidak dapat dihitung (N/A). Tidak adanya permohonan eksekusi di bulan berjalan bukan merupakan kesalahan satker, dan bisa disebabkan karena telah adanya eksekusi secara sukarela dari para pihak dan tidak dilaporkan ke pengadilan.
- **Sampai dengan** Triwulan I 2025, belum ada permohonan Eksekusi dan Penetapan Eksekusi.
- Realisasi dan capaian **sampai dengan** Triwulan I 2025 tidak dapat dihitung (N/A).

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

Penjelasan Target, Realisasi dan Capaian Rata-Rata :

- Target rata-rata 7 Indikator Kinerja yaitu sebesar **93,75%.**
- Dikarenakan beberapa indikator tidak dapat didefinisikan (N/A), maka atas indikator N/A tersebut tidak dimasukkan dalam perhitungan capaian kinerja. Capaian rata-rata Indikator Kinerja yang dapat dihitung **sampai dengan** Triwulan I Tahun 2025 yaitu sebesar **100,33%**.

Pangkalpinang, 8 April 2025
KETUA,

EDI SEPTA SURHAZA

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

LAPORAN KINERJA
TRIWULAN II TAHUN 2025

- Memperhatikan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah , Bagian keenam Pasal 18 dan 19;
- Permenpan No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Rekomendasi Kementerian PAN dan RB No. B/3826/M.PAN-RB/11/2014 Hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah “Pemanfaatan Penetapan Kinerja (PK) yang telah ditandatangani, sebagai sarana untuk menilai dan menyimpulkan kinerja pihak yang berjanji. Selain itu , perlu ada penjabaran lebih lanjut dokumen Penetapan Kinerja (PK) ke dalam satu rencana aksi yang lebih detil dan dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan (progress) kinerja secara periodik (triwulan atau semesteran), sekaligus sebagai sarana untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
TRIWULAN II

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi s.d. TRIWULAN II			Kegiatan/Upaya/Strategi/Kendala/Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
				Realisasi		Capaian (%)	
					%		
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu	100	6/6	100	100	6 perkara diselesaikan tepat waktu dari 6 perkara yang diselesaikan. Ketua dan Panitera selalu melakukan evaluasi agar tidak ada perkara yang melewati batas waktu penyelesaian perkara, yakni 5 bulan untuk pengadilan tingkat pertama.
2.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	35	2/6	33	94,28	Dari total 6 perkara yang diselesaikan, 4 perkara mengajukan banding, sedangkan untuk kasasi terdapat 1 permohonan kasasi, sehingga nilai realisasi perkara yang tidak mengajukan banding dan kasasi adalah 33% dan capaian 94,28%. Ketua dan Panitera selalu melakukan evaluasi untuk mencapai target yang telah direncanakan.
3.		Index Persepsi Pencari Keadilan	90		98,85	109,83	Nilai capaian indeks kepuasan TRIWULAN II sangat baik. Ketua dan segenap aparatur

		Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan					pengadilan berusaha memberikan layanan terbaik, baik dari segi kepaniteraan maupun dari sisi kesekretariatan untuk dukungan sarana dan prasarana.
4.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	100	6/6	100	100	Ketua dan Panitera selalu melakukan evaluasi agar semua salinan putusan perkara yang disampaikan selalu tepat waktu, yakni 14 hari sejak perkara diputus.
5.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	0/0	N/A	N/A	Belum ada pendaftaran perkara prodeo sampai dengan Bulan JUNI 2025, namun Ketua selalu melakukan monitoring dan mendorong Kepaniteraan untuk menggalakkan sosialisasi pembebasan biaya perkara, terutama melalui Posbankum.
6.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	49/49	100	100	Panitera dan Panitera Muda Hukum selalu melakukan monitoring terhadap layanan Posbankum sehingga semua permohonan layanan hukum selalu ditindaklanjuti dengan baik.

7.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100	0/1	0	0	Pada Bulan Juni, terdapat 1 permohonan eksekusi. Saat ini permohonan eksekusi sedang dalam proses dan belum selesai atau belum ada Penetapan Ketua, namun Ketua dan Panitera selalu melakukan monitoring agar permohonan eksekusi segera ditindaklanjuti dan kemungkinan penetapan eksekusi akan terbit di Bulan Juli 2025.
Rata-rata Total			**93,75**			**75,34**	

Perhitungan Capaian Kinerja s/d TRIWULAN II Tahun 2025:

- Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel : 101,37 %
- Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara : 100 %
- Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan : 100 %
- Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan : 0 %

Rata-Rata :**75,34%**

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

PENJELASAN

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

1.Indikator : Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu

Indikator ini mengukur perkara yang diselesaikan tepat waktu dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi		Capaian
Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu	100	$\frac{6}{6}$	100	100(%)

- Perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu pada bulan JUNI 2025 sebanyak 1 perkara dari total 1 perkara yang diselesaikan di Bulan JUNI 2025.
- Perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu **sampai dengan** TRIWULAN II 2025 sebanyak 6 perkara dari total 6 perkara yang telah diselesaikan/diputus. Realisasi dan capaian kinerja sampai dengan TRIWULAN II 2025 sebesar 100%.

2.Indikator : Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi

Indikator ini mengukur Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi		Capaian
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	35	$\frac{2}{6}$	33	94,28(%)

- Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding dan Kasasi pada bulan JUNI 2025 sebanyak 1 perkara dari total 1

perkara yang putus di Bulan JUNI 2025.

- Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding dan Kasasi sampai dengan TRIWULAN II 2025 sebanyak 2 perkara dari total 6 perkara yang putus sampai dengan TRIWULAN II 2025.
- Realisasi sampai dengan TRIWULAN II 2025 sebesar 33% sehingga capaian kinerja sampai dengan TRIWULAN II 2025 sebesar 94,28%.

3.Indikator : Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Indikator ini mengukur Nilai Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi	Capaian
Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90	98,85	109,83

- Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat TRIWULAN II sebesar 98,85% sehingga capaiannya sebesar 109,83%.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

4. Indikator : Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu

Indikator ini mengukur Salinan Putusan Perkara TUN yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi		Capaian
Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	100	6/6	100	100 %)

- Jumlah Putusan yang disampaikan tepat waktu pada bulan JUNI 2025 sebanyak 1 putusan perkara dari total 1 perkara yang putus di Bulan JUNI 2025.
- Jumlah Putusan yang disampaikan tepat waktu sampai dengan TRIWULAN II 2025 sebanyak 6 putusan perkara dari total 6 perkara yang diselesaikan sampai dengan TRIWULAN II 2025.
- Realisasi **sampai dengan** TRIWULAN II 2025 100%, capaian 100%.

5. Indikator : Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan

Indikator ini mengukur jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi		Capaian
Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	0/0	N/A	N/A(%)

- Pada Bulan JUNI 2025, tidak ada pendaftaran perkara prodeo. Realisasi dan capaian kinerja Bulan JUNI tidak dapat dihitung (N/A).
- **Sampai dengan** TRIWULAN II 2025, belum ada perkara prodeo yang didaftarkan, sehingga realisasi dan capaian atas target perkara prodeo yang diselesaikan tidak dapat dihitung (N/A).

6.Indikator : Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Indikator ini mengukur Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi		Capaian
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	49/49	100%	100 (%)

- Pada bulan JUNI 2025 pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum) adalah sebanyak 7 layanan dari 7 permohonan bantuan hukum.(Realisasi 100%)
- Realisasi sebesar 100% ini telah sesuai target (100%) sehingga capaian atas indikator ini sebesar 100%.
- Sampai dengan TRIWULAN II 2025, pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum) adalah sebanyak 49 layanan dari 494 permohonan bantuan hukum. (Realisasi 100%)
- Realisasi sampai dengan bulan TRIWULAN II 2025 sebesar 100% ini mencapai target (100%) sehingga capaian atas indikator ini sampai dengan TRIWULAN II 2025 sebesar 100%.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

7.Indikator : Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)

Indikator ini mengukur Jumlah Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi		Capaian
Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100	0/1	0	0 %)

- Pada bulan JUNI 2025 terdapat 1 permohonan Eksekusi yang belum terbit Penetapan Eksekusinya namun telah diproses sesuai prosedur, sehingga realisasi dan capaian di Bulan JUNI 2025 sebesar 0% karena belum ada penetapan ketua.
- **Sampai dengan** TRIWULAN II 2025, terdapat 1 permohonan Eksekusi.
- Realisasi dan capaian **sampai dengan** TRIWULAN II 2025 sebesar 0%.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

Penjelasan Target, Realisasi dan Capaian Rata-Rata :

- Target rata-rata 7 Indikator Kinerja yaitu sebesar **93,75%.**
- Dikarenakan terdapat 1 indikator tidak dapat didefinisikan (N/A), maka atas indikator N/A tersebut tidak dimasukkan dalam perhitungan capaian kinerja. Capaian rata-rata Indikator Kinerja yang dapat dihitung **sampai dengan** TRIWULAN II Tahun 2025 yaitu sebesar **75,34%**.

Pangkalpinang, 3 Juli 2025
KETUA,

EDI SEPTA SURHAZA

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

LAPORAN KINERJA
TRIWULAN III TAHUN 2025

- Memperhatikan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah , Bagian keenam Pasal 18 dan 19;
- Permenpan No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Rekomendasi Kementerian PAN dan RB No. B/3826/M.PAN-RB/11/2014 Hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah "Pemanfaatan Penetapan Kinerja (PK) yang telah ditandatangani, sebagai sarana untuk menilai dan menyimpulkan kinerja pihak yang berjanji. Selain itu , perlu ada penjabaran lebih lanjut dokumen Penetapan Kinerja (PK) ke dalam satu rencana aksi yang lebih detil dan dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan (progress) kinerja secara periodik (triwulan atau semesteran), sekaligus sebagai sarana untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

TRIWULAN III

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi s.d. Triwulan III			Kegiatan/Upaya/Strategi/Kendala/Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
				Realisasi		Capaian (%)	
					%		
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu	100	10/10	100	100	10 perkara diselesaikan tepat waktu dari total 10 perkara yang diselesaikan. Ketua dan Panitera selalu melakukan evaluasi agar tidak ada perkara yang melewati batas waktu penyelesaian perkara, yakni 5 bulan untuk pengadilan tingkat pertama.
2.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	35	4/10	40	114,29	Dari total 10 perkara yang diselesaikan, 4 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi yakni perkara Nomor 16/G/2024/PTUN.PGP, perkara Nomor 7/G/2025/PTUN.PGP, perkara Nomor 3/G/TF/2025/PTUN.PGP dan perkara Nomor 5/G/KI/2025/PTUN.PGP sehingga nilai realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi adalah 40% dan capaian 114,29%. Ketua dan Panitera selalu melakukan

							evaluasi untuk mencapai target yang telah direncanakan dan hasil yang diperoleh sudah sesuai dengan target.
3.		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90		97,27	108,07	Laporan survey persepsi kepuasan masyarakat dilaporkan secara triwulan. Hasil survey Triwulan III menunjukkan nilai yang sangat baik, yakni sebesar 95,95%, sedangkan hasil survey Triwulan I sebesar 97,01, Triwulan II sebesar 98,85. Nilai rata-rata hasil survey sampai dengan Triwulan III adalah 97,27%, sehingga capaian adalah sebesar 108,07%. Ketua dan segenap aparatur pengadilan berusaha memberikan layanan terbaik, baik dari segi kepaniteraan maupun dari sisi kesekretariatan untuk dukungan sarana dan prasarana.
4.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	100	10/10	100	100	Ketua dan Panitera selalu melakukan evaluasi agar semua salinan putusan perkara yang disampaikan selalu tepat waktu, yakni 14 hari sejak perkara diputus.
5.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	0/0	N/A	N/A	Belum ada pendaftaran perkara prodeo sampai dengan Triwulan III Tahun 2025. Ketua selalu melakukan monitoring dan mendorong Kepaniteraan untuk

	Miskin dan Terpinggirkan						menggalakkan sosialisasi pembebasan biaya perkara, terutama melalui Posbankum, namun sampai dengan Triwulan III Tahun 2025, masih belum ada permohonan perkara prodeo. Menindaklanjuti hal ini, pada tanggal 21 Agustus telah diadakan rapat koordinasi dengan Dirjen Badilmiltun dan diikuti dengan rapat Komite Anggaran PTUN Pangkalpinang untuk mengevaluasi pelaksanaan perkara prodeo. Pada tanggal 25 Agustus 2025, PTUN Pangkalpinang telah mengajukan permohonan revisi anggaran prodeo ke Dirjen Badilmiltun MA RI dan saat ini sedang menunggu penetapan DIPA Revisi dari DJA Kemenkeu.
6.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	75/75	100	100	Panitera dan Panitera Muda Hukum selalu melakukan monitoring terhadap layanan Posbankum sehingga semua permohonan layanan hukum selalu ditindaklanjuti dengan baik.
7.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti	100	1/1	100	100	Pada Bulan Juni, terdapat 1 permohonan eksekusi yang telah ditindaklanjuti dan telah diterbitkan Penetapan Ketua pada tanggal 24 September 2025. Ketua dan Panitera selalu

	Pengadilan	(Dieksekusi)					melakukan monitoring agar permohonan eksekusi segera ditindaklanjuti.
Rata-rata Total			**93,75**			**101,86**	

Perhitungan Capaian Kinerja s/d TRIWULAN III Tahun 2025:

- Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel : 107,45%
- Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara : 100 %
- Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan : 100 %
- Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan : 0 %

Rata-Rata :**101,86%**

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

PENJELASAN

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

1.Indikator : Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu

Indikator ini mengukur perkara yang diselesaikan tepat waktu dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi		Capaian
Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu	100	10/10	100	100(%)

- Perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu pada bulan September 2025 sebanyak 2 perkara dari total 2 perkara yang diselesaikan di Bulan September 2025.
- Perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu **sampai dengan** TRIWULAN III 2025 sebanyak 10 perkara dari total 10 perkara yang telah diselesaikan/diputus. Realisasi dan capaian kinerja sampai dengan TRIWULAN III 2025 sebesar 100%.

2.Indikator : Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi

Indikator ini mengukur Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi		Capaian
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	35	4/10	40	114,29(%)

- Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding dan Kasasi sampai dengan TRIWULAN III 2025 sebanyak 4 perkara

dari total 10 perkara yang telah diselesaikan.

- Realisasi sampai dengan TRIWULAN III 2025 sebesar 40% sehingga capaian kinerja sampai dengan TRIWULAN III 2025 sebesar 114,29%.

3.Indikator : Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Indikator ini mengukur Nilai Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi	Capaian
Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90	97,27	108,07

- Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat s/d Triwulan III secara rata-rata sebesar 97,27% sehingga capaiannya sebesar 108,07%.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

4. Indikator : Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu

Indikator ini mengukur Salinan Putusan Perkara TUN yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi		Capaian
Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	100	10/10	100	100 %)

- Jumlah Putusan yang disampaikan tepat waktu pada bulan September 2025 sebanyak 2 putusan perkara dari total 2 perkara yang diselesaikan di Bulan September 2025.
- Jumlah Putusan yang disampaikan tepat waktu sampai dengan TRIWULAN III 2025 sebanyak 10 putusan perkara dari total 10 perkara yang diselesaikan sampai dengan TRIWULAN III 2025.
- Realisasi **sampai dengan** TRIWULAN III 2025 100%, capaian 100%.

5. Indikator : Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan

Indikator ini mengukur jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi		Capaian
Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	0/0	N/A	N/A(%)

- Pada Bulan September 2025, tidak ada pendaftaran perkara prodeo. Realisasi dan capaian kinerja Bulan September 2025 tidak dapat dihitung (N/A).
- **Sampai dengan** TRIWULAN III 2025, belum ada perkara prodeo yang didaftarkan, sehingga realisasi dan capaian atas target perkara prodeo yang diselesaikan tidak dapat dihitung (N/A).

6.Indikator : Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Indikator ini mengukur Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi		Capaian
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	75/75	100%	100 (%)

- Pada bulan September 2025 pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum) adalah sebanyak 10 layanan dari 10 permohonan bantuan hukum.(Realisasi 100%)
- Realisasi sebesar 100% ini telah sesuai target (100%) sehingga capaian atas indikator ini sebesar 100%.
- Sampai dengan TRIWULAN III 2025, pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum) adalah sebanyak 75 layanan dari 75 permohonan bantuan hukum. (Realisasi 100%)
- Realisasi sampai dengan bulan TRIWULAN III 2025 sebesar 100% ini mencapai target (100%) sehingga capaian atas indikator ini sampai dengan TRIWULAN III 2025 sebesar 100%.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

7.Indikator : Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)

Indikator ini mengukur Jumlah Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi		Capaian
Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100	$\frac{1}{1}$	100	100 %)

- **Sampai dengan** TRIWULAN III 2025, terdapat 1 permohonan Eksekusi yang telah ditindaklanjuti, yakni perkara No 16/G/2024/PTUN.PGP.
- Realisasi dan capaian **sampai dengan** TRIWULAN III 2025 sebesar 100%.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

Penjelasan Target, Realisasi dan Capaian Rata-Rata :

- Target rata-rata 7 Indikator Kinerja yaitu sebesar **93,75%.**
- Dikarenakan terdapat 1 indikator tidak dapat didefinisikan (N/A), maka atas indikator N/A tersebut tidak dimasukkan dalam perhitungan capaian kinerja. Capaian rata-rata Indikator Kinerja yang dapat dihitung **sampai dengan** TRIWULAN III Tahun 2025 yaitu sebesar **101,86%**.

Pangkalpinang, 6 Oktober 2025
KETUA,

MOHAMAD SYAUQIE

LAMPIRAN XVI

PENGUKURAN KINERJA BERKALA SETELAH PERUBAHAN RENSTRA

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

BULAN JANUARI

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan Januari				Realisasi s.d Bulan Januari			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100	0	0	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A
		Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	0	0	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	3	3	100	100	3	3	100	100

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan Januari				Realisasi s.d Bulan Januari			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	0	0	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara	100	0	0	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A
		Persentase perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	100	0	0	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	3,78	**Dihitung Per Triwulan**							
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	85	**Diisi Per Tahun**							

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan Januari				Realisasi s.d Bulan Januari			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	95	-	-	100	105.26	-	-	100	105.26
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (05)	95	-	-	100	105.26	-	-	100	105.26
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	95	**Diisi Per Tahun**							
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	**Diisi Per Tahun**							

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

Perhitungan Capaian Kinerja Bulan JANUARI Tahun 2025:

- Terwujudnya Proses Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern : 100
- Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional : 105.26

Rata-Rata : **102.63%**

Perhitungan Capaian Kinerja s/d Bulan JANUARI Tahun 2025:

- Terwujudnya Proses Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern : 100
- Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional : 105.26

Rata-Rata : **102.63%**

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

PENJELASAN

Terwujudnya Peradilan Yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern

1.Indikator : Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu

Indikator ini mengukur perkara yang diselesaikan tepat waktu dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi sd Bulan Januari		Capaian
Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu	100	0/0	N/A	N/A

- Perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu pada bulan JANUARI 2025 sebanyak 0 perkara dari total 0 perkara yang diselesaikan di Bulan JANUARI 2025, sehingga realisasi atas indikator ini tidak dapat dihitung (N/A) karena pada Bulan JANUARI 2025, tidak ada perkara yang diselesaikan karena proses persidangan masih berjalan.
- Perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu **sampai dengan** bulan JANUARI 2025 sebanyak 0 perkara dari total 0 perkara yang telah diselesaikan/diputus. Realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Bulan JANUARI 2025 tidak dapat dihitung (N/A).

2. Indikator : Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak

Indikator ini mengukur Salinan Putusan Perkara TUN yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi sd Bulan Januari		Capaian
Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak	100	0/0	N/A	N/A

- Jumlah Putusan yang disampaikan tepat waktu pada bulan JANUARI 2025 sebanyak 0 putusan perkara dari total 0 perkara yang putus di Bulan JANUARI 2025. Pada Bulan JANUARI 2025, tidak ada perkara yang diselesaikan karena masih dalam proses persidangan, sehingga realisasi dan capaian atas indikator ini tidak dapat dihitung (N/A).
- Realisasi **sampai dengan** JANUARI 2025 sebanyak 0 putusan yang disampaikan tepat waktu dari total 0 putusan yang dihasilkan karena belum ada perkara yang putus di Bulan Januari 2025. Realisasi dan capaian atas indikator ini tidak dapat dihitung (N/A).

3.Indikator : Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak

Indikator ini mengukur persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu, capaiannya sebagai berikut:

	Target	Realisasi sd Bulan Januari		Capaian
Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak	100	3/3	100%	100 (%)

- Jumlah penerimaan petikan/amar putusan banding, kasasi dan PK sampai dengan bulan Januari 2025 adalah sebanyak 2 putusan banding, 1 putusan kasasi, dan 0 putusan PK.
- Jumlah pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan banding, kasasi dan PK secara tepat waktu sampai dengan bulan Januari 2025 adalah sebanyak 2 putusan banding, 1 putusan kasasi, dan 0 putusan PK.
- Realisasi sampai dengan Bulan Januari 2025 sebesar 100% sehingga capaian kinerja sampai dengan Bulan Januari 2025 sebesar 100%.

4.Indikator : Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan

Indikator ini mengukur persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi sd Bulan Januari	Capaian
Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan	$\frac{0}{0}$	N/A	N/A

- Putusan yang diunggah ke Direktori Putusan pada bulan Januari 2025 sebanyak 0 perkara dari total 0 perkara yang diminutasi di Bulan Januari 2025. Hal ini dikarenakan belum adanya perkara yang diselesaikan di Bulan Januari 2026.
- Putusan yang diunggah ke Direktori Putusan **sampai dengan** bulan Januari 2025 sebanyak 0 perkara dari total 0 perkara yang telah diminutasi. Realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Bulan Januari 2025 tidak dapat didefinisikan (N/A).

5.Indikator : Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara

Indikator ini mengukur Jumlah Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi s/d Bulan Januari		Capaian
Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan TUN	100	0/0	N/A	N/A

- Pada bulan JANUARI 2025 tidak ada permohonan Eksekusi maupun Penetapan Eksekusi, sehingga realisasi dan capaian di Bulan Januari 2025 tidak dapat dihitung (N/A). Tidak adanya permohonan eksekusi di bulan berjalan bukan merupakan kesalahan satker, dan bisa disebabkan karena telah adanya eksekusi secara sukarela dari para pihak dan tidak dilaporkan ke pengadilan.
- **Sampai dengan** bulan JANUARI 2025, belum ada permohonan Eksekusi dan Penetapan Eksekusi.
- Realisasi dan capaian **sampai dengan** Bulan JANUARI tidak dapat dihitung (N/A).

6.Indikator : Persentase Perkara TUN Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court

Indikator ini mengukur persentase perkara TUN yang menggunakan e-Court dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi s/d Bulan FEBRUARI		Capaian
Persentase Perkara TUN Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court	100	0/0	N/A	N/A

- Perkara TUN Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court pada bulan Januari 2025 sebanyak 0 perkara. Hal ini dikarenakan belum adanya perkara yang masuk di Bulan Januari 2025.

- Perkara TUN Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court **sampai dengan** bulan Januari 2025 sebanyak 0 perkara. Realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Bulan Januari 2025 tidak dapat didefinisikan (N/A).

Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

7.Indikator : Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan

Indikator ini mengukur Nilai Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi sd Bulan Januari	Capaian
Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	3,78	Dihitung secara Triwulanan	

- Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat dihitung secara triwulanan, sehingga belum ada data capaian atas indikator ini.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

8. Indikator : Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan

Indikator ini mengukur Indeks Profesionalitas ASN dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi sd Bulan Januari	Capaian
IP ASN	85	Diisi Per Tahun	

- Realisasi IP ASN dihitung secara tahunan, sehingga belum ada data capaian atas indikator ini.

9. Indikator : Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan

Indikator ini mengukur nilai IKPA yang terdiri dari DIPA 01 dan DIPA 05 dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi		Capaian
		DIPA 01	DIPA 05	
Nilai IKPA (DIPA 01 dan DIPA 05)	95	100	100	105,26

- Pada Bulan JANUARI 2025, nilai IKPA DIPA 01 dan DIPA 05 masing-masing sebesar 100. Capaian kinerja Bulan Januari sebesar 105,26%.
- **Sampai dengan** Bulan JANUARI 2025, nilai akumulatif IKPA DIPA 01 dan DIPA 05 masing-masing sebesar 100. Capaian kinerja s/d Bulan Januari sebesar 105,26%.

10. Indikator : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Indikator ini mengukur nilai kinerja perencanaan anggaran yang terdiri dari DIPA 01 dan DIPA 05 dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi		Capaian
		DIPA 01	DIPA 05	
NKPA (DIPA 01 dan DIPA 05)	95	**Diisi Per Tahun**		

- Realisasi NKPA dihitung secara tahunan, sehingga belum ada data capaian atas indikator ini.

11. Indikator : Nilai Indikator Kinerja Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Indikator ini mengukur nilai indikator pengelolaan aset dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi	Capaian
IPA	3	**Diisi Per Tahun**	

- Realisasi IPA dihitung secara tahunan, sehingga belum ada data capaian atas indikator ini.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

Penjelasan Target, Realisasi dan Capaian Rata-Rata :

- Capaian rata-rata Indikator Kinerja bulan JANUARI 2025 yaitu sebesar **102,63%**.
- Capaian rata-rata Indikator Kinerja **sampai dengan** bulan JANUARI 2025 yaitu sebesar **102,63%**.
- Dikarenakan beberapa indikator tidak dapat didefinisikan (N/A), maka atas indikator N/A tersebut tidak dimasukkan dalam perhitungan capaian kinerja.

Pangkalpinang, 3 November 2025
KETUA,

MOHAMAD SYAUQIE

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

BULAN FEBRUARI

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan FEBRUARI				Realisasi s.d Bulan FEBRUARI			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100	1	1	100	100	1	1	100	100
		Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	1	1	100	100	1	1	100	100
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	1	1	100	100	4	4	100	100

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan FEBRUARI				Realisasi s.d Bulan FEBRUARI			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	1	1	100	100	1	1	100	100
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara	100	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Persentase perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	100	2	2	100	100	2	2	100	100
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	3,78	**Dihitung Per Triwulan**							
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	85	**Diisi Per Tahun**							

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan FEBRUARI				Realisasi s.d Bulan FEBRUARI			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	95	0	100	100	105.26	0	100	100	105.26
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (05)	95	0	100	100	105.26	0	100	100	105.26
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	95	**Diisi Per Tahun**							
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	**Diisi Per Tahun**							

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

Perhitungan Capaian Kinerja Bulan FEBRUARI Tahun 2025:

- Terwujudnya Proses Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern : 100
- Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional : 105.26

Rata-Rata : **102.63%**

Perhitungan Capaian Kinerja s/d Bulan FEBRUARI Tahun 2025:

- Terwujudnya Proses Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern : 100
- Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional : 105.26

Rata-Rata : **102.63%**

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

PENJELASAN

Terwujudnya Peradilan Yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern

1.Indikator : Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu

Indikator ini mengukur perkara yang diselesaikan tepat waktu dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi sd Bulan FEBRUARI		Capaian
Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu	100	1/1	100%	100%

- Perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu pada bulan FEBRUARI 2025 sebanyak 1 perkara dari total 1 perkara yang diselesaikan di Bulan FEBRUARI 2025, sehingga realisasi dan capaian atas indikator ini pada Bulan Februari 2025 adalah sebesar 100%.
- Perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu **sampai dengan** bulan FEBRUARI 2025 sebanyak 1 perkara dari total 1 perkara yang telah diselesaikan/diputus. Realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Bulan FEBRUARI 2025 sebesar 100%.

2. Indikator : Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak

Indikator ini mengukur Salinan Putusan Perkara TUN yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi sd Bulan FEBRUARI		Capaian
Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak	100	1/1	100%	100%

- Jumlah Putusan yang disampaikan tepat waktu pada bulan FEBRUARI 2025 sebanyak 1 putusan perkara dari total 1 perkara yang diselesaikan di Bulan FEBRUARI 2025, sehingga realisasi dan capaian atas indikator ini sebesar 100%.
- Realisasi **sampai dengan** FEBRUARI 2025 sebanyak 1 putusan yang disampaikan tepat waktu dari total 1 putusan yang dihasilkan. Realisasi dan capaian atas indikator ini sebesar 100%.

3.Indikator : Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak

Indikator ini mengukur persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu, capaiannya sebagai berikut:

	Target	Realisasi sd Bulan FEBRUARI		Capaian
Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak	100	4/4	100%	100 (%)

- Pada Bulan Februari 2025, terdapat 1 penerimaan petikan/amar putusan banding, 0 putusan kasasi, dan 0 putusan PK. Jumlah pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan banding, kasasi dan PK secara tepat waktu bulan FEBRUARI 2025 adalah sebanyak 1 putusan banding, 0 putusan kasasi, dan 0 putusan PK. Realisasi Bulan FEBRUARI 2025 sebesar 100% sehingga capaian kinerja Bulan FEBRUARI 2025 sebesar 100%.
- Jumlah penerimaan petikan/amar putusan banding, kasasi dan PK sampai dengan bulan FEBRUARI 2025 adalah sebanyak 3 putusan banding, 1 putusan kasasi, dan 0 putusan PK. Jumlah pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan banding, kasasi dan PK secara tepat waktu sampai dengan bulan FEBRUARI 2025 adalah sebanyak 3 putusan banding, 1 putusan kasasi, dan 0 putusan PK. Realisasi sampai dengan Bulan FEBRUARI 2025 sebesar 100% sehingga capaian kinerja sampai dengan Bulan FEBRUARI 2025 sebesar 100%.

4.Indikator : Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan

Indikator ini mengukur persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi sd Bulan FEBRUARI	Capaian
Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan	$\frac{1}{1}$	100%	100%

- Putusan yang diunggah ke Direktori Putusan pada bulan FEBRUARI 2025 sebanyak 1 perkara dari total 1 perkara yang diminutasi di Bulan FEBRUARI 2025, sehingga realisasi dan capaian atas indikator ini di Bulan Februari 2025 sebesar 100%.
- Putusan yang diunggah ke Direktori Putusan **sampai dengan** bulan FEBRUARI 2025 sebanyak 1 perkara dari total 1 perkara yang telah diminutasi. Realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Bulan FEBRUARI 2025 sebesar 100%.

5.Indikator : Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara

Indikator ini mengukur Jumlah Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi s/d Bulan FEBRUARI		Capaian
Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan TUN	100	0/0	N/A	N/A

- Pada bulan FEBRUARI 2025 tidak ada permohonan Eksekusi maupun Penetapan Eksekusi, sehingga realisasi dan capaian di Bulan FEBRUARI 2025 tidak dapat dihitung (N/A). Tidak adanya permohonan eksekusi di bulan berjalan bukan merupakan kesalahan satker, dan bisa disebabkan karena telah adanya eksekusi secara sukarela dari para pihak dan tidak dilaporkan ke pengadilan.
- **Sampai dengan** bulan FEBRUARI 2025, belum ada permohonan Eksekusi dan Penetapan Eksekusi.
- Realisasi dan capaian **sampai dengan** Bulan FEBRUARI tidak dapat dihitung (N/A).

6.Indikator : Persentase Perkara TUN Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court

Indikator ini mengukur persentase perkara TUN yang menggunakan e-Court dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi s/d Bulan FEBRUARI		Capaian
Persentase Perkara TUN Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court	100	2/2	100	100

- Perkara TUN Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court pada bulan FEBRUARI 2025 sebanyak 1 perkara tingkat pertama dan 1 perkara tingkat banding dari total 1 pengajuan perkara tingkat pertama dan 1 pengajuan perkara tingkat banding. Realisasi dan capaian atas indikator ini pada Bulan Februari 2025 sebesar 100%.
- Perkara TUN Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court **sampai dengan** bulan FEBRUARI 2025 sebanyak 1 perkara tingkat pertama dan 1 perkara tingkat banding dari total 1 pengajuan perkara tingkat pertama dan 1 pengajuan perkara tingkat banding. Realisasi dan capaian atas indikator ini sampai dengan Bulan Februari 2025 sebesar 100%.

Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

7.Indikator : Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan

Indikator ini mengukur Nilai Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi sd Bulan FEBRUARI	Capaian
Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	3,78	Dihitung secara Triwulanan	

- Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat dihitung secara triwulanan, sehingga belum ada data capaian atas indikator ini.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

8. Indikator : Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan

Indikator ini mengukur Indeks Profesionalitas ASN dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi sd Bulan FEBRUARI	Capaian
IP ASN	85	Diisi Per Tahun	

- Realisasi IP ASN dihitung secara tahunan, sehingga belum ada data capaian atas indikator ini.

9. Indikator : Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan

Indikator ini mengukur nilai IKPA yang terdiri dari DIPA 01 dan DIPA 05 dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi		Capaian
		DIPA 01	DIPA 05	
Nilai IKPA (DIPA 01 dan DIPA 05)	95	100	100	105,26

- **Sampai dengan** Bulan FEBRUARI 2025, nilai akumulatif IKPA DIPA 01 dan DIPA 05 masing-masing sebesar 100. Capaian kinerja s/d Bulan FEBRUARI sebesar 105,26%.

10. Indikator : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Indikator ini mengukur nilai kinerja perencanaan anggaran yang terdiri dari DIPA 01 dan DIPA 05 dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi		Capaian
		DIPA 01	DIPA 05	
NKPA (DIPA 01 dan DIPA 05)	95	**Diisi Per Tahun**		

- Realisasi NKPA dihitung secara tahunan, sehingga belum ada data capaian atas indikator ini.

11. Indikator : Nilai Indikator Kinerja Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Indikator ini mengukur nilai indikator pengelolaan aset dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi	Capaian
IPA	3	**Diisi Per Tahun**	

- Realisasi IPA dihitung secara tahunan, sehingga belum ada data capaian atas indikator ini.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

Penjelasan Target, Realisasi dan Capaian Rata-Rata :

- Capaian rata-rata Indikator Kinerja bulan FEBRUARI 2025 yaitu sebesar **102,63%**.
- Capaian rata-rata Indikator Kinerja **sampai dengan** bulan FEBRUARI 2025 yaitu sebesar **102,63%**.
- Dikarenakan beberapa indikator tidak dapat didefinisikan (N/A), maka atas indikator N/A tersebut tidak dimasukkan dalam perhitungan capaian kinerja.

Pangkalpinang, 3 November 2025
KETUA,

MOHAMAD SYAUQIE

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

BULAN MARET

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan MARET				Realisasi s.d Bulan MARET			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100	2	2	100	100	3	3	100	100
		Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	2	2	100	100	3	3	100	100
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	1	1	100	100	4	4	100	100

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan MARET				Realisasi s.d Bulan MARET			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	2	2	100	100	3	3	100	100
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara	100	0	0	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A
		Persentase perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	100	1	1	100	100	3	3	100	100
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	3,78			3,84	101,59			3,84	101,59
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	85	**Diisi Per Tahun**							

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan MARET				Realisasi s.d Bulan MARET			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	95	-	-	100	105.26	-	-	100	105.26
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (05)	95	-	-	100	105.26	-	-	100	105.26
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	95	**Diisi Per Tahun**							
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	**Diisi Per Tahun**							

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

Perhitungan Capaian Kinerja Bulan MARET Tahun 2025:

- Terwujudnya Proses Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern : 100
- Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik : 101,59
- Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional : 105,26

Rata-Rata : **102,28%**

Perhitungan Capaian Kinerja s/d Bulan MARET Tahun 2025:

- Terwujudnya Proses Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern : 100
- Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik : 101,59
- Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional : 105,26

Rata-Rata : **102,28%**

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

PENJELASAN

Terwujudnya Peradilan Yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern

1.Indikator : Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu

Indikator ini mengukur perkara yang diselesaikan tepat waktu dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi sd Bulan MARET		Capaian
Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu	100	3/3	100%	100%

- Perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu pada bulan MARET 2025 sebanyak 2 perkara dari total 2 perkara yang diselesaikan di Bulan MARET 2025, sehingga realisasi dan capaian atas indikator ini pada Bulan MARET 2025 adalah sebesar 100%.
- Perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu **sampai dengan** bulan MARET 2025 sebanyak 3 perkara dari total 3 perkara yang telah diselesaikan/diputus. Realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Bulan MARET 2025 sebesar 100%.

2. Indikator : Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak

Indikator ini mengukur Salinan Putusan Perkara TUN yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi sd Bulan MARET		Capaian
Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak	100	3/3	100%	100%

- Jumlah Putusan yang disampaikan tepat waktu pada bulan MARET 2025 sebanyak 2 putusan perkara dari total 2 perkara yang diselesaikan di Bulan MARET 2025, sehingga realisasi dan capaian atas indikator ini sebesar 100%.
- Realisasi **sampai dengan** MARET 2025 sebanyak 3 putusan yang disampaikan tepat waktu dari total 3 putusan yang dihasilkan. Realisasi dan capaian atas indikator ini sebesar 100%.

3.Indikator : Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak

Indikator ini mengukur persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu, capaiannya sebagai berikut:

	Target	Realisasi sd Bulan MARET		Capaian
Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak	100	4/4	100%	100 (%)

- Pada Bulan Maret 2025, tidak ada penerimaan dan pemberitahuan petikan/amar putusan banding, kasasi dan PK. Realisasi

dan capaian Bulan Maret 2025 tidak dapat didefinisikan (N/A) dikarenakan tidak adanya penerimaan petikan/amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima PTUN Pangkalpinang di Bulan Maret 2025.

- Jumlah penerimaan petikan/amar putusan banding, kasasi dan PK sampai dengan bulan MARET 2025 adalah sebanyak 3 putusan banding, 1 putusan kasasi, dan 0 putusan PK. Jumlah pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan banding, kasasi dan PK secara tepat waktu sampai dengan bulan MARET 2025 adalah sebanyak 3 putusan banding, 1 putusan kasasi, dan 0 putusan PK. Realisasi sampai dengan Bulan MARET 2025 sebesar 100% sehingga capaian kinerja sampai dengan Bulan MARET 2025 sebesar 100%.

4.Indikator : Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan

Indikator ini mengukur persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi sd Bulan MARET	Capaian
Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan	3/3	100%	100%

- Putusan yang diunggah ke Direktori Putusan pada bulan MARET 2025 sebanyak 2 perkara dari total 2 perkara yang diminutasi di Bulan MARET 2025, sehingga realisasi dan capaian atas indikator ini di Bulan MARET 2025 sebesar 100%.
- Putusan yang diunggah ke Direktori Putusan **sampai dengan** bulan MARET 2025 sebanyak 3 perkara dari total 3 perkara yang telah diminutasi. Realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Bulan MARET 2025 sebesar 100%.

5.Indikator : Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara

Indikator ini mengukur Jumlah Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi s/d Bulan MARET		Capaian
Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan TUN	100	0/0	N/A	N/A

- Pada bulan MARET 2025 tidak ada permohonan Eksekusi maupun Penetapan Eksekusi, sehingga realisasi dan capaian di Bulan MARET 2025 tidak dapat dihitung (N/A). Tidak adanya permohonan eksekusi di bulan berjalan bukan merupakan kesalahan satker, dan bisa disebabkan karena telah adanya eksekusi secara sukarela dari para pihak dan tidak dilaporkan ke pengadilan.
- **Sampai dengan** bulan MARET 2025, belum ada permohonan Eksekusi dan Penetapan Eksekusi.
- Realisasi dan capaian **sampai dengan** Bulan MARET tidak dapat dihitung (N/A).

6.Indikator : Persentase Perkara TUN Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court

Indikator ini mengukur persentase perkara TUN yang menggunakan e-Court dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi s/d Bulan MARET		Capaian
Persentase Perkara TUN Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court	100	3/3	100	100

- Perkara TUN Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court pada bulan MARET 2025 sebanyak 1 perkara tingkat banding dari total 1 pengajuan perkara tingkat banding. Realisasi dan capaian atas indikator ini pada Bulan MARET 2025 sebesar 100%.
- Perkara TUN Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court **sampai dengan** bulan MARET 2025 sebanyak

1 perkara tingkat pertama dan 2 perkara tingkat banding dari total 1 pengajuan perkara tingkat pertama dan 2 pengajuan perkara tingkat banding. Realisasi dan capaian atas indikator ini sampai dengan Bulan MARET 2025 sebesar 100%.

Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

7.Indikator : Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan

Indikator ini mengukur Nilai Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi sd Bulan MARET	Capaian
Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	3,78	3,84	101,59

- Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat dihitung secara triwulanan. Realisasi Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Triwulan I Tahun 2025 adalah sebesar 3,84, sehingga capaian atas indikator ini adalah sebesar 101,59%.
- Nilai rata-rata realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat sampai dengan Bulan Maret 2025 adalah sebesar 101,59%.

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

8. Indikator : Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan

Indikator ini mengukur Indeks Profesionalitas ASN dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi sd Bulan MARET	Capaian
IP ASN	85	Diisi Per Tahun	

- Realisasi IP ASN dihitung secara tahunan, sehingga belum ada data capaian atas indikator ini.

9. Indikator : Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan

Indikator ini mengukur nilai IKPA yang terdiri dari DIPA 01 dan DIPA 05 dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi		Capaian
		DIPA 01	DIPA 05	
Nilai IKPA (DIPA 01 dan DIPA 05)	95	100	100	105,26

- **Sampai dengan** Bulan MARET 2025, nilai akumulatif IKPA DIPA 01 dan DIPA 05 masing-masing sebesar 100. Capaian kinerja s/d Bulan MARET sebesar 105,26%.

10. Indikator : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Indikator ini mengukur nilai kinerja perencanaan anggaran yang terdiri dari DIPA 01 dan DIPA 05 dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi		Capaian
		DIPA 01	DIPA 05	
NKPA (DIPA 01 dan DIPA 05)	95	**Diisi Per Tahun**		

- Realisasi NKPA dihitung secara tahunan, sehingga belum ada data capaian atas indikator ini.

11. Indikator : Nilai Indikator Kinerja Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Indikator ini mengukur nilai indikator pengelolaan aset dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi	Capaian
IPA	3	**Diisi Per Tahun**	

- Realisasi IPA dihitung secara tahunan, sehingga belum ada data capaian atas indikator ini.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

Penjelasan Target, Realisasi dan Capaian Rata-Rata :

- Capaian rata-rata Indikator Kinerja bulan MARET 2025 yaitu sebesar **102,28%**.
- Capaian rata-rata Indikator Kinerja **sampai dengan** bulan MARET 2025 yaitu sebesar **102,28%**.
- Dikarenakan beberapa indikator tidak dapat didefinisikan (N/A), maka atas indikator N/A tersebut tidak dimasukkan dalam perhitungan capaian kinerja.

Pangkalpinang, 3 November 2025
KETUA,

MOHAMAD SYAUQIE

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

BULAN APRIL

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan APRIL				Realisasi s.d Bulan APRIL			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100	0	0	N/A	N/A	3	3	100	100
		Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	0	0	N/A	N/A	3	3	100	100
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	0	0	N/A	N/A	4	4	100	100

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan APRIL				Realisasi s.d Bulan APRIL			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	0	0	N/A	N/A	3	3	100	100
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara	100	0	0	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A
		Persentase perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	100	1	1	100	100	4	4	100	100
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	3,78	**Diisi Per Triwulan**							
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	85	**Diisi Per Tahun**							

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan APRIL				Realisasi s.d Bulan APRIL			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	95	-	-	99,42	104,65	-	-	99,42	104,65
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (05)	95	-	-	92,18	97,03	-	-	92,18	97,03
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	95	**Diisi Per Tahun**							
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	**Diisi Per Tahun**							

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

Perhitungan Capaian Kinerja Bulan APRIL Tahun 2025:

- Terwujudnya Proses Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern : 100
- Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional : 100,84

Rata-Rata : **100,42%**

Perhitungan Capaian Kinerja s/d Bulan APRIL Tahun 2025:

- Terwujudnya Proses Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern : 100
- Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional : 100,84

Rata-Rata : **100,42%**

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

PENJELASAN

Terwujudnya Peradilan Yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern

1.Indikator : Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu

Indikator ini mengukur perkara yang diselesaikan tepat waktu dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi sd Bulan APRIL		Capaian
Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu	100	3/3	100%	100%

- Tidak ada perkara TUN yang diselesaikan di Bulan April 2025, sehingga realisasi dan capaian atas indikator ini pada Bulan APRIL 2025 tidak dapat didefinisikan (N/A).
- Perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu **sampai dengan** bulan APRIL 2025 sebanyak 3 perkara dari total 3 perkara yang telah diselesaikan/diputus. Realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Bulan APRIL 2025 sebesar 100%.

2. Indikator : Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak

Indikator ini mengukur Salinan Putusan Perkara TUN yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi sd Bulan APRIL		Capaian
Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak	100	3/3	100%	100%

- Jumlah Putusan yang disampaikan tepat waktu pada bulan APRIL 2025 sebanyak 0 putusan perkara dari total 0 perkara yang diselesaikan di Bulan APRIL 2025. Pada Bulan April 2025, tidak ada perkara yang diselesaikan sehingga tidak ada putusan yang disampaikan kepada para pihak. Realisasi dan capaian atas indikator ini pada Bulan April 2025 tidak dapat didefinisikan (N/A).
- Realisasi **sampai dengan** APRIL 2025 sebanyak 3 putusan yang disampaikan tepat waktu dari total 3 putusan yang dihasilkan. Realisasi dan capaian atas indikator ini sebesar 100%.

3.Indikator : Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak

Indikator ini mengukur persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu, capaiannya sebagai berikut:

	Target	Realisasi sd Bulan APRIL		Capaian
Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak	100	4/4	100%	100 (%)

- Pada Bulan APRIL 2025, tidak ada penerimaan dan pemberitahuan petikan/amar putusan banding, kasasi dan PK. Realisasi dan capaian Bulan APRIL 2025 tidak dapat didefinisikan (N/A) dikarenakan tidak adanya penerimaan petikan/amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima PTUN Pangkalpinang di Bulan APRIL 2025.
- Jumlah penerimaan petikan/amar putusan banding, kasasi dan PK sampai dengan bulan APRIL 2025 adalah sebanyak 3 putusan banding, 1 putusan kasasi, dan 0 putusan PK. Jumlah pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan banding, kasasi dan PK secara tepat waktu sampai dengan bulan APRIL 2025 adalah sebanyak 3 putusan banding, 1 putusan kasasi, dan 0 putusan PK. Realisasi sampai dengan Bulan APRIL 2025 sebesar 100% sehingga capaian kinerja sampai dengan Bulan APRIL 2025 sebesar 100%.

4.Indikator : Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan

Indikator ini mengukur persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi sd Bulan APRIL	Capaian
Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan	3/3	100%	100%

- Putusan yang diunggah ke Direktori Putusan pada bulan APRIL 2025 sebanyak 0 perkara dari total 0 perkara yang diminutasi di Bulan APRIL 2025 (tidak ada perkara yang diselesaikan di Bulan April 2025), sehingga realisasi dan capaian atas indikator ini di Bulan APRIL 2025 tidak dapat didefinisikan (N/A).
- Putusan yang diunggah ke Direktori Putusan **sampai dengan** bulan APRIL 2025 sebanyak 3 perkara dari total 3 perkara yang telah diminutasi. Realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Bulan APRIL 2025 sebesar 100%.

5.Indikator : Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara

Indikator ini mengukur Jumlah Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi s/d Bulan APRIL		Capaian
Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan TUN	100	0/0	N/A	N/A

- Pada bulan APRIL 2025 tidak ada permohonan Eksekusi maupun Penetapan Eksekusi, sehingga realisasi dan capaian di Bulan APRIL 2025 tidak dapat dihitung (N/A). Tidak adanya permohonan eksekusi di bulan berjalan bukan merupakan kesalahan satker, dan bisa disebabkan karena telah adanya eksekusi secara sukarela dari para pihak dan tidak dilaporkan ke pengadilan.
- **Sampai dengan** bulan APRIL 2025, belum ada permohonan Eksekusi dan Penetapan Eksekusi.
- Realisasi dan capaian **sampai dengan** Bulan APRIL tidak dapat dihitung (N/A).

6.Indikator : Persentase Perkara TUN Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court

Indikator ini mengukur persentase perkara TUN yang menggunakan e-Court dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi s/d Bulan APRIL		Capaian
Persentase Perkara TUN Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court	100	4/4	100%	100%

- Perkara TUN Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court pada bulan APRIL 2025 adalah sebanyak 1 perkara tingkat pertama dari total 1 pengajuan perkara tingkat pertama. Realisasi dan capaian atas indikator ini pada Bulan APRIL 2025 sebesar 100%.
- Perkara TUN Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court **sampai dengan** bulan APRIL 2025 sebanyak 2

perkara tingkat pertama dan 2 perkara tingkat banding dari total 2 pengajuan perkara tingkat pertama dan 2 pengajuan perkara tingkat banding. Realisasi dan capaian atas indikator ini sampai dengan Bulan APRIL 2025 sebesar 100%.

Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

7.Indikator : Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan

Indikator ini mengukur Nilai Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi sd Bulan April	Capaian
Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	3,78	Dihitung secara Triwulanan	

- Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat dihitung secara triwulanan, sehingga belum ada data capaian atas indikator ini.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

8. Indikator : Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan

Indikator ini mengukur Indeks Profesionalitas ASN dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi sd Bulan APRIL	Capaian
IP ASN	85	Diisi Per Tahun	

- Realisasi IP ASN dihitung secara tahunan, sehingga belum ada data capaian atas indikator ini.

9. Indikator : Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan

Indikator ini mengukur nilai IKPA yang terdiri dari DIPA 01 dan DIPA 05 dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi		Capaian
		DIPA 01	DIPA 05	
Nilai IKPA (DIPA 01 dan DIPA 05)	95	99,42	92,18	100,84

- Pada Bulan APRIL 2025, nilai IKPA DIPA 01 dan DIPA 05 masing-masing sebesar 99,42 dan 92,18. Capaian kinerja Bulan APRIL sebesar 100,84%.
- **Sampai dengan** Bulan APRIL 2025, realisasi DIPA 01 adalah sebesar 99,42, sedangkan realisasi DIPA 05 adalah sebesar 92,18. Rata-rata nilai IKPA DIPA 01 dan DIPA 05 adalah sebesar 95,8. Capaian kinerja s/d Bulan APRIL sebesar 100,84%.

10. Indikator : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Indikator ini mengukur nilai kinerja perencanaan anggaran yang terdiri dari DIPA 01 dan DIPA 05 dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi		Capaian
		DIPA 01	DIPA 05	
NKPA (DIPA 01 dan DIPA 05)	95	**Diisi Per Tahun**		

- Realisasi NKPA dihitung secara tahunan, sehingga belum ada data capaian atas indikator ini.

11. Indikator : Nilai Indikator Kinerja Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Indikator ini mengukur nilai indikator pengelolaan aset dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi	Capaian
IPA	3	**Diisi Per Tahun**	

- Realisasi IPA dihitung secara tahunan, sehingga belum ada data capaian atas indikator ini.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

Penjelasan Target, Realisasi dan Capaian Rata-Rata :

- Capaian rata-rata Indikator Kinerja bulan APRIL 2025 yaitu sebesar **100,42%**.
- Capaian rata-rata Indikator Kinerja **sampai dengan** bulan APRIL 2025 yaitu sebesar **100,42%**.
- Dikarenakan beberapa indikator tidak dapat didefinisikan (N/A), maka atas indikator N/A tersebut tidak dimasukkan dalam perhitungan capaian kinerja.

Pangkalpinang, 3 November 2025
KETUA,

MOHAMAD SYAUQIE

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

BULAN MEI

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan MEI				Realisasi s.d Bulan MEI			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100	2	2	100	100	5	5	100	100
		Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	2	2	100	100	5	5	100	100
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	1	1	100	100	5	5	100	100

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan MEI				Realisasi s.d Bulan MEI			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	2	2	100	100	5	5	100	100
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara	100	0	0	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A
		Persentase perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	100	3	3	100	100	7	7	100	100
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	3,78	**Diisi Per Triwulan**							
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	85	**Diisi Per Tahun**							

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan MEI				Realisasi s.d Bulan MEI			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	95	0	99.96	99.96	105.22	0	99.96	99.96	105.22
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (05)	95	0	94.29	94.29	99.25	0	94.29	94.29	99.25
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	95	**Diisi Per Tahun**							
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	**Diisi Per Tahun**							

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

Perhitungan Capaian Kinerja Bulan MEI Tahun 2025:

- Terwujudnya Proses Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern : 100
- Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional : 102,24

Rata-Rata : **101,12%**

Perhitungan Capaian Kinerja s/d Bulan MEI Tahun 2025:

- Terwujudnya Proses Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern : 100
- Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional : 102,24

Rata-Rata : **101,12%**

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

PENJELASAN

Terwujudnya Peradilan Yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern

1.Indikator : Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu

Indikator ini mengukur perkara yang diselesaikan tepat waktu dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi sd Bulan MEI		Capaian
Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu	100	5/5	100%	100%

- Perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu di Bulan MEI 2025 adalah 2 perkara dari total 2 perkara yang diselesaikan di Bulan Mei 2025, sehingga realisasi dan capaian atas indikator ini pada Bulan MEI 2025 sebesar 100%.
- Perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu **sampai dengan** bulan MEI 2025 sebanyak 5 perkara dari total 5 perkara yang telah diselesaikan/diputus. Realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Bulan MEI 2025 sebesar 100%.

2. Indikator : Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak

Indikator ini mengukur Salinan Putusan Perkara TUN yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi sd Bulan MEI		Capaian
Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak	100	5/5	100%	100%

- Jumlah Putusan yang disampaikan tepat waktu pada bulan MEI 2025 sebanyak 2 putusan perkara dari total 2 perkara yang diselesaikan di Bulan MEI 2025. Realisasi dan capaian atas indikator ini pada Bulan MEI 2025 sebesar 100%.
- Realisasi **sampai dengan** MEI 2025 sebanyak 5 putusan yang disampaikan tepat waktu dari total 5 putusan yang dihasilkan. Realisasi dan capaian atas indikator ini sebesar 100%.

3.Indikator : Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak

Indikator ini mengukur persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu, capaiannya sebagai berikut:

	Target	Realisasi sd Bulan MEI		Capaian
Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak	100	5/5	100%	100 (%)

- Pada Bulan Mei 2025, terdapat 1 pemberitahuan petikan/amar putusan banding yang diberitahukan tepat waktu dari total 1 penerimaan petikan/amar putusan banding. Realisasi dan capaian Bulan MEI 2025 sebesar 100%.
- Jumlah penerimaan petikan/amar putusan banding, kasasi dan PK sampai dengan bulan MEI 2025 adalah sebanyak 4 putusan banding, 1 putusan kasasi, dan 0 putusan PK. Jumlah pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan banding, kasasi dan PK secara tepat waktu sampai dengan bulan MEI 2025 adalah sebanyak 4 putusan banding, 1 putusan kasasi, dan 0 putusan PK. Realisasi sampai dengan Bulan MEI 2025 sebesar 100% sehingga capaian kinerja sampai dengan Bulan MEI 2025 sebesar 100%.

4.Indikator : Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan

Indikator ini mengukur persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi sd Bulan MEI	Capaian
Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan	5/5	100%	100%

- Putusan yang diunggah ke Direktori Putusan pada bulan MEI 2025 sebanyak 2 perkara dari total 2 perkara yang diminutasi di Bulan MEI 2025, sehingga realisasi dan capaian atas indikator ini di Bulan MEI 2025 sebesar 100%.
- Putusan yang diunggah ke Direktori Putusan **sampai dengan** bulan MEI 2025 sebanyak 5 perkara dari total 5 perkara yang telah diminutasi. Realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Bulan MEI 2025 sebesar 100%.

5.Indikator : Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara

Indikator ini mengukur Jumlah Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi s/d Bulan MEI		Capaian
Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan TUN	100	0/0	N/A	N/A

- Pada bulan MEI 2025 tidak ada permohonan Eksekusi maupun Penetapan Eksekusi, sehingga realisasi dan capaian di Bulan MEI 2025 tidak dapat dihitung (N/A). Tidak adanya permohonan eksekusi di bulan berjalan bukan merupakan kesalahan satker, dan bisa disebabkan karena telah adanya eksekusi secara sukarela dari para pihak dan tidak dilaporkan ke pengadilan.
- **Sampai dengan** bulan MEI 2025, belum ada permohonan Eksekusi dan Penetapan Eksekusi.
- Realisasi dan capaian **sampai dengan** Bulan MEI tidak dapat dihitung (N/A).

6.Indikator : Persentase Perkara TUN Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court

Indikator ini mengukur persentase perkara TUN yang menggunakan e-Court dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi s/d Bulan MEI		Capaian
Persentase Perkara TUN Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court	100	7/7	100%	100%

- Perkara TUN Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court pada bulan MEI 2025 adalah sebanyak 1 perkara tingkat pertama dari total 1 pengajuan perkara tingkat pertama dan 2 perkara tingkat banding yang diajukan menggunakan e-Court dari total pengajuan 2 perkara tingkat banding. Realisasi dan capaian atas indikator ini pada Bulan MEI 2025 sebesar 100%.

- Perkara TUN Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court **sampai dengan** bulan MEI 2025 sebanyak 3 perkara tingkat pertama dan 4 perkara tingkat banding dari total 3 pengajuan perkara tingkat pertama dan 4 pengajuan perkara tingkat banding. Realisasi dan capaian atas indikator ini sampai dengan Bulan MEI 2025 sebesar 100%.

Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

7.Indikator : Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan

Indikator ini mengukur Nilai Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi sd Bulan MEI	Capaian
Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	3,78	Dihitung secara Triwulanan	

- Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat dihitung secara triwulanan, sehingga belum ada data capaian atas indikator ini.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

8. Indikator : Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan

Indikator ini mengukur Indeks Profesionalitas ASN dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi sd Bulan MEI	Capaian
IP ASN	85	Diisi Per Tahun	

- Realisasi IP ASN dihitung secara tahunan, sehingga belum ada data capaian atas indikator ini.

9. Indikator : Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan

Indikator ini mengukur nilai IKPA yang terdiri dari DIPA 01 dan DIPA 05 dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi		Capaian
		DIPA 01	DIPA 05	
Nilai IKPA (DIPA 01 dan DIPA 05)	95	99,96	94,29	102,24

- Pada Bulan MEI 2025, nilai IKPA DIPA 01 dan DIPA 05 masing-masing sebesar 99,96 dan 94,29. Capaian kinerja Bulan MEI sebesar 102,24%.
- **Sampai dengan** Bulan MEI 2025, realisasi DIPA 01 adalah sebesar 99,96, sedangkan realisasi DIPA 05 adalah sebesar 94,29. Rata-rata nilai IKPA DIPA 01 dan DIPA 05 adalah sebesar 97,125. Capaian kinerja s/d Bulan MEI sebesar 102,24%.

10. Indikator : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Indikator ini mengukur nilai kinerja perencanaan anggaran yang terdiri dari DIPA 01 dan DIPA 05 dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi		Capaian
		DIPA 01	DIPA 05	
NKPA (DIPA 01 dan DIPA 05)	95	**Diisi Per Tahun**		

- Realisasi NKPA dihitung secara tahunan, sehingga belum ada data capaian atas indikator ini.

11. Indikator : Nilai Indikator Kinerja Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Indikator ini mengukur nilai indikator pengelolaan aset dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi	Capaian
IPA	3	**Diisi Per Tahun**	

- Realisasi IPA dihitung secara tahunan, sehingga belum ada data capaian atas indikator ini.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

Penjelasan Target, Realisasi dan Capaian Rata-Rata :

- Capaian rata-rata Indikator Kinerja bulan MEI 2025 yaitu sebesar **101,12%**.
- Capaian rata-rata Indikator Kinerja **sampai dengan** bulan MEI 2025 yaitu sebesar **101,12%**.
- Dikarenakan beberapa indikator tidak dapat didefinisikan (N/A), maka atas indikator N/A tersebut tidak dimasukkan dalam perhitungan capaian kinerja.

Pangkalpinang, 3 November 2025
KETUA,

MOHAMAD SYAUQIE

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

BULAN JUNI

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan JUNI				Realisasi s.d Bulan JUNI			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100	1	1	100	100	6	6	100	100
		Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	1	1	100	100	6	6	100	100
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	2	2	100	100	7	7	100	100

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan JUNI				Realisasi s.d Bulan JUNI			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	1	1	100	100	6	6	100	100
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara	100	0	0	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A
		Persentase perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	100	1	1	100	100	8	8	100	100
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	3,78			3,95	104,5			3,92	103,7
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	85	**Diisi Per Tahun**							

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan JUNI				Realisasi s.d Bulan JUNI			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	95		100	100	105.26		100	100	105.26
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (05)	95		96,4	96,4	101.47		96,4	96,4	101.47
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	95	**Diisi Per Tahun**							
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	**Diisi Per Tahun**							

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

Perhitungan Capaian Kinerja Bulan JUNI Tahun 2025:

- Terwujudnya Proses Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern : 100
- Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik : 104,5
- Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional : 103,37

Rata-Rata : **102,62%**

Perhitungan Capaian Kinerja s/d Bulan JUNI Tahun 2025:

- Terwujudnya Proses Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern : 100
- Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik : 103,7
- Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional : 103,37

Rata-Rata : **102,36%**

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

PENJELASAN

Terwujudnya Peradilan Yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern

1.Indikator : Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu

Indikator ini mengukur perkara yang diselesaikan tepat waktu dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi sd Bulan JUNI		Capaian
Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu	100	6/6	100%	100%

- Perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu pada bulan JUNI 2025 sebanyak 1 perkara dari total 1 perkara yang diselesaikan di Bulan JUNI 2025, sehingga realisasi dan capaian atas indikator ini pada Bulan JUNI 2025 adalah sebesar 100%.
- Perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu **sampai dengan** bulan JUNI 2025 sebanyak 6 perkara dari total 6 perkara yang telah diselesaikan/diputus. Realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Bulan JUNI 2025 sebesar 100%.

2. Indikator : Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak

Indikator ini mengukur Salinan Putusan Perkara TUN yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi sd Bulan JUNI		Capaian
Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak	100	6/6	100%	100%

- Jumlah Putusan yang disampaikan tepat waktu pada bulan JUNI 2025 sebanyak 1 putusan perkara dari total 1 perkara yang diselesaikan di Bulan JUNI 2025, sehingga realisasi dan capaian atas indikator ini sebesar 100%.
- Realisasi **sampai dengan** JUNI 2025 sebanyak 6 putusan yang disampaikan tepat waktu dari total 6 putusan yang dihasilkan. Realisasi dan capaian atas indikator ini sebesar 100%.

3.Indikator : Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak

Indikator ini mengukur persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu, capaiannya sebagai berikut:

	Target	Realisasi sd Bulan JUNI		Capaian
Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak	100	7/7	100%	100 (%)

- Pada Bulan JUNI 2025, terdapat penerimaan 1 petikan/amar putusan banding dan 1 petikan PK yang langsung disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu. Realisasi dan capaian Bulan JUNI 2025 sebesar 100%.
- Jumlah penerimaan petikan/amar putusan banding, kasasi dan PK sampai dengan bulan JUNI 2025 adalah sebanyak 5 putusan banding, 1 putusan kasasi, dan 1 putusan PK. Jumlah pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan banding, kasasi dan PK secara tepat waktu sampai dengan bulan JUNI 2025 adalah sebanyak 5 putusan banding, 1 putusan kasasi, dan 1 putusan PK. Realisasi sampai dengan Bulan JUNI 2025 sebesar 100% sehingga capaian kinerja sampai dengan Bulan JUNI 2025 sebesar 100%.

4.Indikator : Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan

Indikator ini mengukur persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi sd Bulan JUNI	Capaian
Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan	6/6	100%	100%

- Putusan yang diunggah ke Direktori Putusan pada bulan JUNI 2025 sebanyak 1 perkara dari total 1 perkara yang diminutasi di Bulan JUNI 2025, sehingga realisasi dan capaian atas indikator ini di Bulan JUNI 2025 sebesar 100%.
- Putusan yang diunggah ke Direktori Putusan **sampai dengan** bulan JUNI 2025 sebanyak 6 perkara dari total 6 perkara yang telah diminutasi. Realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Bulan JUNI 2025 sebesar 100%.

5.Indikator : Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara

Indikator ini mengukur Jumlah Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi s/d Bulan JUNI		Capaian
Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan TUN	100	0/0	N/A	N/A

- Pada bulan JUNI 2025 tidak ada permohonan Eksekusi maupun Penetapan Eksekusi, sehingga realisasi dan capaian di Bulan JUNI 2025 tidak dapat dihitung (N/A). Tidak adanya permohonan eksekusi di bulan berjalan bukan merupakan kesalahan satker, dan bisa disebabkan karena telah adanya eksekusi secara sukarela dari para pihak dan tidak dilaporkan ke pengadilan.
- **Sampai dengan** bulan JUNI 2025, belum ada permohonan Eksekusi dan Penetapan Eksekusi.
- Realisasi dan capaian **sampai dengan** Bulan JUNI tidak dapat dihitung (N/A).

6.Indikator : Persentase Perkara TUN Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court

Indikator ini mengukur persentase perkara TUN yang menggunakan e-Court dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi s/d Bulan JUNI		Capaian
Persentase Perkara TUN Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court	100	8/8	100	100

- Perkara TUN Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court pada bulan JUNI 2025 sebanyak 1 perkara tingkat pertama dari total 1 pengajuan perkara tingkat pertama. Realisasi dan capaian atas indikator ini pada Bulan JUNI 2025 sebesar 100%.
- Perkara TUN Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court **sampai dengan** bulan JUNI 2025 sebanyak 4

perkara tingkat pertama dan 4 perkara tingkat banding dari total 4 pengajuan perkara tingkat pertama dan 4 pengajuan perkara tingkat banding. Realisasi dan capaian atas indikator ini sampai dengan Bulan JUNI 2025 sebesar 100%.

Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

7.Indikator : Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan

Indikator ini mengukur Nilai Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi sd Bulan JUNI	Capaian
Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	3,78	3,92	103,7

- Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat dihitung secara triwulanan. Realisasi Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Triwulan II Tahun 2025 adalah sebesar 3,95, sehingga capaian atas indikator ini di Triwulan II adalah sebesar 104,5%.
- Nilai rata-rata realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat sampai dengan Bulan JUNI 2025 adalah sebesar 3,92 sehingga capaiannya adalah sebesar 103,7%.

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

8. Indikator : Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan

Indikator ini mengukur Indeks Profesionalitas ASN dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi sd Bulan JUNI	Capaian
IP ASN	85	Diisi Per Tahun	

- Realisasi IP ASN dihitung secara tahunan, sehingga belum ada data capaian atas indikator ini.

9. Indikator : Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan

Indikator ini mengukur nilai IKPA yang terdiri dari DIPA 01 dan DIPA 05 dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi		Capaian
		DIPA 01	DIPA 05	
Nilai IKPA (DIPA 01 dan DIPA 05)	95	100	96,4	103,37

- **Sampai dengan** Bulan JUNI 2025, nilai akumulatif IKPA DIPA 01 dan DIPA 05 masing-masing sebesar 100 dan 96,4. Capaian kinerja s/d Bulan JUNI sebesar 103,37%.

10. Indikator : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Indikator ini mengukur nilai kinerja perencanaan anggaran yang terdiri dari DIPA 01 dan DIPA 05 dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi		Capaian
		DIPA 01	DIPA 05	
NKPA (DIPA 01 dan DIPA 05)	95	**Diisi Per Tahun**		

- Realisasi NKPA dihitung secara tahunan, sehingga belum ada data capaian atas indikator ini.

11. Indikator : Nilai Indikator Kinerja Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Indikator ini mengukur nilai indikator pengelolaan aset dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi	Capaian
IPA	3	**Diisi Per Tahun**	

- Realisasi IPA dihitung secara tahunan, sehingga belum ada data capaian atas indikator ini.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

Penjelasan Target, Realisasi dan Capaian Rata-Rata :

- Capaian rata-rata Indikator Kinerja bulan JUNI 2025 yaitu sebesar **102,62%**.
- Capaian rata-rata Indikator Kinerja **sampai dengan** bulan JUNI 2025 yaitu sebesar **102,36%**.
- Dikarenakan beberapa indikator tidak dapat didefinisikan (N/A), maka atas indikator N/A tersebut tidak dimasukkan dalam perhitungan capaian kinerja.

Pangkalpinang, 3 November 2025
KETUA,

MOHAMAD SYAUQIE

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

BULAN JULI

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan JULI				Realisasi s.d Bulan JULI			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100	0	0	N/A	N/A	6	6	100	100
		Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	0	0	N/A	N/A	6	6	100	100
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	1	1	100	100	8	8	100	100

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan JULI				Realisasi s.d Bulan JULI			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	0	0	N/A	N/A	6	6	100	100
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara	100	0	0	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A
		Persentase perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	100	3	3	100	100	11	11	100	100
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	3,78	**Diisi Per Triwulan**							
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	85	**Diisi Per Tahun**							

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan JULI				Realisasi s.d Bulan JULI			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	95	-	-	99.8	105.05	-	-	99.8	105.05
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (05)	95	-	-	95.84	100.88	-	-	95.84	100.88
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	95	**Diisi Per Tahun**							
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	**Diisi Per Tahun**							

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

Perhitungan Capaian Kinerja Bulan JULI Tahun 2025:

- Terwujudnya Proses Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern : 100
- Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional : 102,97

Rata-Rata : **101,49%**

Perhitungan Capaian Kinerja s/d Bulan JULI Tahun 2025:

- Terwujudnya Proses Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern : 100
- Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional : 102,97

Rata-Rata : **101,49%**

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

PENJELASAN

Terwujudnya Peradilan Yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern

1.Indikator : Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu

Indikator ini mengukur perkara yang diselesaikan tepat waktu dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi sd Bulan JULI		Capaian
Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu	100	6/6	100%	100%

- Perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu di Bulan JULI 2025 adalah sebanyak 0 perkara dari total 0 perkara yang diselesaikan di Bulan JULI 2025 (tidak ada perkara yang diselesaikan di Bulan Juli 2025), sehingga realisasi dan capaian atas indikator ini pada Bulan JULI 2025 tidak dapat didefinisikan (N/A).
- Perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu **sampai dengan** bulan JULI 2025 sebanyak 6 perkara dari total 6 perkara yang telah diselesaikan/diputus. Realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Bulan JULI 2025 sebesar 100%.

2. Indikator : Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak

Indikator ini mengukur Salinan Putusan Perkara TUN yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi sd Bulan JULI		Capaian
Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak	100	6/6	100%	100%

- Jumlah Putusan yang disampaikan tepat waktu pada bulan JULI 2025 sebanyak 0 putusan perkara dari total 0 perkara yang diselesaikan di Bulan JULI 2025 (tidak ada perkara yang diselesaikan di Bulan Juli 2025). Realisasi dan capaian atas indikator ini pada Bulan JULI 2025 tidak dapat didefinisikan (N/A).
- Realisasi **sampai dengan** JULI 2025 sebanyak 6 putusan yang disampaikan tepat waktu dari total 6 putusan yang dihasilkan. Realisasi dan capaian atas indikator ini sebesar 100%.

3.Indikator : Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak

Indikator ini mengukur persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu, capaiannya sebagai berikut:

	Target	Realisasi sd Bulan JULI		Capaian
Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak	100	8/8	100%	100 (%)

- Pada Bulan JULI 2025, terdapat 1 pemberitahuan petikan/amar putusan banding yang diberitahukan tepat waktu dari total 1 penerimaan petikan/amar putusan banding. Realisasi dan capaian Bulan JULI 2025 sebesar 100%.
- Jumlah penerimaan petikan/amar putusan banding, kasasi dan PK sampai dengan bulan JULI 2025 adalah sebanyak 6 putusan banding, 1 putusan kasasi, dan 1 putusan PK. Jumlah pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan banding, kasasi dan PK secara tepat waktu sampai dengan bulan JULI 2025 adalah sebanyak 6 putusan banding, 1 putusan kasasi, dan 1 putusan PK. Realisasi sampai dengan Bulan JULI 2025 sebesar 100% sehingga capaian kinerja sampai dengan Bulan JULI 2025 sebesar 100%.

4.Indikator : Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan

Indikator ini mengukur persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi sd Bulan JULI	Capaian
Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan	6/6	100%	100%

- Tidak ada putusan yang diunggah ke Direktori Putusan pada bulan JULI 2025 dikarenakan tidak ada perkara yang diselesaikan di Bulan JULI 2025, sehingga realisasi dan capaian atas indikator ini di Bulan JULI 2025 tidak dapat didefinisikan (N/A).
- Putusan yang diunggah ke Direktori Putusan **sampai dengan** bulan JULI 2025 sebanyak 6 perkara dari total 6 perkara yang telah diminutasi. Realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Bulan JULI 2025 sebesar 100%.

5.Indikator : Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara

Indikator ini mengukur Jumlah Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi s/d Bulan JULI		Capaian
Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan TUN	100	0/0	N/A	N/A

- Pada bulan JULI 2025 tidak ada permohonan Eksekusi maupun Penetapan Eksekusi, sehingga realisasi dan capaian di Bulan JULI 2025 tidak dapat dihitung (N/A). Tidak adanya permohonan eksekusi di bulan berjalan bukan merupakan kesalahan satker, dan bisa disebabkan karena telah adanya eksekusi secara sukarela dari para pihak dan tidak dilaporkan ke pengadilan.
- **Sampai dengan** bulan JULI 2025, belum ada permohonan Eksekusi dan Penetapan Eksekusi.
- Realisasi dan capaian **sampai dengan** Bulan JULI tidak dapat dihitung (N/A).

6.Indikator : Persentase Perkara TUN Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court

Indikator ini mengukur persentase perkara TUN yang menggunakan e-Court dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi s/d Bulan JULI		Capaian
Persentase Perkara TUN Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court	100	11/11	100%	100%

- Perkara TUN Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court pada bulan JULI 2025 adalah sebanyak 2 perkara tingkat pertama dari total 2 pengajuan perkara tingkat pertama dan 1 perkara tingkat banding yang diajukan menggunakan e-Court dari total pengajuan 1 perkara tingkat banding. Realisasi dan capaian atas indikator ini pada Bulan JULI 2025 sebesar 100%.

- Perkara TUN Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court **sampai dengan** bulan JULI 2025 sebanyak 6 perkara tingkat pertama dan 5 perkara tingkat banding dari total 6 pengajuan perkara tingkat pertama dan 5 pengajuan perkara tingkat banding. Realisasi dan capaian atas indikator ini sampai dengan Bulan JULI 2025 sebesar 100%.

Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

7.Indikator : Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan

Indikator ini mengukur Nilai Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi sd Bulan JULI	Capaian
Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	3,78	Dihitung secara Triwulanan	

- Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat dihitung secara triwulanan, sehingga belum ada data capaian atas indikator ini.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

8. Indikator : Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan

Indikator ini mengukur Indeks Profesionalitas ASN dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi sd Bulan JULI	Capaian
IP ASN	85	Diisi Per Tahun	

- Realisasi IP ASN dihitung secara tahunan, sehingga belum ada data capaian atas indikator ini.

9. Indikator : Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan

Indikator ini mengukur nilai IKPA yang terdiri dari DIPA 01 dan DIPA 05 dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi		Capaian
		DIPA 01	DIPA 05	
Nilai IKPA (DIPA 01 dan DIPA 05)	95	99,8	95,84	102,97

- Pada Bulan JULI 2025, nilai IKPA DIPA 01 dan DIPA 05 masing-masing sebesar 99,8 dan 95,84. Capaian kinerja Bulan JULI sebesar 102,97%.
- **Sampai dengan** Bulan JULI 2025, realisasi DIPA 01 adalah sebesar 99,8, sedangkan realisasi DIPA 05 adalah sebesar 95,84. Rata-rata nilai IKPA DIPA 01 dan DIPA 05 adalah sebesar 97,82. Capaian kinerja s/d Bulan JULI sebesar 102,97%.

10. Indikator : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Indikator ini mengukur nilai kinerja perencanaan anggaran yang terdiri dari DIPA 01 dan DIPA 05 dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi		Capaian
		DIPA 01	DIPA 05	
NKPA (DIPA 01 dan DIPA 05)	95	**Diisi Per Tahun**		

- Realisasi NKPA dihitung secara tahunan, sehingga belum ada data capaian atas indikator ini.

11. Indikator : Nilai Indikator Kinerja Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Indikator ini mengukur nilai indikator pengelolaan aset dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi	Capaian
IPA	3	**Diisi Per Tahun**	

- Realisasi IPA dihitung secara tahunan, sehingga belum ada data capaian atas indikator ini.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

Penjelasan Target, Realisasi dan Capaian Rata-Rata :

- Capaian rata-rata Indikator Kinerja bulan JULI 2025 yaitu sebesar **101,49%**.
- Capaian rata-rata Indikator Kinerja **sampai dengan** bulan JULI 2025 yaitu sebesar **101,49%**.
- Dikarenakan beberapa indikator tidak dapat didefinisikan (N/A), maka atas indikator N/A tersebut tidak dimasukkan dalam perhitungan capaian kinerja.

Pangkalpinang, 3 November 2025
KETUA,

MOHAMAD SYAUQIE

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

BULAN AGUSTUS

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan AGUSTUS				Realisasi s.d Bulan AGUSTUS			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100	2	2	100	100	8	8	100	100
		Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	2	2	100	100	8	8	100	100
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	4	4	100	100	12	12	100	100

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan AGUSTUS				Realisasi s.d Bulan AGUSTUS			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	2	2	100	100	8	8	100	100
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara	100	0	0	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A
		Persentase perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	100	2	2	100	100	13	13	100	100
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	3,78	**Diisi Per Triwulan**							
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	85	**Diisi Per Tahun**							

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan AGUSTUS				Realisasi s.d Bulan AGUSTUS			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	95	0	99.99	99.99	105.25	0	99.99	99.99	105.25
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (05)	95	0	97.86	97.86	103.01	0	97.86	97.86	103.01
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	95	**Diisi Per Tahun**							
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	**Diisi Per Tahun**							

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

Perhitungan Capaian Kinerja Bulan AGUSTUS Tahun 2025:

- Terwujudnya Proses Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern : 100
- Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional : 104,13

Rata-Rata : **102,07%**

Perhitungan Capaian Kinerja s/d Bulan AGUSTUS Tahun 2025:

- Terwujudnya Proses Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern : 100
- Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional : 104,13

Rata-Rata : **102,07%**

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

PENJELASAN

Terwujudnya Peradilan Yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern

1.Indikator : Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu

Indikator ini mengukur perkara yang diselesaikan tepat waktu dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi sd Bulan AGUSTUS		Capaian
Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu	100	8/8	100%	100%

- Perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu di Bulan AGUSTUS 2025 adalah sebanyak 2 perkara dari total 2 perkara yang diselesaikan di Bulan AGUSTUS 2025, sehingga realisasi dan capaian atas indikator ini pada Bulan AGUSTUS 2025 sebesar 100%.
- Perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu **sampai dengan** bulan AGUSTUS 2025 sebanyak 8 perkara dari total 8 perkara yang telah diselesaikan/diputus. Realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Bulan AGUSTUS 2025 sebesar 100%.

2. Indikator : Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak

Indikator ini mengukur Salinan Putusan Perkara TUN yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi sd Bulan AGUSTUS		Capaian
Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak	100	8/8	100%	100%

- Jumlah Putusan yang disampaikan tepat waktu pada bulan AGUSTUS 2025 sebanyak 2 putusan perkara dari total 2 perkara yang diselesaikan di Bulan AGUSTUS 2025. Realisasi dan capaian atas indikator ini pada Bulan AGUSTUS 2025 sebesar 100%.
- Realisasi **sampai dengan** AGUSTUS 2025 sebanyak 8 putusan yang disampaikan tepat waktu dari total 8 putusan yang dihasilkan. Realisasi dan capaian atas indikator ini sebesar 100%.

3.Indikator : Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak

Indikator ini mengukur persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu, capaiannya sebagai berikut:

	Target	Realisasi sd Bulan AGUSTUS		Capaian
Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak	100	12/12	100%	100 (%)

- Pada Bulan AGUSTUS 2025, terdapat 1 pemberitahuan petikan/amar putusan banding, 2 pemberitahuan petikan/amar

putusan kasasi, dan 1 pemberitahuan petikan/amar putusan PK yang diberitahukan tepat waktu dari total 1 penerimaan petikan/amar putusan banding, 2 petikan/amar putusan kasasi, dan 1 petikan/amar putusan PK. Realisasi dan capaian Bulan AGUSTUS 2025 sebesar 100%.

- Jumlah penerimaan petikan/amar putusan banding, kasasi dan PK sampai dengan bulan AGUSTUS 2025 adalah sebanyak 7 putusan banding, 3 putusan kasasi, dan 2 putusan PK. Jumlah pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan banding, kasasi dan PK secara tepat waktu sampai dengan bulan AGUSTUS 2025 adalah sebanyak 7 putusan banding, 3 putusan kasasi, dan 2 putusan PK. Realisasi sampai dengan Bulan AGUSTUS 2025 sebesar 100% sehingga capaian kinerja sampai dengan Bulan AGUSTUS 2025 sebesar 100%.

4.Indikator : Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan

Indikator ini mengukur persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi sd Bulan AGUSTUS	Capaian
Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan	8/8	100%	100%

- Putusan yang diunggah ke Direktori Putusan pada bulan Agustus 2025 sebanyak 2 perkara dari total 2 perkara yang diminutasi di Bulan Agustus 2025, sehingga realisasi dan capaian atas indikator ini di Bulan Agustus 2025 sebesar 100%.
- Putusan yang diunggah ke Direktori Putusan **sampai dengan** bulan AGUSTUS 2025 sebanyak 8 perkara dari total 8 perkara yang telah diminutasi. Realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Bulan AGUSTUS 2025 sebesar 100%.

5.Indikator : Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara

Indikator ini mengukur Jumlah Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi s/d Bulan AGUSTUS		Capaian
Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan TUN	100	0/0	N/A	N/A

- Pada bulan AGUSTUS 2025 tidak ada permohonan Eksekusi maupun Penetapan Eksekusi, sehingga realisasi dan capaian di Bulan AGUSTUS 2025 tidak dapat dihitung (N/A). Tidak adanya permohonan eksekusi di bulan berjalan bukan merupakan kesalahan satker, dan bisa disebabkan karena telah adanya eksekusi secara sukarela dari para pihak dan tidak dilaporkan ke pengadilan.
- **Sampai dengan** bulan AGUSTUS 2025, belum ada permohonan Eksekusi dan Penetapan Eksekusi.
- Realisasi dan capaian **sampai dengan** Bulan AGUSTUS tidak dapat dihitung (N/A).

6.Indikator : Persentase Perkara TUN Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court

Indikator ini mengukur persentase perkara TUN yang menggunakan e-Court dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi s/d Bulan AGUSTUS		Capaian
Persentase Perkara TUN Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court	100	13/13	100%	100%

- Perkara TUN Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court pada bulan AGUSTUS 2025 adalah sebanyak 1 perkara tingkat pertama dari total 1 pengajuan perkara tingkat pertama dan 1 perkara tingkat banding yang diajukan menggunakan e-Court dari total pengajuan 1 perkara tingkat banding. Realisasi dan capaian atas indikator ini pada Bulan

AGUSTUS 2025 sebesar 100%.

- Perkara TUN Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court **sampai dengan** bulan AGUSTUS 2025 sebanyak 7 perkara tingkat pertama dan 6 perkara tingkat banding dari total 7 pengajuan perkara tingkat pertama dan 6 pengajuan perkara tingkat banding. Realisasi dan capaian atas indikator ini sampai dengan Bulan AGUSTUS 2025 sebesar 100%.

Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

7.Indikator : Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan

Indikator ini mengukur Nilai Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi sd Bulan AGUSTUS	Capaian
Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	3,78	Dihitung secara Triwulanan	

- Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat dihitung secara triwulanan, sehingga belum ada data capaian atas indikator ini.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

8. Indikator : Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan

Indikator ini mengukur Indeks Profesionalitas ASN dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi sd Bulan AGUSTUS	Capaian
IP ASN	85	Diisi Per Tahun	

- Realisasi IP ASN dihitung secara tahunan, sehingga belum ada data capaian atas indikator ini.

9. Indikator : Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan

Indikator ini mengukur nilai IKPA yang terdiri dari DIPA 01 dan DIPA 05 dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi		Capaian
		DIPA 01	DIPA 05	
Nilai IKPA (DIPA 01 dan DIPA 05)	95	99,99	97,86	104,13

- Pada Bulan AGUSTUS 2025, nilai IKPA DIPA 01 dan DIPA 05 masing-masing sebesar 99,99 dan 97,86. Capaian kinerja Bulan AGUSTUS sebesar 104,13%.
- **Sampai dengan** Bulan AGUSTUS 2025, realisasi DIPA 01 adalah sebesar 99,99, sedangkan realisasi DIPA 05 adalah sebesar 97,86. Rata-rata nilai IKPA DIPA 01 dan DIPA 05 adalah sebesar 98,93. Capaian kinerja s/d Bulan AGUSTUS sebesar 104,13%.

10. Indikator : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Indikator ini mengukur nilai kinerja perencanaan anggaran yang terdiri dari DIPA 01 dan DIPA 05 dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi		Capaian
		DIPA 01	DIPA 05	
NKPA (DIPA 01 dan DIPA 05)	95	**Diisi Per Tahun**		

- Realisasi NKPA dihitung secara tahunan, sehingga belum ada data capaian atas indikator ini.

11. Indikator : Nilai Indikator Kinerja Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Indikator ini mengukur nilai indikator pengelolaan aset dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi	Capaian
IPA	3	**Diisi Per Tahun**	

- Realisasi IPA dihitung secara tahunan, sehingga belum ada data capaian atas indikator ini.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

Penjelasan Target, Realisasi dan Capaian Rata-Rata :

- Capaian rata-rata Indikator Kinerja bulan AGUSTUS 2025 yaitu sebesar **102,07%**.
- Capaian rata-rata Indikator Kinerja **sampai dengan** bulan AGUSTUS 2025 yaitu sebesar **102,07%**.
- Dikarenakan beberapa indikator tidak dapat didefinisikan (N/A), maka atas indikator N/A tersebut tidak dimasukkan dalam perhitungan capaian kinerja.

Pangkalpinang, 3 November 2025
KETUA,

MOHAMAD SYAUQIE

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

BULAN SEPTEMBER

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan SEPTEMBER				Realisasi s.d Bulan SEPTEMBER			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100	2	2	100	100	10	10	100	100
		Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	2	2	100	100	10	10	100	100
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	2	2	100	100	14	14	100	100

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan SEPTEMBER				Realisasi s.d Bulan SEPTEMBER			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	2	2	100	100	10	10	100	100
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara	100	1	1	100	100	1	1	100	100
		Persentase perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	100	2	2	100	100	15	15	100	100
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	3,78			3,84	101,59			3,89	102,91
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	85	**Diisi Per Tahun**							

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan SEPTEMBER				Realisasi s.d Bulan SEPTEMBER			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	95		98.76	98.76	103.96		98.76	98.76	103.96
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (05)	95		97.85	97.85	103		97.85	97.85	103
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	95	**Diisi Per Tahun**							
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	**Diisi Per Tahun**							

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

Perhitungan Capaian Kinerja Bulan SEPTEMBER Tahun 2025:

- Terwujudnya Proses Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern : 100
- Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik : 101,59
- Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional : 103,48

Rata-Rata : **101,69%**

Perhitungan Capaian Kinerja s/d Bulan SEPTEMBER Tahun 2025:

- Terwujudnya Proses Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern : 100
- Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik : 102,91
- Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional : 103,48

Rata-Rata : **102,13%**

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

PENJELASAN

Terwujudnya Peradilan Yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern

1.Indikator : Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu

Indikator ini mengukur perkara yang diselesaikan tepat waktu dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi sd Bulan SEPTEMBER		Capaian
Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu	100	10/10	100%	100%

- Perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu pada bulan SEPTEMBER 2025 sebanyak 2 perkara dari total 2 perkara yang diselesaikan di Bulan SEPTEMBER 2025, sehingga realisasi dan capaian atas indikator ini pada Bulan SEPTEMBER 2025 adalah sebesar 100%.
- Perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu **sampai dengan** bulan SEPTEMBER 2025 sebanyak 10 perkara dari total 10 perkara yang telah diselesaikan/diputus. Realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Bulan SEPTEMBER 2025 sebesar 100%.

2. Indikator : Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak

Indikator ini mengukur Salinan Putusan Perkara TUN yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi sd Bulan SEPTEMBER		Capaian
Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak	100	10/10	100%	100%

- Jumlah Putusan yang disampaikan tepat waktu pada bulan SEPTEMBER 2025 sebanyak 2 putusan perkara dari total 2 perkara yang diselesaikan di Bulan SEPTEMBER 2025, sehingga realisasi dan capaian atas indikator ini sebesar 100%.
- Realisasi **sampai dengan** SEPTEMBER 2025 sebanyak 10 putusan yang disampaikan tepat waktu dari total 10 putusan yang dihasilkan. Realisasi dan capaian atas indikator ini sebesar 100%.

3.Indikator : Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak

Indikator ini mengukur persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu, capaiannya sebagai berikut:

	Target	Realisasi sd Bulan SEPTEMBER		Capaian
Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak	100	14/14	100%	100 (%)

- Pada Bulan SEPTEMBER 2025, terdapat penerimaan 1 petikan/amar putusan banding dan 1 petikan kasasi yang langsung disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu. Realisasi dan capaian Bulan SEPTEMBER 2025 sebesar 100%.
- Jumlah penerimaan petikan/amar putusan banding, kasasi dan PK sampai dengan bulan SEPTEMBER 2025 adalah sebanyak 8 putusan banding, 4 putusan kasasi, dan 2 putusan PK. Jumlah pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan banding, kasasi dan PK secara tepat waktu sampai dengan bulan SEPTEMBER 2025 adalah sebanyak 8 putusan banding, 4 putusan kasasi, dan 2 putusan PK. Realisasi sampai dengan Bulan SEPTEMBER 2025 sebesar 100% sehingga capaian kinerja sampai dengan Bulan SEPTEMBER 2025 sebesar 100%.

4.Indikator : Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan

Indikator ini mengukur persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi sd Bulan SEPTEMBER	Capaian
Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan	$\frac{6}{6}$	100%	100%

- Putusan yang diunggah ke Direktori Putusan pada bulan SEPTEMBER 2025 sebanyak 2 perkara dari total 2 perkara yang diminutasi di Bulan SEPTEMBER 2025, sehingga realisasi dan capaian atas indikator ini di Bulan SEPTEMBER 2025 sebesar 100%.
- Putusan yang diunggah ke Direktori Putusan **sampai dengan** bulan SEPTEMBER 2025 sebanyak 10 perkara dari total 10 perkara yang telah diminutasi. Realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Bulan SEPTEMBER 2025 sebesar 100%.

5.Indikator : Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara

Indikator ini mengukur Jumlah Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi s/d Bulan SEPTEMBER		Capaian
Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan TUN	100	1/1	100%	100%

- Pada bulan SEPTEMBER 2025 terdapat 1 permohonan eksekusi yang telah ditindaklanjuti dengan Penetapan Ketua. Realisasi dan capaian atas indikator ini sebesar 100%.
- **Sampai dengan** bulan SEPTEMBER 2025, terdapat 1 permohonan Eksekusi yang telah ditindaklanjuti dengan Penetapan Ketua. Realisasi dan capaian **sampai dengan** Bulan SEPTEMBER sebesar 100%.

6.Indikator : Persentase Perkara TUN Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court

Indikator ini mengukur persentase perkara TUN yang menggunakan e-Court dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi s/d Bulan SEPTEMBER		Capaian
Persentase Perkara TUN Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court	100	15/15	100	100

- Perkara TUN Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court pada bulan SEPTEMBER 2025 sebanyak 2 perkara tingkat pertama dari total 2 pengajuan perkara tingkat pertama. Realisasi dan capaian atas indikator ini pada Bulan SEPTEMBER 2025 sebesar 100%.
- Perkara TUN Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court **sampai dengan** bulan SEPTEMBER 2025 sebanyak 9 perkara tingkat pertama dan 6 perkara tingkat banding dari total 9 pengajuan perkara tingkat pertama dan 6

pengajuan perkara tingkat banding. Realisasi dan capaian atas indikator ini sampai dengan Bulan SEPTEMBER 2025 sebesar 100%.

Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

7.Indikator : Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan

Indikator ini mengukur Nilai Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi sd Bulan SEPTEMBER	Capaian
Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	3,78	3,89	102,91

- Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat dihitung secara triwulanan. Realisasi Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Triwulan III Tahun 2025 adalah sebesar 3,84, sehingga capaian atas indikator ini di Triwulan III adalah sebesar 101,59%.
- Nilai rata-rata realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat sampai dengan Bulan SEPTEMBER 2025 adalah sebesar 3,89 sehingga capaiannya adalah sebesar 102,91%.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

8. Indikator : Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan

Indikator ini mengukur Indeks Profesionalitas ASN dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi sd Bulan SEPTEMBER	Capaian
IP ASN	85	Diisi Per Tahun	

- Realisasi IP ASN dihitung secara tahunan, sehingga belum ada data capaian atas indikator ini.

9. Indikator : Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan

Indikator ini mengukur nilai IKPA yang terdiri dari DIPA 01 dan DIPA 05 dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi		Capaian
		DIPA 01	DIPA 05	
Nilai IKPA (DIPA 01 dan DIPA 05)	95	98,76	97,85	103,48

- **Sampai dengan** Bulan SEPTEMBER 2025, nilai akumulatif IKPA DIPA 01 dan DIPA 05 masing-masing sebesar 98,76 dan 97,85. Capaian kinerja s/d Bulan SEPTEMBER sebesar 103,48%.

10. Indikator : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Indikator ini mengukur nilai kinerja perencanaan anggaran yang terdiri dari DIPA 01 dan DIPA 05 dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi		Capaian
		DIPA 01	DIPA 05	
NKPA (DIPA 01 dan DIPA 05)	95	**Diisi Per Tahun**		

- Realisasi NKPA dihitung secara tahunan, sehingga belum ada data capaian atas indikator ini.

11. Indikator : Nilai Indikator Kinerja Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Indikator ini mengukur nilai indikator pengelolaan aset dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi	Capaian
IPA	3	**Diisi Per Tahun**	

- Realisasi IPA dihitung secara tahunan, sehingga belum ada data capaian atas indikator ini.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

Penjelasan Target, Realisasi dan Capaian Rata-Rata :

- Capaian rata-rata Indikator Kinerja bulan SEPTEMBER 2025 yaitu sebesar **101,69%**.
- Capaian rata-rata Indikator Kinerja **sampai dengan** bulan SEPTEMBER 2025 yaitu sebesar **102,13%**.
- Dikarenakan beberapa indikator tidak dapat didefinisikan (N/A), maka atas indikator N/A tersebut tidak dimasukkan dalam perhitungan capaian kinerja.

Pangkalpinang, 3 November 2025
KETUA,

MOHAMAD SYAUQIE

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

BULAN OKTOBER

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan OKTOBER				Realisasi s.d Bulan OKTOBER			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100	3	3	100	100	13	13	100	100
		Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	3	3	100	100	13	13	100	100
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	0	0	N/A	N/A	14	14	100	100

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan OKTOBER				Realisasi s.d Bulan OKTOBER			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	3	3	100	100	13	13	100	100
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara	100	0	0	N/A	N/A	1	1	100	100
		Persentase perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	100	5	5	100	100	20	20	100	100
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	3,78	**Diisi Per Triwulan**							
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	85	**Diisi Per Tahun**							

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan OKTOBER				Realisasi s.d Bulan OKTOBER			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	95	0	98.68	98.68	103.87	0	98.68	98.68	103.87
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (05)	95	0	98.38	98.38	103.56	0	98.38	98.38	103.56
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	95	**Diisi Per Tahun**							
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	**Diisi Per Tahun**							

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

Perhitungan Capaian Kinerja Bulan OKTOBER Tahun 2025:

- Terwujudnya Proses Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern : 100
- Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional : 103,72

Rata-Rata : **101,86%**

Perhitungan Capaian Kinerja s/d Bulan OKTOBER Tahun 2025:

- Terwujudnya Proses Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern : 100
- Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional : 103,72

Rata-Rata : **101,86%**

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

PENJELASAN

Terwujudnya Peradilan Yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern

1.Indikator : Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu

Indikator ini mengukur perkara yang diselesaikan tepat waktu dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi sd Bulan OKTOBER		Capaian
Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu	100	13/13	100%	100%

- Perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu di Bulan OKTOBER 2025 adalah sebanyak 3 perkara dari total 3 perkara yang diselesaikan di Bulan OKTOBER 2025, sehingga realisasi dan capaian atas indikator ini pada Bulan OKTOBER 2025 sebesar 100%.
- Perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu **sampai dengan** bulan OKTOBER 2025 sebanyak 13 perkara dari total 13 perkara yang telah diselesaikan/diputus. Realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Bulan OKTOBER 2025 sebesar 100%.

2. Indikator : Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak

Indikator ini mengukur Salinan Putusan Perkara TUN yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi sd Bulan OKTOBER		Capaian
Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak	100	13/13	100%	100%

- Jumlah Putusan yang disampaikan tepat waktu pada bulan OKTOBER 2025 sebanyak 3 putusan perkara dari total 3 perkara yang diselesaikan di Bulan OKTOBER 2025. Realisasi dan capaian atas indikator ini pada Bulan OKTOBER 2025 sebesar 100%.
- Realisasi **sampai dengan** OKTOBER 2025 sebanyak 13 putusan yang disampaikan tepat waktu dari total 13 putusan yang dihasilkan. Realisasi dan capaian atas indikator ini sebesar 100%.

3.Indikator : Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak

Indikator ini mengukur persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu, capaiannya sebagai berikut:

	Target	Realisasi sd Bulan OKTOBER		Capaian
Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak	100	14/14	100%	100 (%)

- Pada Bulan OKTOBER 2025, terdapat 1 pemberitahuan petikan/amar putusan banding yang diberitahukan tepat waktu dari total 1 penerimaan petikan/amar putusan banding. Realisasi dan capaian Bulan OKTOBER 2025 sebesar 100%.
- Jumlah penerimaan petikan/amar putusan banding, kasasi dan PK sampai dengan bulan OKTOBER 2025 adalah sebanyak 9 putusan banding, 3 putusan kasasi, dan 2 putusan PK. Jumlah pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan banding, kasasi dan PK secara tepat waktu sampai dengan bulan OKTOBER 2025 adalah sebanyak 9 putusan banding, 3 putusan kasasi, dan 2 putusan PK. Realisasi sampai dengan Bulan OKTOBER 2025 sebesar 100% sehingga capaian kinerja sampai dengan Bulan OKTOBER 2025 sebesar 100%.

4.Indikator : Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan

Indikator ini mengukur persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi sd Bulan OKTOBER	Capaian
Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan	13/13	100%	100%

- Putusan yang diunggah ke Direktori Putusan pada bulan OKTOBER 2025 sebanyak 3 perkara dari total 3 perkara yang diminutasi di Bulan OKTOBER 2025, sehingga realisasi dan capaian atas indikator ini di Bulan OKTOBER 2025 sebesar 100%.
- Putusan yang diunggah ke Direktori Putusan **sampai dengan** bulan OKTOBER 2025 sebanyak 13 perkara dari total 13 perkara yang telah diminutasi. Realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Bulan OKTOBER 2025 sebesar 100%.

5.Indikator : Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara

Indikator ini mengukur Jumlah Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi s/d Bulan OKTOBER		Capaian
Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan TUN	100	1/1	100%	100%

- Pada bulan OKTOBER 2025 tidak ada permohonan Eksekusi maupun Penetapan Eksekusi, sehingga realisasi dan capaian di Bulan OKTOBER 2025 tidak dapat dihitung (N/A). Tidak adanya permohonan eksekusi di bulan berjalan bukan merupakan kesalahan satker, dan bisa disebabkan karena telah adanya eksekusi secara sukarela dari para pihak dan tidak dilaporkan ke pengadilan.
- **Sampai dengan** bulan OKTOBER 2025, terdapat 1 permohonan Eksekusi yang telah ditindaklanjuti dengan Penetapan Ketua. Realisasi dan capaian **sampai dengan** Bulan OKTOBER adalah sebesar 100%.

6.Indikator : Persentase Perkara TUN Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court

Indikator ini mengukur persentase perkara TUN yang menggunakan e-Court dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi s/d Bulan OKTOBER		Capaian
Persentase Perkara TUN Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court	100	20/20	100%	100%

- Perkara TUN Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court pada bulan OKTOBER 2025 adalah sebanyak 4 perkara tingkat pertama dari total 4 pengajuan perkara tingkat pertama dan 1 perkara tingkat banding yang diajukan menggunakan e-Court dari total pengajuan 1 perkara tingkat banding. Realisasi dan capaian atas indikator ini pada Bulan

OKTOBER 2025 sebesar 100%.

- Perkara TUN Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court **sampai dengan** bulan OKTOBER 2025 sebanyak 13 perkara tingkat pertama dan 7 perkara tingkat banding dari total 13 pengajuan perkara tingkat pertama dan 7 pengajuan perkara tingkat banding. Realisasi dan capaian atas indikator ini sampai dengan Bulan OKTOBER 2025 sebesar 100%.

Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

7.Indikator : Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan

Indikator ini mengukur Nilai Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi sd Bulan OKTOBER	Capaian
Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	3,78	Dihitung secara Triwulanan	

- Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat dihitung secara triwulanan, sehingga belum ada data capaian atas indikator ini.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

8. Indikator : Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan

Indikator ini mengukur Indeks Profesionalitas ASN dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi sd Bulan OKTOBER	Capaian
IP ASN	85	Diisi Per Tahun	

- Realisasi IP ASN dihitung secara tahunan, sehingga belum ada data capaian atas indikator ini.

9. Indikator : Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan

Indikator ini mengukur nilai IKPA yang terdiri dari DIPA 01 dan DIPA 05 dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi		Capaian
		DIPA 01	DIPA 05	
Nilai IKPA (DIPA 01 dan DIPA 05)	95	98,68	98,38	103,72

- Pada Bulan OKTOBER 2025, nilai IKPA DIPA 01 dan DIPA 05 masing-masing sebesar 98,68 dan 98,38. Capaian kinerja Bulan OKTOBER sebesar 103,72%.
- **Sampai dengan** Bulan OKTOBER 2025, realisasi DIPA 01 adalah sebesar 98,68, sedangkan realisasi DIPA 05 adalah sebesar 98,38. Rata-rata nilai IKPA DIPA 01 dan DIPA 05 adalah sebesar 98,53. Capaian kinerja s/d Bulan OKTOBER sebesar 103,72%.

10. Indikator : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Indikator ini mengukur nilai kinerja perencanaan anggaran yang terdiri dari DIPA 01 dan DIPA 05 dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi		Capaian
		DIPA 01	DIPA 05	
NKPA (DIPA 01 dan DIPA 05)	95	**Diisi Per Tahun**		

- Realisasi NKPA dihitung secara tahunan, sehingga belum ada data capaian atas indikator ini.

11. Indikator : Nilai Indikator Kinerja Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Indikator ini mengukur nilai indikator pengelolaan aset dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi	Capaian
IPA	3	**Diisi Per Tahun**	

- Realisasi IPA dihitung secara tahunan, sehingga belum ada data capaian atas indikator ini.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

Penjelasan Target, Realisasi dan Capaian Rata-Rata :

- Capaian rata-rata Indikator Kinerja bulan OKTOBER 2025 yaitu sebesar **101,86%**.
- Capaian rata-rata Indikator Kinerja **sampai dengan** bulan OKTOBER 2025 yaitu sebesar **101,86%**.
- Dikarenakan beberapa indikator tidak dapat didefinisikan (N/A), maka atas indikator N/A tersebut tidak dimasukkan dalam perhitungan capaian kinerja.

Pangkalpinang, 3 November 2025
KETUA,

MOHAMAD SYAUQIE

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

BULAN NOVEMBER

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan NOVEMBER				Realisasi s.d Bulan NOVEMBER			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100	2	2	100	100	15	15	100	100
		Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	2	2	100	100	15	15	100	100
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	0	0	N/A	N/A	14	14	100	100

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan NOVEMBER				Realisasi s.d Bulan NOVEMBER			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	2	2	100	100	15	15	100	100
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara	100	0	0	N/A	N/A	1	1	100	100
		Persentase perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	100	3	3	100	100	23	23	100	100
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	3,78	**Diisi Per Triwulan**							
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	85	**Diisi Per Tahun**							

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan NOVEMBER				Realisasi s.d Bulan NOVEMBER			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	95	0	98.95	98.95	104.16	0	98.95	98.95	104.16
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (05)	95	0	98.38	98.38	103.56	0	98.38	98.38	103.56
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	95	**Diisi Per Tahun**							
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	**Diisi Per Tahun**							

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

Perhitungan Capaian Kinerja Bulan NOVEMBER Tahun 2025:

- Terwujudnya Proses Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern : 100
- Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional : 103,86

Rata-Rata : **101,93%**

Perhitungan Capaian Kinerja s/d Bulan NOVEMBER Tahun 2025:

- Terwujudnya Proses Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern : 100
- Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional : 103,86

Rata-Rata : **101,93%**

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

PENJELASAN

Terwujudnya Peradilan Yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern

1.Indikator : Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu

Indikator ini mengukur perkara yang diselesaikan tepat waktu dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi sd Bulan NOVEMBER		Capaian
Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu	100	15/15	100%	100%

- Perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu di Bulan NOVEMBER 2025 adalah sebanyak 2 perkara dari total 2 perkara yang diselesaikan di Bulan NOVEMBER 2025, sehingga realisasi dan capaian atas indikator ini pada Bulan NOVEMBER 2025 sebesar 100%.
- Perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu **sampai dengan** bulan NOVEMBER 2025 sebanyak 15 perkara dari total 15 perkara yang telah diselesaikan/diputus. Realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Bulan NOVEMBER 2025 sebesar 100%.

2. Indikator : Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak

Indikator ini mengukur Salinan Putusan Perkara TUN yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi sd Bulan NOVEMBER		Capaian
Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak	100	15/15	100%	100%

- Jumlah Putusan yang disampaikan tepat waktu pada bulan NOVEMBER 2025 sebanyak 2 putusan perkara dari total 2 perkara yang diselesaikan di Bulan NOVEMBER 2025. Realisasi dan capaian atas indikator ini pada Bulan NOVEMBER 2025 sebesar 100%.
- Realisasi **sampai dengan** NOVEMBER 2025 sebanyak 15 putusan yang disampaikan tepat waktu dari total 15 putusan yang dihasilkan. Realisasi dan capaian atas indikator ini sebesar 100%.

3.Indikator : Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak

Indikator ini mengukur persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu, capaiannya sebagai berikut:

	Target	Realisasi sd Bulan NOVEMBER		Capaian
Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak	100	14/14	100%	100 (%)

- Pada Bulan NOVEMBER 2025, tidak terdapat pemberitahuan petikan/amar putusan banding, kasasi maupun PK dikarenakan tidak adanya petikan/amar putusan banding, kasasi maupun PK yang diterima. Realisasi dan capaian Bulan NOVEMBER 2025 tidak dapat didefinisikan (N/A).
- Jumlah penerimaan petikan/amar putusan banding, kasasi dan PK sampai dengan bulan NOVEMBER 2025 adalah sebanyak 9 putusan banding, 3 putusan kasasi, dan 2 putusan PK. Jumlah pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan banding, kasasi dan PK secara tepat waktu sampai dengan bulan NOVEMBER 2025 adalah sebanyak 9 putusan banding, 3 putusan kasasi, dan 2 putusan PK. Realisasi sampai dengan Bulan NOVEMBER 2025 sebesar 100% sehingga capaian kinerja sampai dengan Bulan NOVEMBER 2025 sebesar 100%.

4.Indikator : Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan

Indikator ini mengukur persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi sd Bulan NOVEMBER	Capaian
Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan	15/15	100%	100%

- Putusan yang diunggah ke Direktori Putusan pada bulan NOVEMBER 2025 sebanyak 2 perkara dari total 2 perkara yang diminutasi di Bulan NOVEMBER 2025, sehingga realisasi dan capaian atas indikator ini di Bulan NOVEMBER 2025 sebesar 100%.
- Putusan yang diunggah ke Direktori Putusan **sampai dengan** bulan NOVEMBER 2025 sebanyak 15 perkara dari total 15 perkara yang telah diminutasi. Realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Bulan NOVEMBER 2025 sebesar 100%.

5.Indikator : Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara

Indikator ini mengukur Jumlah Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi s/d Bulan NOVEMBER		Capaian
Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan TUN	100	1/1	100%	100%

- Pada bulan NOVEMBER 2025 tidak ada permohonan Eksekusi maupun Penetapan Eksekusi, sehingga realisasi dan capaian di Bulan NOVEMBER 2025 tidak dapat dihitung (N/A). Tidak adanya permohonan eksekusi di bulan berjalan bukan merupakan kesalahan satker, dan bisa disebabkan karena telah adanya eksekusi secara sukarela dari para pihak dan tidak dilaporkan ke pengadilan.
- **Sampai dengan** bulan NOVEMBER 2025, terdapat 1 permohonan Eksekusi yang telah ditindaklanjuti dengan Penetapan Ketua. Realisasi dan capaian **sampai dengan** Bulan NOVEMBER adalah sebesar 100%.

6.Indikator : Persentase Perkara TUN Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court

Indikator ini mengukur persentase perkara TUN yang menggunakan e-Court dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi s/d Bulan NOVEMBER		Capaian
Persentase Perkara TUN Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court	100	23/23	100%	100%

- Perkara TUN Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court pada bulan NOVEMBER 2025 adalah sebanyak 2 perkara tingkat pertama dari total 2 pengajuan perkara tingkat pertama dan 1 perkara tingkat banding yang diajukan menggunakan e-Court dari total pengajuan 1 perkara tingkat banding. Realisasi dan capaian atas indikator ini pada

Bulan NOVEMBER 2025 sebesar 100%.

- Perkara TUN Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court **sampai dengan** bulan NOVEMBER 2025 sebanyak 15 perkara tingkat pertama dan 8 perkara tingkat banding dari total 15 pengajuan perkara tingkat pertama dan 8 pengajuan perkara tingkat banding. Realisasi dan capaian atas indikator ini sampai dengan Bulan NOVEMBER 2025 sebesar 100%.

Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

7.Indikator : Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan

Indikator ini mengukur Nilai Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi sd Bulan NOVEMBER	Capaian
Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	3,78	Dihitung secara Triwulanan	

- Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat dihitung secara triwulanan, sehingga belum ada data capaian atas indikator ini.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

8. Indikator : Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan

Indikator ini mengukur Indeks Profesionalitas ASN dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi sd Bulan NOVEMBER	Capaian
IP ASN	85	Diisi Per Tahun	

- Realisasi IP ASN dihitung secara tahunan, sehingga belum ada data capaian atas indikator ini.

9. Indikator : Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan

Indikator ini mengukur nilai IKPA yang terdiri dari DIPA 01 dan DIPA 05 dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi		Capaian
		DIPA 01	DIPA 05	
Nilai IKPA (DIPA 01 dan DIPA 05)	95	98,95	98,38	103,86

- Pada Bulan NOVEMBER 2025, nilai IKPA DIPA 01 dan DIPA 05 masing-masing sebesar 98,95 dan 98,38. Capaian kinerja Bulan NOVEMBER sebesar 103,86%.
- **Sampai dengan** Bulan NOVEMBER 2025, realisasi DIPA 01 adalah sebesar 98,95, sedangkan realisasi DIPA 05 adalah sebesar 98,38. Rata-rata nilai IKPA DIPA 01 dan DIPA 05 adalah sebesar 98,67. Capaian kinerja s/d Bulan NOVEMBER sebesar 103,86%.

10. Indikator : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Indikator ini mengukur nilai kinerja perencanaan anggaran yang terdiri dari DIPA 01 dan DIPA 05 dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi		Capaian
		DIPA 01	DIPA 05	
NKPA (DIPA 01 dan DIPA 05)	95	**Diisi Per Tahun**		

- Realisasi NKPA dihitung secara tahunan, sehingga belum ada data capaian atas indikator ini.

11. Indikator : Nilai Indikator Kinerja Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Indikator ini mengukur nilai indikator pengelolaan aset dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi	Capaian
IPA	3	**Diisi Per Tahun**	

- Realisasi IPA dihitung secara tahunan, sehingga belum ada data capaian atas indikator ini.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

Penjelasan Target, Realisasi dan Capaian Rata-Rata :

- Capaian rata-rata Indikator Kinerja bulan NOVEMBER 2025 yaitu sebesar **101,93%**.
- Capaian rata-rata Indikator Kinerja **sampai dengan** bulan NOVEMBER 2025 yaitu sebesar **101,93%**.
- Dikarenakan beberapa indikator tidak dapat didefinisikan (N/A), maka atas indikator N/A tersebut tidak dimasukkan dalam perhitungan capaian kinerja.

Pangkalpinang, 1 Desember 2025
KETUA,

MOHAMAD SYAUQIE

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

BULAN DESEMBER

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan DESEMBER				Realisasi s.d Bulan DESEMBER			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100	2	2	100	100	17	17	100	100
		Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	2	2	100	100	17	17	100	100
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	5	5	100	100	19	19	100	100

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan DESEMBER				Realisasi s.d Bulan DESEMBER			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	2	2	100	100	17	17	100	100
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara	100	0	0	N/A	N/A	1	1	100	100
		Persentase perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	100	1	1	100	100	24	24	100	100
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	3,78	-	-	3,84	101,59	-	-	3,88	102,65
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	85	-	-	85	100	-	-	85	100

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan DESEMBER				Realisasi s.d Bulan DESEMBER			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	95	-	-	98,95	104,16	-	-	98,95	104,16
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (05)	95	-	-	98,38	103,56	-	-	98,38	103,56
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	95	-	-	100	105,26	-	-	100	105,26
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 05	95	-	-	99,89	105,15	-	-	99,89	105,15
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	-	-	3,175	105,83	-	-	3,175	105,83

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

Perhitungan Capaian Kinerja Bulan DESEMBER Tahun 2025:

- Terwujudnya Proses Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern : 100
- Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik : 101,59
- Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional : 103,73

Rata-Rata : **101,77%**

Perhitungan Capaian Kinerja s/d Bulan DESEMBER Tahun 2025:

- Terwujudnya Proses Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern : 100
- Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik : 102,65
- Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional : 103,73

Rata-Rata : **102,13%**

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

PENJELASAN

Terwujudnya Peradilan Yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern

1.Indikator : Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu

Indikator ini mengukur perkara yang diselesaikan tepat waktu dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi sd Bulan DESEMBER		Capaian
Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu	100	17/17	100%	100%

- Perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu pada bulan DESEMBER 2025 sebanyak 2 perkara dari total 2 perkara yang diselesaikan di Bulan DESEMBER 2025, sehingga realisasi dan capaian atas indikator ini pada Bulan DESEMBER 2025 adalah sebesar 100%.
- Perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu **sampai dengan** bulan DESEMBER 2025 sebanyak 17 perkara dari total 17 perkara yang telah diselesaikan/diputus. Realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Bulan DESEMBER 2025 sebesar 100%.

2. Indikator : Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak

Indikator ini mengukur Salinan Putusan Perkara TUN yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi sd Bulan DESEMBER		Capaian
Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak	100	17/17	100%	100%

- Jumlah Putusan yang disampaikan tepat waktu pada bulan DESEMBER 2025 sebanyak 2 putusan perkara dari total 2 perkara yang diselesaikan di Bulan DESEMBER 2025, sehingga realisasi dan capaian atas indikator ini sebesar 100%.
- Realisasi **sampai dengan** DESEMBER 2025 sebanyak 17 putusan yang disampaikan tepat waktu dari total 17 putusan yang dihasilkan. Realisasi dan capaian atas indikator ini sebesar 100%.

3.Indikator : Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak

Indikator ini mengukur persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu, capaiannya sebagai berikut:

	Target	Realisasi sd Bulan DESEMBER		Capaian
Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak	100	5/5	100%	100 (%)

- Pada Bulan DESEMBER 2025, terdapat penerimaan petikan/amar putusan banding sebanyak 2 berkas dan kasasi 3 berkas. Semua petikan/amar putusan tersebut telah disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu. Realisasi dan capaian Bulan DESEMBER 2025 sebesar 100%.
- Jumlah penerimaan petikan/amar putusan banding, kasasi dan PK sampai dengan bulan DESEMBER 2025 adalah sebanyak 11 putusan banding, 6 putusan kasasi, dan 2 putusan PK. Jumlah pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan banding, kasasi dan PK secara tepat waktu sampai dengan bulan DESEMBER 2025 adalah sebanyak 11 putusan banding, 6 putusan kasasi, dan 2 putusan PK. Realisasi sampai dengan Bulan DESEMBER 2025 sebesar 100% sehingga capaian kinerja sampai dengan Bulan DESEMBER 2025 sebesar 100%.

4.Indikator : Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan

Indikator ini mengukur persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi sd Bulan DESEMBER	Capaian
Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan	17/17	100%	100%

- Putusan yang diunggah ke Direktori Putusan pada bulan DESEMBER 2025 sebanyak 2 perkara dari total 2 perkara yang diminutasi di Bulan DESEMBER 2025, sehingga realisasi dan capaian atas indikator ini di Bulan DESEMBER 2025 sebesar 100%.
- Putusan yang diunggah ke Direktori Putusan **sampai dengan** bulan DESEMBER 2025 sebanyak 17 perkara dari total 17 perkara yang telah diminutasi. Realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Bulan DESEMBER 2025 sebesar 100%.

5.Indikator : Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara

Indikator ini mengukur Jumlah Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi s/d Bulan DESEMBER		Capaian
Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan TUN	100	1/1	100%	100%

- Pada bulan DESEMBER 2025 tidak ada permohonan Eksekusi maupun Penetapan Eksekusi, sehingga realisasi dan capaian di Bulan DESEMBER 2025 tidak dapat dihitung (N/A). Tidak adanya permohonan eksekusi di bulan berjalan bukan merupakan kesalahan satker, dan bisa disebabkan karena telah adanya eksekusi secara sukarela dari para pihak dan tidak dilaporkan ke pengadilan.
- **Sampai dengan** bulan DESEMBER 2025, terdapat 1 permohonan Eksekusi yang telah ditindaklanjuti dengan Penetapan Eksekusi di Bulan September 2025.
- Realisasi dan capaian **sampai dengan** Bulan DESEMBER sebesar 100%.

6.Indikator : Persentase Perkara TUN Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court

Indikator ini mengukur persentase perkara TUN yang menggunakan e-Court dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi s/d Bulan DESEMBER		Capaian
Persentase Perkara TUN Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court	100	24/24	100	100

- Perkara TUN Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court pada bulan DESEMBER 2025 sebanyak 1 perkara tingkat banding dari total 1 pengajuan perkara tingkat banding. Realisasi dan capaian atas indikator ini pada Bulan DESEMBER 2025 sebesar 100%.
- Perkara TUN Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court **sampai dengan** bulan DESEMBER 2025 sebanyak 15 perkara tingkat pertama dan 9 perkara tingkat banding dari total 15 pengajuan perkara tingkat pertama dan 9 pengajuan perkara tingkat banding. Realisasi dan capaian atas indikator ini sampai dengan Bulan DESEMBER 2025 sebesar 100%.

Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

7.Indikator : Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan

Indikator ini mengukur Nilai Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi sd Bulan DESEMBER	Capaian
Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	3,78	3,88	102,65

- Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat dihitung secara triwulanan. Realisasi Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Triwulan IV Tahun 2025 adalah sebesar 3,84, sehingga capaian atas indikator ini di Triwulan IV Tahun 2025 adalah sebesar 101,59%.
- Nilai capaian **sampai dengan** Bulan Desember 2025 dihitung secara rata-rata dari jumlah nilai indeks kepuasan triwulanan dengan data IKM Triwulan I sebesar 3,88, Triwulan II 3,95, Triwulan III 3,84, dan Triwulan IV 3,84. Rata-rata realisasi IKM selama tahun 2025 adalah 3,88 sehingga capaian kinerja sampai dengan Bulan DESEMBER 2025 adalah sebesar 102,65%.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

8. Indikator : Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan

Indikator ini mengukur Indeks Profesionalitas ASN dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi sd Bulan DESEMBER	Capaian
IP ASN	85	85	100%

- Realisasi IP ASN sampai dengan Desember 2025 adalah 85 dan telah sesuai dengan target tahunan, sehingga capaian atas indikator ini sebesar 100%.

9. Indikator : Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan

Indikator ini mengukur nilai IKPA yang terdiri dari DIPA 01 dan DIPA 05 dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi		Capaian
		DIPA 01	DIPA 05	
Nilai IKPA (DIPA 01 dan DIPA 05)	95	98,95	98,38	103,86

- **Sampai dengan** Bulan DESEMBER 2025, nilai akumulatif IKPA DIPA 01 dan DIPA 05 masing-masing sebesar 98,95 dan 98,38. Capaian kinerja s/d Bulan DESEMBER sebesar 103,86%.

10. Indikator : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Indikator ini mengukur nilai kinerja perencanaan anggaran yang terdiri dari DIPA 01 dan DIPA 05 dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi		Capaian
		DIPA 01	DIPA 05	
NKPA (DIPA 01 dan DIPA 05)	95	100	99,89	105,21

- **Sampai dengan** Bulan DESEMBER 2025, nilai akumulatif NKPA DIPA 01 dan DIPA 05 masing-masing sebesar 100 dan 99,89. Capaian kinerja s/d Bulan DESEMBER sebesar 105,21%.

11. Indikator : Nilai Indikator Kinerja Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Indikator ini mengukur nilai indikator pengelolaan aset dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi	Capaian
IPA	3	3,175	105,83

- Realisasi IPA dihitung secara tahunan. **Sampai dengan** Bulan DESEMBER 2025, nilai IPA PTUN Pangkalpinang yang telah dievaluasi oleh PTTUN Palembang adalah sebesar 3,175 sehingga capaian kinerja atas indikator ini adalah sebesar 105,83%.
-

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

Penjelasan Target, Realisasi dan Capaian Rata-Rata :

- Capaian rata-rata Indikator Kinerja bulan DESEMBER 2025 yaitu sebesar **101,77%**.
- Capaian rata-rata Indikator Kinerja **sampai dengan** bulan DESEMBER 2025 yaitu sebesar **102,13%**.

Pangkalpinang, 2 Februari 2026
KETUA,

MOHAMAD SYAUQIE

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

LAPORAN KINERJA
TRIWULAN I TAHUN 2025

- Memperhatikan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah , Bagian keenam Pasal 18 dan 19;
- Permenpan No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Rekomendasi Kementerian PAN dan RB No. B/3826/M.PAN-RB/11/2014 Hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah “Pemanfaatan Penetapan Kinerja (PK) yang telah ditandatangani, sebagai sarana untuk menilai dan menyimpulkan kinerja pihak yang berjanji. Selain itu , perlu ada penjabaran lebih lanjut dokumen Penetapan Kinerja (PK) ke dalam satu rencana aksi yang lebih detil dan dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan (progress) kinerja secara periodik (triwulan atau semesteran), sekaligus sebagai sarana untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
TRIWULAN I

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi s.d. Triwulan I			Kegiatan/Upaya/Strategi/Kendala/Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
				Realisasi		Capaian (%)	
					%		
1.	Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100	3/3	100	100	3 perkara diselesaikan tepat waktu dari 3 perkara yang diselesaikan. Ketua dan Panitera selalu melakukan evaluasi agar tidak ada perkara yang melewati batas waktu penyelesaian perkara, yakni 5 bulan untuk pengadilan tingkat pertama.
		Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	3/3	100	100	Ketua dan Panitera selalu melakukan evaluasi agar semua salinan putusan perkara yang disampaikan selalu tepat waktu, yakni 14 hari sejak perkara diputus.
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar	100	4/4	100	100	Pengiriman pemberitahuan amar putusan banding, kasasi dan PK selalu dimonitoring oleh Panitera agar tidak ada pemberitahuan putusan yang telat diberitahukan kepada

		putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak					para pihak.
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	3/3	100	100	Ketua dan Panitera selalu melakukan evaluasi agar semua putusan yang telah diminutasi langsung diupload ke Direktori Putusan pada hari itu juga. Dari total 3 perkara yang diselesaikan, 3 perkara telah diupload ke Direktori Putusan. Namun terdapat kendala proses sinkronisasi upload putusan ke SIPP yang menyebabkan beberapa putusan terlambat masuk ke Direktori Putusan, namun hal ini segera diatasi dengan mengunggah putusan secara manual ke Direktori Putusan melalui admin Direktori Putusan. Ke depannya, Panitera akan selalu melakukan monev terhadap penginputan putusan ke Direktori Putusan.
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara	100	0/0	N/A	N/A	Sampai dengan Bulan MARET, tidak ada perkara BHT yang dimohonkan eksekusi. Ketua dan Panitera selalu melakukan monitoring agar permohonan eksekusi segera ditindaklanjuti.

		Persentase perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	100	3/3	100	100	Seluruh perkara yang diajukan di PTUN Pangkalpinang, baik perkara tingkat pertama maupun perkara tingkat banding telah diajukan menggunakan e-Court.
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	3,78		3,84	101,59	Nilai capaian indeks kepuasan Triwulan I sangat baik. Ketua dan segenap aparatur pengadilan berusaha memberikan layanan terbaik, baik dari segi kepaniteraan maupun dari sisi kesekretariatan untuk dukungan sarana dan prasarana.
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	85	Diisi per tahun			
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	95		100	105,26	IKPA DIPA 01 Triwulan I sebesar 100. Ini menunjukkan kualitas pelaksanaan anggaran yang sangat baik dan telah melampaui target yang ditetapkan. Sekretaris dan Ketua selalu melakukan monitoring terhadap capaian IKPA secara berkala.
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan	95		100	105,26	IKPA DIPA 05 Triwulan I sebesar 100. Ini menunjukkan kualitas pelaksanaan

		Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (05)					anggaran yang sangat baik dan telah melampaui target yang ditetapkan. Sekretaris dan Ketua selalu melakukan monitoring terhadap capaian IKPA secara berkala.
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	95	Diisi per tahun			
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	Diisi per tahun			
Rata-rata Total						**102,28**	

Perhitungan Capaian Kinerja s/d Triwulan I Tahun 2025:

- Terwujudnya Proses Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern : 100
- Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik : 101,59
- Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional : 105,26

Rata-Rata : **102,28%**

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

PENJELASAN

Terwujudnya Peradilan Yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern

1.Indikator : Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu

Indikator ini mengukur perkara yang diselesaikan tepat waktu dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi sd Triwulan I		Capaian
Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu	100	3/3	100%	100%

- Perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu pada bulan MARET 2025 sebanyak 2 perkara dari total 2 perkara yang diselesaikan di Bulan MARET 2025, sehingga realisasi dan capaian atas indikator ini pada Bulan MARET 2025 adalah sebesar 100%.
- Perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu **sampai dengan** Triwulan I Tahun 2025 sebanyak 3 perkara dari total 3 perkara yang telah diselesaikan/diputus. Realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebesar 100%.

2. Indikator : Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak

Indikator ini mengukur Salinan Putusan Perkara TUN yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi sd Triwulan I		Capaian
Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak	100	3/3	100%	100%

- Jumlah Putusan yang disampaikan tepat waktu pada bulan MARET 2025 sebanyak 2 putusan perkara dari total 2 perkara yang diselesaikan di Bulan MARET 2025, sehingga realisasi dan capaian atas indikator ini sebesar 100%.
- Realisasi **sampai dengan** Triwulan I Tahun 2025 sebanyak 3 putusan yang disampaikan tepat waktu dari total 3 putusan yang dihasilkan. Realisasi dan capaian atas indikator ini sebesar 100%.

3.Indikator : Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak

Indikator ini mengukur persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu, capaiannya sebagai berikut:

	Target	Realisasi sd Triwulan I		Capaian
Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak	100	4/4	100%	100 (%)

- Pada Bulan Maret 2025, tidak ada penerimaan dan pemberitahuan petikan/amar putusan banding, kasasi dan PK. Realisasi

dan capaian Bulan Maret 2025 tidak dapat didefinisikan (N/A) dikarenakan tidak adanya penerimaan petikan/amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima PTUN Pangkalpinang di Bulan Maret 2025.

- Jumlah penerimaan petikan/amar putusan banding, kasasi dan PK sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 adalah sebanyak 3 putusan banding, 1 putusan kasasi, dan 0 putusan PK. Jumlah pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan banding, kasasi dan PK secara tepat waktu sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 adalah sebanyak 3 putusan banding, 1 putusan kasasi, dan 0 putusan PK. Realisasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebesar 100% sehingga capaian kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebesar 100%.

4.Indikator : Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan

Indikator ini mengukur persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi sd Triwulan I	Capaian
Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan	3/3	100%	100%

- Putusan yang diunggah ke Direktori Putusan pada bulan MARET 2025 sebanyak 2 perkara dari total 2 perkara yang diminutasi di Bulan MARET 2025, sehingga realisasi dan capaian atas indikator ini di Bulan MARET 2025 sebesar 100%.
- Putusan yang diunggah ke Direktori Putusan **sampai dengan** bulan Triwulan I Tahun 2025 sebanyak 3 perkara dari total 3 perkara yang telah diminutasi. Realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebesar 100%.

5.Indikator : Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara

Indikator ini mengukur Jumlah Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi sd Triwulan I		Capaian
Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan TUN	100	0/0	N/A	N/A

- Pada bulan MARET 2025 tidak ada permohonan Eksekusi maupun Penetapan Eksekusi, sehingga realisasi dan capaian di Bulan MARET 2025 tidak dapat dihitung (N/A). Tidak adanya permohonan eksekusi di bulan berjalan bukan merupakan kesalahan satker, dan bisa disebabkan karena telah adanya eksekusi secara sukarela dari para pihak dan tidak dilaporkan ke pengadilan.
- **Sampai dengan** Triwulan I Tahun 2025, belum ada permohonan Eksekusi dan Penetapan Eksekusi.
- Realisasi dan capaian **sampai dengan** Triwulan I Tahun 2025 tidak dapat dihitung (N/A).

6.Indikator : Persentase Perkara TUN Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court

Indikator ini mengukur persentase perkara TUN yang menggunakan e-Court dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi sd Triwulan I		Capaian
Persentase Perkara TUN Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court	100	3/3	100	100

- Perkara TUN Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court pada bulan MARET 2025 sebanyak 1 perkara tingkat banding dari total 1 pengajuan perkara tingkat banding. Realisasi dan capaian atas indikator ini pada Bulan MARET 2025 sebesar 100%.
- Perkara TUN Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court **sampai dengan** Triwulan I Tahun 2025

sebanyak 1 perkara tingkat pertama dan 2 perkara tingkat banding dari total 1 pengajuan perkara tingkat pertama dan 2 pengajuan perkara tingkat banding. Realisasi dan capaian atas indikator ini **sampai dengan** Triwulan I Tahun 2025 sebesar 100%.

Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

7.Indikator : Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan

Indikator ini mengukur Nilai Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi sd Triwulan I	Capaian
Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	3,78	3,84	101,59

- Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat dihitung secara triwulanan. Realisasi Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Triwulan I Tahun 2025 adalah sebesar 3,84, sehingga capaian atas indikator ini adalah sebesar 101,59%.
- Nilai rata-rata realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat **sampai dengan** Triwulan I Tahun 2025 adalah sebesar 101,59%.

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

8. Indikator : Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan

Indikator ini mengukur Indeks Profesionalitas ASN dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi sd Triwulan I	Capaian
IP ASN	85	Diisi Per Tahun	

- Realisasi IP ASN dihitung secara tahunan, sehingga belum ada data capaian atas indikator ini.

9. Indikator : Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan

Indikator ini mengukur nilai IKPA yang terdiri dari DIPA 01 dan DIPA 05 dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi		Capaian
		DIPA 01	DIPA 05	
Nilai IKPA (DIPA 01 dan DIPA 05)	95	100	100	105,26

- **Sampai dengan** Bulan MARET 2025, nilai akumulatif IKPA DIPA 01 dan DIPA 05 masing-masing sebesar 100. Capaian kinerja s/d Triwulan I Tahun 2025 sebesar 105,26%.

10. Indikator : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Indikator ini mengukur nilai kinerja perencanaan anggaran yang terdiri dari DIPA 01 dan DIPA 05 dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi		Capaian
		DIPA 01	DIPA 05	
NKPA (DIPA 01 dan DIPA 05)	95	**Diisi Per Tahun**		

- Realisasi NKPA dihitung secara tahunan, sehingga belum ada data capaian atas indikator ini.

11. Indikator : Nilai Indikator Kinerja Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Indikator ini mengukur nilai indikator pengelolaan aset dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi	Capaian
IPA	3	**Diisi Per Tahun**	

- Realisasi IPA dihitung secara tahunan, sehingga belum ada data capaian atas indikator ini.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

Penjelasan Target, Realisasi dan Capaian Rata-Rata :

- Capaian rata-rata Indikator Kinerja bulan MARET 2025 yaitu sebesar **102,28%**.
- Capaian rata-rata Indikator Kinerja **sampai dengan** Triwulan I Tahun 2025 yaitu sebesar **102,28%**.
- Dikarenakan beberapa indikator tidak dapat didefinisikan (N/A), maka atas indikator N/A tersebut tidak dimasukkan dalam perhitungan capaian kinerja.

Pangkalpinang, 3 November 2025
KETUA,

MOHAMAD SYAUQIE

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

LAPORAN KINERJA
TRIWULAN II TAHUN 2025

- Memperhatikan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah , Bagian keenam Pasal 18 dan 19;
- Permenpan No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Rekomendasi Kementerian PAN dan RB No. B/3826/M.PAN-RB/11/2014 Hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah “Pemanfaatan Penetapan Kinerja (PK) yang telah ditandatangani, sebagai sarana untuk menilai dan menyimpulkan kinerja pihak yang berjanji. Selain itu , perlu ada penjabaran lebih lanjut dokumen Penetapan Kinerja (PK) ke dalam satu rencana aksi yang lebih detil dan dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan (progress) kinerja secara periodik (triwulan atau semesteran), sekaligus sebagai sarana untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

Triwulan II

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi s.d. Triwulan II			Kegiatan/Upaya/Strategi/Kendala/Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
				Realisasi		Capaian (%)	
					%		
1.	Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100	6/6	100	100	6 perkara diselesaikan tepat waktu dari 6 perkara yang diselesaikan. Ketua dan Panitera selalu melakukan evaluasi agar tidak ada perkara yang melewati batas waktu penyelesaian perkara, yakni 5 bulan untuk pengadilan tingkat pertama.
		Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	6/6	100	100	Ketua dan Panitera selalu melakukan evaluasi agar semua salinan putusan perkara yang disampaikan selalu tepat waktu, yakni 14 hari sejak perkara diputus.
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	7/7	100	100	Pengiriman pemberitahuan amar putusan banding, kasasi dan PK selalu dimonitoring oleh Panitera agar tidak ada pemberitahuan putusan yang telat diberitahukan kepada para pihak.

		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	6/6	100	100	Ketua dan Panitera selalu melakukan evaluasi agar semua putusan yang telah diminutasi langsung diupload ke Direktori Putusan pada hari itu juga. Dari total 6 perkara yang diselesaikan, 6 perkara telah diupload ke Direktori Putusan. Namun terdapat kendala proses sinkronisasi upload putusan ke SIPP yang menyebabkan beberapa putusan terlambat masuk ke Direktori Putusan, namun hal ini segera diatasi dengan mengunggah putusan secara manual ke Direktori Putusan melalui admin Direktori Putusan. Ke depannya, Panitera akan selalu melakukan monev terhadap penginputan putusan ke Direktori Putusan.
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara	100	0/0	N/A	N/A	Sampai dengan Bulan Juni, tidak ada perkara BHT yang dimohonkan eksekusi. Ketua dan Panitera selalu melakukan monitoring agar permohonan eksekusi segera ditindaklanjuti.
		Persentase perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	100	8/8	100	100	Seluruh perkara yang diajukan di PTUN Pangkalpinang, baik perkara tingkat pertama maupun perkara tingkat banding telah diajukan menggunakan e-Court.
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	3,78		3,92	103,7	Nilai capaian indeks kepuasan Triwulan II sangat baik, yakni sebesar 3,95. Rata-rata nilai capaian indeks Kepuasan hingga Triwulan II adalah 3,92. Ketua dan segenap aparatur pengadilan berusaha memberikan layanan terbaik, baik dari segi kepaniteraan maupun dari sisi kesekretariatan untuk dukungan sarana dan prasarana.

3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	85	Diisi per tahun			
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	95		100	105,26	IKPA DIPA 01 Triwulan II sebesar 100. Ini menunjukkan kualitas pelaksanaan anggaran yang sangat baik dan telah melampaui target yang ditetapkan. Sekretaris dan Ketua selalu melakukan monitoring terhadap capaian IKPA secara berkala.
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (05)	95		96,4	101.47	IKPA DIPA 05 Triwulan II sebesar 96,4. Ini menunjukkan kualitas pelaksanaan anggaran yang sangat baik dan telah melampaui target yang ditetapkan. Sekretaris dan Ketua selalu melakukan monitoring terhadap capaian IKPA secara berkala.
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	95	Diisi per tahun			
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	Diisi per tahun			
Rata-rata Total						**102,36**	

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

Perhitungan Capaian Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025:

- Terwujudnya Proses Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern : 100
- Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik : 103,7
- Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional : 103,37

Rata-Rata : **102,36%**

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

PENJELASAN

Terwujudnya Peradilan Yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern

1.Indikator : Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu

Indikator ini mengukur perkara yang diselesaikan tepat waktu dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi sd Triwulan II		Capaian
Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu	100	6/6	100%	100%

- Perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu pada bulan JUNI 2025 sebanyak 1 perkara dari total 1 perkara yang diselesaikan di Bulan JUNI 2025, sehingga realisasi dan capaian atas indikator ini pada Bulan JUNI 2025 adalah sebesar 100%.
- Perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu **sampai dengan** bulan Triwulan II sebanyak 6 perkara dari total 6 perkara yang telah diselesaikan/diputus. Realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan II sebesar 100%.

2. Indikator : Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak

Indikator ini mengukur Salinan Putusan Perkara TUN yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi sd Triwulan II		Capaian
Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak	100	6/6	100%	100%

- Jumlah Putusan yang disampaikan tepat waktu pada bulan JUNI 2025 sebanyak 1 putusan perkara dari total 1 perkara yang diselesaikan di Bulan JUNI 2025, sehingga realisasi dan capaian atas indikator ini sebesar 100%.
- Realisasi **sampai dengan** Triwulan II sebanyak 6 putusan yang disampaikan tepat waktu dari total 6 putusan yang dihasilkan. Realisasi dan capaian atas indikator ini sebesar 100%.

3.Indikator : Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak

Indikator ini mengukur persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu, capaiannya sebagai berikut:

	Target	Realisasi sd Triwulan II		Capaian
Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak	100	7/7	100%	100 (%)

- Pada Bulan JUNI 2025, terdapat penerimaan 1 petikan/amar putusan banding dan 1 petikan PK yang langsung disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu. Realisasi dan capaian Bulan JUNI 2025 sebesar 100%.
- Jumlah penerimaan petikan/amar putusan banding, kasasi dan PK **sampai dengan** bulan Triwulan II adalah sebanyak 5 putusan banding, 1 putusan kasasi, dan 1 putusan PK. Jumlah pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan banding, kasasi dan PK secara tepat waktu **sampai dengan** Triwulan II adalah sebanyak 5 putusan banding, 1 putusan kasasi, dan 1 putusan PK. Realisasi **sampai dengan** Triwulan II sebesar 100% sehingga capaian kinerja **sampai dengan** Triwulan II sebesar 100%.

4.Indikator : Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan

Indikator ini mengukur persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi sd Triwulan II	Capaian
Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan	6/6	100%	100%

- Putusan yang diunggah ke Direktori Putusan pada bulan JUNI 2025 sebanyak 1 perkara dari total 1 perkara yang diminutasi di Bulan JUNI 2025, sehingga realisasi dan capaian atas indikator ini di Bulan JUNI 2025 sebesar 100%.
- Putusan yang diunggah ke Direktori Putusan **sampai dengan** Triwulan II sebanyak 6 perkara dari total 6 perkara yang telah diminutasi. Realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan II sebesar 100%.

5.Indikator : Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara

Indikator ini mengukur Jumlah Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi sd Triwulan II		Capaian
Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan TUN	100	0/0	N/A	N/A

- Pada bulan JUNI 2025 tidak ada permohonan Eksekusi maupun Penetapan Eksekusi, sehingga realisasi dan capaian di Bulan JUNI 2025 tidak dapat dihitung (N/A). Tidak adanya permohonan eksekusi di bulan berjalan bukan merupakan kesalahan satker, dan bisa disebabkan karena telah adanya eksekusi secara sukarela dari para pihak dan tidak dilaporkan ke pengadilan.
- **Sampai dengan** Triwulan II, belum ada permohonan Eksekusi dan Penetapan Eksekusi.
- Realisasi dan capaian **sampai dengan** Triwulan II tidak dapat dihitung (N/A).

6.Indikator : Persentase Perkara TUN Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court

Indikator ini mengukur persentase perkara TUN yang menggunakan e-Court dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi sd Triwulan II		Capaian
Persentase Perkara TUN Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court	100	8/8	100	100

- Perkara TUN Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court pada bulan JUNI 2025 sebanyak 1 perkara tingkat pertama dari total 1 pengajuan perkara tingkat pertama. Realisasi dan capaian atas indikator ini pada Bulan JUNI 2025 sebesar 100%.
- Perkara TUN Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court **sampai dengan** Triwulan II sebanyak 4

perkara tingkat pertama dan 4 perkara tingkat banding dari total 4 pengajuan perkara tingkat pertama dan 4 pengajuan perkara tingkat banding. Realisasi dan capaian atas indikator ini **sampai dengan** Triwulan II sebesar 100%.

Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

7.Indikator : Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan

Indikator ini mengukur Nilai Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi sd Triwulan II	Capaian
Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	3,78	3,92	103,7

- Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat dihitung secara triwulanan. Realisasi Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Triwulan II Tahun 2025 adalah sebesar 3,95, sehingga capaian atas indikator ini di Triwulan II adalah sebesar 104,5%.
- Nilai rata-rata realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat **sampai dengan** Triwulan II adalah sebesar 3,92 sehingga capaiannya adalah sebesar 103,7%.

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

8. Indikator : Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan

Indikator ini mengukur Indeks Profesionalitas ASN dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi sd Triwulan II	Capaian
IP ASN	85	Diisi Per Tahun	

- Realisasi IP ASN dihitung secara tahunan, sehingga belum ada data capaian atas indikator ini.

9. Indikator : Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan

Indikator ini mengukur nilai IKPA yang terdiri dari DIPA 01 dan DIPA 05 dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi		Capaian
		DIPA 01	DIPA 05	
Nilai IKPA (DIPA 01 dan DIPA 05)	95	100	96,4	103,37

- **Sampai dengan** Bulan JUNI 2025, nilai akumulatif IKPA DIPA 01 dan DIPA 05 masing-masing sebesar 100 dan 96,4. Capaian kinerja s/d Triwulan II sebesar 103,37%.

10. Indikator : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Indikator ini mengukur nilai kinerja perencanaan anggaran yang terdiri dari DIPA 01 dan DIPA 05 dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi		Capaian
		DIPA 01	DIPA 05	
NKPA (DIPA 01 dan DIPA 05)	95	**Diisi Per Tahun**		

- Realisasi NKPA dihitung secara tahunan, sehingga belum ada data capaian atas indikator ini.

11. Indikator : Nilai Indikator Kinerja Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Indikator ini mengukur nilai indikator pengelolaan aset dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi	Capaian
IPA	3	**Diisi Per Tahun**	

- Realisasi IPA dihitung secara tahunan, sehingga belum ada data capaian atas indikator ini.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

Penjelasan Target, Realisasi dan Capaian Rata-Rata :

- Capaian rata-rata Indikator Kinerja bulan JUNI 2025 yaitu sebesar **102,62%**.
- Capaian rata-rata Indikator Kinerja **sampai dengan** Triwulan II yaitu sebesar **102,36%**.
- Dikarenakan beberapa indikator tidak dapat didefinisikan (N/A), maka atas indikator N/A tersebut tidak dimasukkan dalam perhitungan capaian kinerja.

Pangkalpinang, 3 November 2025
KETUA,

MOHAMAD SYAUQIE

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

LAPORAN KINERJA
TRIWULAN III TAHUN 2025

- Memperhatikan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah , Bagian keenam Pasal 18 dan 19;
- Permenpan No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Rekomendasi Kementerian PAN dan RB No. B/3826/M.PAN-RB/11/2014 Hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah “Pemanfaatan Penetapan Kinerja (PK) yang telah ditandatangani, sebagai sarana untuk menilai dan menyimpulkan kinerja pihak yang berjanji. Selain itu , perlu ada penjabaran lebih lanjut dokumen Penetapan Kinerja (PK) ke dalam satu rencana aksi yang lebih detil dan dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan (progress) kinerja secara periodik (triwulan atau semesteran), sekaligus sebagai sarana untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

Triwulan III

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi s.d. Triwulan III			Kegiatan/Upaya/Strategi/Kendala/Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
				Realisasi		Capaian (%)	
					%		
1.	Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100	10/10	100	100	10 perkara diselesaikan tepat waktu dari 10 perkara yang diselesaikan. Ketua dan Panitera selalu melakukan evaluasi agar tidak ada perkara yang melewati batas waktu penyelesaian perkara, yakni 5 bulan untuk pengadilan tingkat pertama.
		Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	10/10	100	100	Ketua dan Panitera selalu melakukan evaluasi agar semua salinan putusan perkara yang disampaikan selalu tepat waktu, yakni 14 hari sejak perkara diputus.
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	14/14	100	100	Pengiriman pemberitahuan amar putusan banding, kasasi dan PK selalu dimonitoring oleh Panitera agar tidak ada pemberitahuan putusan yang telat diberitahukan kepada para pihak.

		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	10/10	100	100	Ketua dan Panitera selalu melakukan evaluasi agar semua putusan yang telah diminutasi langsung diupload ke Direktori Putusan pada hari itu juga. Dari total 10 perkara yang diselesaikan, 10 perkara telah diupload ke Direktori Putusan. Namun terdapat kendala proses sinkronisasi upload putusan ke SIPP yang menyebabkan beberapa putusan terlambat masuk ke Direktori Putusan, namun hal ini segera diatasi dengan mengunggah putusan secara manual ke Direktori Putusan melalui admin Direktori Putusan. Ke depannya, Panitera akan selalu melakukan monev terhadap penginputan putusan ke Direktori Putusan.
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara	100	1/1	100	100	Sampai dengan Bulan September, terdapat 1 perkara BHT yang dimohonkan eksekusi yang langsung ditindakalnjuti dengan Penetapan Ketua pada Bulan September 2025. Ketua dan Panitera selalu melakukan monitoring agar permohonan eksekusi segera ditindaklanjuti.
		Persentase perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	100	15/15	100	100	Seluruh perkara yang diajukan di PTUN Pangkalpinang, baik perkara tingkat pertama maupun perkara tingkat banding telah diajukan menggunakan e-Court.
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	3,78		3,89	102,91	Nilai capaian indeks kepuasan Triwulan III sangat baik, yakni sebesar 3,84. Rata-rata nilai capaian indeks Kepuasan hingga Triwulan III adalah 3,89 yang diperoleh dari rata-rata indeks kepuasan masyarakat dari Triwulan I s/d Triwulan III. Ketua dan segenap aparatur pengadilan berusaha memberikan layanan terbaik, baik dari segi kepaniteraan maupun dari sisi

							kesekretariatan untuk dukungan sarana dan prasarana.
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	85	Diisi per tahun			
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	95		98.76	103.96	IKPA DIPA 01 Triwulan III sebesar 98,76. Ini menunjukkan kualitas pelaksanaan anggaran yang sangat baik dan telah melampaui target yang ditetapkan. Sekretaris dan Ketua selalu melakukan monitoring terhadap capaian IKPA secara berkala.
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (05)	95		97.85	103	IKPA DIPA 05 Triwulan III sebesar 97,85. Ini menunjukkan kualitas pelaksanaan anggaran yang sangat baik dan telah melampaui target yang ditetapkan. Sekretaris dan Ketua selalu melakukan monitoring terhadap capaian IKPA secara berkala.
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	95	Diisi per tahun			
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	Diisi per tahun			
Rata-rata Total						**102,13**	

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

Perhitungan Capaian Kinerja s/d Triwulan III Tahun 2025:

- Terwujudnya Proses Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern : 100
- Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik : 102,91
- Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional : 103,48

Rata-Rata : **102,13%**

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

PENJELASAN

Terwujudnya Peradilan Yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern

1.Indikator : Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu

Indikator ini mengukur perkara yang diselesaikan tepat waktu dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi s/d Triwulan III		Capaian
Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu	100	10/10	100%	100%

- Perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu pada bulan SEPTEMBER 2025 sebanyak 2 perkara dari total 2 perkara yang diselesaikan di Bulan SEPTEMBER 2025, sehingga realisasi dan capaian atas indikator ini pada Bulan SEPTEMBER 2025 adalah sebesar 100%.
- Perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu **sampai dengan** Triwulan III Tahun 2025 sebanyak 10 perkara dari total 10 perkara yang telah diselesaikan/diputus. Realisasi dan capaian kinerja **sampai dengan** Triwulan III Tahun 2025 sebesar 100%.

2. Indikator : Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak

Indikator ini mengukur Salinan Putusan Perkara TUN yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi s/d Triwulan III		Capaian
Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak	100	10/10	100%	100%

- Jumlah Putusan yang disampaikan tepat waktu pada bulan SEPTEMBER 2025 sebanyak 2 putusan perkara dari total 2 perkara yang diselesaikan di Bulan SEPTEMBER 2025, sehingga realisasi dan capaian atas indikator ini sebesar 100%.
- Realisasi **sampai dengan** Triwulan III Tahun 2025 sebanyak 10 putusan yang disampaikan tepat waktu dari total 10 putusan yang dihasilkan. Realisasi dan capaian atas indikator ini sebesar 100%.

3.Indikator : Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak

Indikator ini mengukur persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu, capaiannya sebagai berikut:

	Target	Realisasi s/d Triwulan III		Capaian
Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak	100	14/14	100%	100 (%)

- Pada Bulan SEPTEMBER 2025, terdapat penerimaan 1 petikan/amar putusan banding dan 1 petikan kasasi yang langsung disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu. Realisasi dan capaian Bulan SEPTEMBER 2025 sebesar 100%.
- Jumlah penerimaan petikan/amar putusan banding, kasasi dan PK **sampai dengan** Triwulan III Tahun 2025 adalah sebanyak 8 putusan banding, 4 putusan kasasi, dan 2 putusan PK. Jumlah pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan banding, kasasi dan PK secara tepat waktu **sampai dengan** Triwulan III Tahun 2025 adalah sebanyak 8 putusan banding, 4 putusan kasasi, dan 2 putusan PK. Realisasi **sampai dengan** Triwulan III Tahun 2025 sebesar 100% sehingga capaian kinerja **sampai dengan** Triwulan III Tahun 2025 sebesar 100%.

4.Indikator : Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan

Indikator ini mengukur persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi s/d Triwulan III	Capaian
Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan	$\frac{6}{6}$	100%	100%

- Putusan yang diunggah ke Direktori Putusan pada bulan SEPTEMBER 2025 sebanyak 2 perkara dari total 2 perkara yang diminutasi di Bulan SEPTEMBER 2025, sehingga realisasi dan capaian atas indikator ini di Bulan SEPTEMBER 2025 sebesar 100%.
- Putusan yang diunggah ke Direktori Putusan **sampai dengan** bulan SEPTEMBER 2025 sebanyak 10 perkara dari total 10 perkara yang telah diminutasi. Realisasi dan capaian kinerja **sampai dengan** Triwulan III Tahun 2025 sebesar 100%.

5.Indikator : Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara

Indikator ini mengukur Jumlah Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi s/d Triwulan III		Capaian
Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan TUN	100	1/1	100%	100%

- Pada bulan SEPTEMBER 2025 terdapat 1 permohonan eksekusi yang telah ditindaklanjuti dengan Penetapan Ketua. Realisasi dan capaian atas indikator ini sebesar 100%.
- **Sampai dengan** Triwulan III Tahun 2025, terdapat 1 permohonan Eksekusi yang telah ditindaklanjuti dengan Penetapan Ketua. Realisasi dan capaian **sampai dengan** Triwulan III Tahun 2025 sebesar 100%.

6.Indikator : Persentase Perkara TUN Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court

Indikator ini mengukur persentase perkara TUN yang menggunakan e-Court dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi s/d Triwulan III		Capaian
Persentase Perkara TUN Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court	100	15/15	100	100

- Perkara TUN Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court pada bulan SEPTEMBER 2025 sebanyak 2 perkara tingkat pertama dari total 2 pengajuan perkara tingkat pertama. Realisasi dan capaian atas indikator ini pada Bulan SEPTEMBER 2025 sebesar 100%.
- Perkara TUN Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court **sampai dengan** Triwulan III Tahun 2025

sebanyak 9 perkara tingkat pertama dan 6 perkara tingkat banding dari total 9 pengajuan perkara tingkat pertama dan 6 pengajuan perkara tingkat banding. Realisasi dan capaian atas indikator ini sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 sebesar 100%.

Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

7.Indikator : Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan

Indikator ini mengukur Nilai Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi s/d Triwulan III	Capaian
Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	3,78	3,89	102,91

- Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat dihitung secara triwulanan. Realisasi Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Triwulan III Tahun 2025 adalah sebesar 3,84, sehingga capaian atas indikator ini di Triwulan III adalah sebesar 101,59%.
- Nilai rata-rata realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 adalah sebesar 3,89 sehingga capaiannya adalah sebesar 102,91%.

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

8. Indikator : Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan

Indikator ini mengukur Indeks Profesionalitas ASN dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi s/d Triwulan III	Capaian
IP ASN	85	Diisi Per Tahun	

- Realisasi IP ASN dihitung secara tahunan, sehingga belum ada data capaian atas indikator ini.

9. Indikator : Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan

Indikator ini mengukur nilai IKPA yang terdiri dari DIPA 01 dan DIPA 05 dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi		Capaian
		DIPA 01	DIPA 05	
Nilai IKPA (DIPA 01 dan DIPA 05)	95	98,76	97,85	103,48

- **Sampai dengan** Triwulan III Tahun 2025, nilai akumulatif IKPA DIPA 01 dan DIPA 05 masing-masing sebesar 98,76 dan 97,85. Capaian kinerja s/d Triwulan III Tahun 2025 sebesar 103,48%.

10. Indikator : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Indikator ini mengukur nilai kinerja perencanaan anggaran yang terdiri dari DIPA 01 dan DIPA 05 dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi		Capaian
		DIPA 01	DIPA 05	
NKPA (DIPA 01 dan DIPA 05)	95	**Diisi Per Tahun**		

- Realisasi NKPA dihitung secara tahunan, sehingga belum ada data capaian atas indikator ini.

11. Indikator : Nilai Indikator Kinerja Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Indikator ini mengukur nilai indikator pengelolaan aset dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi	Capaian
IPA	3	**Diisi Per Tahun**	

- Realisasi IPA dihitung secara tahunan, sehingga belum ada data capaian atas indikator ini.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

Penjelasan Target, Realisasi dan Capaian Rata-Rata :

- Capaian rata-rata Indikator Kinerja bulan SEPTEMBER 2025 yaitu sebesar **101,69%**.
- Capaian rata-rata Indikator Kinerja **sampai dengan** Triwulan III Tahun 2025 yaitu sebesar **102,13%**.
- Dikarenakan beberapa indikator tidak dapat didefinisikan (N/A), maka atas indikator N/A tersebut tidak dimasukkan dalam perhitungan capaian kinerja.

Pangkalpinang, 3 November 2025
KETUA,

MOHAMAD SYAUQIE

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

LAPORAN KINERJA
TRIWULAN IV TAHUN 2025

- Memperhatikan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah , Bagian keenam Pasal 18 dan 19;
- Permenpan No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Rekomendasi Kementerian PAN dan RB No. B/3826/M.PAN-RB/11/2014 Hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah “Pemanfaatan Penetapan Kinerja (PK) yang telah ditandatangani, sebagai sarana untuk menilai dan menyimpulkan kinerja pihak yang berjanji. Selain itu , perlu ada penjabaran lebih lanjut dokumen Penetapan Kinerja (PK) ke dalam satu rencana aksi yang lebih detil dan dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan (progress) kinerja secara periodik (triwulan atau semesteran), sekaligus sebagai sarana untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

Triwulan IV

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi s.d. Triwulan IV			Kegiatan/Upaya/Strategi/Kendala/Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
				Realisasi		Capaian (%)	
					%		
1.	Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100	17/17	100	100	17 perkara diselesaikan tepat waktu dari 17 perkara yang diselesaikan. Ketua dan Panitera selalu melakukan evaluasi agar tidak ada perkara yang melewati batas waktu penyelesaian perkara, yakni 5 bulan untuk pengadilan tingkat pertama.
		Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	17/17	100	100	Ketua dan Panitera selalu melakukan evaluasi agar semua salinan putusan perkara yang disampaikan selalu tepat waktu, yakni 14 hari sejak perkara diputus.
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	19/19	100	100	Pengiriman pemberitahuan amar putusan banding, kasasi dan PK selalu dimonitoring oleh Panitera agar tidak ada pemberitahuan putusan yang telat diberitahukan kepada para pihak.

		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	17/17	100	100	Ketua dan Panitera selalu melakukan evaluasi agar semua putusan yang telah diminutasi langsung diupload ke Direktori Putusan pada hari itu juga. Dari total 17 perkara yang diselesaikan, 17 perkara telah diupload ke Direktori Putusan. Namun terdapat kendala proses sinkronisasi upload putusan ke SIPP yang menyebabkan beberapa putusan terlambat masuk ke Direktori Putusan, namun hal ini segera diatasi dengan mengunggah putusan secara manual ke Direktori Putusan melalui admin Direktori Putusan. Ke depannya, Panitera akan selalu melakukan monev terhadap penginputan putusan ke Direktori Putusan.
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara	100	1/1	100	100	Sampai dengan Bulan Desember, terdapat 1 perkara BHT yang dimohonkan eksekusi yang langsung ditindakalnjuti dengan Penetapan Ketua pada Bulan September 2025. Ketua dan Panitera selalu melakukan monitoring agar permohonan eksekusi segera ditindaklanjuti.
		Persentase perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	100	24/24	100	100	Seluruh perkara yang diajukan di PTUN Pangkalpinang, baik perkara tingkat pertama maupun perkara tingkat banding telah diajukan menggunakan e-Court.
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	3,78		3,88	102,65	Nilai capaian indeks kepuasan Triwulan IV sangat baik, yakni sebesar 3,84. Rata-rata nilai capaian indeks Kepuasan hingga Triwulan IV adalah 3,88 yang diperoleh dari rata-rata indeks kepuasan masyarakat dari Triwulan I s/d Triwulan IV. Ketua dan segenap aparatur pengadilan berusaha memberikan layanan terbaik, baik dari segi kepaniteraan maupun dari sisi kesekretariatan

							untuk dukungan sarana dan prasarana.
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	85		85	100	IP ASN Tahun 2025 adalah sebesar 85. Nilai ini menunjukkan indeks profesionalitas ASN yang sangat baik.
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	95		98,95	104,16	IKPA DIPA 01 sampai dengan Triwulan IV sebesar 98,95. Ini menunjukkan kualitas pelaksanaan anggaran yang sangat baik dan telah melampaui target yang ditetapkan. Sekretaris dan Ketua selalu melakukan monitoring terhadap capaian IKPA secara berkala.
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (05)	95		98,38	103,56	IKPA DIPA 05 sampai dengan Triwulan IV sebesar 98,38. Ini menunjukkan kualitas pelaksanaan anggaran yang sangat baik dan telah melampaui target yang ditetapkan. Sekretaris dan Ketua selalu melakukan monitoring terhadap capaian IKPA secara berkala.
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	95		100	105,26	NKPA DIPA 01 Tahun 2025 adalah sebesar 100. Ini menunjukkan kualitas perencanaan anggaran yang sangat baik dan telah melampaui target yang ditetapkan. Sekretaris dan Ketua selalu melakukan monitoring terhadap capaian NKPA secara berkala.
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 05	95		99,89	105,15	NKPA DIPA 05 Tahun 2025 adalah sebesar 99,89. Ini menunjukkan kualitas perencanaan anggaran yang sangat baik dan telah melampaui target yang ditetapkan. Sekretaris dan Ketua selalu melakukan monitoring terhadap capaian NKPA secara berkala.
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3		3,175	105,83	Nilai IPA Tahun 2025 adalah sebesar 3,175. Ini menunjukkan kualitas pengelolaan aset yang sangat baik dan telah melampaui target yang ditetapkan. Sekretaris dan Ketua selalu melakukan monitoring terhadap

							capaian IPA secara berkala.
Rata-rata Total						**102,13**	

Perhitungan Capaian Kinerja s/d Triwulan IV Tahun 2025:

- Terwujudnya Proses Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern : 100
- Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik : 102,65
- Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional : 103,73

Rata-Rata : **102,13%**

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

PENJELASAN

Terwujudnya Peradilan Yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern

1.Indikator : Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu

Indikator ini mengukur perkara yang diselesaikan tepat waktu dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi sd Bulan DESEMBER		Capaian
Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu	100	17/17	100%	100%

- Perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu pada bulan DESEMBER 2025 sebanyak 2 perkara dari total 2 perkara yang diselesaikan di Bulan DESEMBER 2025, sehingga realisasi dan capaian atas indikator ini pada Bulan DESEMBER 2025 adalah sebesar 100%.
- Perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu **sampai dengan** Triwulan IV 2025 sebanyak 17 perkara dari total 17 perkara yang telah diselesaikan/diputus. Realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan IV 2025 sebesar 100%.

2. Indikator : Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak

Indikator ini mengukur Salinan Putusan Perkara TUN yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi sd Bulan DESEMBER		Capaian
Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak	100	17/17	100%	100%

- Jumlah Putusan yang disampaikan tepat waktu pada bulan DESEMBER 2025 sebanyak 2 putusan perkara dari total 2 perkara yang diselesaikan di Bulan DESEMBER 2025, sehingga realisasi dan capaian atas indikator ini sebesar 100%.
- Realisasi **sampai dengan** Triwulan IV 2025 sebanyak 17 putusan yang disampaikan tepat waktu dari total 17 putusan yang dihasilkan. Realisasi dan capaian atas indikator ini sebesar 100%.

3.Indikator : Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak

Indikator ini mengukur persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu, capaiannya sebagai berikut:

	Target	Realisasi sd Bulan DESEMBER		Capaian
Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak	100	5/5	100%	100 (%)

- Pada Bulan DESEMBER 2025, terdapat penerimaan petikan/amar putusan banding sebanyak 2 berkas dan kasasi 3 berkas. Semua petikan/amar putusan tersebut telah disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu. Realisasi dan capaian Bulan DESEMBER 2025 sebesar 100%.
- Jumlah penerimaan petikan/amar putusan banding, kasasi dan PK sampai dengan Triwulan IV 2025 adalah sebanyak 11 putusan banding, 6 putusan kasasi, dan 2 putusan PK. Jumlah pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan banding, kasasi dan PK secara tepat waktu sampai dengan Triwulan IV 2025 adalah sebanyak 11 putusan banding, 6 putusan kasasi, dan 2 putusan PK. Realisasi sampai dengan Triwulan IV 2025 sebesar 100% sehingga capaian kinerja sampai dengan Triwulan IV 2025 sebesar 100%.

4.Indikator : Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan

Indikator ini mengukur persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi sd Bulan DESEMBER	Capaian
Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan	17/17	100%	100%

- Putusan yang diunggah ke Direktori Putusan pada bulan DESEMBER 2025 sebanyak 2 perkara dari total 2 perkara yang diminutasi di Bulan DESEMBER 2025, sehingga realisasi dan capaian atas indikator ini di Bulan DESEMBER 2025 sebesar 100%.
- Putusan yang diunggah ke Direktori Putusan **sampai dengan** Triwulan IV 2025 sebanyak 17 perkara dari total 17 perkara yang telah diminutasi. Realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan IV 2025 sebesar 100%.

5.Indikator : Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara

Indikator ini mengukur Jumlah Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi s/d Bulan DESEMBER		Capaian
Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan TUN	100	1/1	100%	100%

- Pada bulan DESEMBER 2025 tidak ada permohonan Eksekusi maupun Penetapan Eksekusi, sehingga realisasi dan capaian di Bulan DESEMBER 2025 tidak dapat dihitung (N/A). Tidak adanya permohonan eksekusi di bulan berjalan bukan merupakan kesalahan satker, dan bisa disebabkan karena telah adanya eksekusi secara sukarela dari para pihak dan tidak dilaporkan ke pengadilan.
- **Sampai dengan** Triwulan IV 2025, terdapat 1 permohonan Eksekusi yang telah ditindaklanjuti dengan Penetapan Eksekusi di Bulan September 2025.
- Realisasi dan capaian **sampai dengan** Triwulan IV 2025 sebesar 100%.

6.Indikator : Persentase Perkara TUN Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court

Indikator ini mengukur persentase perkara TUN yang menggunakan e-Court dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi s/d Bulan DESEMBER		Capaian
Persentase Perkara TUN Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court	100	24/24	100	100

- Perkara TUN Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court pada bulan DESEMBER 2025 sebanyak 1 perkara tingkat banding dari total 1 pengajuan perkara tingkat banding. Realisasi dan capaian atas indikator ini pada Bulan DESEMBER 2025 sebesar 100%.
- Perkara TUN Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court **sampai dengan** Triwulan IV 2025 sebanyak 15 perkara tingkat pertama dan 9 perkara tingkat banding dari total 15 pengajuan perkara tingkat pertama dan 9 pengajuan perkara tingkat banding. Realisasi dan capaian atas indikator ini sampai dengan Triwulan IV 2025 sebesar 100%.

Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

7.Indikator : Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan

Indikator ini mengukur Nilai Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi sd Bulan DESEMBER	Capaian
Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	3,78	3,88	102,65

- Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat dihitung secara triwulanan. Realisasi Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Triwulan IV Tahun 2025 adalah sebesar 3,84, sehingga capaian atas indikator ini di Triwulan IV Tahun 2025 adalah sebesar 101,59%.
- Nilai capaian **sampai dengan** Bulan Desember 2025 dihitung secara rata-rata dari jumlah nilai indeks kepuasan triwulanan dengan data IKM Triwulan I sebesar 3,88, Triwulan II 3,95, Triwulan III 3,84, dan Triwulan IV 3,84. Rata-rata realisasi IKM selama tahun 2025 adalah 3,88 sehingga capaian kinerja sampai dengan Triwulan IV 2025 adalah sebesar 102,65%.

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

8. Indikator : Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan

Indikator ini mengukur Indeks Profesionalitas ASN dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi sd Bulan DESEMBER	Capaian
IP ASN	85	85	100%

- Realisasi IP ASN sampai dengan Desember 2025 adalah 85 dan telah sesuai dengan target tahunan, sehingga capaian atas indikator ini sebesar 100%.

9. Indikator : Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan

Indikator ini mengukur nilai IKPA yang terdiri dari DIPA 01 dan DIPA 05 dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi		Capaian
		DIPA 01	DIPA 05	
Nilai IKPA (DIPA 01 dan DIPA 05)	95	98,95	98,38	103,86

- **Sampai dengan** Triwulan IV 2025, nilai akumulatif IKPA DIPA 01 dan DIPA 05 masing-masing sebesar 98,95 dan 98,38. Capaian kinerja s/d Triwulan IV 2025 sebesar 103,86%.

10. Indikator : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Indikator ini mengukur nilai kinerja perencanaan anggaran yang terdiri dari DIPA 01 dan DIPA 05 dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi		Capaian
		DIPA 01	DIPA 05	
NKPA (DIPA 01 dan DIPA 05)	95	100	99,89	105,21

- **Sampai dengan** Triwulan IV 2025, nilai akumulatif NKPA DIPA 01 dan DIPA 05 masing-masing sebesar 100 dan 99,89. Capaian kinerja s/d Triwulan IV 2025 sebesar 105,21%.

11. Indikator : Nilai Indikator Kinerja Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Indikator ini mengukur nilai indikator pengelolaan aset dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi	Capaian
IPA	3	3,175	105,83

- Realisasi IPA dihitung secara tahunan. **Sampai dengan** Bulan DESEMBER 2025, nilai IPA PTUN Pangkalpinang yang telah dievaluasi oleh PTTUN Palembang adalah sebesar 3,175 sehingga capaian kinerja atas indikator ini adalah sebesar 105,83%.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

Penjelasan Target, Realisasi dan Capaian Rata-Rata :

- Capaian rata-rata Indikator Kinerja bulan DESEMBER 2025 yaitu sebesar **101,77%**.
- Capaian rata-rata Indikator Kinerja **sampai dengan** bulan DESEMBER 2025 yaitu sebesar **102,13%**.

Pangkalpinang, 2 Februari 2026
KETUA,

MOHAMAD SYAUQIE

LAMPIRAN XVII

MONEV RENCANA AKSI BERKALA

MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 TRIWULAN I

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel	Persentase perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi	35%	33,33%	95,22%
		Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan	90	97,01	107,78%

NO.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN *PROGRESS* PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.1. Persentase Perkara TUN yang Diselesaikan Tepat Waktu				
1	Mendata, mengidentifikasi dan mengevaluasi perkara lebih dari 5 bulan	Telah dilakukan identifikasi dan evaluasi perkara yang lewat dari 5 bulan.	Tidak ada permasalahan. Nilai kinerja sudah baik.	Terus ditingkatkan dan dipantau agar tidak ada perkara yang melebihi jangka waktu penyelesaian yang telah ditetapkan.

2	Melaporkan dan mencari solusi yang tepat.	Tidak ada laporan yang perlu dilaporkan kepada pimpinan karena tidak ada perkara yang lewat dari 5 bulan.	Tidak ada permasalahan. Nilai kinerja sudah baik.	Terus ditingkatkan dan dipantau agar tidak ada perkara yang melebihi jangka waktu penyelesaian yang telah ditetapkan.
3	Menyelesaikan persidangan sesuai asas persidangan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.	Persidangan telah dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.	Tidak ada permasalahan. Nilai kinerja sudah baik.	Terus ditingkatkan dan dipantau agar tidak ada perkara yang melebihi jangka waktu penyelesaian yang telah ditetapkan.
4	Menunda persidangan dengan waktu relatif singkat (maksimal 14 hari)	Tidak ada sidang yang ditunda lebih dari 14 hari.	Tidak ada permasalahan. Nilai kinerja sudah baik.	Terus ditingkatkan dan dipantau agar tidak ada perkara yang melebihi jangka waktu penyelesaian yang telah ditetapkan.
5	Memutus perkara tidak melebihi 5 bulan	Tidak ada perkara yang lewat dari 5 bulan	Tidak ada permasalahan. Nilai kinerja sudah baik.	Terus ditingkatkan dan dipantau agar tidak ada perkara yang melebihi jangka waktu penyelesaian yang telah ditetapkan.

6	Pelaksanaan minutasi perkara tepat waktu	Minutasi perkara selalu dilakukan tepat waktu	Tidak ada permasalahan. Nilai kinerja sudah baik.	Terus ditingkatkan dan dipantau agar tidak ada perkara yang melebihi jangka waktu penyelesaian yang telah ditetapkan.
7	Mencoret/*highlight* perkara yang sudah melebihi batas waktu teguran	Tidak ada perkara yang melebihi batas waktu.	Tidak ada permasalahan. Nilai kinerja sudah baik.	Terus ditingkatkan dan dipantau agar tidak ada perkara yang melebihi jangka waktu penyelesaian yang telah ditetapkan.
1.2. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi				
1	Menyusun putusan perkara tingkat pertama yang berkualitas	Putusan perkara telah diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Tidak ada permasalahan.	Terus dilakukan monitoring dan pemantauan secara berkala.
2	Mendata perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	Data perkara yang tidak mengajukan banding dipantau dari SIPP.	Tidak ada permasalahan.	Terus dilakukan monitoring dan pemantauan secara berkala.
3	Mendata perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.	Data perkara yang tidak mengajukan kasasi dipantau dari SIPP.	Tidak ada permasalahan.	Terus dilakukan monitoring dan pemantauan secara berkala.

NO.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN *PROGRESS* PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.3. Indeks Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan				
1	Membentuk tim survey kepuasan masyarakat	Tim survey kepuasan telah dibentuk melalui SK Ketua PTUN Pangkalpinang	Tidak ada permasalahan. Nilai indeks kepuasan masyarakat sudah baik.	Terus dilakukan monitoring dan pemantauan secara berkala.
2	Menyusun *job description* tim evaluasi kepuasan masyarakat	Uraian tugas tim telah tersusun	Tidak ada permasalahan. Nilai indeks kepuasan masyarakat sudah baik.	Terus dilakukan monitoring dan pemantauan secara berkala.
3	Menyusun jadwal pelaksanaan dan kebutuhan Survey Kepuasan Masyarakat	Jadwal pelaksanaan survey dilakukan per triwulan	Tidak ada permasalahan. Nilai indeks kepuasan masyarakat sudah baik.	Terus dilakukan monitoring dan pemantauan secara berkala.
4	Melaksanakan SKM	SKM telah dilaksanakan per triwulan	Tidak ada permasalahan. Nilai indeks kepuasan masyarakat sudah baik.	Terus dilakukan monitoring dan pemantauan secara berkala.
5	Mendata dan merekap hasil SKM	Hasil SKM telah berhasil dihimpun	Tidak ada permasalahan. Nilai indeks kepuasan	Terus dilakukan monitoring dan

			masyarakat sudah baik.	pemantauan secara berkala.
6	Menyusun Laporan Hasil SKM	Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat telah selesai disusun	Tidak ada permasalahan. Nilai indeks kepuasan masyarakat sudah baik.	Terus dilakukan monitoring dan pemantauan secara berkala.
7	Melakukan evaluasi berdasarkan hasil SKM dan melakukan tinjauan manajemen	Monev SKM dan tindak lanjut hasil survey telah dibuat	Tidak ada permasalahan. Nilai indeks kepuasan masyarakat sudah baik.	Terus dilakukan monitoring dan pemantauan secara berkala.

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan perkara yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%

NO.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN *PROGRESS* PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1	Menginput tundaan sidang setelah sidang dilaksanakan	Tundaan sidang telah diinput secara tertib.	Tidak ada permasalahan.	Terus ditingkatkan dan dipantau agar tidak ada tundaan sidang yang tidak diinput.
2	Membuat Berita Acara Sidang setelah sidang dilaksanakan	BAS sudah disusun secara tertib setelah persidangan.	Tidak ada permasalahan.	Terus ditingkatkan dan dipantau agar tidak ada BAS yang tidak dibuat.
3	Membuat putusan sebelum sidang pembacaan putusan	Putusan selalu diselesaikan tepat waktu sebelum pembacaan putusan	Tidak ada permasalahan.	Terus ditingkatkan dan dipantau agar tidak ada putusan yang lambat dibuat.
4	Menginput amar putusan dan	Amar putusan telah diinput dengan	Tidak ada permasalahan.	Terus ditingkatkan dan

	tanggal putusan di SIPP maksimal 1 hari setelah sidang putusan	tertib ke SIPP.		dipantau amar putusan yang lambat diinput ke SIPP.
5	Mengunggah salinan putusan ke SIPP (e-doc)	Salinan putusan telah diunggah dengan tertib ke SIPP.	Tidak ada permasalahan.	Terus ditingkatkan dan dipantau agar tidak ada salinan putusan perkara yang disampaikan melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan.
6	Mengirimkan Salinan Putusan kepada Para Pihak paling lambat 14 hari, dan selanjutnya menginput tanggal pengiriman salinan putusan ke SIPP.	Salinan putusan selalu dikirimkan kepada para pihak sebelum tenggat waktu 14 hari.	Tidak ada permasalahan.	Terus ditingkatkan dan dipantau agar tidak ada salinan putusan perkara yang disampaikan melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan.
7	Melakukan evaluasi ketepatan waktu penyampaian salinan putusan	Penyampaian salinan putusan selalu dilakukan tepat waktu	Tidak ada permasalahan.	Terus ditingkatkan dan dipantau agar tidak ada salinan putusan perkara yang disampaikan melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan.

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%	N/A	N/A
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%

NO.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN *PROGRESS* PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
3.1. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan				
1	Mengumumkan program bantuan pembebasan biaya perkara melalui website, media sosial, pamflet, dan melalui Posbankum.	Program pembebasan biaya perkara/prodeo telah dipublikasikan ke website, media sosial, pamflet dan juga melalui Posbakum.	NIHIL	Tingkatkan layanan Posbakum untuk lebih aktif menjangkau masyarakat.
2	Pelaksanaan penyelesaian perkara melalui pembebasan biaya perkara (prodeo).	Belum ada permohonan perkara secara prodeo yang masuk	Belum ada pendaftaran perkara prodeo	Tingkatkan layanan Posbakum untuk lebih aktif menjangkau masyarakat.
3	Menyusun laporan perkara prodeo yang diselesaikan.	Laporan perkara prodeo tidak dapat disusun karena tidak ada permohonan perkara secara prodeo yang masuk.	Belum ada pendaftaran perkara prodeo	Tingkatkan layanan Posbakum untuk lebih aktif menjangkau masyarakat.

4	Melakukan evaluasi dan tindak lanjut atas laporan pelaksanaan penyelesaian perkara melalui pembebasan biaya perkara (prodeo).	Belum ada pendaftaran perkara prodeo	Belum ada pendaftaran perkara prodeo	Tingkatkan layanan Posbakum untuk lebih aktif menjangkau masyarakat.
3.2. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)				
1	Membentuk tim seleksi pemilihan Pos Bantuan Hukum	Tim seleksi pemilihan Pos Bantuan Hukum telah dibentuk pada Desember 2024.	Tidak ada permasalahan.	NIHIL
2	Mengadakan MoU dengan Pos Bantuan Hukum terpilih.	MoU dengan Pos Bantuan Hukum telah dilaksanakan di Bulan Januari 2025	Tidak ada permasalahan.	NIHIL
3	Pelaksanaan jam layanan Posbakum sesuai kontrak.	Jam layanan Posbakum telah dilaksanakan sesuai dengan kontrak.	Tidak ada permasalahan.	NIHIL
4	Menyusun Laporan Posbakum.	Laporan Posbakum telah dibuat tiap bulannya.	Tidak ada permasalahan.	NIHIL
5	Melakukan evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan pemberian layanan bantuan hukum melalui Posbakum	Monev Posbakum telah dilaksanakan per triwulan.	Tidak ada permasalahan.	NIHIL

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100%	N/A	N/A

NO.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN *PROGRESS* PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1	Mendata putusan yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap	Putusan BHT sudah terdata	Belum ada permohonan eksekusi	Lakukan pemantauan terhadap pelaksanaan putusan BHT
2	Menerima permohonan eksekusi	Belum ada permohonan eksekusi	Belum ada permohonan eksekusi	Lakukan pemantauan terhadap pelaksanaan putusan BHT
3	Menindaklanjuti permohonan eksekusi	Belum ada permohonan eksekusi yang dapat ditindaklanjuti	Belum ada permohonan eksekusi	Lakukan pemantauan terhadap pelaksanaan putusan BHT
4	Menyusun Laporan Pelaksanaan Eksekusi	Belum ada permohonan eksekusi sehingga Laporan Pelaksanaan Eksekusi belum dapat dibuat.	Belum ada permohonan eksekusi	Lakukan pemantauan terhadap pelaksanaan putusan BHT
5	Melakukan evaluasi dan tindak lanjut atas laporan pelaksanaan eksekusi.	Belum ada permohonan eksekusi	Belum ada permohonan eksekusi	Lakukan pemantauan terhadap pelaksanaan putusan BHT

Pangkalpinang, 8 April 2025

K E T U A,

EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H.

MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 TRIWULAN II

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel	Persentase perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi	35%	33%	94,28%
		Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan	90	98,85	109,83%

NO.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN *PROGRESS* PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.1. Persentase Perkara TUN yang Diselesaikan Tepat Waktu				
1	Mendata, mengidentifikasi dan mengevaluasi perkara lebih dari 5 bulan	Telah dilakukan identifikasi dan evaluasi perkara yang lewat dari 5 bulan.	Tidak ada permasalahan. Nilai kinerja sudah baik.	Terus ditingkatkan dan dipantau agar tidak ada perkara yang melebihi jangka waktu penyelesaian yang telah ditetapkan.

2	Melaporkan dan mencari solusi yang tepat.	Tidak ada laporan yang perlu dilaporkan kepada pimpinan karena tidak ada perkara yang lewat dari 5 bulan.	Tidak ada permasalahan. Nilai kinerja sudah baik.	Terus ditingkatkan dan dipantau agar tidak ada perkara yang melebihi jangka waktu penyelesaian yang telah ditetapkan.
3	Menyelesaikan persidangan sesuai asas persidangan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.	Persidangan telah dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.	Tidak ada permasalahan. Nilai kinerja sudah baik.	Terus ditingkatkan dan dipantau agar tidak ada perkara yang melebihi jangka waktu penyelesaian yang telah ditetapkan.
4	Menunda persidangan dengan waktu relatif singkat (maksimal 14 hari)	Tidak ada sidang yang ditunda lebih dari 14 hari.	Tidak ada permasalahan. Nilai kinerja sudah baik.	Terus ditingkatkan dan dipantau agar tidak ada perkara yang melebihi jangka waktu penyelesaian yang telah ditetapkan.
5	Memutus perkara tidak melebihi 5 bulan	Tidak ada perkara yang lewat dari 5 bulan	Tidak ada permasalahan. Nilai kinerja sudah baik.	Terus ditingkatkan dan dipantau agar tidak ada perkara yang melebihi jangka waktu penyelesaian yang telah ditetapkan.

6	Pelaksanaan minutasi perkara tepat waktu	Minutasi perkara selalu dilakukan tepat waktu	Tidak ada permasalahan. Nilai kinerja sudah baik.	Terus ditingkatkan dan dipantau agar tidak ada perkara yang melebihi jangka waktu penyelesaian yang telah ditetapkan.
7	Mencoret/*highlight* perkara yang sudah melebihi batas waktu teguran	Tidak ada perkara yang melebihi batas waktu.	Tidak ada permasalahan. Nilai kinerja sudah baik.	Terus ditingkatkan dan dipantau agar tidak ada perkara yang melebihi jangka waktu penyelesaian yang telah ditetapkan.
1.2. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi				
1	Menyusun putusan perkara tingkat pertama yang berkualitas	Putusan perkara telah diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Tidak ada permasalahan.	Terus dilakukan monitoring dan pemantauan secara berkala.
2	Mendata perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	Data perkara yang tidak mengajukan banding dipantau dari SIPP.	Tidak ada permasalahan.	Terus dilakukan monitoring dan pemantauan secara berkala.
3	Mendata perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.	Data perkara yang tidak mengajukan kasasi dipantau dari SIPP.	Tidak ada permasalahan.	Terus dilakukan monitoring dan pemantauan secara berkala.

NO.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN *PROGRESS* PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.3. Indeks Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan				
1	Membentuk tim survey kepuasan masyarakat	Tim survey kepuasan telah dibentuk melalui SK Ketua PTUN Pangkalpinang	Tidak ada permasalahan. Nilai indeks kepuasan masyarakat sudah baik.	Terus dilakukan monitoring dan pemantauan secara berkala.
2	Menyusun *job description* tim evaluasi kepuasan masyarakat	Uraian tugas tim telah tersusun	Tidak ada permasalahan. Nilai indeks kepuasan masyarakat sudah baik.	Terus dilakukan monitoring dan pemantauan secara berkala.
3	Menyusun jadwal pelaksanaan dan kebutuhan Survey Kepuasan Masyarakat	Jadwal pelaksanaan survey dilakukan per triwulan	Tidak ada permasalahan. Nilai indeks kepuasan masyarakat sudah baik.	Terus dilakukan monitoring dan pemantauan secara berkala.
4	Melaksanakan SKM	SKM telah dilaksanakan per triwulan	Tidak ada permasalahan. Nilai indeks kepuasan masyarakat sudah baik.	Terus dilakukan monitoring dan pemantauan secara berkala.
5	Mendata dan merekap hasil SKM	Hasil SKM telah berhasil dihimpun	Tidak ada permasalahan. Nilai indeks kepuasan	Terus dilakukan monitoring dan

			masyarakat sudah baik.	pemantauan secara berkala.
6	Menyusun Laporan Hasil SKM	Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat telah selesai disusun	Tidak ada permasalahan. Nilai indeks kepuasan masyarakat sudah baik.	Terus dilakukan monitoring dan pemantauan secara berkala.
7	Melakukan evaluasi berdasarkan hasil SKM dan melakukan tinjauan manajemen	Monev SKM dan tindak lanjut hasil survey telah dibuat	Tidak ada permasalahan. Nilai indeks kepuasan masyarakat sudah baik.	Terus dilakukan monitoring dan pemantauan secara berkala.

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan perkara yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%

NO.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN *PROGRESS* PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1	Menginput tundaan sidang setelah sidang dilaksanakan	Tundaan sidang telah diinput secara tertib.	Tidak ada permasalahan.	Terus ditingkatkan dan dipantau agar tidak ada tundaan sidang yang tidak diinput.
2	Membuat Berita Acara Sidang setelah sidang dilaksanakan	BAS sudah disusun secara tertib setelah persidangan.	Tidak ada permasalahan.	Terus ditingkatkan dan dipantau agar tidak ada BAS yang tidak dibuat.
3	Membuat putusan sebelum sidang pembacaan putusan	Putusan selalu diselesaikan tepat waktu sebelum pembacaan putusan	Tidak ada permasalahan.	Terus ditingkatkan dan dipantau agar tidak ada putusan yang lambat dibuat.
4	Menginput amar putusan dan	Amar putusan telah diinput dengan	Tidak ada permasalahan.	Terus ditingkatkan dan

	tanggal putusan di SIPP maksimal 1 hari setelah sidang putusan	tertib ke SIPP.		dipantau amar putusan yang lambat diinput ke SIPP.
5	Mengunggah salinan putusan ke SIPP (e-doc)	Salinan putusan telah diunggah dengan tertib ke SIPP.	Tidak ada permasalahan.	Terus ditingkatkan dan dipantau agar tidak ada salinan putusan perkara yang disampaikan melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan.
6	Mengirimkan Salinan Putusan kepada Para Pihak paling lambat 14 hari, dan selanjutnya menginput tanggal pengiriman salinan putusan ke SIPP.	Salinan putusan selalu dikirimkan kepada para pihak sebelum tenggat waktu 14 hari.	Tidak ada permasalahan.	Terus ditingkatkan dan dipantau agar tidak ada salinan putusan perkara yang disampaikan melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan.
7	Melakukan evaluasi ketepatan waktu penyampaian salinan putusan	Penyampaian salinan putusan selalu dilakukan tepat waktu	Tidak ada permasalahan.	Terus ditingkatkan dan dipantau agar tidak ada salinan putusan perkara yang disampaikan melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan.

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%	N/A	N/A
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%

NO.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN *PROGRESS* PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
3.1. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan				
1	Mengumumkan program bantuan pembebasan biaya perkara melalui website, media sosial, pamflet, dan melalui Posbankum.	Program pembebasan biaya perkara/prodeo telah dipublikasikan ke website, media sosial, pamflet dan juga melalui Posbakum.	NIHIL	Tingkatkan layanan Posbakum untuk lebih aktif menjangkau masyarakat.
2	Pelaksanaan penyelesaian perkara melalui pembebasan biaya perkara (prodeo).	Belum ada permohonan perkara secara prodeo yang masuk	Belum ada pendaftaran perkara prodeo	Tingkatkan layanan Posbakum untuk lebih aktif menjangkau masyarakat.
3	Menyusun laporan perkara prodeo yang diselesaikan.	Laporan perkara prodeo tidak dapat disusun karena tidak ada permohonan perkara secara prodeo yang masuk.	Belum ada pendaftaran perkara prodeo	Tingkatkan layanan Posbakum untuk lebih aktif menjangkau masyarakat.

4	Melakukan evaluasi dan tindak lanjut atas laporan pelaksanaan penyelesaian perkara melalui pembebasan biaya perkara (prodeo).	Belum ada pendaftaran perkara prodeo	Belum ada pendaftaran perkara prodeo	Tingkatkan layanan Posbakum untuk lebih aktif menjangkau masyarakat.
3.2. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)				
1	Membentuk tim seleksi pemilihan Pos Bantuan Hukum	Tim seleksi pemilihan Pos Bantuan Hukum telah dibentuk pada Desember 2024.	Tidak ada permasalahan.	NIHIL
2	Mengadakan MoU dengan Pos Bantuan Hukum terpilih.	MoU dengan Pos Bantuan Hukum telah dilaksanakan di Bulan Januari 2025	Tidak ada permasalahan.	NIHIL
3	Pelaksanaan jam layanan Posbakum sesuai kontrak.	Jam layanan Posbakum telah dilaksanakan sesuai dengan kontrak.	Tidak ada permasalahan.	NIHIL
4	Menyusun Laporan Posbakum.	Laporan Posbakum telah dibuat tiap bulannya.	Tidak ada permasalahan.	NIHIL
5	Melakukan evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan pemberian layanan bantuan hukum melalui Posbakum	Monev Posbakum telah dilaksanakan per triwulan.	Tidak ada permasalahan.	NIHIL

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100%	N/A	N/A

NO.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN *PROGRESS* PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1	Mendata putusan yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap	Putusan BHT sudah terdata	Belum ada permohonan eksekusi	Lakukan pemantauan terhadap pelaksanaan putusan BHT
2	Menerima permohonan eksekusi	Belum ada permohonan eksekusi	Belum ada permohonan eksekusi	Lakukan pemantauan terhadap pelaksanaan putusan BHT
3	Menindaklanjuti permohonan eksekusi	Belum ada permohonan eksekusi yang dapat ditindaklanjuti	Belum ada permohonan eksekusi	Lakukan pemantauan terhadap pelaksanaan putusan BHT
4	Menyusun Laporan Pelaksanaan Eksekusi	Belum ada permohonan eksekusi sehingga Laporan Pelaksanaan Eksekusi belum dapat dibuat.	Belum ada permohonan eksekusi	Lakukan pemantauan terhadap pelaksanaan putusan BHT
5	Melakukan evaluasi dan tindak lanjut atas laporan pelaksanaan eksekusi.	Belum ada permohonan eksekusi	Belum ada permohonan eksekusi	Lakukan pemantauan terhadap pelaksanaan putusan BHT

Pangkalpinang, 3 Juli 2025

K E T U A,

EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H.

MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 TRIWULAN III

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel	Persentase perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi	35%	40%	114,29%
		Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan	90	97,27	108,07%

NO.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN *PROGRESS* PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.1. Persentase Perkara TUN yang Diselesaikan Tepat Waktu				
1	Mendata, mengidentifikasi dan mengevaluasi perkara lebih dari 5 bulan	Telah dilakukan identifikasi dan evaluasi perkara yang lewat dari 5 bulan.	Tidak ada permasalahan. Nilai kinerja sudah baik.	Terus ditingkatkan dan dipantau agar tidak ada perkara yang melebihi jangka waktu penyelesaian yang telah ditetapkan.

2	Melaporkan dan mencari solusi yang tepat.	Tidak ada laporan yang perlu dilaporkan kepada pimpinan karena tidak ada perkara yang lewat dari 5 bulan.	Tidak ada permasalahan. Nilai kinerja sudah baik.	Terus ditingkatkan dan dipantau agar tidak ada perkara yang melebihi jangka waktu penyelesaian yang telah ditetapkan.
3	Menyelesaikan persidangan sesuai asas persidangan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.	Persidangan telah dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.	Tidak ada permasalahan. Nilai kinerja sudah baik.	Terus ditingkatkan dan dipantau agar tidak ada perkara yang melebihi jangka waktu penyelesaian yang telah ditetapkan.
4	Menunda persidangan dengan waktu relatif singkat (maksimal 14 hari)	Tidak ada sidang yang ditunda lebih dari 14 hari.	Tidak ada permasalahan. Nilai kinerja sudah baik.	Terus ditingkatkan dan dipantau agar tidak ada perkara yang melebihi jangka waktu penyelesaian yang telah ditetapkan.
5	Memutus perkara tidak melebihi 5 bulan	Tidak ada perkara yang lewat dari 5 bulan	Tidak ada permasalahan. Nilai kinerja sudah baik.	Terus ditingkatkan dan dipantau agar tidak ada perkara yang melebihi jangka waktu penyelesaian yang telah ditetapkan.

6	Pelaksanaan minutasi perkara tepat waktu	Minutasi perkara selalu dilakukan tepat waktu	Tidak ada permasalahan. Nilai kinerja sudah baik.	Terus ditingkatkan dan dipantau agar tidak ada perkara yang melebihi jangka waktu penyelesaian yang telah ditetapkan.
7	Mencoret/*highlight* perkara yang sudah melebihi batas waktu teguran	Tidak ada perkara yang melebihi batas waktu.	Tidak ada permasalahan. Nilai kinerja sudah baik.	Terus ditingkatkan dan dipantau agar tidak ada perkara yang melebihi jangka waktu penyelesaian yang telah ditetapkan.
1.2. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi				
1	Menyusun putusan perkara tingkat pertama yang berkualitas	Putusan perkara telah diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Tidak ada permasalahan.	Terus dilakukan monitoring dan pemantauan secara berkala.
2	Mendata perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	Data perkara yang tidak mengajukan banding dipantau dari SIPP.	Tidak ada permasalahan.	Terus dilakukan monitoring dan pemantauan secara berkala.
3	Mendata perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.	Data perkara yang tidak mengajukan kasasi dipantau dari SIPP.	Tidak ada permasalahan.	Terus dilakukan monitoring dan pemantauan secara berkala.

NO.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN *PROGRESS* PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.3. Indeks Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan				
1	Membentuk tim survey kepuasan masyarakat	Tim survey kepuasan telah dibentuk melalui SK Ketua PTUN Pangkalpinang	Tidak ada permasalahan. Nilai indeks kepuasan masyarakat sudah baik.	Terus dilakukan monitoring dan pemantauan secara berkala.
2	Menyusun *job description* tim evaluasi kepuasan masyarakat	Uraian tugas tim telah tersusun	Tidak ada permasalahan. Nilai indeks kepuasan masyarakat sudah baik.	Terus dilakukan monitoring dan pemantauan secara berkala.
3	Menyusun jadwal pelaksanaan dan kebutuhan Survey Kepuasan Masyarakat	Jadwal pelaksanaan survey dilakukan per triwulan	Tidak ada permasalahan. Nilai indeks kepuasan masyarakat sudah baik.	Terus dilakukan monitoring dan pemantauan secara berkala.
4	Melaksanakan SKM	SKM telah dilaksanakan per triwulan	Tidak ada permasalahan. Nilai indeks kepuasan masyarakat sudah baik.	Terus dilakukan monitoring dan pemantauan secara berkala.
5	Mendata dan merekap hasil SKM	Hasil SKM telah berhasil dihimpun	Tidak ada permasalahan. Nilai indeks kepuasan	Terus dilakukan monitoring dan

			masyarakat sudah baik.	pemantauan secara berkala.
6	Menyusun Laporan Hasil SKM	Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat telah selesai disusun	Tidak ada permasalahan. Nilai indeks kepuasan masyarakat sudah baik.	Terus dilakukan monitoring dan pemantauan secara berkala.
7	Melakukan evaluasi berdasarkan hasil SKM dan melakukan tinjauan manajemen	Monev SKM dan tindak lanjut hasil survey telah dibuat	Tidak ada permasalahan. Nilai indeks kepuasan masyarakat sudah baik.	Terus dilakukan monitoring dan pemantauan secara berkala.

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan perkara yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%

NO.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN *PROGRESS* PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1	Menginput tundaan sidang setelah sidang dilaksanakan	Tundaan sidang telah diinput secara tertib.	Tidak ada permasalahan.	Terus ditingkatkan dan dipantau agar tidak ada tundaan sidang yang tidak diinput.
2	Membuat Berita Acara Sidang setelah sidang dilaksanakan	BAS sudah disusun secara tertib setelah persidangan.	Tidak ada permasalahan.	Terus ditingkatkan dan dipantau agar tidak ada BAS yang tidak dibuat.
3	Membuat putusan sebelum sidang pembacaan putusan	Putusan selalu diselesaikan tepat waktu sebelum pembacaan putusan	Tidak ada permasalahan.	Terus ditingkatkan dan dipantau agar tidak ada putusan yang lambat dibuat.
4	Menginput amar putusan dan	Amar putusan telah diinput dengan	Tidak ada permasalahan.	Terus ditingkatkan dan

	tanggal putusan di SIPP maksimal 1 hari setelah sidang putusan	tertib ke SIPP.		dipantau amar putusan yang lambat diinput ke SIPP.
5	Mengunggah salinan putusan ke SIPP (e-doc)	Salinan putusan telah diunggah dengan tertib ke SIPP.	Tidak ada permasalahan.	Terus ditingkatkan dan dipantau agar tidak ada salinan putusan perkara yang disampaikan melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan.
6	Mengirimkan Salinan Putusan kepada Para Pihak paling lambat 14 hari, dan selanjutnya menginput tanggal pengiriman salinan putusan ke SIPP.	Salinan putusan selalu dikirimkan kepada para pihak sebelum tenggat waktu 14 hari.	Tidak ada permasalahan.	Terus ditingkatkan dan dipantau agar tidak ada salinan putusan perkara yang disampaikan melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan.
7	Melakukan evaluasi ketepatan waktu penyampaian salinan putusan	Penyampaian salinan putusan selalu dilakukan tepat waktu	Tidak ada permasalahan.	Terus ditingkatkan dan dipantau agar tidak ada salinan putusan perkara yang disampaikan melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan.

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%	N/A	N/A
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%

NO.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN *PROGRESS* PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
3.1. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan				
1	Mengumumkan program bantuan pembebasan biaya perkara melalui website, media sosial, pamflet, dan melalui Posbankum.	Program pembebasan biaya perkara/prodeo telah dipublikasikan ke website, media sosial, pamflet dan juga melalui Posbakum.	Belum ada pendaftaran perkara prodeo sehingga indikator kinerja tidak tercapai	Telah diusulkan permohonan revisi anggaran prodeo untuk dialihkan ke PAGU Pengamanan Sidang
2	Pelaksanaan penyelesaian perkara melalui pembebasan biaya perkara (prodeo).	Belum ada permohonan perkara secara prodeo yang masuk		
3	Menyusun laporan perkara prodeo yang diselesaikan.	Laporan perkara prodeo tidak dapat disusun karena tidak ada permohonan perkara secara prodeo yang masuk.		

4	Melakukan evaluasi dan tindak lanjut atas laporan pelaksanaan penyelesaian perkara melalui pembebasan biaya perkara (prodeo).	Belum ada pendaftaran perkara prodeo	Belum ada pendaftaran perkara prodeo sehingga indikator kinerja tidak tercapai	Telah diusulkan permohonan revisi anggaran prodeo untuk dialihkan ke PAGU Pengamanan Sidang
3.2. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)				
1	Membentuk tim seleksi pemilihan Pos Bantuan Hukum	Tim seleksi pemilihan Pos Bantuan Hukum telah dibentuk pada Desember 2024.	Tidak ada permasalahan.	NIHIL
2	Mengadakan MoU dengan Pos Bantuan Hukum terpilih.	MoU dengan Pos Bantuan Hukum telah dilaksanakan di Bulan Januari 2025	Tidak ada permasalahan.	NIHIL
3	Pelaksanaan jam layanan Posbakum sesuai kontrak.	Jam layanan Posbakum telah dilaksanakan sesuai dengan kontrak.	Tidak ada permasalahan.	NIHIL
4	Menyusun Laporan Posbakum.	Laporan Posbakum telah dibuat tiap bulannya.	Tidak ada permasalahan.	NIHIL
5	Melakukan evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan pemberian layanan bantuan hukum melalui Posbakum	Monev Posbakum telah dilaksanakan per triwulan.	Tidak ada permasalahan.	NIHIL

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100%	100%	100%

NO.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN *PROGRESS* PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1	Mendata putusan yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap	Putusan BHT sudah terdata	NIHIL	NIHIL
2	Menerima permohonan eksekusi	Permohonan eksekusi telah diterima	NIHIL	NIHIL
3	Menindaklanjuti permohonan eksekusi	Permohonan eksekusi telah ditindaklanjuti	NIHIL	NIHIL
4	Menyusun Laporan Pelaksanaan Eksekusi	Telah ditetapkan Penetapan Ketua sebagai tindak lanjut permohonan eksekusi	NIHIL	NIHIL
5	Melakukan evaluasi dan tindak lanjut atas laporan pelaksanaan eksekusi.	Evaluasi pelaksanaan eksekusi telah dipantau per triwulan	NIHIL	NIHIL

Pangkalpinang, 6 Oktober 2025

K E T U A,

MOHAMAD SYAUQIE, S.H., M.H.

LAMPIRAN XVIII

REVISI MONEV RENCANA AKSI BERKALA

REVISI MONITORING DAN EVALUASI ATAS REVISI RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

TRIWULAN I

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu	100%	100%	100%
		Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak	100%	100%	100%
		Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak	100%	100%	100%
		Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan	100%	100%	100%
		Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara	100%	N/A	N/A
		Persentase Perkara Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court	100%	100%	100%

NO.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN *PROGRESS* PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.1. Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu				
1	Mendata, mengidentifikasi dan mengevaluasi perkara lebih dari 5 bulan	Telah dilakukan identifikasi dan evaluasi perkara yang lewat dari 5 bulan.	Tidak ada permasalahan. Nilai kinerja sudah baik.	Terus ditingkatkan dan dipantau agar tidak ada perkara yang melebihi jangka waktu penyelesaian yang telah ditetapkan.
2	Melaporkan dan mencari solusi yang tepat.	Tidak ada laporan yang perlu dilaporkan kepada pimpinan karena tidak ada perkara yang lewat dari 5 bulan.	Tidak ada permasalahan. Nilai kinerja sudah baik.	Terus ditingkatkan dan dipantau agar tidak ada perkara yang melebihi jangka waktu penyelesaian yang telah ditetapkan.
3	Menyelesaikan persidangan sesuai asas persidangan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.	Persidangan telah dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.	Tidak ada permasalahan. Nilai kinerja sudah baik.	Terus ditingkatkan dan dipantau agar tidak ada perkara yang melebihi jangka waktu penyelesaian yang telah ditetapkan.
4	Menunda persidangan dengan waktu relatif singkat (maksimal 14	Tidak ada sidang yang ditunda lebih dari 14 hari.	Tidak ada permasalahan. Nilai kinerja sudah baik.	Terus ditingkatkan dan dipantau agar tidak ada

	hari)			perkara yang melebihi jangka waktu penyelesaian yang telah ditetapkan.
5	Memutus perkara tidak melebihi 5 bulan	Tidak ada perkara yang lewat dari 5 bulan	Tidak ada permasalahan. Nilai kinerja sudah baik.	Terus ditingkatkan dan dipantau agar tidak ada perkara yang melebihi jangka waktu penyelesaian yang telah ditetapkan.
6	Pelaksanaan minutasi perkara tepat waktu	Minutasi perkara selalu dilakukan tepat waktu	Tidak ada permasalahan. Nilai kinerja sudah baik.	Terus ditingkatkan dan dipantau agar tidak ada perkara yang melebihi jangka waktu penyelesaian yang telah ditetapkan.
7	Mencoret/highlight perkara yang sudah melebihi batas waktu teguran	Tidak ada perkara yang melebihi batas waktu.	Tidak ada permasalahan. Nilai kinerja sudah baik.	Terus ditingkatkan dan dipantau agar tidak ada perkara yang melebihi jangka waktu penyelesaian yang telah ditetapkan.

NO.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN *PROGRESS* PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.2. Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak				
1	Menginput tundaan sidang setelah sidang dilaksanakan	Tundaan sidang telah diinput secara tertib.	Tidak ada permasalahan.	Terus ditingkatkan dan dipantau agar tidak ada tundaan sidang yang tidak diinput.
2	Membuat Berita Acara Sidang setelah sidang dilaksanakan	BAS sudah disusun secara tertib setelah persidangan.	Tidak ada permasalahan.	Terus ditingkatkan dan dipantau agar tidak ada BAS yang tidak dibuat.
3	Membuat putusan sebelum sidang pembacaan putusan	Putusan selalu diselesaikan tepat waktu sebelum pembacaan putusan	Tidak ada permasalahan.	Terus ditingkatkan dan dipantau agar tidak ada putusan yang lambat dibuat.
4	Menginput amar putusan dan tanggal putusan di SIPP maksimal 1 hari setelah sidang putusan	Amar putusan telah diinput dengan tertib ke SIPP.	Tidak ada permasalahan.	Terus ditingkatkan dan dipantau amar putusan yang lambat diinput ke SIPP.
5	Mengunggah salinan putusan ke SIPP (e-doc)	Salinan putusan telah diunggah dengan tertib ke SIPP.	Tidak ada permasalahan.	Terus ditingkatkan dan dipantau agar tidak ada salinan putusan perkara yang disampaikan melebihi

				jangka waktu yang telah ditetapkan.
6	Mengirimkan Salinan Putusan kepada Para Pihak paling lambat 14 hari, dan selanjutnya menginput tanggal pengiriman salinan putusan ke SIPP.	Salinan putusan selalu dikirimkan kepada para pihak sebelum tenggat waktu 14 hari.	Tidak ada permasalahan.	Terus ditingkatkan dan dipantau agar tidak ada salinan putusan perkara yang disampaikan melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan.
7	Melakukan evaluasi ketepatan waktu penyampaian salinan putusan	Penyampaian salinan putusan selalu dilakukan tepat waktu	Tidak ada permasalahan.	Terus ditingkatkan dan dipantau agar tidak ada salinan putusan perkara yang disampaikan melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan.
1.3.Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak				
1	Menerima salinan putusan banding/kasasi/PK dari pengadilan tingkat banding / MA	Salinan putusan banding, kasasi, dan PK diterima	Tidak ada permasalahan	NIHIL
2	Mencatat tanggal diterimanya putusan	Catatan tanggal penerimaan putusan tercatat secara elektronik di SIPP	Tidak ada permasalahan	NIHIL
3	Menyiapkan petikan/amar putusan	Petikan/Amar putusan telah siap	Tidak ada permasalahan	NIHIL

	dan memastikan identitas perkara dan pihak benar	untuk diberitahukan kepada para pihak		
4	Mengirimkan pemberitahuan petikan/amar putusan melalui jurusita/jurusita pengganti atau email sesuai ketentuan	Petikan/amar putusan yang telah disampaikan kepada para pihak	Tidak ada permasalahan	NIHIL
5	Menginput hasil pemberitahuan ke SIPP dan mengunggah bukti pengiriman	Pemberitahuan petikan/amar telah tercatat di SIPP	Tidak ada permasalahan	NIHIL
6	Melakukan evaluasi ketepatan waktu penyampaian petikan/amar putusan kepada para pihak	Evaluasi Penyampaian Petikan/Amar Putusan telah dilaksanakan melalui pengukuran kinerja bulanan	Tidak ada permasalahan	NIHIL
1.4. Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan				
1	Memeriksa kelengkapan putusan	Putusan telah lengkap	Terdapat kendala proses sinkronisasi upload putusan ke SIPP yang menyebabkan beberapa putusan terlambat masuk ke Direktori Putusan	Telah diatasi dengan mengunggah putusan secara manual ke Direktori Putusan melalui admin Direktori Putusan. Ke depannya, Panitera akan selalu melakukan monev terhadap
2	Minutasi putusan	Putusan Telah Diminutasi		
3	Mengunggah putusan ke Direktori Putusan MA	Unggahan Putusan telah dilaksanakan melalui sinkroniasasi SIPP ke Direktori Putusan		
4	Memeriksa status unggahan dan memastikan unggahan telah	Beberapa Unggahan Putusan ke Direktori Putusan gagal *by system*		

	berhasil masuk ke Direktori Putusan MA			penginputan putusan ke Direktori Putusan.
5	Melakukan evaluasi ketepatan waktu pengunggahan putusan ke Direktori Putusan MA	Belum ada monev unggahan putusan ke Direktori Putusan		
1.5. Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara				
1	Mendata putusan yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap	Putusan BHT sudah terdata	Belum ada permohonan eksekusi	Lakukan pemantauan terhadap pelaksanaan putusan BHT
2	Menerima permohonan eksekusi	Belum ada permohonan eksekusi	Belum ada permohonan eksekusi	Lakukan pemantauan terhadap pelaksanaan putusan BHT
3	Menindaklanjuti permohonan eksekusi	Belum ada permohonan eksekusi yang dapat ditindaklanjuti	Belum ada permohonan eksekusi	Lakukan pemantauan terhadap pelaksanaan putusan BHT
4	Menyusun Laporan Pelaksanaan Eksekusi	Belum ada permohonan eksekusi sehingga Laporan Pelaksanaan Eksekusi belum dapat dibuat.	Belum ada permohonan eksekusi	Lakukan pemantauan terhadap pelaksanaan putusan BHT
5	Melakukan evaluasi dan tindak lanjut atas laporan pelaksanaan eksekusi.	Belum ada permohonan eksekusi	Belum ada permohonan eksekusi	Lakukan pemantauan terhadap pelaksanaan putusan BHT

NO.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN *PROGRESS* PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.6. Persentase Perkara Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court				
1	Menyediakan panduan e-Court di PTSP	Panduan e-Court Telah Tersedia di PTSP	Tidak ada permasalahan	NIHIL
2	Membantu pencari keadilan dalam registrasi akun e-Court dan penggunaan e-Filing dan e-Payment	Akun e-Court Telah Teregister	Tidak ada permasalahan	NIHIL
3	Verifikasi Data e-Court	Data e-Court Telah Terverifikasi	Tidak ada permasalahan	NIHIL
4	Melakukan evaluasi atas penggunaan e-Court	Evaluasi Penggunaan e-Court telah dilaksanakan	Tidak ada permasalahan	NIHIL

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	3,78	3,84	101,59%

NO.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN *PROGRESS* PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1	Membentuk tim survey kepuasan masyarakat	Tim survey kepuasan telah dibentuk melalui SK Ketua PTUN Pangkalpinang	Tidak ada permasalahan. Nilai indeks kepuasan masyarakat sudah baik.	Terus dilakukan monitoring dan pemantauan secara berkala.
2	Menyusun *job description* tim evaluasi kepuasan masyarakat	Uraian tugas tim telah tersusun	Tidak ada permasalahan. Nilai indeks kepuasan masyarakat sudah baik.	Terus dilakukan monitoring dan pemantauan secara berkala.
3	Menyusun jadwal pelaksanaan dan kebutuhan Survey Kepuasan Masyarakat	Jadwal pelaksanaan survey dilakukan per triwulan	Tidak ada permasalahan. Nilai indeks kepuasan masyarakat sudah baik.	Terus dilakukan monitoring dan pemantauan secara berkala.
4	Melaksanakan SKM	SKM telah dilaksanakan per	Tidak ada permasalahan.	Terus dilakukan

		triwulan	Nilai indeks kepuasan masyarakat sudah baik.	monitoring dan pemantauan secara berkala.
5	Mendata dan merekap hasil SKM	Hasil SKM telah berhasil dihimpun	Tidak ada permasalahan. Nilai indeks kepuasan masyarakat sudah baik.	Terus dilakukan monitoring dan pemantauan secara berkala.
6	Menyusun Laporan Hasil SKM	Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat telah selesai disusun	Tidak ada permasalahan. Nilai indeks kepuasan masyarakat sudah baik.	Terus dilakukan monitoring dan pemantauan secara berkala.
7	Melakukan evaluasi berdasarkan hasil SKM dan melakukan tinjauan manajemen	Monev SKM dan tindak lanjut hasil survey telah dibuat	Tidak ada permasalahan. Nilai indeks kepuasan masyarakat sudah baik.	Terus dilakukan monitoring dan pemantauan secara berkala.

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	85	N/A	N/A
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	95	100	105,26%
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	95	N/A	N/A
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	N/A	N/A

NO.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN *PROGRESS* PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan				
1	Memperbaharui data pendidikan ASN sesuai dengan data pendidikan terakhir	Telah diperbaharuinya data pendidikan ASN sesuai dengan data pendidikan terkahir	Tidak ada permasalahan	NIHIL
2	Meningkatkan kompetensi ASN sesuai tugas dan fungsi dengan memfasilitasi keikutsertaan ASN dalam pendidikan dan pelatihan	ASN telah mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi	Tidak ada permasalahan	NIHIL
3	Memantau SKP seluruh ASN dan	SKP Triwulan I telah diinput tepat	Tidak ada permasalahan	NIHIL

	memastikan seluruh SKP telah diinput dan dinilai tepat waktu	waktu		
4	Menjaga kepatuhan ASN terhadap aturan yang berlaku dengan memonitoring kehadiran ASN dan mencatat pelanggaran disiplin (jika ada).	Rekap Kehadiran ASN dan Laporan Disipin Hakim telah dibuat per bulan	Tidak ada permasalahan	NIHIL
5	Memonitoring dan mengevaluasi nilai IP ASN Satker	Nilai IP ASN Tahun 2025 belum tersedia	Tidak ada permasalahan	NIHIL
3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan				
1	Melakukan revisi DIPA sesuai dengan kebutuhan satker dan peraturan.	Revisi DIPA telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan satker dan peraturan	Tidak ada permasalahan	NIHIL
2	Menyusun RPD (Rencana Penarikan Dana) secara realistis dan sesuai kebutuhan riil per triwulan untuk meminimalkan Deviasi Hal. III DIPA	RPD telah disesuaikan dalam Revisi Hal III. DIPA yang diajukan per triwulan	Tidak ada permasalahan.	NIHIL
3	Melaksanakan penyerapan anggaran sesuai dengan target per triwulan untuk masing-masing jenis belanja.	Telah dilaksanakan penyerapan anggaran sesuai target per triwulan untuk masing-masing jenis belanja	Tidak ada permasalahan	NIHIL

4	Menyampaikan data kontrak secara tepat waktu dan sesuai dengan peraturan ke KPPN Pangkalpinang.	Data Kontrak Telah Disampaikan Tepat Waktu ke KPPN	Tidak ada permasalahan	NIHIL
5	Melaksanakan pembayaran tagihan tepat waktu	SPM Pembayaran Tagihan Telah Diajukan Tepat Waktu	Tidak ada permasalahan	NIHIL
6	Melaksanakan pengelolaan UP dan TUP secara optimal	Pengelolaan UP Telah Diajukan Secara Optimal dan Tepat Waktu	Tidak ada permasalahan	NIHIL
7	Menginput Capaian Output Tepat Waktu Setiap Bulannya.	Laporan Capaian Output Telah Diinput Tepat Waktu Setiap Bulannya	Tidak ada permasalahan	NIHIL
8	Melakukan monitoring dan evaluasi nilai IKPA secara berkala per triwulan.	Rapat Monev IKPA Per Triwulan Telah Dilaksanakan	Tidak ada permasalahan	NIHIL
3.3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran				
1	Menyusun perencanaan anggaran berbasis kebutuhan dan output riil dengan mempertimbangkan Standar Biaya Masukan (SBM) dan Standar Biaya Keluaran (SBK)	RKAKL PTUN Pangkalpinang telah disusun berbasis kebutuhan dan output riil dengan mempertimbangkan Standar Biaya Masukan (SBM) dan Standar Biaya Keluaran (SBK)	Tidak ada permasalahan	NIHIL
2	Melakukan penginputan target	Target Telah Diinput ke Aplikasi	Tidak ada permasalahan	NIHIL

	tahunan ke dalam aplikasi SAKTI	SAKTI		
3	Menginput data capaian output setiap bulan	Laporan Capaian Output Telah Diinput Tepat Waktu Setiap Bulannya	Tidak ada permasalahan	NIHIL
4	Melakukan monitoring terhadap nilai NKPA melalui aplikasi Monev Kemenkeu	Data NKPA Belum Tersedia	Tidak ada permasalahan	NIHIL
3.4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan				
1	Melakukan Penatausahaan Barang Milik Negara Sesuai Peraturan yang Berlaku	BMN Telah Ditatausahakan Sesuai Peraturan yang Berlaku	Tidak ada permasalahan	NIHIL
2	Realisasi PNBP dari pengelolaan aset	Belum Ada Realisasi PNBP dari Pengelolaan Aset	Tidak ada permasalahan	NIHIL
3	Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN	Belum masuk periode pengusulan RKBMN	Tidak ada permasalahan	NIHIL
4	Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN	BMN Telah Dimanfaatkan dengan Baik	Tidak ada permasalahan	NIHIL
5	Tindak lanjut BMN yang Dihentikan Penggunaannya	Tidak ada BMN yang Dihentikan Penggunaannya	Tidak ada permasalahan	NIHIL
6	BMN memiliki dokumen	BMN Telah Memiliki Dokumen	Tidak ada permasalahan	NIHIL

	kepemilikan	Kepemilikan		
7	Penggunaan BMN yang sesuai ketentuan	BMN Telah Digunakan Sesuai Ketentuan	Tidak ada permasalahan	NIHIL

Pangkalpinang, 3 November 2025

K E T U A,

MOHAMAD SYAUQIE, S.H., M.H.

REVISI MONITORING DAN EVALUASI ATAS REVISI RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

TRIWULAN II

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu	100%	100%	100%
		Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak	100%	100%	100%
		Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak	100%	100%	100%
		Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan	100%	100%	100%
		Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara	100%	N/A	N/A
		Persentase Perkara Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court	100%	100%	100%

NO.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN *PROGRESS* PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.1. Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu				
1	Mendata, mengidentifikasi dan mengevaluasi perkara lebih dari 5 bulan	Telah dilakukan identifikasi dan evaluasi perkara yang lewat dari 5 bulan.	Tidak ada permasalahan. Nilai kinerja sudah baik.	Terus ditingkatkan dan dipantau agar tidak ada perkara yang melebihi jangka waktu penyelesaian yang telah ditetapkan.
2	Melaporkan dan mencari solusi yang tepat.	Tidak ada laporan yang perlu dilaporkan kepada pimpinan karena tidak ada perkara yang lewat dari 5 bulan.	Tidak ada permasalahan. Nilai kinerja sudah baik.	Terus ditingkatkan dan dipantau agar tidak ada perkara yang melebihi jangka waktu penyelesaian yang telah ditetapkan.
3	Menyelesaikan persidangan sesuai asas persidangan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.	Persidangan telah dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.	Tidak ada permasalahan. Nilai kinerja sudah baik.	Terus ditingkatkan dan dipantau agar tidak ada perkara yang melebihi jangka waktu penyelesaian yang telah ditetapkan.
4	Menunda persidangan dengan waktu relatif singkat (maksimal 14	Tidak ada sidang yang ditunda lebih dari 14 hari.	Tidak ada permasalahan. Nilai kinerja sudah baik.	Terus ditingkatkan dan dipantau agar tidak ada

	hari)			perkara yang melebihi jangka waktu penyelesaian yang telah ditetapkan.
5	Memutus perkara tidak melebihi 5 bulan	Tidak ada perkara yang lewat dari 5 bulan	Tidak ada permasalahan. Nilai kinerja sudah baik.	Terus ditingkatkan dan dipantau agar tidak ada perkara yang melebihi jangka waktu penyelesaian yang telah ditetapkan.
6	Pelaksanaan minutasi perkara tepat waktu	Minutasi perkara selalu dilakukan tepat waktu	Tidak ada permasalahan. Nilai kinerja sudah baik.	Terus ditingkatkan dan dipantau agar tidak ada perkara yang melebihi jangka waktu penyelesaian yang telah ditetapkan.
7	Mencoret/highlight perkara yang sudah melebihi batas waktu teguran	Tidak ada perkara yang melebihi batas waktu.	Tidak ada permasalahan. Nilai kinerja sudah baik.	Terus ditingkatkan dan dipantau agar tidak ada perkara yang melebihi jangka waktu penyelesaian yang telah ditetapkan.

NO.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN *PROGRESS* PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.2. Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak				
1	Menginput tundaan sidang setelah sidang dilaksanakan	Tundaan sidang telah diinput secara tertib.	Tidak ada permasalahan.	Terus ditingkatkan dan dipantau agar tidak ada tundaan sidang yang tidak diinput.
2	Membuat Berita Acara Sidang setelah sidang dilaksanakan	BAS sudah disusun secara tertib setelah persidangan.	Tidak ada permasalahan.	Terus ditingkatkan dan dipantau agar tidak ada BAS yang tidak dibuat.
3	Membuat putusan sebelum sidang pembacaan putusan	Putusan selalu diselesaikan tepat waktu sebelum pembacaan putusan	Tidak ada permasalahan.	Terus ditingkatkan dan dipantau agar tidak ada putusan yang lambat dibuat.
4	Menginput amar putusan dan tanggal putusan di SIPP maksimal 1 hari setelah sidang putusan	Amar putusan telah diinput dengan tertib ke SIPP.	Tidak ada permasalahan.	Terus ditingkatkan dan dipantau amar putusan yang lambat diinput ke SIPP.
5	Mengunggah salinan putusan ke SIPP (e-doc)	Salinan putusan telah diunggah dengan tertib ke SIPP.	Tidak ada permasalahan.	Terus ditingkatkan dan dipantau agar tidak ada salinan putusan perkara yang disampaikan melebihi

				jangka waktu yang telah ditetapkan.
6	Mengirimkan Salinan Putusan kepada Para Pihak paling lambat 14 hari, dan selanjutnya menginput tanggal pengiriman salinan putusan ke SIPP.	Salinan putusan selalu dikirimkan kepada para pihak sebelum tenggat waktu 14 hari.	Tidak ada permasalahan.	Terus ditingkatkan dan dipantau agar tidak ada salinan putusan perkara yang disampaikan melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan.
7	Melakukan evaluasi ketepatan waktu penyampaian salinan putusan	Penyampaian salinan putusan selalu dilakukan tepat waktu	Tidak ada permasalahan.	Terus ditingkatkan dan dipantau agar tidak ada salinan putusan perkara yang disampaikan melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan.
1.3.Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak				
1	Menerima salinan putusan banding/kasasi/PK dari pengadilan tingkat banding / MA	Salinan putusan banding, kasasi, dan PK diterima	Tidak ada permasalahan	NIHIL
2	Mencatat tanggal diterimanya putusan	Catatan tanggal penerimaan putusan tercatat secara elektronik di SIPP	Tidak ada permasalahan	NIHIL
3	Menyiapkan petikan/amar putusan	Petikan/Amar putusan telah siap	Tidak ada permasalahan	NIHIL

	dan memastikan identitas perkara dan pihak benar	untuk diberitahukan kepada para pihak		
4	Mengirimkan pemberitahuan petikan/amar putusan melalui jurusita/jurusita pengganti atau email sesuai ketentuan	Petikan/amar putusan yang telah disampaikan kepada para pihak	Tidak ada permasalahan	NIHIL
5	Menginput hasil pemberitahuan ke SIPP dan mengunggah bukti pengiriman	Pemberitahuan petikan/amar telah tercatat di SIPP	Tidak ada permasalahan	NIHIL
6	Melakukan evaluasi ketepatan waktu penyampaian petikan/amar putusan kepada para pihak	Evaluasi Penyampaian Petikan/Amar Putusan telah dilaksanakan melalui pengukuran kinerja bulanan	Tidak ada permasalahan	NIHIL
1.4. Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan				
1	Memeriksa kelengkapan putusan	Putusan telah lengkap	Terdapat kendala proses sinkronisasi upload putusan ke SIPP yang menyebabkan beberapa putusan terlambat masuk ke Direktori Putusan	Telah diatasi dengan mengunggah putusan secara manual ke Direktori Putusan melalui admin Direktori Putusan. Ke depannya, Panitera akan selalu melakukan monev terhadap
2	Minutasi putusan	Putusan Telah Diminutasi		
3	Mengunggah putusan ke Direktori Putusan MA	Unggahan Putusan telah dilaksanakan melalui sinkroniasasi SIPP ke Direktori Putusan		
4	Memeriksa status unggahan dan memastikan unggahan telah	Beberapa Unggahan Putusan ke Direktori Putusan gagal *by system*		

	berhasil masuk ke Direktori Putusan MA			penginputan putusan ke Direktori Putusan.
5	Melakukan evaluasi ketepatan waktu pengunggahan putusan ke Direktori Putusan MA	Belum ada monev unggahan putusan ke Direktori Putusan		
1.5. Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara				
1	Mendata putusan yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap	Putusan BHT sudah terdata	Belum ada permohonan eksekusi	Lakukan pemantauan terhadap pelaksanaan putusan BHT
2	Menerima permohonan eksekusi	Belum ada permohonan eksekusi	Belum ada permohonan eksekusi	Lakukan pemantauan terhadap pelaksanaan putusan BHT
3	Menindaklanjuti permohonan eksekusi	Belum ada permohonan eksekusi yang dapat ditindaklanjuti	Belum ada permohonan eksekusi	Lakukan pemantauan terhadap pelaksanaan putusan BHT
4	Menyusun Laporan Pelaksanaan Eksekusi	Belum ada permohonan eksekusi sehingga Laporan Pelaksanaan Eksekusi belum dapat dibuat.	Belum ada permohonan eksekusi	Lakukan pemantauan terhadap pelaksanaan putusan BHT
5	Melakukan evaluasi dan tindak lanjut atas laporan pelaksanaan eksekusi.	Belum ada permohonan eksekusi	Belum ada permohonan eksekusi	Lakukan pemantauan terhadap pelaksanaan putusan BHT

NO.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN *PROGRESS* PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.6. Persentase Perkara Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court				
1	Menyediakan panduan e-Court di PTSP	Panduan e-Court Telah Tersedia di PTSP	Tidak ada permasalahan	NIHIL
2	Membantu pencari keadilan dalam registrasi akun e-Court dan penggunaan e-Filing dan e-Payment	Akun e-Court Telah Teregister	Tidak ada permasalahan	NIHIL
3	Verifikasi Data e-Court	Data e-Court Telah Terverifikasi	Tidak ada permasalahan	NIHIL
4	Melakukan evaluasi atas penggunaan e-Court	Evaluasi Penggunaan e-Court telah dilaksanakan	Tidak ada permasalahan	NIHIL

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	3,78	3,92	103,7%

NO.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN *PROGRESS* PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1	Membentuk tim survey kepuasan masyarakat	Tim survey kepuasan telah dibentuk melalui SK Ketua PTUN Pangkalpinang	Tidak ada permasalahan. Nilai indeks kepuasan masyarakat sudah baik.	Terus dilakukan monitoring dan pemantauan secara berkala.
2	Menyusun *job description* tim evaluasi kepuasan masyarakat	Uraian tugas tim telah tersusun	Tidak ada permasalahan. Nilai indeks kepuasan masyarakat sudah baik.	Terus dilakukan monitoring dan pemantauan secara berkala.
3	Menyusun jadwal pelaksanaan dan kebutuhan Survey Kepuasan Masyarakat	Jadwal pelaksanaan survey dilakukan per triwulan	Tidak ada permasalahan. Nilai indeks kepuasan masyarakat sudah baik.	Terus dilakukan monitoring dan pemantauan secara berkala.
4	Melaksanakan SKM	SKM telah dilaksanakan per	Tidak ada permasalahan.	Terus dilakukan

		triwulan	Nilai indeks kepuasan masyarakat sudah baik.	monitoring dan pemantauan secara berkala.
5	Mendata dan merekap hasil SKM	Hasil SKM telah berhasil dihimpun	Tidak ada permasalahan. Nilai indeks kepuasan masyarakat sudah baik.	Terus dilakukan monitoring dan pemantauan secara berkala.
6	Menyusun Laporan Hasil SKM	Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat telah selesai disusun	Tidak ada permasalahan. Nilai indeks kepuasan masyarakat sudah baik.	Terus dilakukan monitoring dan pemantauan secara berkala.
7	Melakukan evaluasi berdasarkan hasil SKM dan melakukan tinjauan manajemen	Monev SKM dan tindak lanjut hasil survey telah dibuat	Tidak ada permasalahan. Nilai indeks kepuasan masyarakat sudah baik.	Terus dilakukan monitoring dan pemantauan secara berkala.

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	85	N/A	N/A
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	95	98,2	103,37%
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	95	N/A	N/A
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	N/A	N/A

NO.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN *PROGRESS* PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan				
1	Memperbaharui data pendidikan ASN sesuai dengan data pendidikan terakhir	Telah diperbaharuinya data pendidikan ASN sesuai dengan data pendidikan terkahir	Tidak ada permasalahan	NIHIL
2	Meningkatkan kompetensi ASN sesuai tugas dan fungsi dengan memfasilitasi keikutsertaan ASN dalam pendidikan dan pelatihan	ASN telah mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi	Tidak ada permasalahan	NIHIL
3	Memantau SKP seluruh ASN dan	SKP Triwulan II telah diinput tepat	Tidak ada permasalahan	NIHIL

	memastikan seluruh SKP telah diinput dan dinilai tepat waktu	waktu		
4	Menjaga kepatuhan ASN terhadap aturan yang berlaku dengan memonitoring kehadiran ASN dan mencatat pelanggaran disiplin (jika ada).	Rekap Kehadiran ASN dan Laporan Disipin Hakim telah dibuat per bulan	Tidak ada permasalahan	NIHIL
5	Memonitoring dan mengevaluasi nilai IP ASN Satker	Nilai IP ASN Tahun 2025 belum tersedia	Tidak ada permasalahan	NIHIL
3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan				
1	Melakukan revisi DIPA sesuai dengan kebutuhan satker dan peraturan.	Revisi DIPA telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan satker dan peraturan	Tidak ada permasalahan	NIHIL
2	Menyusun RPD (Rencana Penarikan Dana) secara realistis dan sesuai kebutuhan riil per triwulan untuk meminimalkan Deviasi Hal. III DIPA	RPD telah disesuaikan dalam Revisi Hal III. DIPA yang diajukan per triwulan	Tidak ada permasalahan.	NIHIL
3	Melaksanakan penyerapan anggaran sesuai dengan target per triwulan untuk masing-masing jenis belanja.	Telah dilaksanakan penyerapan anggaran sesuai target per triwulan untuk masing-masing jenis belanja	Tidak ada permasalahan	NIHIL

4	Menyampaikan data kontrak secara tepat waktu dan sesuai dengan peraturan ke KPPN Pangkalpinang.	Data Kontrak Telah Disampaikan Tepat Waktu ke KPPN	Tidak ada permasalahan	NIHIL
5	Melaksanakan pembayaran tagihan tepat waktu	SPM Pembayaran Tagihan Telah Diajukan Tepat Waktu	Tidak ada permasalahan	NIHIL
6	Melaksanakan pengelolaan UP dan TUP secara optimal	Pengelolaan UP Telah Diajukan Secara Optimal dan Tepat Waktu	Tidak ada permasalahan	NIHIL
7	Menginput Capaian Output Tepat Waktu Setiap Bulannya.	Laporan Capaian Output Telah Diinput Tepat Waktu Setiap Bulannya	Tidak ada permasalahan	NIHIL
8	Melakukan monitoring dan evaluasi nilai IKPA secara berkala per triwulan.	Rapat Monev IKPA Per Triwulan Telah Dilaksanakan	Tidak ada permasalahan	NIHIL
3.3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran				
1	Menyusun perencanaan anggaran berbasis kebutuhan dan output riil dengan mempertimbangkan Standar Biaya Masukan (SBM) dan Standar Biaya Keluaran (SBK)	RKAKL PTUN Pangkalpinang telah disusun berbasis kebutuhan dan output riil dengan mempertimbangkan Standar Biaya Masukan (SBM) dan Standar Biaya Keluaran (SBK)	Tidak ada permasalahan	NIHIL
2	Melakukan penginputan target	Target Telah Diinput ke Aplikasi	Tidak ada permasalahan	NIHIL

	tahunan ke dalam aplikasi SAKTI	SAKTI		
3	Menginput data capaian output setiap bulan	Laporan Capaian Output Telah Diinput Tepat Waktu Setiap Bulannya	Tidak ada permasalahan	NIHIL
4	Melakukan monitoring terhadap nilai NKPA melalui aplikasi Monev Kemenkeu	Data NKPA Belum Tersedia	Tidak ada permasalahan	NIHIL
3.4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan				
1	Melakukan Penatausahaan Barang Milik Negara Sesuai Peraturan yang Berlaku	BMN Telah Ditatausahakan Sesuai Peraturan yang Berlaku	Tidak ada permasalahan	NIHIL
2	Realisasi PNBP dari pengelolaan aset	Belum Ada Realisasi PNBP dari Pengelolaan Aset	Tidak ada permasalahan	NIHIL
3	Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN	Belum masuk periode pengusulan RKBMN	Tidak ada permasalahan	NIHIL
4	Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN	BMN Telah Dimanfaatkan dengan Baik	Tidak ada permasalahan	NIHIL
5	Tindak lanjut BMN yang Dihentikan Penggunaannya	Tidak ada BMN yang Dihentikan Penggunaannya	Tidak ada permasalahan	NIHIL
6	BMN memiliki dokumen	BMN Telah Memiliki Dokumen	Tidak ada permasalahan	NIHIL

	kepemilikan	Kepemilikan		
7	Penggunaan BMN yang sesuai ketentuan	BMN Telah Digunakan Sesuai Ketentuan	Tidak ada permasalahan	NIHIL

Pangkalpinang, 3 November 2025

K E T U A,

MOHAMAD SYAUQIE, S.H., M.H.

REVISI MONITORING DAN EVALUASI ATAS REVISI RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

TRIWULAN III

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu	100%	100%	100%
		Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak	100%	100%	100%
		Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak	100%	100%	100%
		Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan	100%	100%	100%
		Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara	100%	100%	100%
		Persentase Perkara Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court	100%	100%	100%

NO.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN *PROGRESS* PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.1. Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu				
1	Mendata, mengidentifikasi dan mengevaluasi perkara lebih dari 5 bulan	Telah dilakukan identifikasi dan evaluasi perkara yang lewat dari 5 bulan.	Tidak ada permasalahan. Nilai kinerja sudah baik.	Terus ditingkatkan dan dipantau agar tidak ada perkara yang melebihi jangka waktu penyelesaian yang telah ditetapkan.
2	Melaporkan dan mencari solusi yang tepat.	Tidak ada laporan yang perlu dilaporkan kepada pimpinan karena tidak ada perkara yang lewat dari 5 bulan.	Tidak ada permasalahan. Nilai kinerja sudah baik.	Terus ditingkatkan dan dipantau agar tidak ada perkara yang melebihi jangka waktu penyelesaian yang telah ditetapkan.
3	Menyelesaikan persidangan sesuai asas persidangan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.	Persidangan telah dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.	Tidak ada permasalahan. Nilai kinerja sudah baik.	Terus ditingkatkan dan dipantau agar tidak ada perkara yang melebihi jangka waktu penyelesaian yang telah ditetapkan.
4	Menunda persidangan dengan waktu relatif singkat (maksimal 14	Tidak ada sidang yang ditunda lebih dari 14 hari.	Tidak ada permasalahan. Nilai kinerja sudah baik.	Terus ditingkatkan dan dipantau agar tidak ada

	hari)			perkara yang melebihi jangka waktu penyelesaian yang telah ditetapkan.
5	Memutus perkara tidak melebihi 5 bulan	Tidak ada perkara yang lewat dari 5 bulan	Tidak ada permasalahan. Nilai kinerja sudah baik.	Terus ditingkatkan dan dipantau agar tidak ada perkara yang melebihi jangka waktu penyelesaian yang telah ditetapkan.
6	Pelaksanaan minutasi perkara tepat waktu	Minutasi perkara selalu dilakukan tepat waktu	Tidak ada permasalahan. Nilai kinerja sudah baik.	Terus ditingkatkan dan dipantau agar tidak ada perkara yang melebihi jangka waktu penyelesaian yang telah ditetapkan.
7	Mencoret/highlight perkara yang sudah melebihi batas waktu teguran	Tidak ada perkara yang melebihi batas waktu.	Tidak ada permasalahan. Nilai kinerja sudah baik.	Terus ditingkatkan dan dipantau agar tidak ada perkara yang melebihi jangka waktu penyelesaian yang telah ditetapkan.

NO.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN *PROGRESS* PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.2. Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak				
1	Menginput tundaan sidang setelah sidang dilaksanakan	Tundaan sidang telah diinput secara tertib.	Tidak ada permasalahan.	Terus ditingkatkan dan dipantau agar tidak ada tundaan sidang yang tidak diinput.
2	Membuat Berita Acara Sidang setelah sidang dilaksanakan	BAS sudah disusun secara tertib setelah persidangan.	Tidak ada permasalahan.	Terus ditingkatkan dan dipantau agar tidak ada BAS yang tidak dibuat.
3	Membuat putusan sebelum sidang pembacaan putusan	Putusan selalu diselesaikan tepat waktu sebelum pembacaan putusan	Tidak ada permasalahan.	Terus ditingkatkan dan dipantau agar tidak ada putusan yang lambat dibuat.
4	Menginput amar putusan dan tanggal putusan di SIPP maksimal 1 hari setelah sidang putusan	Amar putusan telah diinput dengan tertib ke SIPP.	Tidak ada permasalahan.	Terus ditingkatkan dan dipantau amar putusan yang lambat diinput ke SIPP.
5	Mengunggah salinan putusan ke SIPP (e-doc)	Salinan putusan telah diunggah dengan tertib ke SIPP.	Tidak ada permasalahan.	Terus ditingkatkan dan dipantau agar tidak ada salinan putusan perkara yang disampaikan melebihi

				jangka waktu yang telah ditetapkan.
6	Mengirimkan Salinan Putusan kepada Para Pihak paling lambat 14 hari, dan selanjutnya menginput tanggal pengiriman salinan putusan ke SIPP.	Salinan putusan selalu dikirimkan kepada para pihak sebelum tenggat waktu 14 hari.	Tidak ada permasalahan.	Terus ditingkatkan dan dipantau agar tidak ada salinan putusan perkara yang disampaikan melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan.
7	Melakukan evaluasi ketepatan waktu penyampaian salinan putusan	Penyampaian salinan putusan selalu dilakukan tepat waktu	Tidak ada permasalahan.	Terus ditingkatkan dan dipantau agar tidak ada salinan putusan perkara yang disampaikan melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan.
1.3.Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak				
1	Menerima salinan putusan banding/kasasi/PK dari pengadilan tingkat banding / MA	Salinan putusan banding, kasasi, dan PK diterima	Tidak ada permasalahan	NIHIL
2	Mencatat tanggal diterimanya putusan	Catatan tanggal penerimaan putusan tercatat secara elektronik di SIPP	Tidak ada permasalahan	NIHIL
3	Menyiapkan petikan/amar putusan	Petikan/Amar putusan telah siap	Tidak ada permasalahan	NIHIL

	dan memastikan identitas perkara dan pihak benar	untuk diberitahukan kepada para pihak		
4	Mengirimkan pemberitahuan petikan/amar putusan melalui jurusita/jurusita pengganti atau email sesuai ketentuan	Petikan/amar putusan yang telah disampaikan kepada para pihak	Tidak ada permasalahan	NIHIL
5	Menginput hasil pemberitahuan ke SIPP dan mengunggah bukti pengiriman	Pemberitahuan petikan/amar telah tercatat di SIPP	Tidak ada permasalahan	NIHIL
6	Melakukan evaluasi ketepatan waktu penyampaian petikan/amar putusan kepada para pihak	Evaluasi Penyampaian Petikan/Amar Putusan telah dilaksanakan melalui pengukuran kinerja bulanan	Tidak ada permasalahan	NIHIL
1.4. Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan				
1	Memeriksa kelengkapan putusan	Putusan telah lengkap	Terdapat kendala proses sinkronisasi upload putusan ke SIPP yang menyebabkan beberapa putusan terlambat masuk ke Direktori Putusan	Telah diatasi dengan mengunggah putusan secara manual ke Direktori Putusan melalui admin Direktori Putusan. Ke depannya, Panitera akan selalu melakukan monev terhadap
2	Minutasi putusan	Putusan Telah Diminutasi		
3	Mengunggah putusan ke Direktori Putusan MA	Unggahan Putusan telah dilaksanakan melalui sinkroniasasi SIPP ke Direktori Putusan		
4	Memeriksa status unggahan dan memastikan unggahan telah	Beberapa Unggahan Putusan ke Direktori Putusan gagal *by system*		

	berhasil masuk ke Direktori Putusan MA			penginputan putusan ke Direktori Putusan.
5	Melakukan evaluasi ketepatan waktu pengunggahan putusan ke Direktori Putusan MA	Belum ada monev unggahan putusan ke Direktori Putusan		
1.5. Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara				
1	Mendata putusan yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap	Putusan BHT sudah terdata	Tidak ada permasalahan	NIHIL
2	Menerima permohonan eksekusi	Permohonan eksekusi telah diterima	Tidak ada permasalahan	NIHIL
3	Menindaklanjuti permohonan eksekusi	Permohonan eksekusi telah ditindaklanjuti	Tidak ada permasalahan	NIHIL
4	Menyusun Laporan Pelaksanaan Eksekusi	Pelaksanaan eksekusi telah dilaksanakan dengan baik	Tidak ada permasalahan	NIHIL
5	Melakukan evaluasi dan tindak lanjut atas laporan pelaksanaan eksekusi.	Evaluasi atas permohonan eksekusi telah dilakukan	Tidak ada permasalahan	NIHIL

NO.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN *PROGRESS* PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.6. Persentase Perkara Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court				
1	Menyediakan panduan e-Court di PTSP	Panduan e-Court Telah Tersedia di PTSP	Tidak ada permasalahan	NIHIL
2	Membantu pencari keadilan dalam registrasi akun e-Court dan penggunaan e-Filing dan e-Payment	Akun e-Court Telah Teregister	Tidak ada permasalahan	NIHIL
3	Verifikasi Data e-Court	Data e-Court Telah Terverifikasi	Tidak ada permasalahan	NIHIL
4	Melakukan evaluasi atas penggunaan e-Court	Evaluasi Penggunaan e-Court telah dilaksanakan	Tidak ada permasalahan	NIHIL

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	3,78	3,89	102,91%

NO.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN *PROGRESS* PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1	Membentuk tim survey kepuasan masyarakat	Tim survey kepuasan telah dibentuk melalui SK Ketua PTUN Pangkalpinang	Tidak ada permasalahan. Nilai indeks kepuasan masyarakat sudah baik.	Terus dilakukan monitoring dan pemantauan secara berkala.
2	Menyusun *job description* tim evaluasi kepuasan masyarakat	Uraian tugas tim telah tersusun	Tidak ada permasalahan. Nilai indeks kepuasan masyarakat sudah baik.	Terus dilakukan monitoring dan pemantauan secara berkala.
3	Menyusun jadwal pelaksanaan dan kebutuhan Survey Kepuasan Masyarakat	Jadwal pelaksanaan survey dilakukan per triwulan	Tidak ada permasalahan. Nilai indeks kepuasan masyarakat sudah baik.	Terus dilakukan monitoring dan pemantauan secara berkala.
4	Melaksanakan SKM	SKM telah dilaksanakan per	Tidak ada permasalahan.	Terus dilakukan

		triwulan	Nilai indeks kepuasan masyarakat sudah baik.	monitoring dan pemantauan secara berkala.
5	Mendata dan merekap hasil SKM	Hasil SKM telah berhasil dihimpun	Tidak ada permasalahan. Nilai indeks kepuasan masyarakat sudah baik.	Terus dilakukan monitoring dan pemantauan secara berkala.
6	Menyusun Laporan Hasil SKM	Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat telah selesai disusun	Tidak ada permasalahan. Nilai indeks kepuasan masyarakat sudah baik.	Terus dilakukan monitoring dan pemantauan secara berkala.
7	Melakukan evaluasi berdasarkan hasil SKM dan melakukan tinjauan manajemen	Monev SKM dan tindak lanjut hasil survey telah dibuat	Tidak ada permasalahan. Nilai indeks kepuasan masyarakat sudah baik.	Terus dilakukan monitoring dan pemantauan secara berkala.

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	85	N/A	N/A
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	95	98,31	103,48%
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	95	N/A	N/A
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	N/A	N/A

NO.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN *PROGRESS* PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan				
1	Memperbaharui data pendidikan ASN sesuai dengan data pendidikan terakhir	Telah diperbaharuinya data pendidikan ASN sesuai dengan data pendidikan terkahir	Tidak ada permasalahan	NIHIL
2	Meningkatkan kompetensi ASN sesuai tugas dan fungsi dengan memfasilitasi keikutsertaan ASN dalam pendidikan dan pelatihan	ASN telah mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi	Tidak ada permasalahan	NIHIL
3	Memantau SKP seluruh ASN dan	SKP Triwulan III telah diinput tepat	Tidak ada permasalahan	NIHIL

	memastikan seluruh SKP telah diinput dan dinilai tepat waktu	waktu		
4	Menjaga kepatuhan ASN terhadap aturan yang berlaku dengan memonitoring kehadiran ASN dan mencatat pelanggaran disiplin (jika ada).	Rekap Kehadiran ASN dan Laporan Disipin Hakim telah dibuat per bulan	Tidak ada permasalahan	NIHIL
5	Memonitoring dan mengevaluasi nilai IP ASN Satker	Nilai IP ASN Tahun 2025 belum tersedia	Tidak ada permasalahan	NIHIL
3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan				
1	Melakukan revisi DIPA sesuai dengan kebutuhan satker dan peraturan.	Revisi DIPA telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan satker dan peraturan	Tidak ada permasalahan	NIHIL
2	Menyusun RPD (Rencana Penarikan Dana) secara realistis dan sesuai kebutuhan riil per triwulan untuk meminimalkan Deviasi Hal. III DIPA	RPD telah disesuaikan dalam Revisi Hal III. DIPA yang diajukan per triwulan	Tidak ada permasalahan.	NIHIL
3	Melaksanakan penyerapan anggaran sesuai dengan target per triwulan untuk masing-masing jenis belanja.	Telah dilaksanakan penyerapan anggaran sesuai target per triwulan untuk masing-masing jenis belanja	Tidak ada permasalahan	NIHIL

4	Menyampaikan data kontrak secara tepat waktu dan sesuai dengan peraturan ke KPPN Pangkalpinang.	Data Kontrak Telah Disampaikan Tepat Waktu ke KPPN	Tidak ada permasalahan	NIHIL
5	Melaksanakan pembayaran tagihan tepat waktu	SPM Pembayaran Tagihan Telah Diajukan Tepat Waktu	Tidak ada permasalahan	NIHIL
6	Melaksanakan pengelolaan UP dan TUP secara optimal	Pengelolaan UP Telah Diajukan Secara Optimal dan Tepat Waktu	Tidak ada permasalahan	NIHIL
7	Menginput Capaian Output Tepat Waktu Setiap Bulannya.	Laporan Capaian Output Telah Diinput Tepat Waktu Setiap Bulannya	Tidak ada permasalahan	NIHIL
8	Melakukan monitoring dan evaluasi nilai IKPA secara berkala per triwulan.	Rapat Monev IKPA Per Triwulan Telah Dilaksanakan	Tidak ada permasalahan	NIHIL
3.3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran				
1	Menyusun perencanaan anggaran berbasis kebutuhan dan output riil dengan mempertimbangkan Standar Biaya Masukan (SBM) dan Standar Biaya Keluaran (SBK)	RKAKL PTUN Pangkalpinang telah disusun berbasis kebutuhan dan output riil dengan mempertimbangkan Standar Biaya Masukan (SBM) dan Standar Biaya Keluaran (SBK)	Tidak ada permasalahan	NIHIL
2	Melakukan penginputan target	Target Telah Diinput ke Aplikasi	Tidak ada permasalahan	NIHIL

	tahunan ke dalam aplikasi SAKTI	SAKTI		
3	Menginput data capaian output setiap bulan	Laporan Capaian Output Telah Diinput Tepat Waktu Setiap Bulannya	Tidak ada permasalahan	NIHIL
4	Melakukan monitoring terhadap nilai NKPA melalui aplikasi Monev Kemenkeu	Data NKPA Belum Tersedia	Tidak ada permasalahan	NIHIL
3.4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan				
1	Melakukan Penatausahaan Barang Milik Negara Sesuai Peraturan yang Berlaku	BMN Telah Ditatausahakan Sesuai Peraturan yang Berlaku	Tidak ada permasalahan	NIHIL
2	Realisasi PNBP dari pengelolaan aset	Belum Ada Realisasi PNBP dari Pengelolaan Aset	Tidak ada permasalahan	NIHIL
3	Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN	Pengusulan RKBMN telah disampaikan tepat waktu	Tidak ada permasalahan	NIHIL
4	Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN	BMN Telah Dimanfaatkan dengan Baik	Tidak ada permasalahan	NIHIL
5	Tindak lanjut BMN yang Dihentikan Penggunaannya	Tidak ada BMN yang Dihentikan Penggunaannya	Tidak ada permasalahan	NIHIL
6	BMN memiliki dokumen	BMN Telah Memiliki Dokumen	Tidak ada permasalahan	NIHIL

	kepemilikan	Kepemilikan		
7	Penggunaan BMN yang sesuai ketentuan	BMN Telah Digunakan Sesuai Ketentuan	Tidak ada permasalahan	NIHIL

Pangkalpinang, 3 November 2025

K E T U A,

MOHAMAD SYAUQIE, S.H., M.H.

REVISI MONITORING DAN EVALUASI ATAS REVISI RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

TRIWULAN IV

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu	100%	100%	100%
		Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak	100%	100%	100%
		Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak	100%	100%	100%
		Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan	100%	100%	100%
		Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara	100%	100%	100%
		Persentase Perkara Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court	100%	100%	100%

NO.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN *PROGRESS* PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.1. Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu				
1	Mendata, mengidentifikasi dan mengevaluasi perkara lebih dari 5 bulan	Telah dilakukan identifikasi dan evaluasi perkara yang lewat dari 5 bulan.	Tidak ada permasalahan. Nilai kinerja sudah baik.	NIHIL
2	Melaporkan dan mencari solusi yang tepat.	Tidak ada laporan yang perlu dilaporkan kepada pimpinan karena tidak ada perkara yang lewat dari 5 bulan.	Tidak ada permasalahan. Nilai kinerja sudah baik.	NIHIL
3	Menyelesaikan persidangan sesuai asas persidangan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.	Persidangan telah dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.	Tidak ada permasalahan. Nilai kinerja sudah baik.	NIHIL
4	Menunda persidangan dengan waktu relatif singkat (maksimal 14 hari)	Tidak ada sidang yang ditunda lebih dari 14 hari.	Tidak ada permasalahan. Nilai kinerja sudah baik.	NIHIL
5	Memutus perkara tidak melebihi 5 bulan	Tidak ada perkara yang lewat dari 5 bulan	Tidak ada permasalahan. Nilai kinerja sudah baik.	NIHIL
6	Pelaksanaan minutasi perkara tepat waktu	Minutasi perkara selalu dilakukan tepat waktu	Tidak ada permasalahan. Nilai kinerja sudah baik.	NIHIL
7	Mencoret/*highlight* perkara yang sudah melebihi batas waktu teguran	Tidak ada perkara yang melebihi batas waktu.	Tidak ada permasalahan. Nilai kinerja sudah baik.	NIHIL

NO.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN *PROGRESS* PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.2. Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak				
1	Menginput tundaan sidang setelah sidang dilaksanakan	Tundaan sidang telah diinput secara tertib.	Tidak ada permasalahan.	NIHIL
2	Membuat Berita Acara Sidang setelah sidang dilaksanakan	BAS sudah disusun secara tertib setelah persidangan.	Tidak ada permasalahan.	NIHIL
3	Membuat putusan sebelum sidang pembacaan putusan	Putusan selalu diselesaikan tepat waktu sebelum pembacaan putusan	Tidak ada permasalahan.	NIHIL
4	Menginput amar putusan dan tanggal putusan di SIPP maksimal 1 hari setelah sidang putusan	Amar putusan telah diinput dengan tertib ke SIPP.	Tidak ada permasalahan.	NIHIL
5	Mengunggah salinan putusan ke SIPP (e-doc)	Salinan putusan telah diunggah dengan tertib ke SIPP.	Tidak ada permasalahan.	NIHIL
6	Mengirimkan Salinan Putusan kepada Para Pihak paling lambat 14 hari, dan selanjutnya menginput tanggal pengiriman salinan putusan ke SIPP.	Salinan putusan selalu dikirimkan kepada para pihak sebelum tenggat waktu 14 hari.	Tidak ada permasalahan.	NIHIL
7	Melakukan evaluasi ketepatan waktu penyampaian salinan	Penyampaian salinan putusan selalu dilakukan tepat waktu	Tidak ada permasalahan.	NIHIL

	putusan			
1.3.Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak				
1	Menerima salinan putusan banding/kasasi/PK dari pengadilan tingkat banding / MA	Salinan putusan banding, kasasi, dan PK diterima	Tidak ada permasalahan	NIHIL
2	Mencatat tanggal diterimanya putusan	Catatan tanggal penerimaan putusan tercatat secara elektronik di SIPP	Tidak ada permasalahan	NIHIL
3	Menyiapkan petikan/amar putusan dan memastikan identitas perkara dan pihak benar	Petikan/Amar putusan telah siap untuk diberitahukan kepada para pihak	Tidak ada permasalahan	NIHIL
4	Mengirimkan pemberitahuan petikan/amar putusan melalui jurusita/jurusita pengganti atau email sesuai ketentuan	Petikan/amar putusan yang telah disampaikan kepada para pihak	Tidak ada permasalahan	NIHIL
5	Menginput hasil pemberitahuan ke SIPP dan mengunggah bukti pengiriman	Pemberitahuan petikan/amar telah tercatat di SIPP	Tidak ada permasalahan	NIHIL
6	Melakukan evaluasi ketepatan waktu penyampaian petikan/amar putusan kepada para pihak	Evaluasi Penyampaian Petikan/Amar Putusan telah dilaksanakan melalui pengukuran	Tidak ada permasalahan	NIHIL

		kinerja bulanan		
1.4. Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan				
1	Memeriksa kelengkapan putusan	Putusan telah lengkap	Terdapat kendala proses sinkronisasi upload putusan ke SIPP yang menyebabkan beberapa putusan terlambat masuk ke Direktori Putusan	Telah diatasi dengan mengunggah putusan secara manual ke Direktori Putusan melalui admin Direktori Putusan. Ke depannya, Panitera akan selalu melakukan monev terhadap penginputan putusan ke Direktori Putusan.
2	Minutasi putusan	Putusan Telah Diminutasi		
3	Mengunggah putusan ke Direktori Putusan MA	Unggahan Putusan telah dilaksanakan melalui sinkroniasasi SIPP ke Direktori Putusan		
4	Memeriksa status unggahan dan memastikan unggahan telah berhasil masuk ke Direktori Putusan MA	Beberapa Unggahan Putusan ke Direktori Putusan gagal *by system*		
5	Melakukan evaluasi ketepatan waktu pengunggahan putusan ke Direktori Putusan MA	Belum ada monev unggahan putusan ke Direktori Putusan		
1.5. Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara				
1	Mendata putusan yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap	Putusan BHT sudah terdata	Tidak ada permasalahan	NIHIL
2	Menerima permohonan eksekusi	Permohonan eksekusi telah diterima	Tidak ada permasalahan	NIHIL
3	Menindaklanjuti permohonan eksekusi	Permohonan eksekusi telah ditindaklanjuti	Tidak ada permasalahan	NIHIL
4	Menyusun Laporan Pelaksanaan	Pelaksanaan eksekusi telah	Tidak ada permasalahan	NIHIL

	Eksekusi	dilaksanakan dengan baik		
5	Melakukan evaluasi dan tindak lanjut atas laporan pelaksanaan eksekusi.	Evaluasi atas permohonan eksekusi telah dilakukan	Tidak ada permasalahan	NIHIL
1.6. Persentase Perkara Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court				
1	Menyediakan panduan e-Court di PTSP	Panduan e-Court Telah Tersedia di PTSP	Tidak ada permasalahan	NIHIL
2	Membantu pencari keadilan dalam registrasi akun e-Court dan penggunaan e-Filing dan e-Payment	Akun e-Court Telah Teregister	Tidak ada permasalahan	NIHIL
3	Verifikasi Data e-Court	Data e-Court Telah Terverifikasi	Tidak ada permasalahan	NIHIL
4	Melakukan evaluasi atas penggunaan e-Court	Evaluasi Penggunaan e-Court telah dilaksanakan	Tidak ada permasalahan	NIHIL

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	3,78	3,88	102,65%

NO.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN *PROGRESS* PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1	Membentuk tim survey kepuasan masyarakat	Tim survey kepuasan telah dibentuk melalui SK Ketua PTUN Pangkalpinang	Tidak ada permasalahan. Nilai indeks kepuasan masyarakat sudah baik.	Terus dilakukan monitoring dan pemantauan secara berkala.
2	Menyusun *job description* tim evaluasi kepuasan masyarakat	Uraian tugas tim telah tersusun	Tidak ada permasalahan. Nilai indeks kepuasan masyarakat sudah baik.	Terus dilakukan monitoring dan pemantauan secara berkala.
3	Menyusun jadwal pelaksanaan dan kebutuhan Survey Kepuasan Masyarakat	Jadwal pelaksanaan survey dilakukan per triwulan	Tidak ada permasalahan. Nilai indeks kepuasan masyarakat sudah baik.	Terus dilakukan monitoring dan pemantauan secara berkala.
4	Melaksanakan SKM	SKM telah dilaksanakan per	Tidak ada permasalahan.	Terus dilakukan

		triwulan	Nilai indeks kepuasan masyarakat sudah baik.	monitoring dan pemantauan secara berkala.
5	Mendata dan merekap hasil SKM	Hasil SKM telah berhasil dihimpun	Tidak ada permasalahan. Nilai indeks kepuasan masyarakat sudah baik.	Terus dilakukan monitoring dan pemantauan secara berkala.
6	Menyusun Laporan Hasil SKM	Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat telah selesai disusun	Tidak ada permasalahan. Nilai indeks kepuasan masyarakat sudah baik.	Terus dilakukan monitoring dan pemantauan secara berkala.
7	Melakukan evaluasi berdasarkan hasil SKM dan melakukan tinjauan manajemen	Monev SKM dan tindak lanjut hasil survey telah dibuat	Tidak ada permasalahan. Nilai indeks kepuasan masyarakat sudah baik.	Terus dilakukan monitoring dan pemantauan secara berkala.

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	85	85	100%
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	95	98,67	103,86%
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	95	99,95	105,21%
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3,175	105,83%

NO.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN *PROGRESS* PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan				
1	Memperbaharui data pendidikan ASN sesuai dengan data pendidikan terakhir	Telah diperbaharuinya data pendidikan ASN sesuai dengan data pendidikan terkahir	Tidak ada permasalahan	NIHIL
2	Meningkatkan kompetensi ASN sesuai tugas dan fungsi dengan memfasilitasi keikutsertaan ASN dalam pendidikan dan pelatihan	ASN telah mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi	Tidak ada permasalahan	NIHIL
3	Memantau SKP seluruh ASN dan	SKP Triwulan IV dan Tahunan telah	Tidak ada permasalahan	NIHIL

	memastikan seluruh SKP telah diinput dan dinilai tepat waktu	diinput tepat waktu		
4	Menjaga kepatuhan ASN terhadap aturan yang berlaku dengan memonitoring kehadiran ASN dan mencatat pelanggaran disiplin (jika ada).	Rekap Kehadiran ASN dan Laporan Disipin Hakim telah dibuat per bulan	Tidak ada permasalahan	NIHIL
5	Memonitoring dan mengevaluasi nilai IP ASN Satker	Nilai IP ASN telah sesuai dengan target	Tidak ada permasalahan	NIHIL
3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan				
1	Melakukan revisi DIPA sesuai dengan kebutuhan satker dan peraturan.	Revisi DIPA telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan satker dan peraturan	Tidak ada permasalahan	NIHIL
2	Menyusun RPD (Rencana Penarikan Dana) secara realistis dan sesuai kebutuhan riil per triwulan untuk meminimalkan Deviasi Hal. III DIPA	RPD telah disesuaikan dalam Revisi Hal III. DIPA yang diajukan per triwulan	Tidak ada permasalahan.	NIHIL
3	Melaksanakan penyerapan anggaran sesuai dengan target per triwulan untuk masing-masing jenis belanja.	Telah dilaksanakan penyerapan anggaran sesuai target per triwulan untuk masing-masing jenis belanja	Tidak ada permasalahan	NIHIL

4	Menyampaikan data kontrak secara tepat waktu dan sesuai dengan peraturan ke KPPN Pangkalpinang.	Data Kontrak Telah Disampaikan Tepat Waktu ke KPPN	Tidak ada permasalahan	NIHIL
5	Melaksanakan pembayaran tagihan tepat waktu	SPM Pembayaran Tagihan Telah Diajukan Tepat Waktu	Tidak ada permasalahan	NIHIL
6	Melaksanakan pengelolaan UP dan TUP secara optimal	Pengelolaan UP/TUP Telah Diajukan Secara Optimal dan Tepat Waktu	Tidak ada permasalahan	NIHIL
7	Menginput Capaian Output Tepat Waktu Setiap Bulannya.	Laporan Capaian Output Telah Diinput Tepat Waktu Setiap Bulannya	Tidak ada permasalahan	NIHIL
8	Melakukan monitoring dan evaluasi nilai IKPA secara berkala per triwulan.	Rapat Monev IKPA Per Triwulan Telah Dilaksanakan	Tidak ada permasalahan	NIHIL
3.3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran				
1	Menyusun perencanaan anggaran berbasis kebutuhan dan output riil dengan mempertimbangkan Standar Biaya Masukan (SBM) dan Standar Biaya Keluaran (SBK)	RKAKL PTUN Pangkalpinang telah disusun berbasis kebutuhan dan output riil dengan mempertimbangkan Standar Biaya Masukan (SBM) dan Standar Biaya Keluaran (SBK)	Tidak ada permasalahan	NIHIL

2	Melakukan penginputan target tahunan ke dalam aplikasi SAKTI	Target Telah Diinput ke Aplikasi SAKTI	Tidak ada permasalahan	NIHIL
3	Menginput data capaian output setiap bulan	Laporan Capaian Output Telah Diinput Tepat Waktu Setiap Bulannya	Tidak ada permasalahan	NIHIL
4	Melakukan monitoring terhadap nilai NKPA melalui aplikasi Monev Kemenkeu	Realisasi NKPA sudah terpantau sangat baik	Tidak ada permasalahan	NIHIL
3.4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan				
1	Melakukan Penatausahaan Barang Milik Negara Sesuai Peraturan yang Berlaku	BMN Telah Ditatausahakan Sesuai Peraturan yang Berlaku	Tidak ada permasalahan	NIHIL
2	Realisasi PNBP dari pengelolaan aset	Realisasi PNBP dari Pengelolaan Aset Telah Dikelola dengan Baik	Tidak ada permasalahan	NIHIL
3	Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN	Pengusulan RKBMN telah disampaikan tepat waktu	Tidak ada permasalahan	NIHIL
4	Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN	BMN Telah Dimanfaatkan dengan Baik	Tidak ada permasalahan	NIHIL
5	Tindak lanjut BMN yang Dihentikan Penggunaannya	Penghentian penggunaan BMN telah ditindaklanjuti	Tidak ada permasalahan	NIHIL

6	BMN memiliki dokumen kepemilikan	BMN Telah Memiliki Dokumen Kepemilikan	Tidak ada permasalahan	NIHIL
7	Penggunaan BMN yang sesuai ketentuan	BMN Telah Digunakan Sesuai Ketentuan	Tidak ada permasalahan	NIHIL

Pangkalpinang, 2 Februari 2026

K E T U A,

MOHAMAD SYAUQIE, S.H., M.H.

LAMPIRAN XIX

TINDAK LANJUT LHE TAHUN 2024

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kec. Pangkalan Baru
Kepulauan Bangka Belitung 33684
Telp. : (0717) 9111513 ; e-mail : info@ptun-pangkalpinang.go.id ; website: ptun-pangkalpinang.go.id

Pangkalpinang, 15 Agustus 2025

Nomor : 317/KPTUN.W5-TUN.5/OT1.6/VIII/2025
Lampiran : 1 (satu) Bundel
Perihal : Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024

K e p a d a
Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang
di –
P A L E M B A N G

Dengan hormat,

Menindaklanjuti rekomendasi dalam Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2024 oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dengan nomor surat 413/KPTTUN.W5-TUN/OT.1.6/IV/2025 Tanggal 28 April 2025, dengan ini kami sampaikan tindak lanjut atas rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja PTUN Pangkalpinang Tahun 2024 yang telah di*upload* pada aplikasi seMAr dan telah diunggah pada link https://drive.google.com/drive/folders/1Xm9KnscobYrEYUd6fmtlVLY4g1gGQVfT?usp=sharing

Demikian laporan tindak lanjut ini kami kirimkan. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih

Ditandatangani secara elektronik oleh:
KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

MOHAMAD SYAUQIE

Tembusan :
1. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

EVALUASI HASIL TINDAK LANJUT REKOMENDASI LHE SAKIP
UNIT AKUNTABILITAS PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
TAHUN 2024

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Pelaksanaan		Dokumen Pendukung		Keterangan
			Sudah	Belum	Ada	Tidak Ada	
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	**Perencanaan Kinerja** 1. Ke depannya, dokumen RKT, PK, Renstra dan Rencana Aksi dapat mempedomani IKU (untuk indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan upaya hukum kasasi agar digabungkan indikatornya sesuai dengan indikator yang terdapat di IKU).	1. Pemisahan indikator upaya hukum banding dan upaya hukum kasasi pada dokumen perencanaan PTUN Pangkalpinang disebabkan karena perubahan/penggabungan IKU Mahkamah Agung RI tersebut ditetapkan pada 31 Januari 2022 yang masih dalam Periode Renstra 2020 - 2024. Dikarenakan penggabungan ini akan menyebabkan kesulitan perbandingan capaian kinerja per indikator pada Laporan Kinerja dalam kurun waktu Periode Renstra 2020-2024, maka diambil keputusan untuk tetap memisahkan indikator Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dengan Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi untuk memudahkan pengukuran dan perbandingan kinerja pada Laporan Kinerja Tahun 2020-2024. Kesepakatan ini diambil pada Rapat Reviu PK, RKT dan Rencana Aksi Tahun 2024 tanggal 26 November 2024. Pada tahun 2025 yang merupakan tahun awal periode Renstra 2025-2029, indikator Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi telah digabung mempedomani Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022.	√		√		a. Dokumen Keterangan Terkait IKU Banding dan Kasasi yang memuat kesepakatan rapat tanggal 26 November 2024, IKU 2025, PKT 2025 dan Rencana Aksi 2025.
B.	**Pengukuran Kinerja** 1. Agar dilengkapi dengan SK Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pengumpulan Kinerja.	1. Telah dilengkapi dengan SK Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pengumpulan Kinerja.	√		√		a. Dokumen SK Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pengumpulan Kinerja.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

C.	**Pelaporan Kinerja** 1. Agar dilengkapi dengan SOP yang berkaitan dengan pencapaian kinerja. 2. Ke depannya, satker dapat menyertakan narasi perubahan budaya kinerjanya ke arah yang lebih baik pada salah satu bagian dalam Laporan Kinerja tahunannya. Namun sebelumnya, Satker harus menentukan dahulu variabel budaya kinerja yang diinginkan, dapat berasal dari internal (misal: 5S, 3S, dan budaya lainnya yang telah ditentukan) atau budaya kinerja yang berlaku umum (contoh: BERAKHLAK). Satker mengangkat adanya kondisi budaya kinerja yang masih silo (terpisah-pisah) dan penyebab kendala kinerja kemudian diidentifikasi dan ditetapkan rencana aksi (action plan). Pada akhirnya, satker juga menyertakan narasi tentang hasil tindak lanjut atas rencana aksi perubahan budaya silo tersebut.	1. Telah dilengkapi dengan SOP yang berkaitan dengan pencapaian kinerja. 2. Ke depannya, satker akan menyertakan narasi perubahan budaya kinerja dalam Laporan Kinerja tahunan.	√		√		a) SOP yang berkaitan dengan pencapaian kinerja.
D.	**Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal** 1. Agar dilengkapi dengan SOP yang berkaitan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi.	1. Telah dilengkapi dengan SOP yang berkaitan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi	√		√		1. SOP yang berkaitan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi.

Pangkalpinang, 15 Agustus 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh:
KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

MOHAMAD SYAUQIE

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

LAMPIRAN XX

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA DENGAN TARGET MA

PERBANDINGAN CAPAIAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
DENGAN TARGET RENSTRA MA TAHUN 2025-2029

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian PTUN Pangkalpinang Tahun 2025			Target Nasional Tahun 2025 Pada Renstra MA Tahun 2025 - 2029
			Target	Realisasi	Capaian	
1.	Terwujudnya Peradilan Yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif Dan Modern	Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %	96,46%
		Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak	100 %	100 %	100 %	99,97%
		Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/ Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak.	100 %	100 %	100 %	91,01%
		Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan	100 %	100 %	100 %	90,11%
		Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara.	100 %	100 %	100 %	39,55%
		Persentase Perkara Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court.	100 %	100 %	100 %	95,76%
Rata-rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis I			**100%**	**100%**	**100%**	**85,48%**
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	3,78	3,88	102,65%	3,78
Rata-rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis II			**3,78**	**3,88**	**102,65%**	**3,78**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian PTUN Pangkalpinang Tahun 2025			Target Nasional Tahun 2025 Pada Renstra MA Tahun 2025 - 2029
			Target	Realisasi	Capaian	
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	85	85	100%	71
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	95	98,67	103,86%	93
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	95	99,95	105,21%	75
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3,175	105,83%	3
Rata-rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis III			-	-	**103,73%**	-
Rata-rata Capaian Kinerja			-	-	**102,13%**	-

LAMPIRAN XXI

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH

Perbandingan Capaian Kinerja Tahunan
Dengan Target Jangka Menengah Dalam Dokumen Renstra

No.	Tujuan	Target Jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target					Realisasi					Capaian				
	Uraian		Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
1	Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara, dan Berkeadilan	100%	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
				Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
				Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
				Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
				Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
				Persentase Perkara Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
2		3,78-3,85	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	3,78	3,8	3,82	3,84	3,85	3,88	-	-	-	-	102,65%	-	-	-	-

No.	Tujuan	Target Jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target					Realisasi					Capaian				
	Uraian		Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
3	Mewujudkan Badan Peradilan yang Transparan, Akuntabel, Modern, dan Profesional	85	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	85	85	85	85	85	85	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
		95		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	95	95	95	95	95	98,67	-	-	-	-	103,86%	-	-	-	-
		95		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	95	95	95	95	95	99,95	-	-	-	-	105,21%	-	-	-	-
		3-3,2		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3,05	3,10	3,15	3,2	3,175	-	-	-	-	105,83%	-	-	-	-

LAMPIRAN XXII

ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN KINERJA

ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN/KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Tabel 84. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan

Program	Kegiatan	Realisasi Anggaran	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Analisa Dukungan
Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan TUN	PAGU : Rp 53.385.000,- Realisasi : Rp 53.380.000,- (99,99%)	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern	Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu	100%	Program dan kegiatan ini berperan mendukung kelancaran proses persidangan dan menjaga ketepatan waktu penyelesaian perkara melalui: • Anggaran konsumsi pengamanan sidang sebesar Rp 2.885.000,- yang memastikan persidangan berjalan tertib dan lancar tanpa penundaan akibat gangguan keamanan. • Anggaran sidang keliling sebesar Rp 17.500.000,- yang mempercepat penyelesaian perkara bagi pihak yang terkendala akses, sehingga mencegah keterlambatan proses.
				Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak	100%	Dukungan program dan kegiatan bersifat tidak langsung berupa: • Kelancaran persidangan (didukung pengamanan sidang) yang berdampak pada percepatan minutasi dan penyampaian salinan putusan. • Sidang keliling yang membantu mempercepat tahapan penyelesaian perkara sehingga tahapan administrasi putusan tidak tertunda.
				Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak	100%	Proses perkara tingkat pertama yang tertib dan tepat waktu mempengaruhi kelancaran administrasi lanjutan, termasuk pengiriman pemberitahuan amar putusan. Dalam hal ini, program dan kegiatan mendukung sistem manajemen perkara yang tertib dan berkelanjutan.
				Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan	100%	Kelancaran proses persidangan dan minutasi (yang didukung kegiatan dalam DIPA) memastikan tidak terjadi penumpukan perkara sehingga unggah putusan dapat dilakukan tepat waktu. Hal ini mendukung tertib administrasi publikasi putusan.
				Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara	100%	Pengamanan sidang dan dukungan operasional persidangan turut menunjang proses eksekusi agar berjalan lancar dan aman.
				Persentase Perkara Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court	100%	Program dan kegiatan mendukung peningkatan aksesibilitas dan modernisasi layanan melalui: • Posbakum yang membantu masyarakat memahami dan memanfaatkan e-Court. • Sidang keliling memperluas akses layanan peradilan, termasuk layanan berbasis elektronik.

Program	Kegiatan	Realisasi Anggaran	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Analisa Dukungan
Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan TUN	PAGU : Rp 53.385.000,- Realisasi : Rp 53.380.000,- (99,99%)	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	102,65%	Program dan kegiatan berimplikasi secara langsung meningkatkan persepsi kualitas layanan melalui: • Anggaran pelaksanaan Posbakum yang meningkatkan akses bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu. • Anggaran sidang keliling yang meningkatkan kemudahan akses layanan. • Pengamanan sidang yang menciptakan suasana persidangan yang aman dan tertib. Dukungan ini memliki efek nyata dalam meningkatkan kepuasan masyarakat pencari keadilan.
Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	PAGU : Rp 5.699.777.000,- Realisasi : Rp 5.650.166.499,- (99,12%)	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	100 %	Program dan kegiatan secara langsung mendukung peningkatan profesionalitas ASN melalui pemenuhan hak pegawai melalui Belanja Pegawai, sarana kerja, dan dukungan operasional.
				Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	103,86 %	Seluruh struktur DIPA menjadi instrumen utama pencapaian IKPA karena indikator ini mengukur kualitas pelaksanaan anggaran tersebut.
				Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	105,21 %	Struktur DIPA yang direncanakan berbasis kebutuhan riil menjadi faktor utama dalam menjaga nilai NKPA.
	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	PAGU : Rp 492.478.000,- Realisasi : Rp 491.543.496,- (99,81%)		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	105,83 %	Program dan kegiatan berperan dalam pencapaian nilai IPA melalui: • Pengadaan kendaraan dinas dan perangkat pengolah data yang menambah nilai aset yang harus dikelola secara tertib. • Anggaran pemeliharaan kantor yang mendukung kondisi aset tetap optimal. • Dukungan manajemen administrasi yang memastikan pencatatan dan pelaporan BMN berjalan sesuai ketentuan.

LAMPIRAN XXIII

ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN

ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada tahun 2025 adalah sebesar 102,13%. Secara umum dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan target kinerja telah tercapai dan ada beberapa indikator yang melebihi target. Nilai kinerja sebesar 102,13% ini menunjukkan bahwa semua target yang ditentukan telah tercapai dan sejalan dengan perencanaan kinerja yang ditentukan di tahun 2025.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Upaya Perbaikan yang Telah/Akan Dilakukan
1	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu	100%	100%	100%	• Kepatuhan hakim dan kepaniteraan terhadap standar waktu penyelesaian perkara sesuai dengan SOP Penyelesaian Perkara dengan mempedomani SEMA Nomor 2 Tahun 2014. • Efektivitas manajemen perkara, termasuk pengendalian jadwal persidangan dan musyawarah majelis hakim. • Koordinasi yang baik antar unsur hakim dan kepaniteraan, terutama dalam pengaturan minutasi dan administrasi perkara. • Optimalisasi pemanfaatan sistem informasi perkara (SIPP dan e-Court) dalam mendukung monitoring penyelesaian perkara. • Adanya monitoring dan evaluasi secara berjenjang mulai dari Panitera Muda, Panitera hingga Ketua dan Wakil Ketua yang dilakukan secara berkala untuk memastikan ketepatan waktu penyelesaian perkara. • Pengawasan bidang yang berjalan dengan baik oleh Hakim Pengawas Bidang.	Walaupun target telah tercapai 100%, strategi ke depan akan berfokus untuk: • Menjaga konsistensi capaian • Menyeimbangkan ketepatan waktu dan kualitas putusan • Mengantisipasi peningkatan beban perkara • Membangun sistem pengendalian yang berkelanjutan • Meningkatkan kompetensi SDM

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Upaya Perbaikan yang Telah/Akan Dilakukan
		Persentase Penyediaan/ Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak	100%	100%	100%	• Kepatuhan hakim dan kepaniteraan terhadap standar waktu penyampaian salinan dan petikan putusan sesuai dengan SOP Penyampaian Salinan Putusan dengan mempedomani SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. • Sinergi yang baik antara Majelis Hakim, Panitera Pengganti, dan staf kepaniteraan yang memastikan tidak terjadinya hambatan dalam proses pengetikan, penandatanganan, hingga pengiriman salinan. • Optimalisasi pemanfaatan sistem informasi perkara (SIPP dan e-Court) dalam mempercepat proses penyampaian salinan putusan kepada para pihak, baik secara elektronik maupun konvensional. • Adanya monitoring dan evaluasi secara berjenjang mulai dari Panitera Muda, Panitera hingga Ketua dan Wakil Ketua yang dilakukan secara berkala untuk memastikan ketepatan waktu penyampaian salinan putusan. • Adanya komitmen terhadap pelayanan publik yang prima dan budaya kerja yang berorientasi pada ketepatan waktu dan akuntabilitas yang mendorong seluruh aparatur untuk menjaga standar layanan sesuai target kinerja. • Pengawasan bidang yang berjalan dengan baik oleh Hakim Pengawas Bidang.	Walaupun target telah tercapai 100%, untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja tersebut, perlu dilakukan beberapa upaya sebagai berikut: • Penguatan monitoring terhadap batas waktu minutasi dan pengiriman salinan putusan untuk mencegah potensi keterlambatan. • Melakukan evaluasi berkala terhadap SOP agar lebih ringkas, jelas, dan adaptif terhadap perkembangan sistem peradilan elektronik. • Mengadakan pembinaan teknis terkait percepatan minutasi, pemanfaatan aplikasi peradilan, dan manajemen waktu administrasi perkara sebagai upaya peningkatan kapasitas SDM kepaniteraan. • Mendorong pemanfaatan e-Court secara maksimal untuk mempercepat penyampaian salinan putusan kepada para pihak. • Evaluasi berkala dan identifikasi potensi hambatan (misalnya beban perkara meningkat atau keterbatasan SDM) serta menyiapkan langkah antisipatif sejak awal tahun.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Upaya Perbaikan yang Telah/Akan Dilakukan
		Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak	100%	100%	100%	• Penerapan monitoring administrasi perkara secara berkala, sehingga setiap putusan yang diterima segera diproses dan dijadwalkan pengirimannya tanpa penundaan. • Optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP dan sarana elektronik, yang mempercepat pencatatan dan pengendalian tenggat waktu pengiriman. • Koordinasi yang efektif antara kepaniteraan dan bagian terkait, sehingga tidak terjadi hambatan administratif dalam penyampaian pemberitahuan kepada para pihak. • Komitmen aparatur terhadap standar pelayanan dan kepatuhan terhadap SOP, yang memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan.	Capaian indikator "Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) Secara Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak" pada tahun 2025 telah optimal dan berhasil mencapai target yang ditentukan, namun Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang terus bertekad untuk meningkatkan kinerja di tahun mendatang dan mempertahankan capaian dengan terus melakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk menjaga ketepatan waktu pemberitahuan petikan/amar putusan banding, kasasi, dan PK kepada para pihak.
		Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan	100%	100%	100%	Keberhasilan pencapaian indikator Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan sebesar 100% Tahun 2025 didukung oleh: • Disiplin pelaksanaan minutasi dan unggah putusan. • Pemantauan berkala oleh pimpinan dan kepaniteraan, sehingga tidak terdapat putusan yang terlewat dari kewajiban publikasi. • Komitmen terhadap asas transparansi peradilan, yang mendorong aparatur untuk memastikan seluruh putusan dipublikasikan tepat waktu.	• Membuat register monitoring khusus unggah Direktori Putusan, berisi tanggal minutasi dan tanggal unggah untuk memastikan tidak terjadi keterlambatan. • Menunjuk admin Direktori Putusan untuk memantau status putusan di Direktori Putusan. Jika terdapat putusan yang gagal tersinkronisasi dari SIPP, maka admin Direktori Putusan harus segera melakukan unggah putusan secara manual ke Direktori Putusan. • Menetapkan batas waktu internal di mana putusan harus diunggah ke Direktori Putusan bersamaan dengan tanggal minutasi. • Melakukan evaluasi bulanan oleh Panitera, untuk memastikan seluruh putusan yang telah diminutasi telah terunggah 100%.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Upaya Perbaikan yang Telah/Akan Dilakukan
		Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara	100%	100%	100%	Keberhasilan indikator ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain: 1. Pengelolaan administrasi perkara yang tertib dan responsif 2. Koordinasi yang efektif antara Majelis Hakim dan Kepaniteraan 3. Pengawasan dan monitoring pimpinan secara berkala 4. Komitmen terhadap kepastian hukum dan pelayanan publik	1. Penguatan sistem monitoring permohonan eksekusi 2. Melakukan evaluasi dan penyempurnaan SOP agar proses administrasi dan tahapan pelaksanaan eksekusi lebih efektif dan terdokumentasi dengan baik. 3. Peningkatan koordinasi internal 4. Mitigasi risiko hambatan eksternal 5. Evaluasi berkala terhadap kinerja eksekusi
		Persentase Perkara Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court	100%	100%	100%	Keberhasilan indikator ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain: 1. Komitmen Implementasi Kebijakan Digitalisasi Peradilan 2. Kesiapan Infrastruktur dan SDM 3. Efektivitas Sosialisasi dan Pendampingan Pengguna e-Court	Langkah strategis untuk menjaga konsistensi dan meningkatkan kualitas implementasi adalah sebagai berikut: 1. Penguatan Infrastruktur Teknologi Informasi 2. Peningkatan Kompetensi SDM 3. Optimalisasi Layanan Bantuan dan Sosialisasi 4. Penguatan Sistem Pengawasan Serta Monitoring dan Evaluasi Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Upaya Perbaikan yang Telah/Akan Dilakukan
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	3,78	3,88	102,65%	• **Peningkatan Kualitas Pelayanan** – Implementasi standar layanan yang konsisten, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan pencari keadilan. • **Optimalisasi Layanan Berbasis Teknologi** – Pemanfaatan sistem elektronik yang mempermudah akses layanan, meningkatkan transparansi, dan mempercepat proses administrasi. • **Kompetensi dan Profesionalisme SDM** – Aparatur yang semakin memahami prinsip pelayanan prima serta berorientasi pada kepuasan pengguna. • **Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan** – Adanya monitoring dan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat sehingga setiap kekurangan dapat segera diperbaiki.	1. Penguatan Tindak Lanjut Hasil Survei 2. Peningkatan Kompetensi Pelayanan Prima melalui pelatihan dan pembinaan berkelanjutan guna memperkuat sikap profesional, empati, dan responsivitas aparatur dalam memberikan layanan. 3. Meningkatkan kualitas dan stabilitas sistem layanan berbasis elektronik agar semakin mudah diakses, cepat, dan transparan. 4. Melakukan monitoring berkala terhadap penerapan standar layanan guna memastikan konsistensi kualitas di setiap lini pelayanan. 5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	85	85	100%	1. Perencanaan dan Penetapan Target yang Progresif 2. Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi ASN 3. Pengelolaan Kinerja dan Disiplin yang Konsisten 4. Komitmen Pimpinan dan Budaya Kerja Organisasi	1. Penyusunan Rencana Pengembangan Individu 2. Mendorong ASN mengikuti diklat teknis, manajerial, dan fungsional serta sertifikasi kompetensi guna meningkatkan kualitas profesionalitas secara berkelanjutan. 3. Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja 4. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi dalam Manajemen SDM 5. Penguatan Budaya Kerja Berbasis Integritas dan Akuntabilitas

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Upaya Perbaikan yang Telah/Akan Dilakukan
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	95	98,67	103,86%	1. Perencanaan Anggaran yang Akurat dan Realistis 2. Pengendalian dan Monitoring Berkala 3. Kepatuhan terhadap Regulasi Perbendaharaan 4. Koordinasi yang Efektif Antar Unit Kerja 5. Komitmen Pimpinan dalam Pengawasan	• Mempertahankan Monitoring Berkala – Melakukan evaluasi rutin atas realisasi dan rencana penarikan dana agar kualitas pelaksanaan anggaran tetap terjaga. • Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Keuangan – Mengikuti pembaruan regulasi dan pelatihan teknis guna meminimalkan kesalahan administrasi. • Penguatan Perencanaan yang Lebih Presisi – Menyusun rencana kegiatan dan penarikan dana secara lebih detail untuk menghindari revisi berulang. • Optimalisasi Koordinasi Internal – Memperkuat komunikasi antar pejabat pengelola anggaran agar setiap kendala dapat segera diselesaikan.
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	95	99,95	105,21%	Keberhasilan pencapaian nilai NKPA sebesar 99,95 yang melampaui target dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain: 1. Perencanaan Anggaran yang Lebih Presisi dan Berbasis Kinerja 2. Peningkatan Kualitas Penyusunan Dokumen Perencanaan 3. Koordinasi dan Review Internal yang Efektif 4. Komitmen Pimpinan dan Tim Perencanaan	Meskipun nilai NKPA telah melampaui target, langkah penguatan tetap diperlukan untuk menjaga konsistensi dan meningkatkan kualitas perencanaan anggaran ke depan. Adapun alternatif solusi yang akan dilakukan antara lain: 1. Penyempurnaan Perencanaan Berbasis Data dan Kinerja 2. Peningkatan Kapasitas Tim Perencanaan 3. Memastikan keterpaduan antara dokumen perencanaan, rencana penarikan dana, dan target kinerja. 4. Penguatan *Review* dan *Quality Control Internal*

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Upaya Perbaikan yang Telah/Akan Dilakukan
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3,175	105,83%	Keberhasilan pencapaian nilai IPA sebesar 3,175 yang melampaui target dan standar nasional dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain: 1. Tertib Administrasi dan Penatausahaan Aset 2. Penguatan Pengawasan dan Pengendalian Internal 3. Peningkatan Kompetensi Pengelola Barang 4. Komitmen terhadap Akuntabilitas dan Kepatuhan Regulasi	Meskipun nilai IPA telah melampaui target, langkah penguatan tetap diperlukan untuk menjaga konsistensi dan meningkatkan kualitas pengelolaan aset ke depan. Adapun alternatif solusi yang akan dilakukan antara lain: • Pemutakhiran Data Aset Secara Berkala – Melakukan inventarisasi dan rekonsiliasi rutin untuk memastikan akurasi dan kesesuaian data fisik dan administrasi. • Peningkatan Kompetensi Pengelola BMN – Mengikuti pelatihan dan pembaruan regulasi agar pengelolaan aset tetap sesuai ketentuan terbaru. • Penguatan Monitoring dan Pengawasan Internal – Melaksanakan pengecekan berkala terhadap kondisi dan pemanfaatan aset guna mencegah potensi penyimpangan. • Optimalisasi Pemeliharaan dan Pengamanan Aset – Menyusun jadwal pemeliharaan yang terencana agar nilai dan fungsi aset tetap terjaga.

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru
Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung

0717-9111513 www.ptun-pangkalpinang.go.id info@ptun-pangkalpinang.go.id